

**POLA, KELEMBAGAAN, DAN KONTESTASI AKTOR
DALAM PENGELOLAAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI
KAMPILI
(Perspektif Kajian Ekologi Politik)**

**JUMIATI
P0100314403**



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN 2018**

PENGESAHAN UJIAN PROMOSI

POLA, KELEMBAGAAN, DAN KONTESTASI AKTOR DALAM PENGELOLAAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI KAMPILI (Perspektif Kajian Ekologi Politik)

**Disusun dan Diajukan
Oleh :**

**JUMIATI
P0100314403**

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian
tutup

**Menyetujui
Komisi Penasehat**

**Prof. Ir. M. Saleh S Ali, M.Sc.Ph.D.
Promotor**

Tanggal :

Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, MT, DEV

Co-Promotor

Tanggal.....

Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si

Co-Promotor

Tanggal.....

**Ketua Program Studi
Ilmu Pertanian**

Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS.

**POLA, KELEMBAGAAN, DAN KONTESTASI AKTOR DALAM
PENGELOLAAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI KAMPILI
(Perspektif Kajian Ekologi Politik)**

Disertasi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor

**Program Studi
Ilmu Pertanian**

Disusun dan Diajukan

Oleh :

**JUMIATI
P0100314403**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumiaty

Nomor Mahasiswa : P0100314403

Program Studi : Ilmu Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan, atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2018

Yang Menyatakan

Jumiaty

ABSTRAK

JUMIATI. Pola, Kelembagaan, dan Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Kampili (Perspektif Kajian Ekologi Politik). (Dibimbing oleh M. Saleh S Ali, Imam Mujahidin Fahmid dan Mahyuddin).

Penelitian bertujuan untuk 1. Menjelaskan pola pemanfaatan jaringan irigasi Kampili di Sulawesi Selatan. 2. Menganalisis sistem kelembagaan irigasi pada Daerah Irigasi Kampili. 3. Menganalisis kontestasi aktor dalam pengaturan pendistribusian sumberdaya air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili. Penelitian ini dilaksanakan pada Daerah Irigasi Kampili Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada Juni 2016 sampai Mei 2018, menggunakan paradigma Postpositivisme dan Konstruktivisme, jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan strategi studi kasus. Analisis yang digunakan yaitu dianalisis deskriptif kualitatif, analisis R-O-N, analisis stakeholder dan analisis kontestasi untuk menjawab tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemanfaatan air irigasi ditentukan oleh karakteristik a) waktu yang berbasis musim tanam, b) ruang yang lebih besar memberi akses pada wilayah tengah c) pelaku didominasi oleh peran Juru Primer dan Petugas Pintu Air dan d) komoditi padi.

Sistem kelembagaan irigasi Kampili dicirikan oleh saling keterkaitan R– O – N pada sistem pendistribusian air irigasi pada level bendung adalah *Resources* (R) air bendung, dikelola oleh *Organisation* BBWS dan Komisi Irigasi, dengan penerapan norma masing–masing yang dimilikinya. Pada level saluran primer *Resources* (R) air di saluran primer dikelola oleh *Organisation* (O) BBWS, DSDACKTR, IP3A dengan norma masing–masing yang dimilikinya. Pada level saluran sekunder *Resources* (R) air pada saluran sekunder dikelola oleh *Organisation* (O) BBWS, DSDAKTR, GP3A, dengan menerapkan norma dari masing–masing . Sedangkan pada tingkat tersier atau usahatani *Resources* (R) air pada saluran tersier sampai ke petakan lahan persawahan dikelola oleh *Organisation* (O) dari P3A, dinas pertanian dan kelompok tani.

Kontestasi aktor yang berlangsung terbagi dalam tiga pola kontestasi, yaitu kontestasi koeksistensi, kontestasi hibridisasi, dan kontestasi *zero sum game*. Kontestasi aktor pada ranah kebijakan yang dominan berlangsung yaitu pola kontestasi hibridisasi walaupun masih terdapat kontestasi koeksistensi dan *zero sum game* dan pada ranah operasional pada level bendung hingga sekunder adalah pola kontestasi hibridisasi, sedangkan pada level tersier (usahatani) yang berlangsung adalah kontestasi koeksistensi, *zero sum game* dan hibridisasi.

Kata Kunci : Pola, Kelembagaan, Kontestasi Aktor, Irigasi.

ABSTRACT

Jumiati. Pattern, Institutions, and Actor Contestation of Irrigation Management in Kampili Area (*Political Ecology Perspectives*). (Supervised by: **M. Saleh S. Ali, Imam Mujahidin Fahmid dan Mahyuddin**)

This Research aims to: 1) explain the pattern of irrigation networks usage in Kampili area of South Sulawesi. 2) Analyzing the institutional system of Irrigation in Kampili Area. 3) Analyzing the Actor contestation to manage the irrigation water distribution of Irrigation Kampili Area. This research was conducted in Kampili Irrigation Area, South Sulawesi on June 2016 to May 2018, using postpositivism and constructivism paradigm, This is descriptive research with a qualitative approach and case study strategy, using qualitative descriptive analysis, R-O-N analysis, stakeholder and contestation analysis to answer research objectives

The results show that the pattern of irrigation water use is determined by the characteristics of a) time based on the growing season, b) larger space provides access to the middle area c) the actor is dominated by primary technical Assistant and Water Gate Operators and d) Paddy Commodities.

The institutional system of kampili irrigation characterized by the R-O-N linkage in the irrigation water distribution system on weirs level is Water Resources (R) at the dam, managed by the BBWS Organization and Irrigation commision, with the application of each norm. On the primary channel level, there are water resources (R), managed by Organization (O) BBWS, DSDACKTR, IP3A with each norm. In secondary channels, The water resources (R) managed by Organization (O) BBWS, DSDAKTR, GP3A, by applying each norm (O.), while at tertiary or farming level, Water Resources (R), managed by Organization (O) from P3A, Dinas Pertanian and groups of the farmer.

The contestation of the actors divided into three contestation patterns, namely coexistence contestation, hybridization contestation and zero-sum game contestation. The Dominant contribution of actors in the policy scope is hybridization contestation pattern, though coexsistension contestation and zero-sum has still existed. Moreover, the contestation of the actors In the operational area in dams to Secondary levels is hybridization contestation pattern, while on the tertiary level (farming) is coexistence contestation, zero-sum game, and hybridization.

Keywords: Pattern, Institutional, Actors Contestation, Irrigation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang	18
B. Permasalahan	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Kegunaan Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Ekologi Irigasi	26
B. Stakeholder	33
C. Kontestasi Aktor	36
D. Teori Kelembagaan	39
E. ekologi politik	57
F. Kerangka Konseptual	84
BAB III METODE PENELITIAN.....	88
A. Paradigma, Jenis dan Pendekatan Penelitian	88
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	92
C. Jenis dan Sumber Data.....	93
D. Teknik Pengumpulan Data	94

E. Sumber Data	97
F. Analisis data	98
G. Pengecekan Keabsahan Data Temuan.....	105
BAB IV_GEOGRAFI, IKLIM DAN KONDISI PERTANIAN KABUPATEN	
GOWA.....	107
A. Geografi dan Iklim Kabupaten Gowa.....	107
BAB V POLA PEMANFAATAN IRIGASI DAERAH IRIGASI KAMPILI	
SEBAGAI SUMBER IRIGASI_DI SULAWESI SELATAN.....	112
A. Sungai Jeneberang dan Bendungan Bili - Bili	112
B. Bendung Kampili	116
C. Bangunan Pembagi Pertama	118
D. Bangunan Pembagi ke Dua (Bangunan Limbung 14)	123
E. Bangunan Pembagi ke Tiga (Bangunan Induk Limbung 17)	125
F. Pola Tanam	126
G. Aktivitas Irigasi	139
BAB VI KELEMBAGAAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI KAMPILI	
A. Lembaga Pemerintah.....	164
B. Lembaga Komisi Irigasi Kabupaten.....	176
C. Lembaga Petani.....	182
BAB VII STAKEHOLDER DAN KONTESTASI AKTOR	
DALAMPENGELOLAAN DAERAH IRIGASI KAMPILI	208
A. Identifikasi Stakeholder dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi.....	208
B. Peran Aktor dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi.....	211
C. Kepentingan (<i>Interest</i>) dan Kuasa (<i>Power</i>) Aktor dalam Pendistribusian Air Irigasi	231
D. Kontestasi Aktor dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi...	231

BAB VIII PENUTUP	255
A. Kesimpulan	255
B. Implikasi Teori	261
D. Implikasi Kebijakan	263
DAFTAR PUSTAKA.....	273
DAFTAR LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim

Segaja puji bagi Allah SWT pemilik pengetahuan yang tak terbatas, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul: Pola, Kelembagaan, dan Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Daerah Irigasi Kampili (Perspektif Kajian Ekologi Politik). Salam dan taslim penulis kirimkan kepada hamba Allah yang paling mulia yang dapat ditauladani, satu - satunya manusia yang paling sempurna yaitu Nabiullah Muhammad SAW.

Penelitian dan penulisan disertasi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak mulai dari pengumpulan data, penyusunan hingga penulisan akhir. Penulis merasakan begitu banyak tantangan yang dihadapi akan tetapi karena bantuan dan doa dari semua pihak baik secara moral maupun moril sehingga disertasi ini bisa terselesaikan.

Dalam tulisan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada:

1. Prof. Ir. M. Saleh S Ali, M.Sc.,P.hD sebagai promotor, Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, MT, DEV, dan Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si sebagai co-promotor, atas bimbingan dan bantuan tulus yang telah diberikan mulai dari rencana penelitian, pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian disertasi ini.
2. Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S., Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S., Prof. Dr. Ir. Dorothea Agnes Rampisela, M.Sc., dan Dr. A.Nixia Tenriawaru, S.P.,M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan penyusunan disertasi.
3. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana dan seluruh staf Sekolah Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan program doktor dalam bidang pertanian, konsentrasi Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Irwan Akib, M.Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar periode sebelumnya yang telah memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Rahman Rahim, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Muhammadiyah Makassar

6. Ir. H. Saleh Molla, M.M., Ir. Arifin Fattah, M.Si., Dr. Ir. Darmawati, M.Si., H. Burhanuddin, S.Pi.,M.Si., dan Ir. Nurdin Mappa, M.M. selaku Pimpinan Fakultas Pertanian yang telah memberikan izin dan bantuan selama penulis melanjutkan pendidikan program doktor di Universitas Hasanuddin.
7. Dekan Fakultas Pertanian H. Burhanuddin, S.Pi.,M.Si., dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Husnah Latifah.,S.Hut., M.Hut., Akbar Ramli, S.P.,M.Si., dan Ardi Rumallang, S.P.,M.M. terima kasih atas support yang telah diberikan kepada penulis.
8. Sahabatku yang telah sama berjuang mulai dari awal pendaftaran hingga akhir perkuliahan hingga sekarang yang telah memberikan support yang luar biasa kepada penulis sahabatku “Memori Nasi Kuning” H. Burhanuddin, S.Pi., M.Si, Kandaku Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd., dan saudaraku Dr. Murni, S.Pi.,M.Si.
9. Seluruh Kaprodi, sekjur, seluruh statf, dan dosen Fakultas Pertanian khususnya Kaprodi Agribisnis Amruddin, S.Pt.,M.Pd., prodi dimana penulis mengajar selama ini. Terima kasih atas support dan bantuannya selama ini.
10. Terima kasih kepada Teman – teman angkatan 2014 yang selalu tulus mendoakan dan ikhlas membantu penulis selama ini, semoga kita sukses bersama “angkatan 2014 luar biasa”.

11. Keluarga besar Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya keluarga besar Fakultas Pertanian terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
12. Aminah Qadir, S.E., Ana, Andi, Ifa dan Ibrahim dan terima kasih kepada dinda Arief Muchsin, S.Pd.,M.Pd., Dr. Tarman, S.Pd.,M.Pd. yang telah banyak membantu saya selama ini.
13. Kemenristekdikti yang telah memberikan beasiswa dan bantuan Hibah Penelitian Doktor.
14. Pemerintah Kabupaten Gowa, Takalar dan Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di dalam wilayahnya.
15. Petugas Irigasi D.I. Kampili Bapak Syamsuddin, Hasanuddin Dg. Nassa, Dahlan, Rahman Tombong, Herman.S, yang telah membantu penulis di dalam mengumpulkan data mulai dari bendung hingga ke tersier, terima kasih kepada Ketua IP3A bapak Jamil, para Ketua GP3A dan seluruh pengurus dan anggota P3A D.I.Kampili dan masyarakat dan petani yang telah membantu memberikan informasi selama penelitian.
16. Pimpinan dan staf BBWS Jeneberang, DSDCKTR Provinsi dan Kabupaten, Dinas Tanaman Pangan Pertanian Kabupaten Gowa, Lembaga Komisi Irigasi, seluruh operataor irigasi D.I. Kampili dan Ketua IP3A Bissua yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis di dalam mengumpulkan data penelitian.

17. Saudara – Saudaraku Muhammad Ridwan Dg. Sassa, Mustari Dg. Kawang, Mustafa Dg. Rani, Asrul, Yuliarti dan Rahmawati, dan terima kasih kepada saudara Iparku ST. Surayati, S.Pd Dg. Kaca dan Suami, sahabat – sahabatku S1 Sosek Unismuh Angkatan 96.

18. Dato' Nyomba dan Istri yang telah memberiku kesempatan untuk bersekolah, serta keluarga besarku di Sabintang dan Pa'bentengan Takalar terima kasih semua atas dukungan dan doanya.

Teristimewa penulis persembahkan disertasi ini buat kedua orang tuanya Tettaku Sehuddin Lira dan terkhusus buat almarhumah ibundaku tercinta Bunga Intan Dg. Sulo yang telah memberikan segalanya sehingga penulis bisa sampai ketahap sekarang ini. Dan teristimewa buat suamiku Drs. Muhammad Amin Ali, yang telah bersabar, ikhlas mendampingi mulai dari pendidikan S1 hingga sekarang, dan tercinta kedua buah hatiku Amalul Anugrah Amin dan Artisa Anggraeni Amin. Penulis persembahkan disertasi ini buat Kedua orang tuaku, suami dan anak-anakku yang telah bersabar mendampingi serta ikhlas mendoakanku sehingga penulis diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga disertasi ini bermanfaat untuk kebijakan pengelolaan Daerah Irigasi Kampili Sulawesi Selatan.

Makassar, Juni 2018.

Jumiati

DAFTAR TABEL

No	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Tipe Hak Kepemilikan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam Berdasarkan Pemilik, Hak dan Kewajiban	50
2.	Dimensi Politisasi Lingkungan	61
3.	Tesis Politik Ekologi.....	64
4.	Matriks Jenis dan Sumber Data	78
5.	Nama Sungai, Panjang dan Luas Sungai di Kabupaten Gowa	90

6.	Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Gowa, 2017	91
7.	Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kabupaten Gowa 2017	92
8.	Potensi Irigasi Menurut Daerah Irigasi di Kabupaten Gowa, 2017	93
9.	Jenis Pengairan dan Luas Panen dan Produksi Tanaman di Kabupaten Gowa berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gowa.....	118
10	Luas Area Pelayanan Daerah Irigasi Kampili	119
11	Jadwal Pengaliran Air Irigasi Untuk Wilayah Hulu, Tengah dan Hilir dalam Setahun pada Daerah Irigasi Kampili	120
12.	Jadwal Pengaliran Air Irigasi Untuk Wilayah Hulu, Tengah dan Hilir dalam Setahun pada Daerah Irigasi Kampili	
13	Luas Panen dan Produksi Padi Per Kecamatan Tahun 2014 – 2016 di Kabupaten Gowa	140
14	Sumberdaya Lembaga Operator Irigasi pada Bendung, Primer dan Sekunder Pemeliharaan dan Operasi Daerah Irigasi Kampili	151
15	Jumlah Pengurus IP3A, GP3A pada Daerah Irigasi Kampili.....	163
16.	Luas lahan GP3A, Blok Tersier dan P3A di Daerah Irigasi Kampili, 2018.....	170
17	Matriks Kelembagaan Irigasi dengan Unsur – Unsur Pembangunan	209
18.	Kepentingan (<i>Interest</i>) dan Kuasa (<i>Power</i>) Aktor dalam Pendistribusian Air Irigasi pada Daerah Irigasi Kampili	213
19	Aktor, Arena Kontestasi dan Hasil Kontestasi pada Rana Kebijakan Kegiatan Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi pada Daerah Irigasi Kampili	225
20	Aktor, Arena Kontestasi dan Hasil Kontestasi pada Rana Operasional Kegiatan Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi	

pada Daerah Irigasi Kampil	235
----------------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

No	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Hirarki Unit Kelembagaan Pembangunan	33
2.	Perspektif Ricardian Terhadap Sumberdaya Alam.....	65
3.	Kerangka Konseptual	80
4.	Pemetaan <i>Stakeholder</i> berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan/Pengaruh (Matriks 3 x 3)	84
5.	Sungai Jeneberang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan	94
6.	Keadaan Bendungan Bili – Bili di Kabupaten Gowa.....	95
7.	Bendung Kampili Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan	97

8.	Pintu pembuang, Penguras Lumpur dan Pintu Saluran Induk	99
9.	Saluran primer pada wilayah Hulu Daerah Irigasi Kampili...	101
10.	Bangunan Pembagi (BL 7) Daerah Irigasi Kampili	102
11.	Bangunan Pembagi (BL 14) Daerah Irigasi Kampili	106
12.	Bangunan Pembagi (BL 17) Daerah Irigasi Kampili	107
13.	Saluran tersier tanpa pintu	122
14.	Pengambilan dengan pompa untuk saluran tersier	122
15.	Pintu Tersier	123
16.	Pintu Resmi Primer, Sekunder dan Tersier	123
17.	Pengaliran Air dan Pembersihan Saluran Tersier	123
18.	Interkoneksi R – O – N Kelembagaan Irigasi dalam Sistem pengaturan pendistribusian air Irigasi pada Daerah Irigasi Kampili	185

DAFTAR LAMPIRAN

No	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Peta Daerah Irigasi Kampili	262
2.	Struktur Organisasi.....	263

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan manusia yang sangat esensial adalah air, karena air merupakan kebutuhan sehari – hari termasuk menjadi sumber utama di bidang pertanian. Di dalam bidang pertanian masalah yang dihadapi adalah terjadinya kelangkaan akan air, jika terjadi kelangkaan maka akan menimbulkan perebutan sumber daya yang pada akhirnya akan memicu munculnya konflik diantara pengguna (Saadah *et al.*, 2012). Persoalan konflik pemanfaatan air menjadi salah satu isu utama dalam ekologi politik karena kebutuhan manusia yang tak terbatas sementara sumber daya yang tersedia terbatas (Briant dan Bulley, 1997).

Penelitian ini menggunakan perspektif ekologi politik dalam mengkaji ekologi irigasi pada Daerah Irigasi Kampili, dan salah satu konsep ekologi politik adalah mendiskusikan peran *stakeholder*

(Briant dan Bulley, 1997). Terdapat lima tesis dalam penelitian yang mengkaji ekologi politik, yaitu konsep degradasi dan marjinalisasi, konflik lingkungan, konservasi dan kontrol, Identitas lingkungan dan pergerakan sosial, serta objek politik dan aktor (Robbins, 2004).

Ekologi politik yang mengkaji tentang degradasi dan marjinalisasi telah dilakukan oleh Febryanto (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, mekanisme akses struktural dan relasional yang dijalankan pengusaha mampu membuat implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran menjadi tidak efektif. Kebijakan ini terkait dengan pengelolaan mangrove secara lestari, tetapi dalam implementasinya Pemerintah Kabupaten Pesawaran lebih mendukung intensifikasi tambak udang, sehingga konversi mangrove dapat terjadi secara masif. Mekanisme tersebut juga mampu meredam gejolak sosial yang muncul akibat dampak negatif dari aktivitas tambak berupa degradasi ekosistem pesisir dan marjinalisasi masyarakat lokal, perilaku sebagian besar pengusaha yang tidak ramah lingkungan dengan mengkonversi mangrove dan membuang limbah tambak, ke perairan telah mengakibatkan degradasi ekosistem pesisir dan memarjinalkan masyarakat lokal di Kabupaten Pasewaran Provinsi Lampung.

Bixler (2013) mengkaji tentang identitas lingkungan dan pergerakan sosial, penurunan kondisili lingkungan dan proses sosial yang terjadi didalam konservasi hutan di sekitar Gunung Karibu. Ia menemukan adanya hubungan kekuasaan yang kompleks didalam pemanfaatan

sumber daya yang hanya dikuasai oleh beberapa *stakeholder* sementara memberikan kerugian kepada *stakeholder* yang lainnya.

Brite (2016) mengkaji irigasi dari prespektif ekologi politik dengan membandingkan pengelolaan irigasi secara tradisional dan pengelolaan irigasi secara modern. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan irigasi yang dilakukan secara tradisional lebih menjaga keberlanjutan lingkungan dan memenuhi kebutuhan manusia.

Penelitian yang telah dilakukan pada Daerah Irigasi Kampili diantaranya yang dilakukan oleh Laban *et al.*, (2015) yang menemukan bahwa petani selain menggunakan air yang bersumber dari irigasi Kampili, mereka juga menggunakan berbagai irigasi non-teknis.

Sundawati *et al.*, (2009) telah melakukan penelitian analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam upaya pemulihan Ekosistem Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemulihan ekosistem kawasan DTA Danau Toba dapat digolongkan ke dalam pemangku kepentingan kunci, utama, dan pendukung. Pemangku kepentingan kunci merupakan lembaga pemerintah kabupaten yang tupoksinya berkaitan langsung dengan pemulihan ekosistem DTA Danau Toba seperti Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup yang memiliki peranan yang paling tinggi dalam upaya pemulihan ekosistem DTA Danau Toba. Hal tersebut terkait dengan sistem pemerintahan otonomi daerah (pemda memiliki kewenangan yang cukup besar dalam

menentukan berbagai kebijakan di wilayahnya). Meski tidak terjadi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan yang mengemuka, namun terdapat potensi konflik diantara beberapa pemangku kepentingan. Selain itu ditemukan pula potensi kolaborasi diantara beberapa pemangku kepentingan.

Penelitian ekologi politik sudah banyak dilakukan terutama dalam melihat degradasi lingkungan dan marginalisasi, pendekatan aktor dan analisis *stakeholder* diantaranya (Arifin, 2012; Rusyamin, 2013; Febryano, 2014; Kakisima, 2015;). Akan tetapi mereka melihat secara terpisah, antara kelembagaan, *stakeholder*, dan kontestasi pemanfaatan sumber daya, sementara penelitian ini melihat kelembagaan, analisis *stakeholder*/aktor dan kontestasi dalam pemanfaatan sumber daya air irigasi secara keseluruhan. Penelitian ini melihat aspek teknis dalam proses pendistribusian air irigasi dan melihat aspek kelembagaan serta kontestasi aktor pada pengaturan pendistribusian air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili.

Pembangunan irigasi menjadi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan kebijakan pemerintah yang sangat strategis untuk mencapai swasembada beras. Menurut UU Pengairan No. 11 Tahun 1974 dan Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya terdiri irigasi permukaan, rawa, air

bawah tanah, pompa, dan tambak. Dalam mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan adanya jaringan irigasi berupa saluran irigasi yang membawa air memenuhi kebutuhan agar tidak terjadi kelangkaan. Jiang *et al.*, (2016) mengatakan bahwa kekurangan air merupakan masalah kronis dan karena itu pertanian memerlukan adanya irigasi.

Sumber daya air merupakan sumber daya yang masuk ke dalam sumber daya bersama (*common property*). Dalam pengelolaan sumber daya bersama terdapat persoalan yaitu munculnya persaingan diantara penggunaanya yang disebabkan oleh sifatnya yang bebas dimanfaatkan oleh siapapun. Implikasi dari persoalan tersebut menimbulkan suatu fenomena yang disebut *commons dilemma* (Hardin, 1968). Fenomena ini terjadi ketika pengelolaan sumber daya bersama itu dikelola dengan kelembagaan yang lemah.

Penelitian Trawick (2002) di Andean Peru menemukan bahwa penguasaan sumber daya (air irigasi) oleh orang – orang yang berkuasa menjadi penyebab konflik, serta tidak adanya kesadaran untuk berkontribusi dalam perbaikan irigasi.

Menurut Rahman (1999), pengelolaan irigasi merupakan upaya untuk mendistribusikan air secara adil dan merata, namun dalam mekanismenya sering dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar, yaitu: 1) jumlah daerah golongan air bertambah tanpa terkendali, 2) letak petakan sawah relatif dari saluran tidak diperhitungkan dalam distribusi air dan anjuran teknologi yang berada dibagian hilir (*tail*

end), 3) penyadapan air secara liar diperjalanan berlanjut tanpa sanksi, dan 4) produktivitas padi sangat beragam antara bagian hulu dan hilir. Kalau kita lihat persoalan ini tidak terlepas dari unsur kelembagaan dan perangkat kebijakan yang belum berfungsi secara efektif dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air. Adanya anggapan bahwa air irigasi adalah barang publik (*publik good*), menyebabkan masyarakat cenderung kurang efisien dalam menggunakan air. Secara ekonomi, ketidakjelasan tentang hak-hak dalam penggunaan air (*water rights*) dan kewajiban dalam pengelolaan air menyebabkan organisasi asosiasi pemakai air kurang efektif, dan mekanisme kelembagaan dalam alokasi sumber daya air tidak berfungsi, sehingga menimbulkan inefisiensi penggunaan air.

Bagi petani, sumber daya air itu adalah barang bebas maka semua orang berhak untuk memanfaatkannya. Sejalan dengan itu, Rachman *et al.*, (2002) berpendapat bahwa dalam konteks kelembagaan irigasi, tiga aspek penting yang sangat berperan adalah : 1) batas yurisdiksi (*jurisdiction boundary*) yaitu batas otoritas suatu lembaga dalam mengatur sumber daya air, yang umumnya berdasarkan batas hidrologis seperti saluran sekunder dan saluran primer, 2) hak kepemilikan (*property rights*) yaitu hak setiap individu petani untuk mendapatkan pelayanan air sesuai dengan kewajiban yang dibebankan, dan 3) aturan representasi (*rule of representation*) yaitu aturan yang telah disepakati dengan tujuan untuk menjamin terjadinya keseimbangan antara hak atas pelayanan air

yang diperoleh dengan besarnya kewajiban yang dibebankan. Sementara itu, aspek teknis pada dasarnya menyangkut alokasi air (*water allocation*) serta operasi dan pemeliharaan (*maintenance*). Keterpaduan aspek teknis dan system kelembagaan dalam pengelolaan irigasi berpengaruh terhadap hasil (*outcomes*), efisiensi, dan optimasi pengelolaan air irigasi.

B. Permasalahan

Dalam pengelolaan dan pendistribusian air irigasi untuk lahan pertanian di daerah irigasi Kampili terdapat banyak *stakeholder* yaitu para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap air irigasi. Keterlibatan *stakeholders* itu menimbulkan sejumlah permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan air irigasi, kelembagaan, serta relasi aktor didalamnya. Dalam hubungan itu, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pola pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili?
2. Bagaimana sistem kelembagaan irigasi pada Daerah Irigasi Kampili?
3. Bagaimana kontestasi aktor dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pola pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili.
2. Menganalisis sistem kelembagaan irigasi pada Daerah Irigasi Kampili.

3. Menganalisis kontestasi aktor dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Memberikan konstribusi pada pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan air irigasi yang baik serta bagaimana seharusnya actor memainkan peranannya.
2. Diharapkan menjadi bahan informasi buat pemerintah terutama dalam mengambil kebijakan dalam keberlanjutan pengelolaan air irigasi dan pengembangan pertanian
3. Sebagai bahan informasi terutama kepada peneliti yang ingin mengkaji hal sama dengan metode yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekologi Irigasi

Air merupakan faktor penentu dalam proses produksi pertanian. Oleh karena itu, investasi irigasi menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka penyediaan air untuk pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan usahatani sehingga air irigasi harus diberikan dalam jumlah, waktu, dan mutu yang tepat, jika tidak maka tanaman akan terganggu pertumbuhannya pada gilirannya akan mempengaruhi produksi pertanian (Anonim, 2017).

Pemberian air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, saluran primer dan sekunder, kotak bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani. rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menjadi menurun. Apabila kondisi ini dibiarkan terus

dan tidak segera diatasi, sehingga akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian yang diharapkan, dan berimplikasi negatif terhadap kondisi pendapatan petani dan keadaan sosial, ekonomi disekitar lokasi (Anonim, 2010).

Pasandaran (2005) mengatakan bahwa tanah dan air adalah identitas kultural bagi banyak suku bangsa di dunia termasuk suku-suku bangsa di Indonesia. Tanah dapat diwariskan sebagai milik individu ataupun kelompok sedangkan air dalam suatu wilayah pada umumnya dipandang sebagai warisan bersama (*common heritage resources*). Dalam praktek irigasi di pedesaan dikenal berbagai kearifan lokal yang memungkinkan terjadinya interaksi antar individu, antar kelompok dalam suatu sistem irigasi dan antar kelompok masyarakat dalam sistem irigasi yang berbeda pada suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam sistem interaksi tersebut penggunaan air antar individu ataupun antar kelompok dapat dipertukarkan pada suatu musim ataupun antar musim berdasarkan prinsip kepercayaan timbal balik (*mutual trust*) dan ada sanksi yang dilaksanakan berdasarkan norma yang berlaku setempat. Pengawasan terhadap proses yang berlaku dilakukan secara kolektif dan transparan serta pengambilan keputusan yang dilakukan bersama didorong oleh rasa tanggungjawab bahwa sumber daya air adalah kepentingan bersama yang perlu dipelihara dengan baik.

a. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Salah satu prinsip dalam perencanaan jaringan irigasi teknis adalah pemisahan antara jaringan irigasi dan jaringan pembuang. Hal ini berarti bahwa baik saluran irigasi maupun pembuang tetap bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, dari pangkal hingga ujung. Saluran irigasi mengalirkan air irigasi ke sawah, ke saluran pembuang alamiah yang kemudian akan diteruskan ke laut.

Perlunya batasan petak tersier yang ideal hingga maksimum adalah agar pembagian air di saluran tersier lebih efektif dan efisien hingga mencapai lokasi sawah terjauh (Anonim, 2010). Secara hirarki jaringan irigasi dibagi menjadi jaringan utama yang meliputi bangunan, saluran primer dan sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang terdiri dari bangunan dan saluran yang berada dalam petak tersier.

a) Petak tersier

Petak tersier terdiri dari beberapa petak kuarter masing-masing seluas kurang lebih 8 -15 hektar. Petak tersier sebaiknya mempunyai batas-batas yang jelas, misalnya jalan, parit, batas desa dan batas-batas lainnya. Ukuran petak tersier berpengaruh terhadap efisiensi pemberian air. Apabila kondisi topografi memungkinkan, petak tersier sebaiknya berbentuk bujur sangkar atau segi empat. Hal ini akan

memudahkan dalam pengaturan tata letak dan pembagian air yang efisien (Anonim, 2010).

Petak tersier sebaiknya berbatasan langsung dengan saluran sekunder atau saluran primer. Sedapat mungkin dihindari petak tersier yang terletak tidak secara langsung di sepanjang jaringan saluran irigasi utama, karena akan memerlukan saluran muka tersier yang membatasi petak-petak tersier lainnya. Panjang saluran tersier sebaiknya kurang dari 1500 meter tetapi dalam kenyataan kadang-kadang panjang saluran ini mencapai 2500 meter (Anonim, 2010).

b) Petak sekunder

Petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang semuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda topografi yang jelas misalnya saluran drainase. Luas petak sekunder dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi topografi daerah yang bersangkutan.

c) Petak primer

Petak primer terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil langsung air dari saluran primer. Petak primer dilayani oleh satu saluran primer yang pengambilannya langsung dari sumber air di sungai. Daerah di sepanjang saluran primer sering tidak dapat dilayani dengan mudah dengan cara menyadap air dari saluran sekunder. Apabila saluran

primer melewati sepanjang garis tinggi daerah saluran sekunder yang berdekatan harus dilayani langsung dari saluran primer (Anonim, 2010).

b. Bangunan irigasi

Keberadaan bangunan irigasi diperlukan untuk menunjang pengambilan dan pengaturan air irigasi, adapun bangunan irigasi terdiri dari:

1. Bangunan bagi dan sadap

Bangunan bagi dan sadap pada irigasi teknis dilengkapi dengan pintu dan alat ukur debit untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sesuai jumlah dan pada waktu tertentu.

Namun dalam keadaan tertentu sering dijumpai kesulitan-kesulitan dalam operasi dan pemeliharaan sehingga muncul usulan sistem proposional, yaitu bangunan bagi dan sadap tanpa pintu dan alat ukur tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Elevasi ambang kesemua arah harus sama
2. Bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama.
3. Lebar bukaan proposional dengan luas sawah yang diairi.

Tetapi disadari bahwa sistem proposional tidak bisa diterapkan dalam irigasi yang melayani lebih dari satu jenis tanaman dari penerapan sistem golongan. Untuk itu kriteria ini menetapkan agar diterapkan

tetap memakai pintu dan alat ukur debit dengan memenuhi tiga syarat proposional.

- a. Bangunan bagi terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
- b. Bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima.
- c. Bangunan bagi dan sadap mungkin digabung menjadi satu rangkaian bangunan.
- d. Boks-boks bagi di saluran tersier membagi aliran untuk dua saluran atau lebih (tersier, subtersier dan/atau kuarter (Anonim, 2017).

c. Bangunan pelengkap

Sebagaimana namanya bangunan pelengkap berfungsi sebagai pelengkap bangunan irigasi. Bangunan pelengkap berfungsi untuk membantu para petugas memperlancar kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan. Bangunan pelengkap dapat juga dimanfaatkan untuk pelayanan umum. Jenis-jenis bangunan pelengkap antara lain jalan inspeksi, tanggul, jembatan penyeberangan, tangga, sarana mandi hewan, serta bangunan lainnya (Anonim, 2017).

d. Standar tata nama

Nama yang diberikan untuk saluran-saluran irigasi dan pembuang, bangunan dan daerah irigasi harus jelas dan logis. Nama yang diberikan harus pendek dan tidak mempunyai tafsiran ganda (ambigu). Nama

harus dipilih dan dibuat dengan baik sehingga jika dibuat bangunan baru tidak perlu mengubah nama bangunan yang sudah.

a) Daerah Irigasi

Daerah irigasi dapat diberi nama sesuai dengan nama daerah setempat, atau desa penting di daerah itu, yang biasanya terletak dekat dengan jaringan bangunan utama atau sungai yang airnya diambil untuk keperluan irigasi.

b) Jaringan irigasi primer

Saluran irigasi primer sebaiknya diberi nama sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani, contoh: saluran primer Bissua, saluran primer Kampili, saluran primer Bili – bili yang ada di DAS Jeneberang.

c) Jaringan irigasi sekunder

Saluran sekunder sering diberi nama sesuai dengan nama desa yang terletak di petak sekunder. Petak sekunder akan diberi nama sesuai dengan nama saluran sekundernya. Sebagai contoh saluran sekunder Jatia mengambil nama Desa Jatia.

d) Jaringan irigasi tersier

Petak tersier diberi nama seperti bangunan sadap tersier dari jaringan utama.

1. Ruas-ruas saluran tersier diberi nama sesuai dengan nama boks yang terletak di antara kedua boks. misalnya (T1 - T2), (T3 - K1)
2. Boks tersier diberi kode T, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam, mulai dari boks pertama di hilir bangunan sadap tersier: T1, T2 dan sebagainya
3. Petak kuarter diberi nama sesuai dengan petak rotasi, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam. Petak rotasi diberi kode A, B, C dan seterusnya menurut arah jarum jam
4. Boks kuarter diberi kode K, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam, mulai dari boks kuarter pertama di hilir boks tersier dengan nomor urut tertinggi: K1, K2 dan seterusnya.
5. Saluran irigasi kuarter diberi nama sesuai dengan petak kuarter yang dilayani tetapi dengan huruf kecil, misalnya a1,a2 dan seterusnya.
6. Saluran pembuang kuarter diberi nama sesuai dengan petak kuarter yang dibuang airnya, menggunakan huruf kecil diawali dengan dk, misalnya dka1, dka2 dan seterusnya.
7. Saluran pembuang tersier, diberi kode dt1, dt2 juga menurut arah jarum jam.

B. Stakeholder

Istilah *stakeholder* sudah sangat fenomenal, kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya

alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan istilah *stakeholder* ini secara luas ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, *stakeholder* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Ramirez (1999) mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *stakeholder* ini, beberapa definisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) mendefinisikan *stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. *Stakeholder* ini sering diidentifikasi dari segi kekuatan dan kepentingan relatif *stakeholder* terhadap isu (Freeman, 1984), dan dari segi posisi dan pengaruh yang dimiliki *stakeholder* (Grimble and Wellard, 1996). *Stakeholder* dalam ISO 26000 didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi (Anonim, 2010). Sedangkan menurut AA1000 SES *stakeholder* adalah kelompok yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan, serta kinerja organisasi (Anonim, 2015).

Hovland (2005) berpendapat bahwa *stakeholder* adalah orang maupun kelompok yang memiliki kepentingan atau terkena dampak dari suatu kegiatan. Analisis *stakeholder* berguna untuk mengidentifikasi dan

menganalisis kebutuhan dan perhatian para *stakeholder* pada kegiatan. Analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat mulai dari penentu kebijakan, pelaksana kegiatan, maupun para pihak lain sebagai pendukung. Analisis ini juga dapat dijadikan alat penting dalam melakukan penilaian terhadap perbedaan kepentingan antar kelompok *stakeholder* dan kemampuannya dalam mempengaruhi hasil akhir kegiatan.

Golder *et al.*, (2005) mengatakan bahwa *stakeholder* adalah gambaran kepentingan individu, kelompok, dan institusi terhadap sumber daya alam. Selain itu, *stakeholder* juga dapat diartikan sebagai penerima dampak positif atau negatif dari suatu kegiatan. Menurut Crosby (1992); Mitchell *et al.*, (1997); Fletcher *et al.*, (2003), *stakeholder* dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Stakeholder* utama, yaitu pihak yang berkepentingan langsung dalam kegiatan.
2. *Stakeholder* kunci, yaitu *stakeholder* yang penting terkait dengan masalah kegiatan serta memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan, misalnya eksekutif dan legislatif.
3. *Stakeholder* pendukung, yaitu kelompok *stakeholder* yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. *Stakeholder* pendukung tidak berkaitan langsung dalam kegiatan namun masih memiliki pengaruh terhadap sikap masyarakat dan pemerintah.

Mitchell *et al.*, (1997) mendefenisikan *stakeholder* sebagai

kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Fletcher *et al.*, (2003), secara singkat mendefenisikan *stakeholders* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan yang memiliki *inters and power* dan posisi penting dan pengaruh yang dimilikinya. *Stakeholder* dikelompokkan menjadi tiga yaitu *stakeholder* primer, sekunder, dan kunci (Mitchell *et al.*, 1997 dan Fletcher *et al.*, 2003).

Race dan Millar (2006) menjelaskan bahwa dalam analisis *stakeholder* dilakukan identifikasi beserta perannya dalam suatu kegiatan. Analisis tersebut berguna untuk mengetahui kategori menurut kepentingan dan pengaruh dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, analisis tersebut dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan antar *stakeholder* dalam proses kegiatan.

C. Kontestasi Aktor

Foucault (1980), dalam *power and knowledge* tentang konsep kekuasaan, menjelaskan bahwa konstelasi kekuasaan menyebar dan bekerja dalam interaksi antar aktor sosial dalam masyarakat. Menurut Foucault (1980) kekuasaan selalu terartikulasikan melalui pengetahuan dan pengetahuan memiliki efek kekuasaan. Penyelenggara kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Pengetahuan beserta institusi penopang yang diproduksi kelompok dominan tidaklah memuat kategori benar atau salah, karena masyarakat

dan zaman memiliki bentuk-bentuk wacananya sendiri di dalamnya dibangun kebenaran-kebenaran itu. Pengetahuan lokal diproduksi oleh kelompok dominan pada waktu yang lampau, sedangkan pengetahuan modern diproduksi oleh kelompok pada waktu saat ini.

Bertens (1985) berpendapat bahwa terdapat beberapa pandangan Foucault tentang kekuasaan. Pertama, kekuasaan bukanlah hak milik tetapi sebagai strategi seseorang/kelompoknya dalam satu ruangan tertentu di mana satu sama lain saling berkompetisi untuk mewujudkan tujuannya masing-masing. Kedua, kekuasaan bersifat menyebar di mana-mana dan tidak dapat dilokalisasi. Ketiga, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui normalisasi dan regulasi. Keempat, kekuasaan tidak bersifat destruktif melainkan produktif yang menghasilkan sesuatu yang dapat mengubah sesuatu dalam tatanan sosial politik yang aktual. Sementara itu menurut Bourdieu (1993), kekuasaan merupakan suatu perjuangan setiap agen (individu, kelompok maupun institusi) dalam mendapatkan berbagai modal dalam suatu ranah (*field*) tertentu.

Bourdieu mengatakan “arena” adalah suatu ruang hubungan yang karakternya terdiri atas posisi para penghuninya (Emirbayer dan Jhonson, 2008). Di dalam arena terdapat suatu kontestasi antara aktor dengan modal-modal yang mereka miliki (Swartz, 2002), atau seperti yang didefinisikan oleh Bourdieu (1977) bahwa arena adalah ruang sirkulasi kapital yang dimiliki oleh organisasi yang berada di dalam arena tersebut.

Kontestasi dan relasi tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kasus dan lapangan. Dengan melakukan pendekatan melalui arena, maka seorang pengamat akan dapat mengetahui cakupan ruang kajian yang dimilikinya (Swartz, 1997 dan Walther, 2014).

Kapital dalam perspektif Bourdieu tidak sama dengan kapital dalam pandangan Marxisme. Bourdieu memperluas definisi kapital, dan oleh Marx terpusat pada ekonomi menjadi memiliki dimensi kultural dan simbolik (Desan, 2013). Kapital dalam pandangan Bourdieu terbagi dalam beberapa kategori, yakni ekonomi kapital termasuk aset yang langsung dapat dikonversi menjadi uang, kapital budaya yakni bentuk kapital yang dapat terinstitusionalisasi dalam bentuk pendidikan atau pengetahuan, dan kapital sosial yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kehormatan atau pangkat (*nobility*). Kapital hanya dapat berfungsi di dalam suatu arena atau dalam relasi interorganisasi, dalam konsep Marx bahwa “kapital bukanlah suatu benda (*thing*) melainkan relasi sosial”. Melalui kapital, pemetaan hubungan kekuasaan dapat dilakukan (Haryatmoko, 2016). Melalui kapital tersebut, setiap organisasi berpacu untuk mengejawantahkan persepsi mereka atau mengejar nilai mereka. Dengan kapital tersebut, setiap organisasi juga beroperasi melalui fungsi-fungsi yang mereka bentuk dalam arena. Dalam konteks ekologi politik, kontestasi yang dilakukan dalam arena dilakukan untuk pengelolaan kekuasaan dalam membuat akses ke sumber daya alam.

D. Teori Kelembagaan

North (1990), mengatakan bahwa “kelembagaan” atau “institusi” sebagai semua bentuk batasan-batasan yang dibuat oleh manusia untuk memberi bentuk terhadap interaksi di antara mereka. Jadi menurut North (1990) “kelembagaan” adalah kerangka kerja manusia dalam saling berinteraksi. Selain itu, North juga mengatakan bahwa yang membedakan antara kelembagaan (institusi) dengan organisasi adalah bahwa organisasi memberikan struktur bagi interaksi manusia berdasarkan kerangka kelembagaan yang dibuat.

Menurut Schlager dan Ostrom (1999), pengelolaan air dari perspektif kelembagaan dapat diartikan sebagai kewenangan membuat keputusan dalam pemanfaatan sumber daya air. Pengelolaan air merupakan salah satu tipe hak atas air yang dapat bersifat kumulatif. Termasuk dalam hak atas air (*water rights*) misalnya: hak untuk akses, yaitu hak untuk masuk dalam suatu kawasan sumber daya, hak pemanfaatan, yaitu hak untuk memanfaatkan satuan dari sumber daya, hak mengenyampingkan (*exclusion right*), yaitu hak untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk kawasan dan memanfaatkan sumber daya, hak transfer yaitu hak untuk menjual atau menyewakan sumber daya. Hak untuk akses dan pemanfaatan adalah hak pada tingkat operasional sedangkan tiga hak lainnya adalah hak kolektif.

a. Sistem irigasi dalam perspektif kelembagaan

Dalam konteks kelembagaan pengelolaan irigasi terdapat tiga aspek penting yang sangat berperan yaitu:

a) Batas yurisdiksi (*jurisdiction boundary*)

Banyak permasalahan dalam pengelolaan air irigasi berkaitan dengan struktur batas yurisdiksi. Konsep batas yuridiksi dapat memberikan arti batas otoritas yang dimiliki oleh oleh suatu lembaga dalam mengatur sumber daya. Dalam kasus pengelolaan wilayah sungai maupun irigasi, batas yurisdiksi juga menunjukkan bagaimana suatu institusi menentukan siapa yang tercakup dan apa yang diperoleh.

Menurut Rachman (1999), kegunaan air dipengaruhi oleh dimensi lokasi, waktu, dan kualitas sehingga faktor yang menentukan seperti keadaan tanah iklim, dan musim akan mempengaruhi nilai investasi irigasi yang dibangun dan menentukan tingkat keinginan masyarakat penggunaan air untuk membayar iuran air (*user's willingness to pay*). Semakin langka ketersediaan air, maka petani untuk membayar iuran irigasi semakin besar, dan sebaliknya semakin melimpah ketersediaan air sehingga petani untuk membayar air semakin rendah. Oleh karena itu, air harus diberi harga yang sebanding dengan tambahan biaya (biaya marjinal) yang dikeluarkan dalam penyediaan dan pendistribusian yang meliputi manfaat terbesar yang seharusnya (*opportunity cost*) mampu dihasilkan dari penggunaan sumber daya (modal, tenaga kerja dan lahan), jika sumber daya tersebut digunakan untuk kegiatan lain.

Sebagian masyarakat petani masih berpendapat bahwa air merupakan sumber daya yang bebas dimiliki oleh semua orang (*common property*), pandangan ini timbul karena air menjadi komoditas dan murah di daerah tropis dengan ketersediaan yang relatif melimpah. Namun di daerah tertentu yang ketersediaannya terbatas, khususnya di daerah beriklim kering, air dipandang sebagai sesuatu yang berharga.

Batas yurisdiksi berbeda-beda berdasarkan jenis pengolahan irigasinya yaitu: 1) irigasi pemerintah, 2) irigasi yang diserahkan pengolaannya pada masyarakat (penyerahan irigasi kecil (PIK)), dan 3) irigasi desa. Untuk irigasi pemerintah, perbaikan dan pemeliharaan seluruh bangunan pada seluruh primer dan sekunder sampai dengan 50 meter saluran tersier menjadi tanggung jawab pemerintah (PU pengairan), dan operasionalnya juga wewenang pemerintah. Sementara untuk irigasi PIK, bangunan irigasi adalah tanggung jawab pemerintah, namun operasionalnya menjadi wewenang masyarakat. Berbeda halnya untuk irigasi desa, baik pembangunan, pemeliharaan, maupun operasionalnya berada di tangan masyarakat. Batas yurisdiksi dalam irigasi menjadi lebih mudah, khususnya untuk mengetahui siapa yang berhak ikut terlibat dalam pengolahan air dalam satu hamparan hidrologis. Pembatasan ini terjadi hanya melalui aspek teknis, karena air mengalir ke tempat - tempat yang lebih rendah, kecuali ada upaya khusus menaikkan muka air melalui pompanisasi. Hukum gravitasi dengan sendirinya akan membentuk batas yurisdiksi pengolahan sumber daya air (Rachman,1999).

b) Hak kepemilikan (*water rights*)

Aspek ini mengandung muatan sosial yang diatur hukum, adat dan tradisi, atau kesepakatan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya (air). Implikasinya adalah: 1) hak individu merupakan kewajiban orang lain, dan 2) kepemilikan yang jelas dapat memudahkan individu/masyarakat untuk akses dan kontrol terhadap sumber daya (Rachman, 1999). ‘*water rights*’ pada kelembagaan irigasi dapat merefleksikan hak yang diterima petani, yaitu memperoleh air pada saat dibutuhkan dengan jumlah dan kualitas tertentu, serta membayar kewajiban yang telah disepakati.

Saat kondisi ketersediaan air sangat memadai dan stabil sepanjang tahun, peran P3A umumnya relatif kurang sehingga cukup beralasan apabila para petani tidak mau membayar iuran P3A. Petani hanya bersedia membayar kewajiban setelah merasakan adanya pelayanan jasa dari P3A. Fenomena semacam ini memberikan petunjuk bahwa melalui konsep “*water rights*” yang adaptif, kelembagaan irigasi dapat terjamin eksistensinya. Para petani berhak memperoleh layanan irigasi sesuai dengan kewajibannya sepanjang mereka merasakan air yang diperoleh berasal dari usaha jasa pihak tertentu.

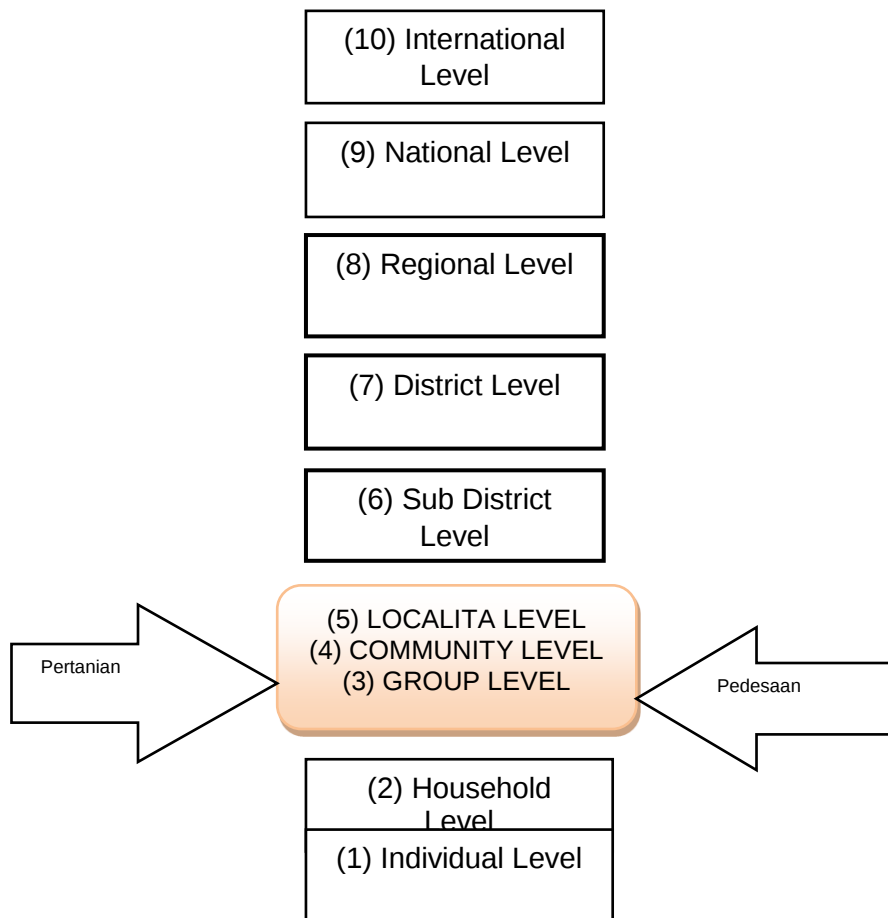
c) Aturan representasi (*rules of representation*)

Aspek ini dipandang paling penting untuk meningkatkan efisiensi operasional. Keputusan yang diambil dan akibatnya terhadap kinerja akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses

pengambilan keputusan kolektif (Rachman, 1999). Efektivitas pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kinerja dan status kelembagaan yang terkait, seperti panitia irigasi, Bamus, P3A/GP3A, dan ulu–ulu. Di tingkat paling bawah, petani yang menjadi anggota P3A diwakili oleh pengurus P3A dalam berhadapan dengan luar kelompok, misalnya dengan staf PU pengairan.

Kelembagaan pembangunan adalah Kompleks aturan (nilai, simbol, norma, prosedur) dan organisasi (struktur dan status serta fungsi dan peran) yang mempengaruhi perilaku (tata kelakuan/perilaku terpola) untuk mengarahkan, mempercepat dan memelihara perubahan bagi tercapainya tujuan bersama yang dianggap bernilai pada sebuah tatanan. Kelembagaan pembangunan pertanian dan pedesaan secara hirarkli tersusun mulai dari level individu untuk orang paling bawah sampai pada level internasional yang paling tinggi (Uphoff,1986).

Menurut Uphoff (1986), dalam manajemen pembangunan, terdapat sepuluh level yang bisa diidentifikasi keterlibatannya yakni: 1) level individu; 2) level rumah tangga; 3) level kelompok; 4) level komunitas; 5) level lokalitas; 6) level sub-distrik; 7) level distrik; 8) level propinsi; 9) level nasional; dan 10) level internasional. Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan pada hakekatnya melibatkan interaksi keseluruhan tingkatan ini. Kapital dan teknologi yang menjadi unsur kunci pembangunan mengalir dari level internasional hingga tingkat rumah tangga seperti diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hirarki Unit Kelembagaan Pembangunan

Sumber : Diadopsi dari Uphoff ,1986; Brinkerhoff, & Goldsmith, 1990

Dengan mengacu pada

pengambilan keputusan kolektif yang memungkinkan dicapai, Uphoff (1986) membagi level lokal terdiri dari level kelompok, komunitas dan lokalitas. Level kelompok dipahami sebagai suatu perangkat identifikasi diri sejumlah orang yang memiliki kepentingan bersama, termasuk di dalamnya ikatan pertetanggaan, kelompok okupasi, etnis, kasta, kelompok umur, kelompok jenis kelamin dan lain-lain. Level komunitas mengacu pada unit residensial/pemukiman yang relatif bertahan terutama secara sosial-ekonomi. Level lokalitas adalah kumpulan komunitas yang memiliki

interaksi/kerjasama komersial satu sama lain setingkat desa. Sedangkan level individu dan rumah tangga tidak dimasukkan dalam kategori lokal berhubung pengambilan keputusan pada level tersebut berskala kecil sehingga tidak signifikan pengaruhnya dalam penetapan tindakan kolektif. Begitu pula level kecamatan ke atas tidak dimasukkan dalam kriteria lokal, karena pengambilan keputusan yang berlangsung di dalamnya lebih ditentukan oleh otoritas negara. Pada level kelompok, komunitas dan lokalitas tercipta suatu pengambilan keputusan kolektif yang relatif otonom untuk lahirnya tindakan kolektif. Dalam kaitan ini, terdapat empat kategori aktivitas organisasional yang berlangsung pada level lokal yakni: pengambilan keputusan, mobilisasi dan manajemen sumber daya, proses komunikasi, dan manajemen konflik (Uphoff, 1986). Dengan demikian, lembaga lokal dapat diartikan sebagai lembaga yang area aktivitasnya berada pada level kelompok, komunitas, dan lokalitas. Sebuah lembaga lokal melibatkan pihak-pihak pada tiga tingkatan tersebut, dengan aktivitas yang terutama menyangkut kepentingan mereka, dengan wilayah aktivitas yang terbatas pada tiga tingkatan dimaksud.

Ohama (2001) melihat sistem kemasyarakatan lokal (*local social system*) sebagai arena bagi berlangsungnya aktivitas pembangunan tingkat lokal, interkoneksi antara administrasi lokal, pasar lokal dan masyarakat lokal dan diberi nama hubungan trigonal (*trigonal relationship*). Selanjutnya Ohama ((2001) mengemukakan bahwa ada tiga unsur fundamental dalam pembangunan yakni sumber daya (*resources*),

organisasi (*organizations*) dan norma (*norms*). Organisasi adalah pelaku yang mengelola sejumlah sumber daya berdasarkan norma-norma tertentu. Ketiga unsur dalam proses pembangunan yaitu:

1. *Resources (R)* yakni berbagai sumber daya yang merupakan unsur dasar dalam setiap program pembangunan. Tanpa sumber daya tersebut, kita tidak dapat menginisiasi sesuatu kegiatan secara berarti dan substantif. Sumber daya tersebut membutuhkan persiapan untuk mendapatkan sumber daya penting lainnya seperti pendanaan, informasi serta teknologi, dan lain sebagainya, agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk mencapai sasaran-sasaran dan cita-cita pembangunan.
2. *Organizations (O)*, yakni organisasi-organisasi yang melaksanakan peran, pelaku atau actor pembangunan. Dengan cara mengintegrasikan dan memadukan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. *Norms (N)*, yakni norma-norma manajerial, yang membutuhkan tingkat penghargaan terhadap mekanisme konsultasi, kerjasama dan partisipasi serta komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Salman (2012), unsur yang mengelola (O) dan unsur yang mengatur pengelolaan (N). Terdapat rangkaian interkoneksi R-O-N di dalam sebuah tatanan memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan mewujudkan visi bersama. Terdapat tatanan yang memiliki sumber daya yang melimpah (R), tetapi pelaku (O) yang mengelolanya

berkapasitas rendah, serta nilai dan norma yang berlaku (N) tidak mengarah dengan efektif pada pengelolaan sumber daya yang baik. Sebaliknya, terdapat tatanan yang memiliki pelaku berkapasitas (O) dan memiliki nilai dan norma yang mendukung kemajuan (N), tetapi sumber dayanya terbatas (R). pada dasarnya lokalitas, daerah, dan negara adalah rangkaian interkoneksi R-O-N dengan berbagai variasinya.

Uphoff (1986) mengelompokkan kelembagaan berdasarkan orientasi, tujuan pelayanan dan sifat keanggotaan suatu lembaga. Pembagian ini digolongkan ke dalam enam bentuk, yaitu: (1) *local administration*, merupakan instansi pemerintah di daerah sebagai aparat pemerintah pusat yang bertanggung-jawab kepada atasan langsung (*accountable to bureaucrats superiors*), (2) *local government* yang memiliki kewenangan untuk tugas pembangunan dan pengaturannya bertanggungjawab kepada pemerintah daerah (*accountable to local residents*), (3) *membership organizations* sebagai *local self help associations*, (4) *cooperations*, (5) *service organization* dan, (6) *private business*.

Dalam manajemen pembangunan setidaknya terdapat enam kategori lembaga lokal yang perlu diperhatikan. Keenam lembaga ini dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori sector yaitu: 1) lembaga lokal yang termasuk dalam sector public (*public sector*), yakni administrasi lokal dan pemerintahan lokal, 2) lembaga lokal yang termasuk dalam sector sukarela (*voluntary sector*) yakni organisasi keanggotaan dan koperasi,

dan 3) lembaga lokal yang termasuk dalam sector swasta (*private sector*) yakni organisasi jasa dan bisnis swasta (Uphoff, 1986).

a. Sektor Publik (*Public Sphere*)

1. Administrasi Lokal

Administrasi lokal adalah perangkat staf dari sejumlah departemen/sector yang area aktivitasnya menjangkau level lokal seperti PPL dari Departemen Pertanian, staf Posyandu dan Kesehatan Masyarakat dari Departemen Kesehatan, aparat PMD dari Departemen Dalam Negeri, Penyuluh Koperasi dari Departemen Koperasi dan UKM, dan sebagainya.

Beberapa upaya mempercepat pembangunan pertanian akan mengandalkan peranan staf pemerintah di tingkat lokal. Hal ini berarti mereka mencoba menjadi administrator bagi setiap pembangunan. Salah satunya adalah memfasilitasi kredit pertanian atau pembelian sarana produksi, sementara pertanian sendiri mengalami fluktuasi cuaca, penyakit, harag di pasaran dan lainnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mampukah lokal administrasi melakukan yang terbaik dalam memajukan kelembagaan pertanian?.

Peran utama dari lokal administrasi adalah menunjukkan teknologi baru yang dapat meningkatkan produksi dan dapat digunakan/diterapkan dan diterima sebagai suatu hal yang tepat dan produktif. Penelitian pertanian yang inovatif masih dilakukan

oleh pemerintah, lokal administrasi diposisikan untuk menyebarkanluaskannya. Untuk memperoleh manfaat dari suatu inovasi tidak hanya sekedar diketahui tetapi lokal administrasi mungkin dapat memainkan peran yang lebih populer sehingga memungkinkan untuk ditangani oleh pihak swasta sebagai penanggung jawab penyebar-luasannya.

Ketika input dibutuhkan untuk memperbaiki produksi langka dan sistem distribusi sebaiknya dilakukan lebih adil dan produktif. Administrasi lokal lebih memungkinkan daripada distributor swasta dalam menanganinya dengan tujuan langsung kepada subyeknya. Koperasi atau organisasi kemasyarakatan lainnya dapat dimanfaatkan untuk itu dan mereka menghindari korupsi sebagai kapasitas dari dominasi kaum elit dan manipulasi. Apabila terdapat kekurangan beberapa kelembagaan lokal dapat dihilangkan pengaruhnya.

Alasan diberikannya subsidi apabila penggunaan setiap input seperti benih dan pupuk dapat dimanfaatkan bukan saja oleh produsen dalam hal ini petani tapi juga masyarakat luas. Administrasi lokal memungkinkan menjadi suatu jaringan yang dipilih untuk digunakan untuk distribusi subsidi dengan ketentuan tidak melakukan korupsi.

Penyuluhan sebagai suatu layanan yang baik, seperti hasil penelitian Leonard (1977) menunjukkan bahwa kemajuan petani

dapat dicapai dengan lebih dari 42 kali mendapatkan kunjungan penyuluhan. Masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan materi/informasi teknologi terbatas
2. Penyuluh sering diabaikan, sehingga membuat mereka kehilangan semangat bekerja
3. Penyuluh tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dimotivasi dan dihargai
4. Penyuluh bekerja dalam atmosfir yang tidak menentu, dan tidak mengetahui seberapa lama mereka ditempatkan pada suatu daerah
5. Penyuluh tidak difasilitasi oleh sarana transportasi dan komunikasi sehingga menyulitkan mereka bekerja

2. Pemerintah Lokal

Kelembagaan lokal pemerintahan kurang berperan dalam pembangunan pertanian hal tersebut ditunjukkan beberapa instansi yang memiliki tanggung jawab langsung secara substansial dalam bidang pertanian. Suatu alasan menarik adalah produksi pertanian itu adalah bukan barang-barang publik. Alasan yang perlu dipertimbangkan dan menguntungkan pemerintah setempat, yaitu suatu kebutuhan teknis untuk peningkatan pertanian yang nampak di luar kemampuan atau wewenang pemerintah lokal, dan persepsi administrasi lokal mampu mendorong dan mengendalikan pengambilan keputusan tentang fungsi pertanian

(Haragopal, 1980; Reddy, 1982). Belum nampak suatu penjelasan yang cukup, kalau kepemimpinan mereka belum bisa memainkan suatu peran yang lebih besar yaitu melaksanakan manajemen standar tinggi yaitu kejujuran dan kerja keras.

Suatu alasan yang secara teoritis menarik adalah produksi pertanian itu adalah pribadi dan keuntungannya juga pribadi dibanding dengan barang-barang publik/umum. Kadang masyarakat Desa Panchayats di India terkenal dikuasai oleh petani yang lebih makmur dan bisa menggunakan otoritas mereka untuk mempromosikan inovasi pertanian khusus untuk mereka sebagai daya tarik, namun lokal pemerintah nampaknya mempunyai banyak aktivitas alam terkait dengan barang-barang publik seperti persediaan air atau jalan yang luas dan menguntungkan sedikit kontroversial. Petani kaya dapat “mengakui” mengejar ketertarikannya dalam bidang pertanian melalui organisasi keanggotaan seperti koperasi dan menyerupai badan pemerintah yang bekerja secara regular. Sejak pengembangan organisasi lokal dalam yuridis mereka memberikan manfaat bagi semua orang, aktivitasnya yang berguna bagi siapapun dan semua anggota masyarakat akan memelihara fungsi pemerintah lokal yang sah. Menurut pemikiran ini, bahwa suatu klinik kesehatan atau sekolah lebih tepat melakukan suatu pemerintahan yang lokal dibanding pembangunan saluran irigasi atau program pemupukan (Ralston *et al.*, 1983).

Suatu penjelasan yang terpisahkan dan didasarkan pada pertimbangan yang birokratis adalah bahwa pemerintah lokal tanpa alternative yurisdiksi di bawah beberapa kementerian lain yang mungkin dapat mengendalikan selain Kementerian Pertanian, yang jelas memberi perhatian tentang birokratis “hamparan rumput “. Suatu Kementerian dari administrasi lokal, pemerintah lokal bukan dari keahlian pertanian tidak mampu mengembangkan kapasitas dan bekerja langsung dalam pengembangan pertanian.

b. Sektor Sukarela (*Voluntary Sphere*)

a) Organisasi keanggotaan

Organisasi keanggotaan mencakup sejumlah asosiasi mandiri yang ditujukan untuk menangani tugas beragam seperti komite pembangunan desa (LKMD), tugas khusus seperti P3A, dan kebutuhan dari anggota yang sifatnya spesifik seperti organisasi ibu-ibu (PKK/Wanita Tani)

Asosiasi sukarela dapat melaksanakan suatu fungsi yang luas untuk memudahkan pengembangan pertanian (Oxby, 1983). Organisasi keanggotaan beroperasi seperti perseroan terbatas, tetapi untuk membuat suatu laba, mereka dibentuk untuk melayani anggota mereka, dan bermanfaat menjadi lebih baik, lebih murah dan lebih dapat dipercaya. Membedakan organisasi seperti itu mulai dari koperasi dan semacamnya dan khususnya organisasi lokal yang melibatkan penyatuan sumber daya dan resiko. Biasanya tidak ada penyatuan sumber daya dalam organisasi keanggotaan kecuali ketika merundingkan daya beli

yang lebih besar atau mencari harga penjualan yang lebih untuk kelompok komoditas. Bersama organisasi keanggotaan dan koperasi sebagai “sektor perantara” anantara yang dikenal sebagai “sektor publik” dan “sektor swasta”.

Organisasi keanggotaan yang diketahui memberi pelayanan terbaik dalam pertanian adalah kelompok tani di Taiwan, yang sudah menyokong kepada kemajuan produktivitas. Dalam kelompok tani tersedia layanan penyuluhan, input produksi, kredit, pengolahan, pemasaran, perbankan, dan pelayanan lainnya. Setiap organisasi secara menyeluruh dari kursus, mewakili puncak pengembangan program berkelanjutan dalam mengembangkan kelembagaan lokal (Uphoff, 1986).

Jika staf teknis diarahkan oleh asosiasi petani, penyuluh seperti itu dapat memegang tanggung jawab pada para sasaran mereka, memastikan bahwa pengetahuan diletakkan pada anggota dengan adaptasi sesuai kondisi-kondisi spesifik dan selanjutnya mungkin lebih giat. Fungsi yang lain dapat melobi wakil pemerintah nasional untuk mendapatkan jasa lebih baik untuk pemikiran pertanian pejabat lokal yang dapat dipertanggung jawabkan kepada daerah pemilihan mereka. Kasus di Nigeria Utara menunjukkan suatu desa telah mampu menjamin saham jasa pengembangan yang lebih besar melalui usaha otoritas asli (pemerintah lokal) dan kelompok peminat di pedesaan. Di Nepal kelompok petani telah di organisir dalam program pengembangan petani kecil, kelompok ini telah mampu menahan struktur lokal dalam beberapa tempat

melalui program pengembangan petani kecil, kelompok ini telah mampu menahan struktur kekuasaan lokal dalam beberapa tempat melalui pengaruh pemerintah local (Uphoff, 1986).

Kekuatan terbesar organisasi keanggotaan adalah fleksibilitas, karena mereka mudah mengidentifikasi kebutuhan mereka dan usaha pengerahan untuk pertemuan. Organisasi keanggotaan dapat menarik kembali ketika mereka berubah format, contoh dari Kenya tercatat lima belas identifikasi. Setiap fleksibilitas berarti kelompok tidak mungkin dengan mudah dilembagakan. Kontribusi organisasi keanggotaan, member-kan pengarahannya sumber daya dan komunikasi dua arah yang lebih penting dibanding. Tujuan mereka adalah menjalani hukuman melalui suatu rangkaian organisasi yang berakhir dalam waktu yang sangat panjang (Uphoff, 1986).

b) Koperasi

Uphoff (1986), mengatakan bahwa koperasi dapat dihubungkan dengan peningkatan produksi pertanian. Namun tidak mencakup dalam kategori koperasi produsen suatu unit produksi paralel dengan rumah tangga, perusahaan pribadi, atau perusahaan negara. Sumber daya yang dikelola koperasi antara lain 1) uang, 2) tenaga kerja, 3) daya beli dan 4) produksi. Semuanya disesuaikan dengan macam dan jenis koperasi yaitu: a) kredit dan usaha simpan pinjam, b) koperasi tenaga kerja, dan c) koperasi konsumsi. Koperasi dapat digolongkan secara terpisah:

- 1) koperasi penyedia input pertanian untuk mendapatkan harga lebih rendah dan berkualitas lebih baik.
- 2) koperasi Pemasaran, usaha ini menyediakan harga yang lebih baik untuk anggota dalam pengolahan dan pengangkutan produk atau dengan menyimpan dan menjual ketika harga menguntungkan dan memberi rangsangan keanggota untuk menggunakan teknologi peningkatan produksi dengan kerja keras.

Dua jenis koperasi yang umum dalam pengembangan pertanian telah disebutkan di atas. Koperasi dapat dibedakan dari bentuknya, perbedaan tersebut berdasarkan pada jenis organisasi lokal yang dikembangkan dan relevan dengan koperasi, yaitu:

- 1) Fungsi: koperasi berdasarkan ini kerjasama dapat disusun dari fungsi tunggal yang mencakup satu sumber daya, multi fungsi mencakup beberapa sumber daya.
- 2) Struktur: koperasi dapat dioperasikan sebagai organisasi sederhana, lebih besar, atau organisasi yang lebih kompleks yang menghubungkan masyarakat ke dalam dua, tiga, empat, atau lebih strata organisasi.
- 3) Tujuan: koperasi merupakan kegiatan ekonomi murni, dengan keuntungan material dari anggota sebagai tujuan utama, atau dapat diperluas dengan tujuan sosial politik yang baik, menunjukkan bahwa koperasi memberikan perubahan sosial dan memperluas pengaruh politik

- 4) Keanggotaan: koperasi dapat membedakan keanggotaannya yang eksklusif, yaitu pembatasan keanggotaan (contohnya gabungan petani kecil) atau keanggotaan inklusif setiap orang dapat berkontribusi dalam suatu bidang khusus (uang, tenaga kerja, material) untuk menjadi anggota
- 5) Inisiatif: hal ini bisa dimulai hanya dari anggota atau pemerintahan atau input dari organisasi/kelembagaan swasta
- 6) Akuntabilitas: memiliki kejelasan tujuan dan kebijakan yang bersifat ke bawah untuk anggotanya dan ke atas untuk pengurus

Koperasi sering mengalami berbagai kesulitan didalam bersaing dengan pemasaran swasta atau perusahaan penyuplai karena struktur keuangan mereka (Turtianen and Pischke, 1982). Sedangkan perusahaan swasta mempunyai suatu kejelasan atau perangsang untuk menanam modal untuk membangun dan menggunakan teknologi maju, anggota koperasi boleh mendistribusikan laba mereka apabila keuntungan lebih sedikit dari nilai buku yang dikumpulkan tentang asset. Selain itu juga koperasi harus memelihara hubungan yang memberi kepuasan antara semua komponen yang terlibat yaitu anggota, pemerintah, pelanggan dan pekerja (yang bukan anggota tapi melakukan aktivitas bisnis dengan mereka). Masalah yang dihadapi bersifat universal, meskipun tidak selalu menyerah pada korupsi. Berbagai hal cepat mematikan suatu koperasi adalah karena hilangnya dukungan dan kepercayaan anggota dan tidak berarti bebas dari tanggung jawab korupsi, tapi itu sebagai konsekwensi

dari pembentukan koperasi. Seperti koperasi kopi di Bukusu di daerah Kenya Barat disimpulkan bahwa korupsi dengan mudah terlihat menyebar dasa diusut oleh otoritas struktur colonial yang telah dibentuk (Hamer, 1981). Uphoff (1986) mengatakan bahwa suatu struktur yang asing telah dibebankan pada masyarakat yang tidak saling kenal dengan organisasi formal tidak ada hukum adat tradisional atau sanksi secara eksternal dibangun sistem yang tidak dapat dimengerti karyawan dan anggota koperasi lokal.

Dominasi pejabat ketika korupsi merusakkan koperasi karena secara efektif di bawah kendali pejabat mereka harus diperlakukan bukan sebagai organisasi lokal. Pada sisi lain, pengaturan secara transparan dan efisien, merupakan kontribusi untuk pengembangan pertanian bahkan ketika partisipasi anggota dalam manajemen. Organisasi ini langka karena pengelolaannya berstandar tinggi yaitu kejujuran dan kerja keras.

Namun dari sisi ekonomi koperasi dapat menyimpan atau mengumpulkan untuk anggota untuk membeli masukan atau memproses dan hasil penjualan dibuat yang lebih besar oleh organisasi. Memelihara standard dari koperasi secara umum memerlukan peran aktif anggota. Usaha melakukan penyalahgunaan oleh anggota paling mudah untuk menimbulkan konflik. Ketika sedang beroperasi dengan sukses ada sedikit perangsang bagi anggota untuk menginvestasikan waktu mengatur manajemen meskipun menyenangkan namun dapat meningkatkan godaan. Kelembagaan koperasi secara umum lebih efektif dalam

menyediakan masukan yang lain dibanding kredit. Bagaimanapun mereka harus mampu beroperasi seperti bisnis atau mereka tidak akan bertahan bersaing dengan perusahaan swasta. Pada sisi lain, jika penyalur swasta melakukan suatu monopoli atau monopsoni, capaian mereka mungkin ditingkatkan dan manipulasi harga mereka yang menikmati dan membentuk kompetisi bagi koperasi. Ini adalah contoh yang lain dari nilai mempunyai; menikmati kombinasi kelembagaan lokal. Keuntungan koperasi dari pelaksanaan pengolahan dan pemasaran adalah secara wajar jelas. Kadang-kadang pemerintah mengharapkan melaksanakan yang lebih efisien dengan mengembangkan skala mereka, dan mungkin dengan maksud untuk memperoleh kendali atas mereka, namun telah mempertimbangkan hak-hak untuk membeli atau memproses hasil panen seperti kopi atau coklat. Koperasi sebagai suatu hasil perubahan kelembagaan monopoli, efisiensi dan manfaat mereka ke produsen pada umumnya menderita ketika memberi kuasa pasar yang absolut. Ketika satu atau beberapa saluran bersaing, bagaimanapun koperasi memiliki banyak penawaran dalam pengembangan pertanian, tetapi seperti saluran yang lain, mereka hanya dapat menyokong dan tidak untuk memenuhi daftar kelembagaan lokal dalam pengembangan pertanian (Uphoff, 1986).

c. Sektor swasta (*private sector*)

a) Organisasi jasa

Organisasi Layanan lokal lebih sering ditemukan terkait dengan aktivitas pendidikan atau pelayanan kesehatan yang utama dalam pengembangan pertanian. Organisasi Layanan terkait dengan gereja berterus terang dengan pembenaran, dan masyarakat sangat lemah usahanya sebagai pekejaan dari derma.

Kelembagaan dari organisasi layanan, bagaimanapun tergantung pada staf dan penderma dibanding pada penerima uang. Yang belakangan bukanlah “anggota” dan tidak punya kendali atas organisasi. Menurut mereka, tidak memiliki kewajiban dan tidak perlu mendukungnya dengan acara akan memberinya dasar kelembagaan yang luas. Untuk memastikan, jika staf dan penderma merasakan suatu kekuatan organisasi, mereka dapat membuatnya ke dalam suatu kelembagaan melalui usaha yang didukung mereka sendiri. Meskipun demikian, sedikitnya beberapa penilaian dan penerimaan minimum dalam masyarakat yang diperlukan bagi suatu organisasi layanan untuk dijadikan lembaga dalam beberapa cara yang substansial. Peran dari organisasi layanan mungkin lebih dari suatu katalis dibanding suatu agen yang operasional dalam bidang pertanian (Uphoff, 1986).

b) Bisnis Swasta

Peran Bisnis Pribadi dari swasta dalam pengembangan pertanian jarang ditujukan dalam kaitan dengan pengembangan kelembagaan lokal. Literatur kebanyakan melakukan klaim secara komparatif dari efisiensi dalam alokasi sumber daya, karena kontribusi aspek kelembagaan

perusahaan swasta lokal jarang dievaluasi. Literatur juga dikuasai dengan ketikan, menyumbangkan penilaian dari yang telah dibuat. Gambaran dari media pengusaha desa yang memiliki pinjaman luar biasa tinggi dan membayar sedikit berbeda dengan apa yang ada pada toko, yang berorientasi melayani pertanian cuma-cuma bagi semua yang memintanya. Secara empiris menaksir bagaimana sering suatu pandangan mempunyai kebenaran dalam mengetahui frekuensi capaian hal positif dan negatif oleh usahawan swasta. Gambaran yang berlawanan adalah interpretasi dari peran perusahaan yang multinasional dalam mengembangkan negara. Suatu bisnis pribadi seperti suatu koperasi akan mencukupi dan efisien sebagai satu-satunya saluran di area pedesaan untuk menangani masukan dan keluaran. Bagaimanapun bisnis pribadi dapat membuat suatu komoditi yang sangat bernilai sebagai bagian dari suatu sistem dalam kelembagaan lokal yang menengahi antara rumah tangga dan individu dan lainnya. Pertanyaannya adalah dimana ketidaksesuaiannya dan untuk apa suatu bisnis pribadi (Freeman, 1981; Feder, 1978; Uphoff, 1986).

Pertimbangan pertama adalah potensi keuntungan. Dukungan operasional dalam peningkatan pertanian, seperti persediaan masukan, pengolahan dan penyimpanan, menarik sebagai peluang bisnis untuk investasi dalam area, yang tidak menguntungkan akan dilakukan aktivitas tertentu dapat dikomersialkan dalam rangka membuatnya bernilai (memiliki nilai jual). Perusahaan swasta memiliki ketidakpastian

pendapatan karena variabel-variabel yang mempengaruhi lemah, oleh karena pelayanan masukan (*input*) atau keluaran (*output*) tidak dianggap sebagai suatu bisnis menguntungkan. Perubahan teknologi produksi pertanian lebih mungkin diprakarsai oleh pemerintah (administrasi lokal) atau mungkin dari masyarakat itu sendiri melalui saluran bantuan yang kolektif.

Penanganan secara diam-diam yang dilakukan usahawan swasta lain secara umum lebih disesuaikan pada peluang baru dibanding dengan kelembagaan. Stimulus pemerintah yaitu potensi keuntungan yang dapat mempengaruhi orang untuk berinovasi dan menekuni atau “melakukan pekerjaan mereka” saja tanpa spekulasi. Selanjutnya usahawan swasta mungkin lebih baik daripada pejabat dalam memberi jasa yang baru dalam suatu wilayah. Beberapa penilaian tentang keuntungan komparatif dari para pelaku bisnis yang bersifat usahawan adalah situasi spesifik sebagai saingan birokrasi. Beberapa kompetisi yang berlangsung antar pribadi dan saluran sektor publik boleh diacu dalam membuat perencanaan yang berharga.

Kekuatan dasar bisnis pribadi adalah perangsang dalam penggunaan sumber daya secara efisien dan inovatif, kompetisi yang dapat mendorong, pengaturan monopoli swasta, dan sering digunakan di area fasilitas umum, yang tidak nampak seperti dan sering digunakan di area fasilitas umum yang tidak nampak seperti pada infrastruktur area pertanian. Kemampuan reaksi pada kondisi yang berubah-ubah dan

pengambilan resiko sangat penting karena operasional bisnis orang-orang yang milik pemerintah mempunyai suatu keuntungan. Sektor swasta mempunyai suatu keuntungan bersih pada saluran kelembagaan lain yaitu pada pembuatan dan perbaikan alat dan mesin pertanian. Pekerjaan perbaikan merupakan suatu hal yang kompleks dan banyak dilakukan perusahaan yang memang menjadikannya sebagai produksi yang utama pada tingkatan nasional atau regional (Uphoff, 1986).

b. Aspek Kultural dan Struktural Kelembagaan Irigasi

Tonny (2003) mengatakan bahwa kelembagaan memiliki aspek kultural dan struktural. Segi kultural berupa norma-norma dan nilai-nilai, dan segi struktural berupa berbagai peranan sosial. Menurutnya kedua segi tersebut berhubungan erat satu sama lain. Rahardjo (1999) mengatakan bahwa lembaga sosial (*social institution*), merupakan wadah dan perwujudan yang lebih konkrit dari kultur dan struktur. Menurutnya dalam suatu lembaga, setiap orang yang termasuk di dalamnya pasti memiliki status dan peran tertentu. status merupakan refleksi dari struktur, sedangkan peran merupakan refleksi kultur.

Ambler (1992) mengatakan bahwa pengelolaan irigasi yang baik perlu dilaksanakan serangkaian kegiatan yang menyangkut seluruh aspek operasi dan pemeliharaan, mulai dari pengerahan tenaga untuk membersihkan saluran atau memperbaiki bendungan sampai kepada penyelesaian konflik, pembagian air dan perencanaan untuk musim berikutnya. Menurutnya semua kegiatan ini menuntut adanya

kelembagaan petani pemakai air yang kuat dan hal tersebut yang paling menonjol dalam pengelolaan irigasi kecil di pedesaan.

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mengelola air irigasi yang baik. Menurut Uphoff (1986), pengelolaan irigasi yang baik dibagi kedalam tiga kategori besar, yaitu “kegiatan kelembagaan”, “bangunan kontrol air”, dan “penggunaan air”. Menurutnya kategori kegiatan bangunan kontrol air meliputi usaha-usaha perekayasaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Sedangkan dalam rangkaian kegiatan penggunaan air, meliputi tugas-tugas pengadaan, pengalokasian, pendistribusian, dan pembuangan air. Kategori kelembagaan irigasi meliputi dimensi-dimensi seperti penyelesaian konflik, komunikasi, pengeralahan sumber daya dan pengambilan keputusan.

Coward (1980) memperkenalkan konsep sosiologi irigasi, menyebutkan lima tugas-tugas atau tindakan-tindakan mendasar yang terjadi dalam suatu sistem irigasi. Kelima tugas yang bersifat mendasar tersebut diantaranya:

(1) Perolehan air (*water acquisition*)

Perolehan air yaitu tugas mendapatkan air untuk sistem irigasi melalui metode-metode atau cara-cara yang luar biasa. Menurut Ambler (1992), semakin mudah petani dalam memperoleh air, dan semakin besar ketersediaan air, maka petani semakin tidak terdorong untuk membentuk suatu organisasi yang kuat.

(2) Alokasi air.

Kegiatan pengalokasian air merupakan tugas pembagian dan pendistribusian sistem persediaan kepada para pemakai air. Menurut Rachman *et al.*, (1999), alokasi distribusi penggunaan air irigasi diatur berjenjang tetapi juga memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan air. Cara pengalokasian air pada tipe irigasi teknis berskala besar diatur menurut golongan, karena keterbatasan persediaan air pada musim kemarau. Tetapi aturan golongan tersebut belum dapat menjamin persediaan air irigasi secara merata untuk seluruh petak tersier karena golongan irigasi tersebut tidak digilir antar petak tersier (permanen). Hasil kajian Sumaryanto (1999) dan Saptana *et al.*, (2000), tentang rekayasa optimalisasi alokasi air irigasi diperoleh beberapa gambaran sebagai berikut: pertama, sistem pengelolaan air irigasi pada jaringan irigasi skala besar dilakukan dengan sistem golongan, yaitu pembagian air dengan membagi wilayah layanan dengan sistem golongan, kedua, sistem pengelolaan air irigasi pada jaringan irigasi skala kecil dan menengah tidak dilakukan sistem golongan, pendistribusian air dilakukan dengan cara giring gilir antar petakan sawah dari yang berada di hulu kemudian di tengah dan baru selanjutnya bagian hilir.

(3) Sistem pemeliharaan sarana fisik irigasi.

Sistem gotong royong untuk pemeliharaan sarana irigasi telah lama dikenal di Indonesia dan setiap suku mempunyai istilah sendiri seperti jeumba di Aceh, Julo - julo di Sumatera Barat, atau Gorol Jawa Barat.

Menurut Ambler (1992), semakin sulit tantangan ekologis yang dihadapi oleh para petani maka semakin kuat dan formal sistem pemeliharaannya dan kemudian pada sistem pengoperasiannya. Hasil kajian Sutawan (1993), mengenai sistem subak di Bali mengatakan bahwa sebelum campur tangan pemerintah, anggota - anggota subak dimobilisasikan secara teratur dalam merawat sistem saluran. Akan tetapi setelah pembangunan sistem irigasi baru kegiatan gotong royong menurun drastis, hal ini dilihat dari rata-rata jumlah jam kerja untuk perbaikan dan perawatan semakin berkurang setelah pembangunan sistem baru tersebut. Menurutnya petani merasa bahwa mereka sekarang tidak bertanggung jawab lagi untuk pemeliharaan sistem pengairan tersier.

(4) Pengadaan sumber daya

Pengadaan sumber daya meliputi tugas menghimpun tenaga kerja, bahan, dana, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas seperti sistem pemeliharaan. Dalam sistem irigasi, menurut Ambler (1992), petani pada umumnya mengumpulkan iuran secara rutin untuk mengantisipasi kerusakan dimasa mendatang. Selain iuran rutin, jika terjadi kerusakan petani juga akan diminta sumbangan yang dikenakan pada petani sesuai dengan besarnya masing-masing hak atas air atau luas lahan sawah yang terairi. Iuran rutin setelah adanya rehabilitasi sistem irigasi dilakukan dalam lembaga P3A dan disebut Iuran Penggunaan Air Irigasi (IPAIR). Hasil penelitian Sumaryanto *et al.*, (2006)

dan Rachman *et al.*, (1999) di beberapa wilayah irigasi juga disebutkan bahwa partisipasi petani dalam pembayaran IPAIR masih sangat rendah.

(5) Menghadapi pertentangan atau konflik

Mengelola pertentangan atau konflik yaitu tugas untuk menampung dan menengahi perselisihan sebagai akibat dari berbagai operasi seperti alokasi air. Konflik dalam suatu sistem irigasi dapat disebabkan karena sedikitnya debit air yang diterima petani hilir, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan petani. Adanya penggunaan air selain untuk pertanian, seperti untuk keperluan domestik, ternak dan lain-lain (Uphoff, 1986). Kelima tugas tersebut diatas, menurut Coward (1984) dapat digunakan untuk menciptakan skema analitis dalam memahami aspek kelembagaan dan organisasi dari sistem irigasi yang ada sebelum proyek perbaikannya maupun setelah perbaikan fisik irigasi.

E. Teori Hak Kepemilikan (*Property Right*)

Hak kepemilikan (*Property rights*) atas sesuatu mengandung pengertian hak untuk mengakses, memanfaatkan (*utilize*), mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak atas sesuatu tersebut pada pihak lain. Bromley (1992) mendefinisikan *propety right* sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba/keuntungan secara aman (*secure*) karena orang lain respek terhadap aliran laba tersebut (terekait dengan transaksi).

Furubotn dan Richter (2000) melacak teori kepemilikan dan bermuara pada dua teori, yaitu teori kepemilikan individu dan teori

kepemilikan sosial. Teori kepemilikan individu merupakan penopang utama doktrin hak-hak alamiah (*natural rights*) dari ekonomi klasik yang mengarah pada lahirnya *private property right* atau individualistis. Sedangkan teori kepemilikan sosial mendorong lahirnya *commons property* atau *state property* yang dianut secara ekstrim oleh negara-negara sosialis. Caporaso dan Levine (1992) menjelaskan dua teori yang berbeda mengenai *property rights* menurutnya, yang pertama adalah aliran positivis menganggap hak-hak kepemilikan lahir melalui sistem politik. Sistem politik atau kekuasaan mendesain hak kepemilikan dan menegakkannya melalui pengadilan hukum dan yang Kedua, aliran alamiah yang mengatakan bahwa hak kepemilikan melekat pada seseorang sejak lahir. Kelahiran individu disertai dengan kelahiran atas hak-haknya yang tidak bisa dipisahkan, ditegakan atau tidak melalui proses pengadilan hukum, hak bawaan lahir sejatinya harus ada.

Tietenberg (1992) mengidentifikasi karakteristik *property right* sebagai berikut:

1. *Eksklusivitas*: pemanfaatan, nilai manfaat dari sesuatu dan biaya penegakan, secara eksklusif jatuh ke tangan pemilik termasuk keuntungan yang diperoleh dari transfer hak kepemilikan tersebut
2. *Transferability*: seluruh hak kepemilikan dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik yang lain secara suka rela melalui jual beli, sewa, hibah dan lain – lain.

3. *Enforceability*: hak kepemilikan bisa ditegakan, dihormati dan dijamin dari praktek perampasan pihak lain.

Dalam konteks penguasaan sumber daya alam Hanna (1996) membagi 4 tipe hak kepemilikan dalam sistem pengelolaan sumber daya alam, yaitu (1) hak kepemilikan pribadi (*private property regime*); (2) hak kepemilikan bersama (*common property regime*); (3) hak milik negara (*state property regime*); dan tanpa hak milik (*open access regime*). Karakteristik dari masing-masing tipe rezim/penguasaan tersebut berdasarkan unit pemegang hak kepemilikan dan hak pemilik serta tugas-tugas pemilik terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tipe Hak Kepemilikan dalam Pemanfaatan Sumber daya Alam Berdasarkan Pemilik, Hak dan Kewajiban

Tipe	Pemilik	Pemilik/Pemegang akses	
		Hak	Kewajiban
Kepemilikan Private	Individu	Akses, pemanfaatan, kontrol	Menjaga pemanfaatan yang merugikan sosial
Kepemilikan Bersama	Kolektif	Akses, pemanfaatan, kontrol (pengecualian kepada non pemilik)	Merawat, mengatur tingkat pemanfaatan
Kepemilikan Negara	Negara/Warga Negara	Akses, pemanfaatan, kontrol (menentukan aturan)	Menjaga tujuan/Manfaat Sosial
Akses Terbuka (Tanpa Kepemilikan)	Tidak ada	Pemanfaatan	Tidak ada

Sumber: Hanna (1996)

Sedangkan Feeny *et al.*, 1990; Lynch & Harwell 2002 membagi tipe hak kepemilikan sumber daya sebagai berikut:

1. Akses terbuka (*open access*) adalah sumber daya bebas dan terbuka diakses oleh siapapun dan tidak ada regulasi yang mengatur.

2. Milik privat (*private property*) adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau individu, ada aturan yang mengatur hak-hak pemilik dalam memanfaatkan sumber daya alam, manfaat dan biaya ditanggung sendiri oleh pemilik dan hak kepemilikan dapat dipindahtangankan.
3. Milik kelompok masyarakat (*common property*) adalah sumber daya dikuasai oleh sekelompok masyarakat yang para anggota punya kepentingan untuk kelestarian pemanfaatan, pihak luar bukan anggota tidak boleh memanfaatkan serta hak kepemilikan tidak bersifat eksklusif dapat dipindahtangankan sepanjang sesuai aturan yang disepakati bersama terdapat aturan pemanfaatan yang mengikat anggota kelompok.
4. Milik negara (*state property*) adalah hak pemanfaatan sumber daya alam secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah serta pemerintah memutuskan tentang akses dan sifat eksploitasi sumber daya alam.

Sedangkan Bromley (1992), membagi rezime kepemilikan menjadi empat:

1. Rezime kepemilikan individu/pribadi (*private property regime*), yakni kepemilikan pribadi atas sesuatu yang hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya.
2. Rezim kepemilikan bersama (*common property regime*), yakni

kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu, karena hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut.

3. Rezim kepemilikan oleh negara yang hak kepemilikan dan aturan-aturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya.
4. Rezim akses terbuka yaitu tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban.

Sehingga berdasarkan tipe hak kepemilikan sumber daya alam Ostrom (1990) mengatakan bahwa sistem irigasi merupakan sumber daya yang bersifat *common pool resources*, polisentris dan kental dengan aspek sosio-kultural masyarakat. Sistem irigasi sebagai sistem *common pool resources* dilihat dari karakteristik sumber dayanya maka sumber air dan segala aspek pemanfaatannya bersifat sumber daya milik bersama (*common pool resource*) dan polisentris. Sifat tersebut sulit membatasi orang untuk memanfaatkannya karena biaya pembatasnya (*exclusion cost*) menjadi tinggi, pengambilan suatu unit sumber daya akan mengurangi kesediaan bagi pihak lain untuk memanfaatkannya (*subtractibility* atau *rivalry*). Akibatnya setiap individu berupaya menjadi penumpang bebas (*free rider*), memanfaatkan sumber daya tanpa bersedia berkontribusi terhadap penyediaannya atau pelestariannya dan rentan terhadap masalah eksploitasi berlebih atau kerusakan sumber daya. Hal ini dikenal sebagai *tragedy of the commons* (Hardin, 1968). Tragedi ini bisa terjadi jika tidak ada pembatasan, aturan, pemanfaatan sumber daya sehingga bersifat akses terbuka (*open access*).

Tragedi kepemilikan bersama timbul saat setiap manusia berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan makhluk hidup lain. Oleh karena itu tragedi kepemilikan bersama ini umumnya terjadi pada sumber daya yang merupakan milik umum.

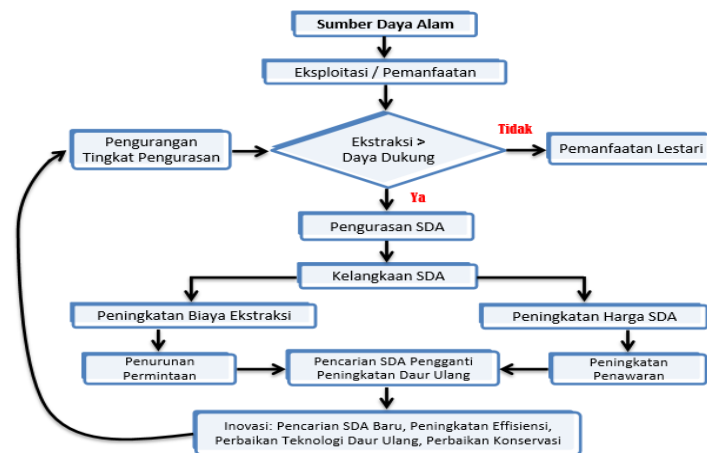
Pandangan yang menyebabkan terjadinya tragedi kepemilikan bersama adalah keinginan untuk meraih untung yang banyak demi kepentingan pribadi daripada berbagi kepada yang lain. Pandangan seperti ini awalnya akan terasa menguntungkan bagi pihak yang memakai banyak sumber daya alam, namun pada akhirnya ketersediaan sumber daya alam akan habis dan justru berdampak negatif bagi pengguna dan pihak lain. Sehingga untuk mencegahnya dibutuhkan keinginan berkorban untuk tidak mengambil banyak namun akan berdampak positif bagi kelestarian sumber daya alam yang ada (Hardin, 1994).

Barang milik bersama adalah semua sumber daya yang dimiliki secara bersama-sama oleh semua orang (pemberian Tuhan) seperti udara, Air yang kita gunakan, ikan yang ditangkap di laut, kayu yang ditebang dari hutan. Sehingga untuk menghindari tragedi pada barang kepemilikan bersama harus ditempuh dengan cara pemaksaan seperti pembuatan peraturan tentang larangan-larangan, pajak dan aturan-aturan non formal yang disepakati bersama oleh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sarker (2013) mengatakan untuk menghindari *Tragedi Of The Commons* dalam pengelolaan irigasi di

Jepan, negara harus mengatur pengelolaannya serta mengatur kelembagaannya serta membuat kebijakan dalam pemanfaatan irigasi.

Prinsipnya *tragedy of the commons* ini menganut paham yaitu kalau saya tidak memanfaatkan sekarang pasti ada orang lain juga akan menfaatkannya. Inilah hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saling berlomba-lomba dalam mengumpulkan sesuatu sedangkan daya dukung sumber daya alam kita terbatas. Dalam paham ekonomi bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan kebutuhan harus ditingkatkan demi taraf hidupnya (Sarker, 2013).

Ada dua pandangan terhadap sumber daya alam menurut Fauzi (2006), yaitu: (1) Pandangan konservatif – pesimis (perspektif Malthusian): Pandangan ini berakar dari pemikiran Malthus "*Principle of Population*", karena SDA yang terbatas tidak akan mampu mendukung pertumbuhan penduduk yang tumbuh secara eksponensial. Produksi SDA akan mengalami "*Diminishing Return*", karena output per kapita akan cenderung mengalami penurunan sepanjang waktu. Ketika terjadi *diminishing return*, standar hidup manusia akan menurun sampai ke tingkat subsiten. Tingkat subsiten merupakan batas garis kemiskinan. Kondisi ini akan terus berlangsung sampai terwujud ekonomi dalam kondisi keseimbangan (*steady state*). 2) Pandangan Eksploitatif atau biasa disebut sebagai perspektif Ricardian, adapun perspektif Ricardian terhadap sumber daya dapat dilihat pada Gambar 2.



Pandangan

Perspektif

Ricardian

Gambar 2. Perspektif Ricardian terhadap Sumber Daya Alam (Fauzi, 2006)

mengemukakan bahwa:

1. Sumber daya alam dianggap sebagai “mesin pertumbuhan” (*engine of growth*) yang akan mentransformasikan sumber daya alam ke dalam “*manmade capital*” yang pada akhirnya menghasilkan produktifitas yang tinggi di masa mendatang.
2. Keterbatasan penawaran dari sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi (eksploitasi SDA secara intensif) atau cara ekstensifikasi (memanfaatkan SDA yang belum dieksploitasi).
3. Bila terjadi kelangkaan SDA, akan tercermin pada dua indikator ekonomi, yakni meningkatnya harga *input* dan *output* yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan SDA. Namun peningkatan harga output akan menimbulkan insentif bagi produsen SDA sehingga produsen akan

berusaha meningkatkan suplai. Ketersediaan SDA yang terbatas, sehingga kombinasi harga *input* dan *output* akan menimbulkan insentif untuk melakukan substitusi dan peningkatan daur ulang. Kelangkaan SDA akan menimbulkan insentif untuk mengembangkan inovasi seperti pencarian deposit, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan teknologi daur ulang sehingga mengurangi tekanan terhadap pengurusan SDA.

F. Ekologi Politik

Kajian ekologi politik sebelumnya merupakan hasil dari perkembangan dari ilmu pengetahuan ecology manusia, dan sosiologi lingkungan. Ekologi manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Haeckel pada tahun 1866 sebagai ilmu yang memiliki konsep tentang hubungan manusia (*human system*) dengan alam (*non-human system*) di biosfer. Ekologi manusia melakukan pengkajian-pengkajian pada isu kehancuran alam dari perspektif konflik-social dan mengkaji lembaga fungsional dalam tata hubungan manusia dengan alam (Dunlap and Catton, 1979). Analisa ekologi-biologi maupun sosiologi untuk menjelaskan keterkaitan hubungan manusia dengan alam melalui pendekatan antropologi mulai berkembang sejak akhir dekade 1970-an dan awal 1980an. Meskipun demikian, istilah ekologi politik pertama kali dicetuskan oleh Russett (1967); Wolf (1972); Miller (1978); Cocksburn dan Ridgeway (1970) (Robbins, 2004). Istilah ekologi sendiri sebenarnya merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antar manusia dan

lingkungannya. Sebagai bidang ilmu pengetahuan, ekologi bertujuan untuk memberikan ilustrasi hubungan antar manusia dan spesies lainnya.

Ekologi politik merupakan kelanjutan dari kajian ekologi budaya (*cultural ekologi*). Hal ini bisa dilihat dari kajian *cultural ecology* tahun 1960-an. Escobar (2006) berpendapat bahwa kerangka ekologi politik (*political ecology*) dapat diterapkan dari hubungan antara perbedaan dan kesamaan akses dalam konflik distribusi ekonomi, ekologi, dan budaya. Hal ini didukung oleh Turner (2004) yang mengatakan bahwa konflik sumber daya telah menjadi fokus analisis dan metodologi utama dari ekologi politik karena konflik dapat menjelaskan kepentingan, kekuatan, dan kerentanan yang berbeda dari kelompok sosial yang berbeda yang didasari oleh keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatannya.

Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa ekologi politik menjadi bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik pengelolaan lingkungan, dengan asumsi pokok bahwa perubahan lingkungan tidak bersifat teknis, tetapi merupakan suatu bentuk politisasi lingkungan yang melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. Blaikie *et al.*, (1987) mendefinisikan ekologi politik ini sebagai kombinasi perhatian dari ekologi dan ekonomi politik dalam arti luas yakni dialektika antara masyarakat dan sumber daya berbasis tanah dan termasuk juga dialektika antar kelas dan kelompok di dalam masyarakat itu sendiri (Walker, 2005). Menurut Walker

(2005) ekologi politik merupakan kajian yang mendominasi dalam beberapa penelitian tentang hubungan manusia dan lingkungan dalam ilmu geografi. Akar pemikiran ekologi politik ini sudah dimulai sejak Steward (1955) mengkaji tentang strategi ekologi manusia menjadi adaptasi kebudayaan (ekologi budaya) dan juga dipengaruhi oleh pemikiran tentang bencana (*hazards*) (Burton, 1978).

Ekologi politik awal yang menekankan pada perubahan lingkungan biofisikal ini berkembang pula sebagai respon dari teori Malthusian (Shanin 1971) dan teori-teori Marxist (Frank, 1969 dan Wallerstein, 1974). Para ilmuwan mulai fokus pada ketidakseimbangan relasi kekuasaan, konflik, dan modernisasi kebudayaan ekonomi politik kapitalis. Fase ekologi politik strukturalis cirinya adalah seperti kajian Bunker (1984) yang menggunakan pendekatan sistem dunia (*marxist*) dan teori dependensi mencoba untuk menjelaskan teori sistem ekologi dari aliran energi dan barang-barang dari negara pinggiran ke negara maju. Hal ini juga ditekankan oleh kajian-kajian Blaikie yang sampai pada kesimpulan bahwasanya ekologi politik tidak hanya menghubungkan antara politik dan pengetahuan lingkungan saja, dan yang lebih penting adalah mengkaitkannya dengan masalah-masalah kerentanan manusia secara sosial (epistemologi keadilan sosial) (Forsyth, 2003). Sedangkan pada tahun 1990an, ekologi politik mulai sedikit bergeser perhatiannya tidak lagi berpusat pada peran ekonomi politik yang dianggap terlalu makro deterministik. Sehingga muncul kajian baru yang lebih bersifat

studi-studi lokal gerakan lingkungan, diskursus dan politik simbolik (mikro politik), serta hubungan kelembagaan dan kekuasaan, pengetahuan dan praktis dari perjuangan di lapangan. Sebuah aliran yang disebut sebagai ekologi politik poststrukturalis.

Beberapa isu kunci dalam ekologi politik merupakan wilayah eksplorasi yang memiliki hubungan multilevel antara fenomena global dan lokal.

Tidak hanya soal fungsi lingkungan tetapi juga soal pengambilan keputusan dan hierarki kekuasaan. Ada empat isu utama yang kemudian menjadi dominan dalam kajian ekologi politik global saat ini, yaitu *deforestation*, *desertification*, *biodiversity utilization* dan *climate change* (Adger *et al.*, 2000).

Isu tersebut merupakan diskursus yang menjadi perdebatan utama dalam lapangan pembangunan dan lingkungan dalam berbagai skalanya.

Terdapat beberapa pendekatan yang berbeda didalam ekologi politik yang saling melengkapi, ragam pendekatan tersebut muncul dari hasil riset berbagai ahli. Berdasarkan hasil riset tersebut, Bryant dan Bailey (2001) memetakannya menjadi lima pendekatan yang terkait satu sama lainnya.

1. Pendekatan yang bertumpu pada masalah lingkungan secara spesifik, dan pijakannya adalah perspektif atau bidang kajian traditional geography serta berkaitan dengan upaya memahami dampak manusia terhadap lingkungan fisik.

2. Pendekatan yang bertumpu pada konsep terkait dengan pertanyaan ekologi politik, yakni mengeksplorasi bagaimana konsep – konsep tersebut dikonstruksi. Analisis wacana yang mendominasi sekitar konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka memperjelas asumsi dasar tentang masyarakat dan alam serta ekonomi politik yang membuat asumsi itu ada.
3. Pendekatan yang melihat kaitan politik dengan masalah ekologis dalam konteks wilayah geografis tertentu, seperti kajian masalah lingkungan di Asia, Afrika dan sebagainya.
4. Pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan ekologi politik terkait dengan karaktersitik sosial ekonomi, seperti kelas, gender, dan etnik.
5. Pendekatan yang menekankan kebutuhan untuk fokus pada kepentingan, karakteristik, dan tindakan dari para aktor dalam memahami konflik politik dan ekologi.

Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa politik ekologi menggunakan asumsi untuk menafsirkan politisasi lingkungan dunia ketiga dan memfokuskannya pada deskripsi dari perubahan lingkungan fisik sendiri, tetapi pada cara bagaimana perubahan tersebut berhubungan dengan aktivitas manusia. Asumsi tersebut adalah; 1) peneliti politik ekologi menerima gagasan bahwa biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan sebagian besar distribusikan diantara aktor secara tidak merata, 2) distribusi yang tidak merata dari biaya dan manfaat lingkungan tersebut memperkuat

atau mengurangi senjangan sosial dan ekonomi yang ada, dan 3) dampak sosial dan ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan juga memiliki implikasi politik dari segi perubahan kekuasaan aktor-aktor dalam hubungannya dengan aktor-aktor lainnya. Politisasi lingkungan yang terjadi di dunia ketiga mencakup tiga dimensi, yaitu: hari-hari, episodik, dan sistemik. Dimensi ini berkaitan dengan perubahan fisik, tingkat dampak, sifat dampak terhadap manusia, respon politik, dan konsep-konsep kunci seperti yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Dimensi Politisasi Lingkungan

Dimensi	Perubahan fisik	Tingkat dampak	Sifat dampak terhadap manusia	Respon politik	Konsep kunci
Sehari-hari	Erosi tanah, deforestasi, salinisasi	Bertahap dan bahkan mungkin tidak dirasakan untuk waktu yang lama	Kumulatif dan biasanya sangat tidak setara; orang miskin yang paling menderita (terjadi ketidakadilan/ketidakmerataan dalam memperoleh Sumber daya)	Resistensi/protes masyarakat terkena dampak yang dilakukan oleh mereka yang terancam kelangsungan nafkahnya serta merasa tertekan oleh kehancuran lingkungan	Marjinalisasi (proses peminggiran kaum miskin dan ketidakadilan lingkungan yang diderita oleh alam
Episodik (berjalan/berlanjutan)	Banjir, badai, kekeringan	Sering tapi kadang-kadang muncul secara tiba-tiba	Bisa banyak kemungkinan akan tetapi orang miskin adalah yang paling menderita dan alam	Bantuan "bencana" perbaikan sumber daya alam dan lingkungan	Kerentanan (terjadi kerawanan pangan dan ketidakpastian nafkah serta kehancuran alam
Sistemik (keseluruhan dari segalanya)	Radiasi nuklir, konsentrasi pestisida, spesies termodifikasi secara biologi	Bertahap dan belum tentu dirasakan tetapi juga berpotensi secara mendadak	Cenderung mempunyai dampak umum karena manusia dan alam akan menjadi menderita	Ketidakpercayaan terhadap pakar/ahli	Resiko (struktur alam dan masyarakat kehidupannya sangat berisiko terhadap kehancuran dan kematian

Sumber: Bryant dan Bailey (1997)

Tabel 2 memperlihatkan adanya gambaran tentang bentuk-bentuk serta derajat kehancuran alam dan masyarakat dengan berlangsungnya krisis ekologi. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran untuk dijadikan informasi dalam merumuskan strategi dan aplikasi terhadap kebijakan lingkungan sebagai bentuk intervensi aksi dan pengaruh politik. Menurut Bryant dan Bailey (1997) sistem sosial masyarakat akan menghadapi tiga aspek penting atas kerusakan lingkungan di lihat dari perspektif ekonomi politik, ketiga aspek itu adalah: 1) marjinalitas atau peminggiran secara sosial ekologis sebuah kelompok makhluk hidup, 2) kerentanan secara sosial, ekonomi, ekologi dan fisik akibat berlangsungnya kehancuran secara terus menerus dan 3) kehidupan yang penuh dengan resiko kehancuran taraf lanjut. Selanjutnya Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan pentingnya ekologi politik, karena masyarakat dunia memiliki tiga pilihan atas kehancuran alam yang tak dapat terelakkan dan menjadi suatu realitas (*the inconvenient truth*). Robbins (2004) mendukung pendapat Bryant dan Bailey (1997) yang melihat permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh dunia ketiga bukan merupakan refleksi dari kegagalan kebijakan pasar, tetapi merupakan manifestasi dari kekuatan politik dan ekonomi yang lebih luas yang terkait dengan penyebaran kapitalisme, terutama sejak abad ke-19 (penebangan hutan, pertambangan, industrialisasi, urbanisasi, dan lain-lain). Adanya campur tangan negara dalam aktivitas perekonomian mendorong ke arah kehancuran lingkungan. Kompleksnya permasalahan

lingkungan dunia ketiga membutuhkan tidak sekedar kebijakan yang bersifat teknis, melainkan juga perubahan mendasar dalam proses politik ekonomi di tingkat lokal, regional, dan global. Bryant (1992) mengatakan bahwa peneliti ekologi politik mempunyai premis bahwa perubahan lingkungan bukanlah proses manajemen teknis, sebaliknya perubahan lingkungan tersebut memiliki sumber politik, kondisi dan konsekuensi yang berbenturan dengan kesenjangan sosial ekonomi serta proses politik yang berlangsung. Reduksionisme ekonomi harus dihindari ketika menggunakan interpretasi ini, karena reduksionisme tersebut menyederhanakan realitas dan mengurangi akurasi dari analisis yang dapat melemahkan penelitian ekologi politik dunia ketiga dalam tiga cara, yaitu: (1) reduksionisme ekonomi gagal mengaitkan makna yang menjelaskan faktor ekologi, (2) reduksionisme ekonomi mengabaikan sumber-sumber lain perubahan lingkungan, dan (3) reduksionisme ekonomi juga tidak mempertimbangkan secara serius kekuatan petani dan kelompok-kelompok lainnya yang kurang beruntung secara sosial. Ekologi politik dunia ketiga harus dipahami secara inklusif yang didasarkan pada pandangan bahwa ekologi politik dunia ketiga tersebut harus peka terhadap interaksi beragam kekuatan sosial politik dan relasi kekuatan ini terhadap perubahan lingkungan. Sejalan dengan pandangan tersebut, De Koning (2008) berpendapat bahwa penekanan yang diberikan oleh ekologi politik adalah hubungan antara akses sumber daya alam dan alokasi, distribusi kekuasaan dalam mediasi akses, dan alokasi serta

lembaga yang memegang kekuasaan. Oleh karena itu, Schubert (2005) mengatakan bahwa fokus peneliti ekologi politik adalah pada struktur dan konstruksi sosial yang membentuk akses dan kontrol atas sumber daya alam tersebut dan tidak hanya pada konflik kekerasan saja karena mereka cenderung melihat konflik dan konflik kepentingan melekat pada hubungan sosial serta interaksi manusia dengan alam.

Sejalan dengan pernyataan Bryant dan Bailey (1997); Stott dan Sullivan (2000) mengatakan bahwa bidang ekologi politik sangat beragam sehubungan dengan substantif, epistemologi fokus, dan metode. Selanjutnya penelitian ekologi politik yang beragam di banyak lokasi, oleh Robbins (2004) dibagi ke dalam empat pertanyaan besar, tema, atau narasi penelitian seperti yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Tesis Ekologi Politik

Tesis	Apa yang dijelaskan	Relevansi
Degradasi dan marjinalisasi	Perubahan lingkungan: mengapa dan bagaimana?	Degradasi lahan, menyalahkan masyarakat marjinal, diletakkan dalam
Konflik lingkungan	Akses lingkungan: konteks politik dan ekonomi yang lebih luas	Konflik lingkungan ditunjukkan menjadi bagian yang lebih luas dari perjuangan gender, kelas, ras, dan sebaliknya
Konservasi dan kontrol	Kegagalan konservasi dan pengecualian politik/ekonomi: mengapa dan bagaimana?	Biasanya dipandang tidak ramah, usaha-usaha konservasi lingkungan ditunjukkan memiliki dampak buruk dan kadang-kadang gagal hasilnya
Identitas lingkungan dan pergerakan sosial	Pergolakan sosial: siapa, dimana, dan bagaimana?	Perjuangan politik dan sosial ditunjukkan dikaitkan dengan isu-isu perlindungan mata pencaharian dan lingkungan
Objek Politik dan aktor	Sosial- kondisi politik yang sangat terstruktur)	sistem politik dan ekonomi dan yang dipengaruhi oleh aktor-aktor yang bukan manusia yang terjalin diantara mereka

Sumber: Robbins (2004)

Robbins (2004) mengemukakan lima tesis dalam pendekatan ekologi politik yaitu: 1) konsep degradasi dan marginalisasi, 2) konflik lingkungan, 3) konservasi dan kontrol, 4) Identitas lingkungan dan pergerakan sosial, dan 5) objek politik dan aktor. Sedangkan Bryant dan Bailey (1997) mengatakan bahwa peneliti ekologi politik memberikan suatu perspektif politik ekonomi secara luas dengan mengadopsi berbagai pendekatan dalam menerapkan perspektif tersebut untuk investigasi interaksi manusia-lingkungan di dunia ketiga. Pendekatan yang berbeda tersebut tidak saling eksklusif karena para peneliti sering menggabungkan atau menggunakan pendekatan yang berbeda. Hal ini mencerminkan prioritas penelitian yang berbeda di lapangan, yaitu: 1) pendekatan yang mengarahkan penelitian dan penjelasan dalam ekologi politik dunia ketiga seputar masalah lingkungan tertentu atau serangkaian masalah seperti erosi tanah, deforestasi hutan tropis, pencemaran air, atau degradasi lahan, 2) pendekatan yang memfokuskan pada suatu konsep yang dianggap memiliki kaitan penting terhadap pertanyaan ekologi politik, 3) pendekatan yang memeriksa hubungan masalah - masalah politik dan ekologi dalam konteks suatu wilayah geografis tertentu, 4) pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ekologi politik dalam menjelaskan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas, etnis, atau gender, dan 5) pendekatan yang menekankan kebutuhan yang terfokus pada kepentingan, karakteristik, dan tindakan dari berbagai tipe aktor

dalam pemahaman konflik ekologi politik Perhatian pendekatannya yaitu: 1) interaksi alam (lingkungan) dengan manusia, 2) analisa aktor lokal (*stakeholder*) yang terlibat dalam persoalan lingkungan, 3) analisa bagaimana interaksi, dari tingkat lokal sampai global, aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik dari suatu lingkungan, 4) analisa bagaimana tindakan masa lalu menentukan dan menciptakan berbagai ketidakadilan (*inequalities*) yang masih ada sekarang Walker (1998); Biersack and Greenberg (2006), 5) relasi gender, 6) analisa bagaimana kekuasaan (*power*) dan bangunan pengetahuan (*knowledge*) mempengaruhi lingkungan (Foucault), dan 7) analisa hubungan manusia dengan lingkungan sebagai '*socially constructed*'.

G. Kerangka Konseptual

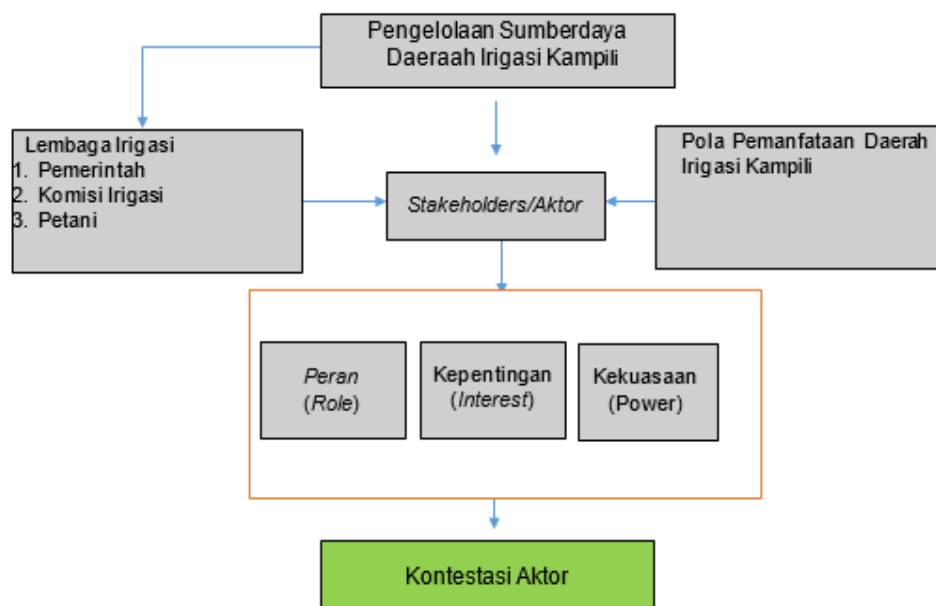
Salah satu sumber air irigasi yang ada di Kabupaten Gowa adalah Bendung Kampili yang sumber airnya berasal dari sungai Jeneberang dan Jene' Lata, air yang berasal dari sungai Jeneberang terlebih dahulu di bendung di Dam Bili - bili, kemudian airnya di alirkan atau dibagi untuk sumber daya air minum PDAM Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, PLTA dan irigasi. Terdapat tiga bendung yang memperoleh air dari Dam Bili-bili yaitu Bendung Bili-bili, Bissua dan Kampili. Bendung Kampili dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili untuk Kabupaten Gowa, dan sebagian kecil mengalir ke lahan persawahan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Di dalam pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili terdapat tiga lembaga, yaitu lembaga pemerintah, lembaga komisi irigasi dan lembaga petani. Lembaga pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai penentu di dalam pengelolaan air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili. Kemudian lembaga petani terdiri dari lembaga IP3A, GP3A dan P3A yang merupakan lembaga yang berfungsi membawa inspirasi petani dan pengelola daerah tersier, dan yang terakhir lembaga Komisi Irigasi yang merupakan lembaga koordinasi antara lembaga petani dan lembaga pemerintah.

Crosby (1992) mengkategorikan *stakeholder* dalam tiga kelompok yaitu: 1) *stakeholder* utama, yaitu pihak yang berkepentingan langsung dalam pengaturan sumber daya air irigasi, petani sebagai pengguna dan operator irigasi sebagai pengatur di dalam pendistribusian air irigasi, 2) *stakeholder* kunci, yaitu *stakeholder* yang terkait dengan masalah kegiatan dan *stakeholder* kunci memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal ini pemerintah pusat maupun dan provinsi dan daerah yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya, dan 3) *stakeholder* pendukung, yaitu kelompok yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya. *Stakeholder* pendukung atau sekunder yaitu tidak berkaitan langsung dalam kegiatan namun masih memiliki pengaruh terhadap sikap

masyarakat dan pemerintah dalam hal ini peneliti dan LSM dan lainnya yang mendukung kegiatan ini.

Perspektif ekologi politik dalam mengkaji ekologi irigasi pada Daerah Irigasi Kampili. Salah satu konsep ekologi politik adalah mendiskusikan peran *stakeholder* Briant dan Bulley (1997) dan objek politik dan aktor dari Robbins (2004). Penelitian ini akan menganalisis pola pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi, sistem kelembagaan yang berlangsung analisis *stakeholder/aktor*, dan kontestasi aktor dalam



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian Pengelolaan Daerah Irigasi Kampili

pengaturan dan pendistribusian air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili, dengan berorientasi pada pendekatan aktor yaitu peran, kepentingan dan kekuasaan dari masing – masing aktor. Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual dari penelitian secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma, Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan perspektif penelitian yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana peneliti melihat realita (*world views*), mempelajari fenomena, cara yang digunakan dalam penelitian, dan yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Pemilihan paradigma penelitian dalam konteks desain penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian (Guba, 1990). Sedangkan Denzin dan Lincoln (2017) mendefinisikan paradigma adalah sistem keyakinan dasar berdasarkan asumsi ontologis, epistemologis dan metodologi.

Guba dan Lincoln (1994) mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat keyakinan yang mendasar (atau metafisik) tentang persoalan pokok atau prinsip utama. Paradigma menggariskan apa yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan apa yang seharusnya dikemukakan dan kaidah apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Sedangkan Guba (1990) mengatakan bahwa suatu paradigma dapat

dicirikan oleh respon terhadap tiga pertanyaan mendasar yaitu mempertanyakan tentang hakikat suatu realitas (ontology), mempertanyakan mengapa peneliti ingin mengetahui realitas, atau mempertanyakan mengapa suatu fenomena dapat terjadi (Epistimologi), dan bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan atau metode apa yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan pengetahuan (metodologi).

Paradigma menurut pandangan Denzin dan Lincoln (2017) adalah sistem keyakinan dasar yang berlandaskan asumsi ontologi, epistimologi, dan metodologi. Dengan kata lain, paradigma adalah sistem keyakinan dasar sebagai landasan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa itu hakekat realitas? apa hakikat hubungan antara peneliti dan realitas dan bagaimana cara peneliti mengetahui realitas? .

Paradigma menurut Ritzer (2004), merupakan gambaran fundamental tentang pokok permasalahan dalam suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan Creswell (2014) mengatakan paradigma sebagai pandangan dunia (*worldviews*) karena memiliki arti kepercayaan dasar yang memandu tindakan. Paradigma dalam penelitian ini akan menggunakan paradigma konstruktivisme yang merupakan salah satu paradigma dalam penelitian kualitatif.

Paradigma penelitian untuk menjawab tujuan pertama dan kedua menggunakan paradigma fakta sosial untuk melihat bagaimana struktur mempengaruhi individu dan tujuan ketiga digunakan paradigma

konstruktivisme, yaitu bagaimana aktor bertindak berdasarkan kepentingan yang dipangkunya. Realitas dikonstruksi dalam suatu konteks kehidupan sosial bersifat eksploratif, teori lahir dan berkembang di lapangan lebih menekankan pada makna dan nilai serta mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data untuk mengungkap keadaan yang sesungguhnya di lapangan secara tepat.

Menurut Creswell (2014) dalam konteks konstruktivisme, peneliti memiliki tujuan utama yakni berusaha memaknai (atau menafsirkan) makna yang dimiliki oleh orang lain tentang dunia ini. Ketimbang mengawali penelitiannya dengan suatu teori sebaiknya membuat atau mengembangkan suatu teori atau pola makna tertentu secara induktif.

Lenggono (2006) mengatakan bahwa penelitian dengan pendekatan konstruktivisme dapat memotret realitas sosial, tidak hanya realitas obyektif yang berada di luar orang yang diteliti, tetapi juga realitas subyektif di dalam diri orang yang diteliti menyangkut kehendak dan kesadarannya.

Guba (1990) mengemukakan sistem keyakinan dasar pada penelitian konstruktivitas, asumsi ontologi ialah realitas ada dalam bentuk konstruksi mental yang bersifat ganda, didasarkan secara sosial dan pengalaman lokal dan khusus bentuk dan isinya, tergantung mereka yang mengungkapkannya. Asumsi epistemologi ialah subjektif, peneliti dan yang diteliti disatukan ke dalam pengetahuan yang utuh dan bersifat tunggal (*monistic*). Temuan secara harfiah merupakan kreasi dari proses interaksi

antara peneliti dan yang diteliti. Asumsi metodologi ialah hermeneutik–dialektik–konstruksi individual, dinyatakan dan diperhalus secara *hermeneutik* dengan tujuan menghasilkan satu atau beberapa konstruksi yang secara substansial disepakati.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006).

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, kebenaran menurut penelitian kualitatif adalah kebenaran “intersubyektif” bukan kebenaran “obyektif”. Kebenaran intersubyektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, seperti budaya dan sifat unik dari individu manusia. Realitas adalah sesuatu yang “*dipersepsikan*” oleh yang melihat dan bukan sekedar fakta yang bebas konteks dan bebas dari *interpretasi* apapun. Oleh karena itu, kebenaran merupakan “bangunan” (konstruksi) yang disusun oleh seorang peneliti dengan cara mencatat dan memahami apa yang terjadi di dalam interaksi sosial kemasyarakatan (Irawan, 2007). Penelitian ini menggunakan metode/strategi studi kasus. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian yaitu bagaimana atau

mengapa, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Yin 2006). Kasus yang dipelajari terikat pada sistem, waktu dan tempat atau ruang, mengkaji secara detail dan mendalam satu atau lebih program, kejadian, individu, atau aktivitas. Konteks dari kasus tersebut mencakup latar fisik, sosial, ekonomi, dan sejarah (Suharjito 2014). Studi kasus memberikan akses dan peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti (Bungin, 2008). Pendekatan studi kasus menekankan pada abstraksi tingkat pertama, yakni penjelasan langsung dari pelaku bukan pada abstraksi tingkat kedua, yakni asumsi dan klasifikasi yang dikonstruksikan oleh peneliti (Bennet, 1976). Menurut Suharjito (2014), penjelasan tentang suatu gejala atau fenomena dalam penelitian ini diberikan secara emik, yang penjelasan emik tersebut dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan, diketahui, dilakukan, dan diharapkan oleh informan sesuai apa yang disampaikan informan sendiri.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Daerah Irigasi Kampili yang merupakan bendung tertua dari tiga bendung yang berada di Kabupaten Gowa, Daerah Irigasi Kampili mengairi lahan persawahan di Kabupaten Gowa, dan sebagian kecil mengairi lahan persawahan di Kecamatan

Galesong Utara Kabupaten Takalar dan Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Pengumpulan data yang bersumber dari instansi/lembaga pemerintah dimulai dari bulan Juni 2016 sampai Desember 2016, penelitian dengan lembaga Komisi Irigasi dan lembaga petani Juni 2016 sampai Desember 2017, sedangkan dengan lembaga petani dimulai bulan Juni 2016 hingga Mei 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri atas:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan sebelumnya membuat daftar pertanyaan kunci, pertanyaan tersebut bisa berkembang di lapangan dan di samping itu dilakukan juga pengamatan langsung. Pola pendistribusian air irigasi, sistem kelembagaan, *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Daerah Irigasi Kampili. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yaitu berasal dari BBWS yaitu Petugas Bendungan Bili – bili 2 orang, Kepala Bagian Perencanaan 1 orang, PSDA terdiri dari Petugas Irigasi terdiri dari Pengamat 1 orang, BOP 2 orang, Juru Primer 1 orang Juru Sekunder 4 orang, Petugas Pintu Air 17 orang, ketua IP3A 1 orang, ketua GP3A 11 orang, ketua P3A 44 orang, 2 -5 orang anggota setiap P3A, petani non DI Kampili 10 orang, Kepala Bidang

Tanaman Pangan Kabupaten Gowa 1 orang, aparat pemerintah desa sebanyak 5 orang, anggota dari komisi irigasi, anggota LSM Pelangi dan 2 orang peneliti yang telah melakukan penelitian di lokasi yang sama.

2. Data Sekunder yang menjadi penunjang dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil penelitian berupa buku, jurnal nasional dan internasional, BBWS, PU, LSM, DSDCKTR, Dinas Pertanian, Statistik Kabupaten Gowa, aparat desa. Data dalam bentuk peta, berupa luas lahan irigasi, data DAS Jeneberang, keberadaan bendung, debit air dibendung, luas daerah irigasi, nama petugas irigasi dan semua data yang berhubungan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi kualitatif yaitu peneliti langsung mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, ikut dalam kegiatan rapat komisi irigasi, melihat langsung kegiatan pendistribusian irigasi mulai aktivitas di Bendung Kampili, saluran primer, sekunder dan tersier. Mengikuti kegiatan kerja bakti pada saluran irigasi, baik ditingkat primer maupun ditingkat sekunder, melihat langsung aktivitas pengambilan air secara ilegal. Terlibat langsung dalam kegiatan rapat komisi irigasi dan kegiatan lembaga petani.

Observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan langsung dalam aktivitas pengelolaan Daerah Irigasi Kampili, sesuai dengan pendapat Creswell (2014) yang mengatakan bahwa observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab secara lisan yaitu dua orang atau lebih, berhadapan secara fisik (Kartono, 1980). Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln (2017), wawancara merupakan suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan dan dilakukan secara berkali-kali. Kerlinger (2000) mengatakan bahwa wawancara adalah situasi peran antar pribadi berhadapan muka (*face to face*) yaitu ketika seseorang (yakni pewawancara) mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang diwawancarai atau informan.
3. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan untuk memperoleh pemahaman mendalam menyangkut realitas pemanfaatan Daerah Irigasi Kampili, sistem kelembagaan dan peran dari aktor yang terlibat di dalam pengelolaan Daerah Irigasi Kampili, mulai dari cara mendistribusikannya, cara memperolehnya, aturan yang diterapkan dalam pendistribusian air irigasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kunci, kemudian dikembangkan

sesuai dengan kondisi yang ada. Secara garis besar, teknik wawancara yang dilakukan pada informan petani menyangkut informasi mengenai cara mereka memperoleh air irigasi, manfaat yang dia rasakan dalam berusahatani, program pengambil kebijakan dalam irigasi yang dia terima, aturan main dalam operasional dan pengelolaan irigasi. informasi di luar dirinya menyangkut peran pemerintah, lembaga irigasi mulai dari pusat hingga ke lembaga petani (peran Balai Besar Pompengan, PSDA Provinsi, PSDA Kabupaten, Pemda, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, IP3A, GP3A dan P3A. LSM dan yang memiliki keterkaitan dengan irigasi Jeneberang, serta peran lembaga.

4. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang atau lembaga. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dalam arti luas dokumen berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan atau gambar (foto) dan karya monumental. Lincoln dan Guba (1994) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh dan untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan Renier (1997) menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian yaitu: 1) dalam arti luas yaitu meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan, 2) dalam arti sempit, yaitu yang

meliputi semua sumber tertulis saja, dan 3) dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat resmi atau surat negara. Sedangkan menurut Creswell (2014), dokumen bisa berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat seperti buku harian, surat e-mail. Dokumentasi yang diambil di lapangan yaitu berupa informasi baik berupa gambar, tabel tulisan baik yang tertera pada papan informasi, dalam laporan petugas irigasi, dalam bentuk buku laporan mulai dari jumlah GP3A, luas lahan sawah yang dimiliki oleh masing GP3A, jadwal pendistribusian, dan cara pendistribusian air irigasi.

5. *Audi Visual* adalah materi audio dan visual, data ini berupa foto, film, objek – objek seni, videotape, segala jenis suara atau bunyi. *Audi visual* dalam penelitian ini, berupa hasil rekaman dengan informan baik informan pemerintah, komisi irigasi, lembaga petani dan pengambilan gambar dalam bentuk video kegiatan, pengambilan gambar dari udara dengan menggunakan drone meliputi sungai Jeneberang, Bendungan Bili – bili, Bendung Kampili, saluran irigasi, bangunan pembagi utama.

E. Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang meliputi aspek dan sub aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini tertera pada Tabel 4 .

Tabel 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

No	Tujuan	Aspek yang diteliti	Sumber Data
----	--------	---------------------	-------------

1.	Menjelaskan pola pemanfaatan Daerah Irigasi Kampili	Sistem pendistribusian air, pada level bendung, primer, sekunder dan tersier. 1) aktivitas perolehan air, 2) pengalokasian air, 3) pemeliharaan, 4) pengadaan sumber daya, dan ke 5) Pengelolaan konflik	BBWS, DSDACKTR, Petugas Bendungan Bili - bili POB, Pengamat, Juru, PPA, IP3A GP3A, ketua/sek P3A, Mandoro je'ne, anggota P3A, petani, anggota Komisi Irigasi, pemerintah desa, tokoh masyarakat, Ketua Apdesi, Kepala Desa, Masyarakat yang tinggal di sekitar saluran irigasi.
2	Menjelaskan sistem kelembagaan irigasi DI Kampili	Lembaga Irigasi yang terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga petani dan lembaga komisi irigasi, fungsi dari semua lembaga dan unsur – unsur yang dimiliki <i>Resource</i> (R) <i>Organisation</i> , (O) dan <i>Norm</i> (N) yang dimiliki oleh lembaga irigasi	BBWS, DSDACKTR, Petugas Bendungan Bili - bili POB, Pengamat, Juru, PPA, IP3A GP3A, ketua/sek P3A, Mandoro Je'ne, anggota P3A, petani, anggota Komisi Irigasi.
3	Menganalisis <i>stakeholder</i> dan kontestasi aktor dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada D.I. Kampili	- Mengidentifikasi semua <i>stakeholder</i> - Melakukan assessment terhadap kepentingan-kepentingan para <i>stakeholder</i> dan dampak-dampak potensial yang muncul dari kepentingan-kepentingan ini - Melakukan assessment terhadap pengaruh dan kepentingan para <i>stakeholder</i> - mengidentifikasi pola kontestasi yang berlangsung dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada kinerja kebijakan dan pengelolaan.	- Semua <i>stakeholder</i>/aktor dan wawancara mendalam dengan <i>stakeholder</i>/aktor - irigasi.

F. Analisis data

Analisis data di mulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data berupa data teks seperti transkrip, data gambar atau foto. Kemudian data tersebut direduksi menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan (Creswell, 2014). Miles dan Huberman (1992) berpendapat bahwa, terdapat tiga tahapan kegiatan dalam analisis data yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) paparan data (*data display*), dan 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang meliputi tahapan kegiatan: 1) pengumpulan informasi dari hasil wawancara yang telah terkumpul, catatan lapangan, dokumen,

rekaman, gambar, foto dan lain-lain, 2) melakukan reduksi data dengan tujuan untuk membuat rangkuman data dan informasi penting yang berkaitan dengan tujuan penelitian, 3) penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus, sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data, 4) penarikan kesimpulan, merupakan hasil penelitian yang menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil analisis data.

Adapun analisis data yang digunakan yaitu merujuk Creswell (2014) yaitu:

1. Organisasi data dengan menciptakan data mengorganisasikan file untuk data.
2. Pembacaan *memoing* yaitu membaca seluruh teks, membuat catatan pinggir, membentuk kode awal.
3. Mendeskripsikan menjadi kode dan tema dengan mendeskripsikan kasus dan konteksnya.
4. Mengklarifikasikan data menjadi kode dan tema dengan menggunakan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola.
5. Menafsirkan data dengan menggunakan penafsiran langsung dan mengembangkan generalisasi naturalistik tentang pelajaran yang dapat diambil.
6. Menyajikan dan memvisualisasikan data dengan menyajikan gambaran mendalam tentang kasus atau beberapa kasus dengan menggunakan narasi, tabel dan gambar.

Berdasarkan gambaran pengambilan data yang telah diuraikan, maka analisis selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab pola pemanfaatan air irigasi pada Daerah irigasi Kampili

Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan dalam menggambarkan pola pendistribusian yaitu mulai dari bendung, saluran primer, sekunder dan tersier pada Daerah Irigasi Kampili analisis ini untuk menggambarkan tentang :

- a) Jadwal Pendistribusian dengan melihat jadwal pendistribusian mulai dari rapat sidang komisi irigasi untuk menyepakati jadwal hambur dan pembukaan pintu di bendung Kampili
 - b) Peran semua petugas irigasi yaitu pengamat, POB, PPA, Juru dan PS serta petani yang tergabung dalam P3A pada saluran tersier
 - c) Proses pendistribusian irigasi mulai dari bendung, saluran primer, sekunder dan tersier
 - d) Kondisi bangunan irigasi yang ada pada Daerah irigasi Kampili
 - e) Pola Tanam secara umum
 - f) Aktivitas irigasi meliputi : 1) aktivitas perolehan air, 2) pengalokasian air, 3) pemeliharaan, 4) pengadaan sumber daya, dan ke 5) pengelolaan konflik.
2. Menjawab tujuan kedua maka digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan R-O-N dalam Kelembagaan Irigasi

Menjelaskan sistem kelembagaan irigasi dilakukan dengan melihat lembaga yang terlibat dalam pengelolaan Daerah Irigasi Kampili, kemudian mengelompokkan sumber daya yang dimiliki, organisasi yang mengatur serta aturan yang ada dalam setiap lembaga pada Daerah Irigasi Kampili. Penelitian ini akan melihat sumber daya yang dimiliki atau *Resources* (R) Daerah Irigasi Kampili, organisasi yang mengatur *organisation* (O), dan aturan yang digunakan oleh organisasi di dalam mengelola sumber daya yang ada pada Daerah Irigasi Kampili.

- a) Sumber daya yang terdiri dari air, lahan persawahan, petani, operator irigasi, mulai dari bendung hingga ke tersier.
 - b) Organisasi (O) meliputi struktur organisasi pada lembaga petani, pemerintah dan komisi irigasi.
 - c) Aturan atau norma (N) berupa undang–undang, peraturan pemerintah dan kesepakatan yang dibuat oleh semua lembaga.
3. Menjawab tujuan ketiga maka digunakan analisis *stakeholder* dan analisis kontestasi aktor

a. Analisis Stakeholder

Analisis data yang digunakan dalam menganalisis *stakeholder*, yaitu berdasarkan *interest* dan *power* (Bryson, 2003). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran peran optimal yang diharapkan dari setiap *stakeholder* dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili, yang dimaksud dengan *interest* disini adalah minat/kepentingan/kepedulian *stakeholder* dalam pengaturan pendistribusian Daerah Irigasi Kampili, sedangkan *power* adalah

kekuatan/kemampuan/kewenangan *stakeholder* untuk melaksanakan (mempengaruhi pelaksanaan) pengelolaan Daerah Irigasi Kampili. Analisis *stakeholder* meliputi 1) *identifikasi stakeholder* digunakan opini para ahli dan hasil penelitian Rampisela *et al.*, (2015).

Kemudian Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Daerah Irigasi Kampili dikelompokkan dalam sembilan kuadran 3 x 3 (*three-by-three matrix*) sebagai berikut:

b. Pengukuran tingkat kepentingan dan kekuasaan/pengaruh *stakeholder*

Kemudian derajat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili dinilai secara kualitatif dari hasil wawancara mendalam serta pertemuan kelompok dan data dari hasil penelitian sebelumnya. Tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* diklasifikasikan menjadi rendah, sedang dan tinggi menggunakan kriteria yang diadopsi dari ODA (1995), Grimble (1998) dan Eden dan Ackerman, 1998). Tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* diklasifikasikan mengikuti kriteria sebagai berikut:

a. Derajat kepentingan

- 1) Tinggi yaitu memiliki harapan, aspirasi dan menerima manfaat langsung dari terwujudnya pengaturan pendistribusian air irigasi yang baik pada Daerah Irigasi Kampili

2) Sedang yaitu memiliki harapan dan aspirasi tetapi tidak menerima manfaat langsung dari terwujudnya pengaturan pendistribusian air irigasi yang baik pada Daerah Irigasi Kampili

3) Rendah yaitu tidak memiliki harapan, aspirasi dan manfaat langsung atas terwujudnya pengaturan pendistribusian air irigasi yang baik pada Daerah Irigasi Kampili

b. Derajat pengaruh

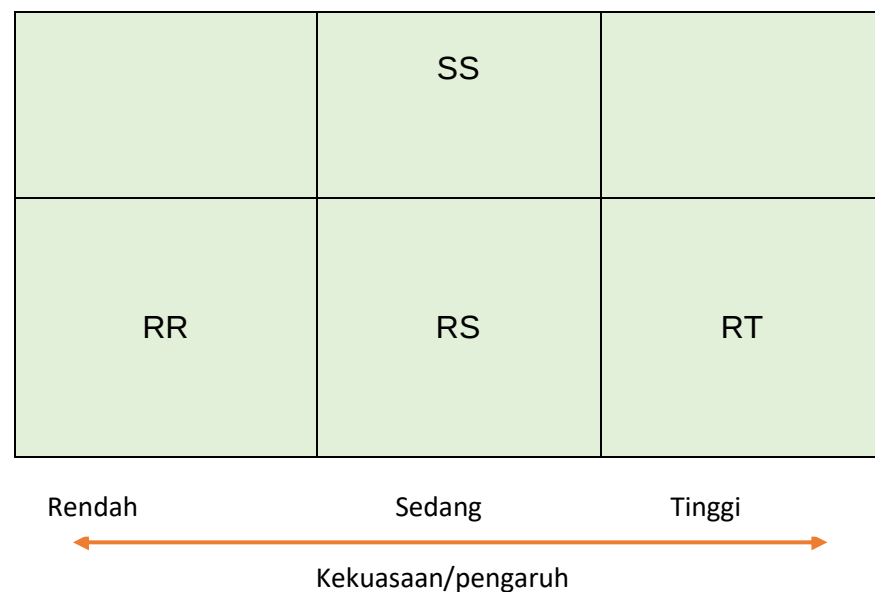
1) Tinggi yaitu memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan

2) Sedang yaitu memiliki kewenangan terbatas dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan

3) Rendah yaitu tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan mempengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan.

Adapun matriks yang digunakan dalam pemetaan *stakeholder* sebagai berikut:

K e p e n t i n g a n	Tinggi	TR	TS	TT
	Sedang	SR		ST



Gambar 4. Pemetaan *Stakeholder* berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan/Pengaruh (Matriks 3 x 3)

c. Analisis kontestasi

Pendekatan berorientasi aktor dari Bryant dan Bailey (1997) digunakan untuk mengeksplorasi lebih mendalam posisi dan peran, kepentingan, serta tindakan dari aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan irigasi.

Pengaturan pendistribusian air irigasi dan perebutan sumber daya air irigasi terdapat banyak *stakeholder*. Setiap *stakeholder*/aktor menjalankan perannya dan untuk mengetahui bagaimana peran dari setiap aktor yang terlibat dalam pengaturan pendistribusian air irigasi digunakan serta keterlibatan aktor lain di dalamnya. Maka dalam analisis ini akan digunakan adalah analisis aktor yang berkontestasi dalam

pengaturan irigasi untuk melihat pola kontestasi yang berlangsung (Foucault 1980; Salman 2012).

Pola kontestasi antara peran dan kepentingan serta kekuatan yang melekat pada setiap aktor dalam pengaturan air irigasi akan melahirkan kontestas sebagai berikut:

- a) *zero sum game* berlangsung ketika kebijakan/aturan aktor di dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada D.I. Kampili saling menghilangkan.
- b) hibridisasi berlangsung ketika terjadi kebijakan/aturan aktor dipadukan dengan kebijakan aktor yang lainnya dan melahirkan kebijakan/aturan yang baru dalam pengaturan pendistribusian air irigasi, dan
- c) koeksistensi berlangsung ketika terjadi kehadiran aktor secara bersama dalam kebijakan/aturan dalam pengaturan pendistribusian air irigasi dan kebijakan/aturan itu berjalan masing – masing.

G. Pengecekan Keabsahan Data Temuan

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi, pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, selanjutnya perlu dilakukan pengecekan dapat tidaknya ditransfer kelatar lain (*transferability*), ketergantungan pada konteksnya (*dependability*), dan dikonformasikan kepada sumbernya (*confirmability*).

Peneliti dalam melakukan pengecekan keabsahan data temuan, maka peneliti melakukan perpanjangan waktu di lapangan dengan melakukan penelitian enam bulan sebelum menyusun proposal, kemudian kurang lebih setahun lebih dalam mendalami kondisi lapangan, informasi yang peneliti terima dari semua informan yang ada dicatat dalam catatan harian, kemudian berulang kali kembali ke lapangan menemui informan tentang hasil wawancara sebelumnya, kemudian mencari informasi terkait dengan informan yang lain, hadir dalam kegiatan rapat komisi irigasi dan mendengarkan informasi dari informan sebelumnya apakah menyampaikan permasalahan yang sama pada saat wawancara terpisah, kemudian melakukan pertemuan terpisah dari masing – masing lembaga, baik lembaga operator irigasi dan lembaga petani. Kemudian mempertemukan kembali informasi yang sudah dikumpulkan, selain itu peneliti juga mencari informasi ke peneliti dan LSM yang pernah melakukan penelitian dan pendampingan di Daerah Irigasi Kampili, melakukan wawancara dan mengambil hasil penelitian sebelumnya kemudian mencocokkan informasi yang telah diperoleh dengan temuan sebelumnya. Peneliti berhenti melakukan pengumpulan data setelah data yang ada sudah jenuh, artinya informasi yang peneliti terima dari informan sudah menyampaikan hal yang sama pada pertanyaan yang sama.

BAB IV

GEOGRAFI, IKLIM, DAN KONDISI PENGAIRAN KABUPATEN GOWA

A. Geografi dan Iklim Kabupaten Gowa

Secara administrasi Bendung Kampili terletak di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada posisi $5^{\circ}33' 6''$ - $5^{\circ}34' 7''$ LS dan $12^{\circ}38' 6''$ - $12^{\circ}33' 6''$ BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, serta Bantaeng, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Luas wilayahnya yaitu 1.883, 33 m² dengan tofografi

berupa perbukitan, pegunungan, lembah, dan sungai. Luas wilayah dataran tingginya yaitu 72,26% (BPS Kabupaten Gowa, 2017).

Kabupaten Gowa memiliki banyak sungai yang dijadikan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat. Nama sungai, jumlah, panjang sungai, dan luas daerah aliran sungai dapat di lihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Nama Sungai, Panjang, dan Luas Sungai di Kabupaten Gowa

No	Nama Sungai <i>River Name</i>	Panjang Sungai <i>Lenght</i> (km)	Luas Daerah Aliran Sungai (Km ²)
1	Jeneberang	90	881,00
2	sapaya	21	9,00
3	Pa'bundukang	60	38,00
4	Bikampang	12	6,40
5	Lembaya	30	6,10
6	Koccikang	21	4,25
7	Tanru Rusa	12	15,60
8	Sicini	7	8,40
9	Batang Kaliki	12	18,50
10	Takapala	12	6,10
11	Je'nelata	30	226,00
12	Passosokia	19	17,50
13	Pallappakang	23	28,00

14	Malino	45	36,00
15	Cadika	48	36,00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Gowa, 2017

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa sungai Jeneberang merupakan sungai terpanjang dari 15 sungai yang ada dengan panjang 90 km dan luas daerah aliran sungai yaitu 881 km². Terpanjang kedua yaitu sungai Pa'bundukang dengan panjang 60 km dan luas daerah aliran sungai yaitu 38 km² dan sungai terpendek yaitu sungai Sicini dengan panjang 7 Km dan luas daerah aliran sungai yaitu 8,40 km².

Selain sungai, terdapat pula Daerah Irigasi (D.I) sebanyak 6. D.I. tersebut memiliki potensi dan fungsional yang berbeda sehingga diperuntukkan untuk pemenuhan irigasi teknis. Adapun nama potensi dan fungsionalnya tertera pada Tabel 6.

Tabel 6. Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Gowa, 2017

No	Daerah Irigasi <i>Irrigation Areas</i>	Baku <i>Standart</i>	Potensi <i>Potency</i>	Fungsional <i>Functional</i>
1	Kampili	8.366,48	8.366,48	8.366,48
2	Bili – bili	2.369,00	2.369,00	2.369,00
3	Bissua	4.952,00	4.952,00	4.952,00
4	Senre	710,00	710,00	710,00
5	Pasosokia	400,00	400,00	400,00
6	Pa'ladingan	538,00	538,00	538,00
7	Lembaya	273,00	273,00	273,00
8	Birampang	250,00	250,00	250,00
9	Pedesaan	19.058,67	19.058,67	19.058,67

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Gowa, 2017

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa terdapat sembilan Daerah Irigasi. Tiga diantaranya memiliki sumber air yang berasal dari Bendungan Bili-bili, yaitu Daerah Irigasi Kampili, Bissua, dan Bili-bili. Dua diantaranya dikelola oleh pusat, yaitu D.I. Kampili dan Bissua karena memiliki daerah areal pelayanan lebih dari 3.000 hektar. Sedangkan D.I. Bili-bili pengelolaannya oleh Provinsi Sulawesi Selatan karena memiliki luas areal pelayanan 1000 - 3.000 hektar. Sementara tujuh D.I. lainnya dikelola oleh Kabupaten Gowa karena luas areal pelayanannya kurang dari 1000 hektar.

Jenis pengairan yang ada di Kabupaten Gowa terdiri dari: pengairan irigasi, tadah hujan, dan rawa pasang surut. Jenis pengairan yang digunakan setiap kecamatan berbeda. Adapun jenis pengairan yang digunakan terlihat Tabel 7.

Tabel 7. Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kab. Gowa 2017

No	Kecamatan	Jenis Pengairan (Type of Irrigation)		
		Irigasi	Tadah Hujan	Rawa Pasang Surut
1	Bontonompo	1.655	940	
2	Bontonompo Selatan	562	1.556	
3	Bajeng	3.112	153	
4	Bajeng Barat	1.425	45	30
5	Pallangga	2.680	58	
6	Barombong	1.539	111	
7	Sombaopu	1.067	81	
8	Bontomarannu	645	308	
9	Pattallassang	657	1.270	
10	Parangloe	446	583	60
11	Manuju	320	1.649	
12	Tinggimoncong	939	414	
13	Tombolo Pao	956	1.429	
14	Parigi	806	450	
15	Bungaya	1.446	492	
16	Bontolempangan	1.775	562	
17	Tompobulu	2.573	0	
18	Biringbulu	551	780	
		23.154	10.881	90

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Gowa, 2017

Berdasarkan Tabel 7 dijelaskan bahwa urutan jenis pengairan terluas yaitu: pengairan irigasi seluas 23.154 hektar, tadah hujan seluas 10.881 hektar, dan sawah dengan pengairan pasang surut seluas 90 hektar. Jika ditotal luas lahan sawah berdasarkan luas pengairan yaitu 34.125 hektar.

Dalam memperlancar pendistribusian irigasi dari bendungan hingga ke persawahan dibutuhkan sarana irigasi yang memadai. Adapun potensi irigasi serta sarana dan prasarananya tertera pada Tabel 8.

Tabel 8. Potensi Irigasi dan Sarana dan Prasarana Irigasi di Kabupaten Gowa, 2017

No	Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Dam	Bangunan	Saluran Pembawa (Km)	Saluran pembuang (km)	Tanggul banjir	Jalan inspeksi (km)
1	Kampili	8.366,48	1	275	110,43	32	21,30	7,70
2	Bili – bili	2,369	1	90	20,09	9,94	-	-
3	Bissua	4.952	1	169	74,46	17	-	12,05
4	Senre	710	1	1	10,30			
5	Pasosokia	400	1	1	5,10			
6	Pa'ladingan	538	1	3	4,86			
7	Lembaya	273	1	6	8,84			
8	Birampang	250	1	-	4,91			
9	Pedesaan	19.058,67	105	-	337,41			

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Gowa, 2017

Berdasarkan Tabel 8, dijelaskan bahwa terdapat sembilan daerah irigasi yang memiliki luas pelayanan yang berbeda dengan dam dan saluran pembawa masing-masing. Akan tetapi untuk bangunan hanya tujuh D.I. saluran pembuang hanya dimiliki oleh tiga D.I. yaitu: Kampili, Bissua, dan Bili.bili. Tanggul banjir hanya dimiliki oleh D.I. Kampili. Jalan inspeksi dimiliki D.I. Kampili dan Bissua. Terdistribusinya irigasi dengan baik sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang baik secara kuantitas dan kualitas serta.

BAB V

POLA PEMANFAATAN AIR IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI KAMPILI

A. Sungai Jeneberang dan Bendungan Bili - Bili

Sungai Jeneberang merupakan sungai legendaris dari 15 sungai besar yang ada di Kabupaten Gowa. Hulunya berasal dari Gunung Bawakaraeng, mengalir sejauh 90 km dengan luasan (*cover area*) pengalirannya 727 km², membelah wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara antara Barombong dan Tanjung Bayang. Sungai Jeneberang sering meluap saat musim hujan pada bulan Desember sampai Januari. Kondisi yang paling parah terjadi pada tahun 1976 dimana hampir 2/3 Kota Ujung Pandang (Makassar) tergenang. Genangan ini berasal dari meluapnya air sungai Jeneberang di daerah bagian hilir jembatan Sungguminasa dan drainase Sinrijala, Jongala, dan Panampu. Berbeda

halnya pada musim kemarau, Sungai Jeneberang tidak mampu memenuhi kebutuhan irigasi dan air minum masyarakat.

Sungai Jeneberang merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat, baik sebagai sumber air minum maupun pertanian terutama di Kabupaten Gowa, Takalar dan Kota Makassar. Sungai ini sering meluap pada musim hujan yang dapat menimbulkan malapetaka bagi penduduk sekitar. Dengan kondisi tersebut, sehingga Bendungan Bili-bili dibangun dengan tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum, mengatasi banjir, pembangkit tenaga listrik, kebutuhan air irigasi dan rekreasi.

Bendungan Bili – bili berada dalam wilayah DAS Jeneberang yang merupakan salah satu DAS prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 1984, No. 059/Kpts-II/1985 dan No. 124/Kpts/1984.

DAS Jeneberang berdasarkan wilayahnya dapat dibagi atas: *upper watersheed* (bagian Hulu), *middle watersheed* (bagian Tengah), *lower watersheed* (bagian Hilir) dengan luas keseluruhan seluas 784,80 km².

Adapun aliran Sungai Jeneberang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Sungai Jeneberang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

Akibat karena kerusakan sumber air di hulu Sungai Jeneberang yang dahulunya memiliki debit air $2.200 \text{ m}^3/\text{detik}$, sekarang hanya tinggal $1.200 \text{ m}^3/\text{detik}$ (Anonim, 1999). Alokasi pemanfaatan air irigasi adalah untuk keperluan air minum dan kebutuhan industri sebesar $3.300 \text{ liter/detik}$, dan pembangkit listrik tenaga air sebesar $16,30 \text{ MW}$ dan sisanya untuk keperluan irigasi bagi tiga daerah irigasi yaitu Bili-bili, Bissua, dan Kampili yaitu sebesar 24.585 ha pada musim hujan dan 19.540 ha pada musim kemarau (Anonim, 1999).



Adapun gambar Bendungan Bili-bili terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Dam Bili – bili di Kabupaten Gowa, 2016

Daerah yang diairi oleh masing – masing bendung tersebut sebagai berikut:

- 1) Bendung Bili-bili, mengairi lahan persawahan di Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Somba Opu, dan Makassar;
- 2) Bendungan Bissua, mengairi lahan persawahan di Kecamatan Pallangga, Bontonompo Selatan, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Pallangga, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa serta Kecamatan Galesong Utara, Polongbakeng Utara Kabupaten Takalar; dan
- 3) Bendung Kampili, mengairi lahan persawahan di Kabupaten Gowa meliputi Pallangga, Bajeng, Barombong, Bontompo, Kabupaten Takalar meliputi Kecamatan Galesong Utara, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

B. Bendung Kampili

Bendung Kampili merupakan bendung tertua diantara Bendung Bissua dan Bili – bili. Dibangun pada jaman Pemerintahan Belanda tahun 1930, sedangkan Bendung Bissua dan Bili–bili dibangun oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Jepang Tahun 2004. Bersamaan dengan dibangunnya kedua bendung tersebut maka Bendung Kampili juga direhabilitasi. Adapun gambar Bendung Kampili dapat di lihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Bendung Kampili Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

Daerah Irigasi Kampili memiliki 1 saluran induk, 17 bangunan primer, 35 saluran sekunder, 215 saluran tersier. D.I. Kampili juga didesain untuk mengairi sawah seluas 10.545 hektar (JICA, 2004; BBWS, 2017). Air yang berasal dari Bendung Kampili diperuntukkan untuk kebutuhan air bersih PDAM Limbung dan Limbung Mas Indah (perikanan) yang ada di Kecamatan Bajeng.

Pada awalnya daerah ini didesain untuk mengairi lahan persawahan seluas 10.545 hektar tetapi karena pesatnya alih fungsi lahan sehingga lahan yang dapat diairi tersisa 8.366,48 hektar (BPS, 2017). Data ini berbeda dengan yang ditemukan oleh (Rampisela *et al.*, 2016) seluas 9.106,30 hektar. Hal ini disebabkan karena dalam perhitungan Rampisela dimasukkan pelayanan yang diberikan ke Kecamatan Galesong Utara dan Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sedangkan dalam perhitungan BPS area tersebut tidak dimasukkan.

Hasil wawancara dengan POB Bendung Kampili

“Sebenarnya kemampuan pelayananan D.I Kampili 10.545 hektar, tetapi lahan yang ada sekarang itu sudah berkurang karena adanya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan tidak produktif seperti untuk perumahan. Jadi andaikan petani itu mau diatur, maka air itu akan cukup untuk mengairi semua lahan. Karena kalau tidak salah sisa delapan ribuan lebih, akan tetapi karena petani tidak mau diatur, jadi biar air banyak tidak akan pernah cukup, disebabkan ada yang menutup saluran kemudian mereka mengairi lahannya sawahnya. Kemudian kalau penuhmi akan terbuang percuma ke sungai karena tidak dibuka lagi penutupnya sehingga sawah yang lainnya tidak mendapatkan air”

Pendistribusian air pada tingkat bendung dilakukan oleh Petugas Operasional Bendung (POB) yang bertugas mendistribusikan air dari bendung ke saluran primer. Jumlah air yang diberikan didasarkan pada hasil keputusan rapat Komisi Irigasi atau permintaan dari BBWS melalui Pengamat dan Juru Primer, serta mempertimbangkan kondisi kesediaan air sungai. POB terkadang mendistribusikan air tidak sesuai dengan permintaan karena ada faktor lain, seperti pernyataan POB berikut:

“Seharunya pintu air dibuka 100 cm masing – masing pintu, akan tetapi karena ada kondisi di saluran yang rusak maka percuma saja semua pintu air saya buka karena tidak ada gunanya, apalagi kalau itu terjadi di saluran di hulu, karena air juga akan terbuang percuma kembali ke sungai, adanya sampah dan bobolan di bangunan-bangunan. Selain itu jika terjadi kecelakaan di saluran maka saya harus menutup pintu bendung. Akan tetapi jika dalam situasi normal saya selalu membuka pintu air sesuai dengan debit air di sungai”.

Air dari bendung dialirkan ke saluran induk atau saluran primer yang merupakan batas tanggungjawab POB kemudian diambil alih oleh petugas operator irigasi saluran primer yaitu Juru Primer, Petugas Pintu Air (PPA) Primer, dan Petugas Saluran Primer. Kondisi batas bendung dan saluran primer terlihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Pintu Pembuang, Penguras Lumpur dan Pintu Saluran Induk (Primer) Daerah Irigasi Kampili

C. Bangunan Pembagi Pertama (BL 7)

Setelah air masuk ke saluran induk D.I. Kampili, bangunan pertama yang akan dituju adalah BL1 yang merupakan pintu primer yang langsung membagi kesaluran tersier (bangunan sadap). Selain BL 1, terdapat bangunan lain yang diberi nama BL 1a. seperti: 1) Jembatan

penyemberangan hewan dan oleh manusia; 2) bangunan pelimpah yang berfungsi jika air berlebih di saluran kemudian keluar atau melimpah; 3) bangunan pemasuk dan pembuang air yaitu bangunan yang memasukkan air kembali ke saluran yang berasal dari sungai dan sebaliknya.

Pemberian nama disesuaikan dengan keberadaan bangunan itu sendiri. Diberi nama BL 1a, BL 1b dan BL 1c karena bangunan tersebut berada di bagian Bangunan Limbung 1 sebagai bangunan utamanya.

Petugas yang bertanggungjawab pada saluran primer yaitu Juru Primer, memiliki tugas mengawasi operasi dan pemeliharaan saluran primer atau saluran induk mulai BL 1 sampai BL 17. Tugas Juru Kampili yaitu 1) menjaga kondisi saluran tetap dalam kondisi bersih; 2) sistem pendistribusian air berjalan sesuai dengan kebutuhan; 3) memfasilitasi kebutuhan air petani, dan 4) mengontrol PPA primer dalam operasi dan pemeliharaan pintu-pintu air yang ada pada saluran primer. Adapun saluran induk/primer Kampili dapat di lihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Saluran Induk (primer) pada wilayah Hulu Daerah Irigasi Kampili

Selain pintu air resmi yaitu pintu air yang terdapat pada skema jaringan irigasi D.I. Kampili terdapat juga pintu air yang tidak berada di dalam skema itu yaitu pintu air yang berada antara BL 2 dan BL 3 yang keberadaannya mengairi lahan persawahan yang terdapat di areal pelayanan D.I. Bissua dengan jalan menggunakan pompa air sebanyak 4 buah. Keberadaan pompa ini merupakan salah satu penyebab berkurangnya air pada saluran primer D.I. Kampili.

Pengambilan air secara ilegal ini terus berlangsung tanpa mendapatkan sanksi sehingga menjadi permasalahan tidak terdistribusinya air secara baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahman (1999), mengatakan bahwa tidak terdistribusinya air secara adil dan merata disebabkan karena adanya penyadapan air secara liar diperjalanan yang berlanjut tanpa sanksi.

BL 7 berada di hulu D.I. Kampili yang memiliki pintu bagi ke saluran Sekunder Pallangga dan Sekunder Jatia. Selain kedua saluran sekunder tersebut terdapat pula pintu saluran tersier yang masih dioperasikan walaupun pintu ini tidak masuk dalam skema jaringan D.I. Kampili tetapi masuk skema jaringan D.I.Bissua. Hal ini disebabkan karena tidak mendapatkan air dari saluran Bissua sehingga harus mengambil dari saluran Kampili.

Kondisi saluran pada bangunan bagi BL 7 dapat di lihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Bangunan Pembagi (BL 7) Daerah Irigasi Kampili

PPA BL 7 membuka pintu saluran tersier karena petani mempunyai hak untuk memperoleh air. Sumber daya air yang digunakan sebelumnya berasal dari D.I. Kampili dan bukan atas keinginannya untuk di pindahkan ke D.I. Blissua. Hal ini bisa memicu konflik sehingga PPA Primer tetap memberikan air atas persetujuan Juru Primer. Pertimbangannya, jika diberikan atas sepengetahuan PPA Primer pengambilannya bisa terkontrol dan dibuatkan jadwal. PPA tetap harus hati-hati membagi air ke pintu-pintu yang ada karena BL 7 adalah pusat semua pintu. Pembagian yang baik tidak dapat terjadi jika BL 7 tidak diatur dengan baik.

Jumlah air menurut PPA Primer cukup untuk digunakan sampai ke hilir jika jadwal tanam diikuti. Aturan jadwal tanam yang berlaku yaitu mendahulukan bagian hilir, kemudian bagian tengah, dan terakhir di hulu. Akan tetapi biasanya petani di hulu dan tengah tidak memperhatikan

jadwal tersebut karena ketika melihat air sudah ada mereka langsung meminta kepetugas dibukakan pintu air.

Persoalan pembagian air sangat kompleks disebabkan karena 1) ketidakpatuhan petani di wilayah hulu dan tengah mengikuti jadwal tanam yang mendahulukan wilayah hilir, 2) petani di luar skema jaringan tetap memanfaatkan sumber daya air yang berasal dari D.I. Kampili, dan 3) petugas irigasi memberikan air kepada petani yang tidak berhak dengan pertimbangan menghindari konflik, dan 4) ketidakpatuhan sebagian petani terhadap pola tanam yang ada.

Seorang petani (R) yang sawahnya berada di daerah hulu menyatakan:

“Masa na nisuruhki attayang je’ne, ampa nia mangka je’ne ridalekangta, jai poeng je’ne, masa anjo tu bellayya na nibolikang ampa katte nalaloiki je’ne, ampa belum tentu anjo jeneka amotereki mae rikatte punna le’ba di sareang anjo bellayya. Baji kangngangi antu kau ricua punna kamma anjo bagen, ampa singkammajaki para petani ero ngasengjaki ri je’ne, punna timoro, punna barat iyya ampa bosu terus, tongkomi karna banjirji poeng punna tanisungke”

“Masa kami disuruh menunggu air sementara air sudah ada dan jumlahnya banyak di depan kami. Masa yang jauh mau diberikan dan belum tentu juga akan kembali ke kami. Lebih baik kami ribut kalau begitu. Jika musim kemarau, kita semua butuh air kecuali musim hujan tidak perlu ada kekhawatiran. Kami tidak ingin berbagi kalau kami belum cukup, kalau memang kami tidak kebagian yang lain juga tidak kebagian”.

Pernyataan petani tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk tidak menunggu giliran mereka mendapatkan air dan berusaha mendapatnya di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Hal ini

menjadi salah satu penyebab tidak terdistribusinya air secara baik di D.I. Kampili.

Petugas BL 7 harus mendistribusikan air di bangunan secara baik, bukan hanya mempertimbangan kondisi lahan yang ada di sekitar tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan petani. Petugas irigasi harus ahli dalam menjalankan tugas dan fungsinya pengaturan air secara dapat lebih adil. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kubota dan Rampisela (2016) yang mengatakan bahwa dalam proses pengaturan air dibutuhkan SDM, etika dan kemampuan manajemen air yang tinggi untuk membaginya dengan adil dan cukup.

D. Bangunan Pembagi Kedua (BL 14)

BL 14 merupakan bangunan bagi untuk saluran sekunder yang berada di daerah tengah. Akan tetapi sebelum BL 14 ini terdapat bangunan bagi untuk keperluan PDAM Limbung.

Menurut Petugas Pintu Air BL 14 keberadaan PDAM ini sebenarnya membuat jumlah air yang masuk BL 14 berkurang karena sebelumnya sudah diambil oleh PDAM walaupun di luar jadwal pengambilannya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan PPA Primer BL 14 sebagai berikut:

“itu PDAM tidak ada sumbangsihnya terhadap saluran irigasi atau Bendung Kampili. Jangankan sumbangsih jika sampah tertumpuk di saluran mereka tidak ada yang mau bekerja sama, padahal jika sampah numpuk di saluran, pintu saluran harus dibuka dan kalau dibuka maka PDAM tidak akan kebagian air.

BL 14 membagi ke saluran Sekunder Timpopo, Kalukuang, Doang. Dari ketiga saluran sekunder tersebut terdapat dua saluran sekunder yang membagi yaitu: 1) saluran sekunder Doang membagi ke sekunder Pattarungang, Balla Tabbua, Tompo Balang, dan Moncobalang; 2) sekunder Kalukuang terdapat 15 bangunan (BK 1 – BK 15), kemudian sekunder kalukuang selain bangunan sadap terdapat pula bangunan bagi yaitu pada BK 4, membagi ke sekunder Bone dan Labbakka, BK 7 membagi ke sekunder Parapa, BK 8 membagi ke Sekunder Boka dan Sekunder Panciro, BK 12 membagi ke Sekunder Cilallang dan Bontomanai, BK 14 dan 15 merupakan bangunan yang ke Makassar akan tetapi pintu ini hampir tidak pernah memperoleh air pada musim kemarau.

Di wilayah BL 14 terdapat terdapat GP3A Assamaturu dengan luas wilayah 829,80 hektar; GP3A Kalukuang dengan luas areal 1257,70 hektar; GP3A Galesong Utara dengan luas areal 1.210,26 hektar; GP3A Passe'reanta dengan luas 1.144,20 hektar; dan GP3A Tubarania dengan luas area 133,10 hektar. Adapun bangunan bagi BL 14 dapat di lihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Bangunan Pembagi (BL 14) Daerah Irigasi Kampili



E. Bangunan Pembagi Ketiga (BL 17)

BL 17 merupakan bangunan pembagi untuk saluran sekunder yang ada di daerah hilir. Bangunan ini memperoleh air dari saluran pembawa bangunan Sekunder Doang. Bangunan ini pertemuan D.I. Bissua yang berasal dari timur, dan D.I. Kampili berasal dari utara. D.I Bissua menuju ke barat dengan menggunakan saluran besar, kemudian air dari D.I. Kampili dari utara itu menuju ke selatan dengan melalui saluran gorong - gorong kemudian melimpah ke selatan dengan menggunakan gorong-gorong yang bentuknya cekung yang disebut bangunan sipong. Pada BL 17 terdapat tiga pintu pembagi, yaitu ke sekunder Pammase, Borong Boddia, dan Bontolangkasa.

Wilayah BL 17 terdapat GP3A Sirannuang dengan luas daerah irigasi 563,10 hektar, GP3A Paraikatte dengan luas daerah irigasi 536,10 hektar dan GP3A Sipakainga 823,24 hektar. Jenis komoditi yang ditanam yaitu padi, jagung dan kacang hijau. Lahan persawahan di Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat, dan Bontonombo, selain memperoleh air dari Daerah Irigasi Kampili juga memperoleh air dari Irigasi Bissua. Adapun gambar dari BL 17 dapat di lihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Bangunan Pembagi (BL 17) Daerah Irigasi Kampili

F. Pola Tanam

Ketersediaan air di lahan persawahan petani merupakan faktor utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Kondisi ini tentunya membutuhkan pelayanan sistem irigasi yang baik mulai dari hulu hingga ke hilir. Pendistribusian air ini sangat mempengaruhi pengaturan pola tanam yang ada. Adapun pola tanam pada daerah irigasi Kampili yang direkomendasikan berdasarkan ketersediaan air pada Bendungan Bili-bili yaitu padi- padi - palawija. Adapun pengaturannya sebagai berikut: 1) Musim rendeng atau tanam pertama bulan Oktober-Maret diperuntukkan untuk tanam padi pertama, 2) musim gadu I atau tanam padi kedua pada bulan April-Juli, dan 3) musim gadu II atau tanam ke tiga untuk palawija pada bulan Agustus-September.

Pengaturan pola tanam yang dibuat Dinas PU dikenal dengan nama OKMAR (Oktober Maret), ASEP (April September). Dengan pola tanam ini yaitu dua kali pertanaman padi dan sekali palawija atau bera sesuai dengan ketersediaan air di Bendungan Bili-bili. Musim tanam ke tiga diperuntukan untuk palawija karena selain waktu tanam yang singkat dan memberikan kesempatan kepada lahan untuk istirahat, hal ini juga disebabkan karena jumlah air yang tersedia untuk irigasi sedikit dan diperuntukkan untuk PDAM. Jumlah air yang diberikan pada gadu 1 berkisar antara 18 – 27 kubik/detik. Sementara pada musim ketiga di bawah dari jumlah tersebut sehingga tidak cukup untuk digunakan menanam padi.

Wawancara dengan Juru Sekunder Jatia “

Pengalaman saya selama ini, jika petugas Bendungan Bili – bili hanya membuka atau memberikan air ke sungai kalau hanya 18 m³/detik maka kami tidak akan cukup air, jangankan di BL 17, di BL 7 saja kadang tidak cukup, akan tetapi jika petugas Bendungan Bili – bili membuka pintu air dengan 23 -25 m³/detik, maka kondisi air sudah aman untuk digilir”

Sistem pendistribusian air dimulai dari hasil rapat yang ada di P3A kemudian di bawah ke GP3A untuk disampaikan dalam rapat Komisi Irigasi untuk memutuskan tentang jadwal pendistribusian air dan jadwal tanam yang kemudian dimintakan persetujuan dari BBWS. Hasilnya disampaikan kepada petugas Bendungan Bili – bili yang akan mengalirkan air ke sungai kemudian ke Bendung Bili – bili, Bissua, dan Kampili.

Rencana pengairan dan pola tanam tidak sepenuhnya terlaksana karena petani dibeberapa lahan yang dekat dengan sumber air, dan

mendapatkan bantuan dari dinas pertanian berupa benih dan pompa melakukan penanaman padi tiga kali sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara petani dengan petani, petani dengan petugas irigasi.

Wawancara dengan Juru Sekunder

“Sebenarnya kami itu tidak mengenal namanya gadu 2 karena untuk bulan Agustus – September yang waktunya memang singkat dan jumlah air di sungai kecil. Memang seharusnya Agustus – September itu untuk palawija. Khan Oktober – Maret itu untuk tanam padi kemudian April – Juli itu untuk padi kedua dan untuk Agustus – September itu untuk palawija. Jadi pola tanam yaitu padi – padi – palawija. Padi gadu itu adalah padi yang ditanam pada musim kemarau dan padi rendengan itu ditanam pada musim hujan. Padi gadu itu hanya bisa ditanam pada lahan sawah yang irigasinya baik atau dekat dari sumber air”.

Pernyataan dari petugas irigasi berbeda dengan keinginan dari Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, seperti hasil wawancara berikut:

Wawancara Kepala Bidang Tanaman Pangan

“Setelah panen dibulan Agustus maka ada lagi musim kedua yaitu bulan September – Desember. Seharunya pada bulan Agustus – September itu tanaman palawija atau bera (istirahat). Tapi petani tetap menanam padi karena airnya dari bendung atau pompa. Kita (Dinas Pertanian) memang banyak menggunakan pompa untuk penanaman gadu dua, untuk tanam padi atau palawija. Tidak semua juga lahan dapat ditanami padi, tapi Dinas Pertanian memang punya program (LTT Padi) Luas Tambah Tanam Padi, supaya ada penambahan luas produksi, ada penambahan luas tanam, sehingga jika bertambah tanam akan bertambah produksi terjadi peningkatan pendapatan petani. Inimi terjadi di bulan September. Masalah PSDA tentang air yang memang kalau bukan BOS nya yang minta dibuka mereka juga tidak mau buka, makanya kita selalu juga koordinasi, tapi sepanjang koordinasi ada di kabupaten, itu juga penjaga air tidak ada masalah. Kalau ada air di bendungan maka kita biasanya meminta walaupun masih ditunjang dengan pompa. Kita di Gowa itu mengenal istilah IP300, artinya dalam setahun tiga kali tanam. Seperti tanaman padi, jika irigasi teknis, kami mengharapkan tiga kali. Makanya ada rencana pemerintah Kabupaten Gowa mau

kembarkan itu Dam Bili – bili, mau dibuat satu lagi bendungan. Dibuat khusus petani atau masyarakat Kabupaten Gowa. Karena di Gowa ini banyak bendungan tapi bukan khusus petani Gowa yang nikmati, seperti nanti jenelata, juga Gowa, tapi nanti airnya juga untuk petani di kabupaten lain.

Rampisela *et al.*, (2016) telah melakukan penelitian pada GP3A Sirannuang dan menemukan bahwa pada musim tanam pertama atau rendeng yaitu 100,0% sawah ditanami padi, kemudian pada musim tanam kedua yaitu musim kemarau atau gadu 1 lahan sawah yang ditanami 70,18% ditanami padi, dan musim tanam ke tiga atau gadu 2 hanya 2,53% lahan sawah ditanami padi.

Di Daerah Irigasi Kampili pada musim kemarau tidak semua petani menanam padi dengan menggunakan air yang berasal dari saluran yang ada tetapi menggunakan air irigasi pompa, baik sumber airnya berasal dari sungai atau langsung dari saluran distribusi atau pompa air tanah.

Hasil wawancara dengan juru sekunder Jatia

“Sikedeki siberangi karna persoalan je’ne, nia petani bella tananah tena na gappa jene, ampa anjo petani amani – mania ri salurangga anggapai, jari larro anjo petani tenayya na gappa, angngapana mae na buang jeneka naung ribinangayya, ampa nagana apuliki ta’kala tenaki nia agappa jene’, annemi na si bambangi sikedeki siberangi, maraengi poeng anjo alamunga tiboang anjo ammania battu ri saluranga niaka jenena, ampa anjo petani bellayya alamungi ase’ nia ero je’ne nia tea’ jene karna anjo tiboanga teami jene, ampa anne alamunga ase’ eroki je’ne, ampa anne alamunga tiboang teai dilalaoi tanana, jari abeseremi seng”.

“Petani hampir saling parang, karena persoalan air, ada petani yang lahannya jauh dari saluran tidak kebagian air, kemudian petani yang dekat dari saluran memperoleh air, maka petani yang jauh tersebut membuang air ke sungai, dengan alasan tidak ada kalau ada yang memperoleh air ada yang tidak kebagian, sementara sama – sama membutuhkan. Tapi ada juga

petani yang menanam kacang hijau dengan yang menanam padi, yang dekat dari saluran sudah tidak mau lahannya dilewati air, sementara yang sawahnya jauh dan menanam padi menginginkan air, ini juga konflik sesama petani persoalan air lagi”.

Hasil wawancara dengan petani “B” (yang dekat dari saluran air)

“Ikatte anne petaniyya punna aciniki jene iyya pasti eroki alamu ase, karna punna nia jene angapa na tipoang nanilamung, karna asseyya niparalluangi,ni karre ikatte anne mae, jari punna nia jene alamuki ase punna parallui nikompai poe, apalagi dinas pertanian na suruhmakaki alamung ase, nasareki poeng bantuang kompa supaya digunakanki jene tanah punna kurangi jene risaluranga”

“Hasil wawancara dengan petani “B” mengatakan bahwa kami petani jika melihat air pasti ingin menanam padi karena kalau ada air, kenapa harus tanam kacang hijau, karena padi itu lebih penting ditanam dibandingkan dengan palawija, karena kalau padi lebih menguntungkan, kemudian dinas pertanian juga mengharapkan kita tanam padi, bahkan mendapatkan bantuan alat pompa untuk mengatasi air kalau terjadi kekurangan di saluran”.

Hasil wawancara dengan petani “M” (jauh dari saluran air)

“Pore katte anjo tuniaka tanahna ri biring aganga apalagi niya salurang je’ne, punna parallu na kompai anjo niaka kompa nauang risaluranga, biasa poeng na bangkai anjo salurang jeneka, jari katte anne tanahta belai battu ri saluranga tenamo kinggappa jene, biasa tongang anjo katte laroki ingka naniapami, karena sikodi kodiki punna kamma anne, jari manna tiboang nilamung susahjaki rijene karena tena nanagappaki katte tulalanga tanahta. Iyami anjo na leba’ kenanga ero siberangi punna nia tungowa dudu jene, na kaluppaiki katte. Jari memang parallui anjo petugaska angatoro baji – baji pembagian jeneka untuk petani khususna punna timoro, karena punna bara’ ta liwa – liwaki jeneka, bahkan nibuangji naung rikaloranga kateajaki jene.

Petani tersebut mengatakan bahwa petani di dekat saluran sangat beruntung karena melakukan penanaman 3 kali sedangkan mereka yang jauh terlambat bahkan kadang tidak ada sama sekali, air hanya sampai

jika musim hujan itupun banjir sementara untuk gadu I dan gadu II kesulitan air. Hal ini terjadi karena petani di bagian tengah yang gampang memperoleh air terlebih dahulu menanam, kemudian pada musim gadu II banyak yang tanam padi sehingga air yang ada hanya terpakai pada daerah tengah ini.

Wawancara dengan Juru D.I. Kampili

Sebenarnya masalah besar terjadi itu dimusim kemarau yang seharusnya peruntukan untuk tanam palawija tapi dinas pertanian memaksakan untuk menanam padi yang disebut oleh dinas gadu 2, ini sebenarnya karena kesediaan air di sungai memang kurang, jadi untuk mendistribusikan air keseluruh petani yang ada di Daerah Irigasi Kampili tidak cukup untuk tanam padi akan tetapi hanya cukup untuk palawija, ini sangat sering terjadi konflik di petani, petani ada yang lahannya tidak ingin dilewati air kalau dia tanam palawija, sementara ada petani yang tanam padi dan butuh air, sehingga ini juga membuat saya pusing dengan kondisi ini, lain lagi jika petani yang di dekat saluran ingin tanam padi, maka otomatis air tidak akan sampai ke lahan yang lainnya, karena kebutuhan air akan lahans sawah yang tanam padi sangat banyak sehingga lahan lainnya tidak kebagian, sebenarnya ini masalahnya di petani akan tetapi dia didukung oleh dinas pertanian yang programnya untuk peningkatan hasil produksi padi.

Wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Pertanian Gowa

“Untuk mendukung program pusat swasembada beras, maka kami memberikan bantuan pompa dan benih untuk menggenjot tanam ketiga untuk padi, kalau ada air sungai maka kami yang langsung minta ke Balai untuk bisa dialirkan supaya petani bisa menanam, kan jumlah lahan semakin berkurang sehingga untuk menambah hasil produksi maka yang harus dilakukan adalah tambah tanam, artinya digunakan untuk tanam ketiga, jadi tidak ada lagi boro”.

Sistem pembagian air yang diberikan untuk tanam palawija di gadu II menyebabkan konflik antara petani, adanya kecemburuan sosial antara petani yang memperoleh air dengan petani yang tidak memperoleh air,

lain lagi dengan persoalan petani yang lahannya ditanami palawija, kemudian lahan yang lainnya menanam padi, ini juga bisa menimbulkan konflik karena yang menanam palawija sudah tidak butuh air sementara petani yang tanam padi membutuhkan air untuk padinya sehingga menimbulkan konflik karena persoalan ketidakseragaman penerapan pola tanam yang sudah ada.

Pendistribuan air musim ke tiga bagi PSDA adalah untuk tanaman palawija karena jumlah air yang ada di sungai jumlahnya sedikit selain irigasi diperuntukan untuk PDAM, sedangkan untuk kebutuhan air yang diberikan hanya 60% dari jumlah yang diberikan pada gadu I, sehingga kalau semua petani ingin menanam padi maka air tidak akan mencukup sehingga diharuskan bagi petani untuk menanam palawija. Adanya bantuan dari dinas pertanian dan keinginan petani yang merasa aman jika menanam padi yang merupakan makanan pokoknya dapat memicu konflik diantara petani.

Wawancara dengan Pengamat D.I. Kampili

Sebenarnya tanam ketiga itu diperuntukan untuk tanam palawija akan tetapi petani tidak bisa melihat air, begitu melihat air maka langsung mau tanam padi, inimi biasa konflik antar petani, berapa kalimi kukasih tau tidak cukupki itu air di lahanta kalau tanam padi ki tapi tidak na peduli, ini juga yang biasa merusak bangunan, karena tidak ada air dari pintu legal, maka na bukaki pintu ilegal atau membobolki, lihatki itu saluran yang ada dari BL 7, dari BL 14 jaina antu bobolan, itu disengaja dilakukan petani kalau musim tanam ke 3, ini juga biasa berkelahi sama petani kalau ada yang tidak mau air tapi lebih banyak yang mau air, selain sesama petani sesama petugas pintu air juga, sesama juru bahkan sama saya juga pernah saya larang tapi marahki”

Seharusnya pendistribusian air irigasi didasarkan atas keputusan hasil rapat Komisi Irigasi akan tetapi pelaksanaan rapat komisi kadang terlambat sehingga pendistribusian tidak lagi berdasarkan hasil keputusan rapat Komisi Irigasi akan tetapi diberikan berdasarkan permintaan petani melalui lembaga petani (IP3A) sesuai dengan kutipan hasil wawancara berikut:

Wawancara dengan Juru Primer

“Komisi irigasi juga kacau masa sudahmi orang tanam di petani barupi rapat komisi irigasi tahun 2015 itu, jadi kacau karena aturan tidak berjalan baik dipetani juga di pemerintah. Padahal itu harusnya rapat komir dulu baru mengalir air dan tanam, tapi tidak berjalan. Jadi saya biasaya ,minta sama POB buka pintu sebelum rapat komir karena lambat duduip rapat ampa petani teriakmi mau tanam, karena kapang ditunggu rapat aiii lambatki orang tabur benih, sudah 2 minggu dibuka pintu baru di rapat komir”

Hal yang sama juga disampaikan bapak Ketua IP3A”

“Komisi itu hanya 2 kali dalam setahun dan disitu memutuskan jadwal tata pola tanam termasuk membicarakan hal apa yang terjadi dalam setahun, jadi sebenarnya rapat Komisi Irigasi itu adalah rapat koordinasi, tetapi ada keputusan yang dibuat rekomendasi tentang jadwal tata pola tanam. Komisi itu diketua oleh wakil bupati, ketua hariannya adalah Bappeda, sekretaris PSDA, anggotanya adalah Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Kepolisian, PG3A dan LSM, inilah yang rapat” khan harusnya begitu rapat komir itu duluan baru pengaliran air, tapi untuk tahun ini itu tidak berjalan, karena kami sudah hambur benih komisi belum rapat, ini terjadi karena persoalan dana, katanya dananya belum turun atau cair, sehingga belum rapat, saya pernah ambil alih satu kali pekerjaan komisi, saya yang mengundang langsung, itu illegal lo’ saya laksanakan karena kami dalam kondisi butuh dan terdesak dengan keadaan petani, maka dibahasakanlah pra komisi”

Pengaliran air irigasi dari bendungan memiliki jadwal yang disesuaikan dengan jadwal tanam dari Dinas Pertanian, salah satu jadwal tanam gadu 1 tahun 2015 di wilayah Daerah Irigasi sebagai berikut: 1) Wilayah hulu tanggal 5 -7 April (pengaliran) hamburan benih 5 – 10 April, 2) wilayah tengah pengaliran tanggal 9 – 10 April hambur benih pada tanggal 9 – 14 April, dan 3) wilayah hilir pengaliran tanggal 11 - 13 April hambur benih tanggal 11 – 13 April. Jadwal tersebut merupakan hasil tudang sipulung pada Tahun 2015 berlaku selama 2 tahun disepakati dan disahkan oleh Dinas Pertanian kemudian disetujui oleh PSDA. Jadwal tersebut disampaikan ke petani melalui perwakilan pengurus P3A dan disosialisasikan kepada anggota kelompok di dalam rapat P3A. Sedangkan jadwal pengaliran air setiap tahun terjadi perubahan hanya di awal hambur saja, akan tetapi ini dilakukan petani atas inisiatif sendiri karena jika menunggu hasil rapat Komisi Irigasi selalu terlambat khususnya untuk tanam gadu 1 tahun 2016 dan 2017.

Permasalahan yang sering dihadapi petani dalam memperoleh air atau kekurangan sebenarnya bukan karena kurangnya jumlah air di saluran primer maupun di saluran sekunder akan tetapi, penyebab dari kelangkaan air pada saluran tersier disebabkan karena adanya kerusakan saluran, saluran tertimbun sampah/lumpur, dan adanya bobolandi saluran.

Hasil wawancara dengan ketua P3A Renggang

“Ka'de nibagi baji – baji ane jeneka battu risaluran lompoo sanggena mae risalurang sekunderka antama ri saluran tersier pasti dapatki semua air, karena air itu tidak kurang kalau sudah dialirkan dari bendungan akan tetapi menghilang di jalangki anjo

jeneka, maka renggang tidak na kebagian air punna musim kemarau kodong, punna musim hujan iyya teajaki jene na nia, ingka apapoeng, ini karena adanya pencurian air di saluran sebelumnya sehingga air tidak bisa sampai ke P3A Renggang, dulu itu air sampai ke renggang waktu ada itu orang jepang, karena ada penjaga disaluran air dan di pintu – pintu, tetapi sekarang tidak adami sehingga petani seenaknya melakukan pencurian dan pengrusakan saluran”

Sama halnya dengan pernyataan petani anggota P3A Renggang “D”

“Katte tena biasa tena ki gappa jene karna na bangka anjo tawwa rateanga anjoeng na bangka anjo saluranga, ampa punna lebba na buangi nau ri kaloranga anjo jenek, tena nana tongkoki supaya asolongi mae ri tanah maraenganga, kuntungana na pela anjo jenek. Karna tena nakibiasa anggappa jene punna ampakamma anjo ke’nanga, jari biasa katte anne ri hilirka biasa nikana kade tena na kajala anjo pipa lombo, sikali ammalliki pipa lombo ampo ni lamung naung ritanayya supaya tenamo ambangkai, ingka siapa memang modala punna iraya sa’gena kalau mae. Nikeke naung ritanayya, anjo jenek jai ingka nabangkai jari ta’pela – pelaki. Anne jenek ri renggang jene bantu di tangke bajeng, na olo kalau mae bantu ri doja, saianjo jenek bantu ri doja naoloe kalawu mae tangke bajeng, ritangke bajengmi anne biasa jai tu bangka jene. Jari katte anrini biasa akompa punna tena jene, ka susahki alamu ase punna tena jene, ampa anjo jenek tenapa nabattu, (kelihatan kesal) kade tena anjo tu bangka jene anjoeng ri tangke bajeng niaja jene kalau mae, anne beru –beru angopaki katena jene ampa eromaki apanaung lessoro, cinnaku kusaring aberangi punna kuciniki anjo allukaka je’ne risaluranga, ingka tena na leba nicini karna tenapa tau ampa a’panggaurangi”

Keduanya mengatakan bahwa sebenarnya penyebab air tidak sampai disaat ingin hambur benih padi sebabkan karena, banyaknya petani yang mengambil air secara berlebihan dan membuang kembali ke saluran pembuang sehingga air yang seharusnya bisa digunakan di saluran tersier terbuang percuma. Kondisi ini yang membuat petani di hilir berfikir, andaikan biayanya tidak mahal mereka ingin membuat pipa besar

dari saluran sekunder ke tersier dengan harapan dapat memperoleh air langsung tanpa menyaksikan pembobolan yang dilakukan oleh petani di bagian hulu karena dengan menyaksikan hal tersebut kadang ingin melakukan perkelahian dengan petani tersebut.

Kekurangan air pada P3A Renggang selama penanaman pada musim kemarau tidak disebabkan oleh pasokan air yang tidak memadai dari saluran primer dan saluran sekunder akan tetapi adanya perolehan air yang tidak terkontrol di saluran yang menuju saluran tersier dan adanya kerusakan saluran. Kekurangan air yang terjadi di saluran tersier di daerah hilir pada musim tanam pertama disebabkan oleh karena P3A yang sudah tidak kompak semua pekerjaan diserahkan kepada mandoro je'ne atau kepada Ketua P3A. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab air tidak dapat sampai pada saluran tersier, sesuai dengan penelitian Rampisela *et al.*, (2012) menunjukkan bahwa kekurangan air pada daerah hilir pada musim kemarau musim tanam pertama (rending) tidak disebabkan oleh kekurangan air pada saluran primer dan sekunder akan tetapi karena adanya kerusakan pada tersier.

Terjadi pendistribusian air berbeda menyebabkan perbedaan komoditi yang diusahakan setiap wilayah seperti halnya komoditi yang diusahakan pada sawah Daerah Irigasi Kampili Kabupaten Gowa. Adapun luas panen, jenis komoditi di Kabupaten Gowa tertera pada Tabel 9.

Tabel 9. Jenis Pengairan, Luas Panen, dan Produksi Padi, Jagung, dan Kacang Hijau di Kabupaten Gowa

Kecamatan	Luas sawah dengan	Luas panen dan produksi		
		Padi	Jagung	Kacang Hijau

Jenis pengairan (hektar)									
	Irigasi teknis	Tadah hujan	Total	Luas panen (hektar)	Produksi (Ton)	Luas panen (hektar)	Produksi (ton)	Luas panen (hektar)	Produksi (ton)
Pallangga	2.680	58	2738	5.458,5	34.293	44,1	255	1.567,7	1.953
Bajeng	3.112	153	3265	6.673,6	47.933	403,9	2.273	1.832	2.188
Barombong	1.539	111	1650	3.253,8	21.255	148,9	788	744,6	870
Bajeng Barat	1.425	45	1470	3.514,6	24.784	10,8	60	124,8	156
Bontonompo	1.655	940	2595	4.627,6	33.208	1.567,7	9.117	1.224,8	1.658
Total				23.528,10	113.588	2.175,4	12.493	5.369,10	6.825

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2017

Berdasarkan Tabel 9 dijelaskan bahwa di kelima kecamatan di Kabupaten Gowa mengusahakan komoditi padi, jagung dan kacang hijau. Kecamatan Bajeng memiliki lahan paling luas baik lahan irigasi maupun tadah hujan dibandingkan dengan keempat kecamatan lainnya. Produksi padi dan kacang hijau terbanyak di Kecamatan Bajeng sedangkan produksi jagung banyak ada di Kecamatan Bontonompo. Disebabkan karena Kecamatan Bajeng memiliki akses irigasi lebih gampang karena berada pada wilayah tengah, sedangkan Kecamatan Bontonompo merupakan banyak lahan tadah hujan, serta masuk pada areal pengembangan komoditi jagung dari Dinas Pertanian.

Pelayanan irigasi untuk kelima kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa selain berasal dari D.I. Kampili juga menggunakan irigasi dari D.I. Bissua, adapun luas pelayanan D.I. Kampili tertera pada Tabel 10.

Tabel 10. Luas Area Pelayanan Daerah Irigasi Kampili

No	Kecamatan	Luas Area (Hektar)	Persentase (%)
1	Pallangga	2.226,80	24,45
2	Barombong	1.876,82	20,61
3	Bajeng	1.693,34	18,59

4	Bontonompo	1.359,34	14,93
5	Galesong Utara/Takalar	723,30	8,12
6	Bajeng Barat	723,00	7,94
7	Tamalate/Makassar	487,70	5,36
Total		9.106,30	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 10 dijelaskan bahwa pelayanan D.I Kampili terbanyak di Kabupaten Gowa dengan luas 86,52% diperuntukkan lahan sawah tersebar di Kecamatan Pallangga, Bajeng Barombong, Bajeng Barat, dan Bontonompo, kemudian 8,12% lahan persawahan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dan hanya 5,36% mengalir ke Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Keenam kecamatan memperoleh air dari D.I. Kampili juga memperoleh dari D.I Bissua, sedangkan Kecamatan Tamalate selain menggunakan Irigasi Teknis menggunakan pula irigasi embung bantuan dari Dana Anggaran Khusus Kota Makassar.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa terjadi perbedaan dalam petani mengakses air pada wilayah hulu, tengah, dan hilir yang menyebabkan perbedaan komoditi yang ditanam pada wilayah masing – masing. Untuk mengetahui jenis tanaman pada musim rendeng, gadu 1 dan gadu 2 tertera pada Tabel 11:

Tabel 11. Jadwal Pengaliran Air Irigasi Untuk Wilayah Hulu, Tengah dan Hilir dalam Setahun pada Daerah Irigasi Kampili

Musim Tanam	Jadwal	Awal Hambur	Jenis Komoditi	GP3A
-------------	--------	-------------	----------------	------

	Pengaliran Air			
Hulu a. Rendeng b. Gadu I c. Tanam III (Gadu II)	Oktober 5 – 7 April Tidak diatur	Oktober 5 – 10 April Tidak diatur	Padi Padi Padi, palawija	Minasa Baji
Tengah a. Rendeng b. Gadu I c. Tanam III (Gadu II)	Oktober 8 -9 April Tidak diatur	Oktober 8 – 14 Tidak diatur	Padi Padi Padi, palawija	Pallangga (b1) Galesong (utara (b1) Jatia (b2) Tubarana (b2) Assamaturu (b2) Galaesong Utara (b2) Kalukuang (b2) Passereanta (b2)
Hilir a. Rendeng b. Gadu I c. Tanam III (Gadu II)	November 11 – 13 April Tidak diatur	November 11-16 Tidak diatur	Padi Padi, palawija padi, palawija, bera	Sirannuang Paraikatte Sipakainga

Sumber: Data primer setelah diolah, 2018

G. Aktivitas Irigasi

Terdapat lima aktivitas yang bersifat mendasar yang terdiri atas:

1) Aktivitas perolehan air, 2) pengalokasian air, 3) pemeliharaan, 4) pengadaan sumber daya, dan 5) pengelolaan konflik (Coward,1980).

a. Perolehan air (*Water Acquisition*)

Perolehan air yaitu tugas mendapatkan air untuk sistem irigasi melalui metode-metode atau cara-cara yang luar biasa. Menurut Ambler (1992), semakin mudah petani dalam memperoleh air, semakin besar ketersediaan air sehingga petani semakin tidak terdorong untuk membentuk suatu organisasi yang kuat.

Petani pada Daerah Irigasi Kampili dalam mengakses sumber daya air pada saluran irigasi ada yang gampang memperoleh dan ada sulit. Petani yang letak lahannya berada di sekitar saluran gampang mengakses karena lain duluan memperoleh air dari bangunan pintu kadangkala melakukan pembobolan pada saluran, sedangkan petani yang jauh dari saluran agak sulit dalam mengakses karena menunggu giliran pengaliran yang kadang terlambat karena adanya pengambilan ilegal, penggunaan air yang berlebihan pada petani sebelumnya serta kerusakan bangunan irigasi.

Lahan sawah petani yang ada di Daerah Irigasi Kampili, memperoleh air yang berasal dari saluran irigasi teknis dan non teknis. Petani yang dekat dari saluran irigasi lebih cenderung memperoleh air pada saat dibutuhkan, seperti pada wilayah tengah, berbeda dengan petani yang lahan persawahan berada pada wilayah hulu lahannya berada di atas dari saluran sehingga menggunakan irigasi teknis dan pompanisasi, kemudian petani yang berada di hilir selain menggunakan irigasi teknis, juga menggunakan pompanisasi yang airnya berasal dari tanah, sungai dan saluran pembawa yang ada pada D.I. Kampili.

Pembagian air di pintu primer dan sekunder setiap bangunan dijaga secara resmi oleh petugas baik dari petugas operator irigasi yaitu Petugas Pintu Air (PPA) yang memiliki hak membuka dan menutup pintu air. Di dalam memperoleh air ada petani memperoleh berlebihan dan terdapat pula petani yang tidak memperoleh air saat dibutuhkan. Banyak petani

yang melakukan pembobolan menyebabkan tidak terdistribusinya air secara efisien dan efektif. Hilangnya keseragaman petani dalam waktu tanam memberikan dampak yang beragam terhadap pola penggunaan air, salah satunya adalah munculnya pengambilan ilegal baik dengan membuka pintu secara ilegal, merusak saluran irigasi, dan membuka bangunan ilegal. Adapun gambar pintu legal dan ilegal dapat di lihat pada Gambar 13, 14, 15, 16 dan 17.



Gambar 13. Saluran tersier tanpa pintu



Gambar 14. Pengambilan dengan pompa untuk saluran tersier



Gambar 15. Pintu Tersier yang Diperoleh dari Saluran Sekunder yang Membagi ke Saluran Tersier



Gambar 16. Pintu Resmi Primer, Sekunder, dan Tersier



Gambar 17. Pengaliran Air dan Pembersihan Saluran Tersier

b. Pengalokasian Air Irigasi

Pengalokasian air irigasi merupakan tugas dari pembagi air yang memiliki kewenangan untuk mendistribusiakan air ke pada pemakai air. Pengalokasian air yang diharapkan adalah pengalokasian yang adil dari hulu hingga hilir. Kondisi ini sulit dicapai dengan banyaknya pengambilan

yang seharusnya tidak ada di bagian hulu dan tengah. Untuk mengalokasikan air yang cukup dan adil ke seluruh lahan maka dibutuhkan sumber daya manusia dan manajemen serta keinginan berbagi dari sesama petani, sesuai dengan pernyataan Rampisela (2011), petani ingin seaman mungkin sehingga mengambil air sebanyak – banyaknya, yang tak mampu disadarinya membuat tingkat kehilangan air semakin bertambah sehingga sebagian petani di wilayah hilir tidak memperoleh air. Sedangkan Kubota dan Rampisela (2016) mengatakan bahwa teknologi saja tidak akan cukup tetapi dibutuhkan sumber daya manusia dan etika serta kemampuan manajemen air yang tinggi untuk membaginya dengan adil dan cukup.

Kegiatan pengalokasian air merupakan tugas pembagian dan pendistribusian sistem persediaan kepada para pemakai air. Menurut Rachman *et al.*, (1999), alokasi distribusi penggunaan air irigasi diatur berjenjang tetapi juga memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan air. Cara pengalokasian air pada tipe irigasi teknis berskala besar diatur menurut golongan, karena keterbatasan persediaan air pada musim kemarau (Kalo, 1988). Tetapi aturan golongan tersebut belum dapat menjamin persediaan air irigasi secara merata untuk seluruh petak tersier karena golongan irigasi tersebut tidak digilir antar petak tersier (permanen). Hasil kajian tentang rekayasa optimalisasi alokasi air irigasi diperoleh beberapa gambaran sebagai berikut: 1) Sistem pengelolaan air irigasi pada jaringan irigasi skala besar dilakukan dengan sistem

golongan, yaitu pembagian air dengan membagi wilayah layanan dengan sistem golongan, 2) sistem pengelolaan air irigasi pada jaringan irigasi skala kecil dan menengah tidak dilakukan sistem golongan, pendistribusian air dilakukan dengan cara giring gilir antar petakan sawah dari yang berada di hulu kemudian ditengah dan baru selanjutnya bagian hilir (Sumaryanto *et al.*, 1999 dan Saptana *et al.*, 2000).

Pembagian air yang diberikan oleh para petugas pintu air baik di bendung, sesuai dengan permintaan dari hasil keputusan rapat, akan tetapi jika rapat komisi irigasi terlambat, sehingga pembagian air akan diberikan sesuai dengan permintaan dari pengamat dan juru pengairan, demikian juga untuk pembagian air di bangunan primer dan sekunder, diberikan sesuai dengan laporan dari juru primer dan juru sekunder, akan tetapi jumlah air yang di distribusikan tidak dapat diukur oleh petugas, disebabkan karena kemampuan petugas yang tidak bisa menggunakan alat pengukuran debit air di pintu pembagi sehingga petugas hanya mendistribusikan sesuai dengan informasi dari petani atau petugas.

Pernyataan dari Juru Primer

“Contohnya tahun 2016 Komisi Irigasi juga kacau masa sudahmi orang tanam di petani barupi rapat komisi irigasi, jadi kacau karena aturan tidak berjalan baik dipetani juga di pemerintah. Padahal itu harusnya rapat komir dulu baru mengalir air dan tanam, tapi tidak berjalan. Jadi saya biasaya ,minta sama POB buka pintu sebelum rapat komir karena lambat dudui rapat ampa petani teriakmi mau tanam, karena kapang ditunggu rapat aiii lambatki orang tabur benih, sudah 2 minggu dibuka pintu baru di rapat komir.

Pernyataan dari Ketua IP3A

“komir tahun ini itu tidak berjalan, kami sudah hambur benih, komir belum rapat, ini terjadi karena dana, katanya dananya belum cair, sehingga belum rapat, saya pernah ambil alih pekerjaan komisi, saya mengundang langsung, itu illegal lo’ saya laksanakan karena kami dalam kondisi butuh dan terdesak dengan keadaan petani, maka dibahasakanlah pra komisi, kemudian saya hubungi juru primer Dg. Nassa supaya dimintakan dibuka pintu”

Alokasi air yang diberikan sudah tidak terukur lagi berapa jumlahnya, menurut petugas irigasi juru dan PPA, petugas tidak tahu cara menghitungnya, sehingga dalam mendistribusikan tinggal memperkirakan apakah petani sudah cukup atau tidak, atau mereka menunggu permintaan tutup dan buku dari petani.

Pembagian air yang adil antara tiga lokasi pendistribusian hulu, tengah dan hilir ke lahan petani tidak akan tercapai, jika terdapat kerusakan bangunan, pembobolan air di hulu dan tengah, sehingga daerah hilir kesulitan mendapatkan air, adanya perubahan pola tanam di petani dan bantuan sarana dari dinas pertanian yang membuat petani mengalihkan jadwal tanam palawija yang menjadi tanam padi yang membuat jumlah kebutuhan air lebih besar dari kesediaan air di bendung.

Pembagian air pada banyak bermasalah yaitu pada musim kemarau, yaitu musim tanam ketiga, karena jumlah air yang diberikan oleh bendungan adalah 60% dan diperuntukkan untuk tanaman palawija. Hal ini menjadi permasalahan karena beberapa petani yang ada di bagian tengah dan hulu menanam padi sehingga menyebabkan jumlah air yang sedikit karena diperuntukkan untuk tanaman padi sehingga beberapa lahan petani tidak kebagian air. Seharusnya pintu bagi yang ada baik di

tingkat primer dan sekunder sudah yang bertugas yaitu petugas pintu air. Petugas pintu air adalah bertugas membuka pintu dan mendistribusikan air berdasarkan hasil rapat komisi irigasi atau hasil permintaan dari juru primer dan juru sekunder, selain petugas pintu air tidak boleh ada yang membuka dan membagi air pada tingkat primer dan sekunder, akan tetapi tanpa sepengetahuan petugas pintu air petani membuka pintu air bahkan ada yang membobol pintu dan mengganti kunci dari pengaman yang diberikan oleh petugas, serta menjaga kebersihan saluran yang dijaganya. petugas yang membagi air di tersier adalah Mandoro je'ne, yang merupakan anggota yang P3A yang dipilih langsung oleh anggota dan disepakati oleh semua pengurus P3A, adapun yang menjadi Mandoro je'ne itu harus orang rajin, kemudian di disegani oleh petani lainnya, serta harus adil dalam mendistribusikan air. Sesuai dengan pernyataan berikut dari ketua P3A T"

"Mandoro je'ne itu tidak boleh sembarang ditunjuk, harus melalui musyawarah P3A, yang dipilih setiap P3A minimal 2 orang, syaratnya yang pertama yaitu haruski rajin bekerja, yang kedua dia harus rajin dan yang ketiga karena ini harus menjaga petani yang banyak dan dia harus bisa didengar maka mandoro itu harus disegani dan rewa sebenarnya "makanya biasanya kita ambil yang preman2 begitu supaya dia bisa mengendalikan anggota".

Tugas Mandoro je'ne adalah membagi air sesuai yang disepakati yaitu mulai ke lahan sawah yang paling hilir kemudian ke lahan sawah tengah dan yang terakhir ke lahan sawah yang paling hulu. Pembagian air ini diberikan pada saat air sudah masuk ke saluran tersier, kemudian di

alirkan ke saluran cacing, air kembali diberikan menjelang hambur benih dan pengeolahan lahan dengan tujuan mempermudah pengolahan lahan karena lahan sawah dalam kondisi basah, kemudian pada dasar dan pemupukan lanjutan yaitu 7 – 21 HST dan 21 – 35 HST. Tugas Mandoro je'ne membagi ke lahan persawahan pada saat petani membutuhkan.

Dalam pengalokasian air kadangkala ada petani yang melanggar kesepakatan yang sudah ada, petani yang di hulu yang seharusnya menunggu air karena belum jadwalnya, mengambil air yang ada maka akan membuat lahan sawah yang di hilir tidak kebagian, apalagi kalau petani yang di hulu mengambil air dan meninggalkan sawahnya, sehingga air yang ada kadangkala terbang masuk ke sungai, kejadian ini terjadi di beberapa P3A yang ada di Daerah irigasi kampili, dan salah satu contohnya yang terjadi di P3A Timbuseng sesuai dengan pernyataan dari ketua P3A berikut:

“Petani kadang tidak mau mendengar dan melanggar kesepakatan yang sudah ada, contohnya harusnya yang di hilir dulu dikasih tapi yang di hulu tidak sabar dia buka pintu air yang menuju ke sawahnya dan yang lebih parah kadang dia tidak tutup kembali jadi pada saat air di sawah meluap terbang percuma ke sungai, jika Mandoro je'ne dapat dia tutup tapi kadang kala juga dia tunggu memeng mandoro meninggal tempat kemudian dia ke sawah untuk membuka sendiri”

Petani yang tidak mau ribut dengan petani lain yang ada di hilir dan sudah butuh air, kadang menggunakan pompa untuk menaikkan air

dari sungai bagi mereka ini lebih aman dibanding berkelahi dengan petani lainnya. Sesuai dengan pernyataan dari petani :

“Daripada ributki sama petani dan bisa berkelahi gara – gara air, makanya saya mengambil air langsung dari sungai dengan menggunakan pompa”.

Bagi petani menggunakan air dari sungai dapat menggunakan pompa lebih murah karena kalau menggunakan air dangkal (sumur bor itu selain boros kadang juga kesulitan mendapatkan air. Jika menggunakan pompa dengan sumber air permukaan itu pernah dilakukan di kelompok tani yang ada di Barombong yang lahan sawahnya diujung P3A Timbuseng lahan sawah tadah hujan yaitu jika menggunakan pompa biaya yang dikeluarkan yaitu 150 liter solar itu bisa mengairi lahan sawah untuk tanaman padi seluas 15 hektar, dan bagi petani ini dianggap menguntungkan, di Barombong terdapat kelompok tani yang lahan sawahnya tadah hujan pengairannya menggunakan air sungai dengan pompanisasi untuk lahan yang seluas 15 hektar. Sesuai dengan pernyataan Ketua P3A:

“Kami di Barombong itu selain menggunakan air dari Kampili, kami juga menggunakan air dengan mengambil dari sungai dengan pompa, dan biaya lebih murah, yang lalu itu kami hanya ,membeli solar 150 liter dan kami bisa panen padi dengan luas 15 hektar sawah. Kami menggunakan air permukaan itu jauh lebih mjurah dibandingkan dengan menggunakan air dangkal. Yang lalu saya membeli bbm Rp. 50.000/satukali pompa dan saya memompa sebanyak 8 kali sehingga biayanya lebih mahal yaitu Rp.400.000.

Hak petani memperoleh air pada saat dibutuhkan dan memiliki kewajiban membayar atau menyetor iuran irigasi ke Mandoro je’ne,

kemudian Mandoro je'ne memberikan sebagian ke ketua P3A untuk kegiatan rapat P3A. Jumlah yang dibayarkan itu semua hasil kesepakatan yaitu satu ember satu petak lahan yang kurang lebih 10 are, jika lebih dari 10 are 2 ember. Dalam pelaksanaannya kadang banyak petani yang tidak membayar sesuai dengan petani kesepakatan yang sudah ada. Sesuai dengan pernyataan ketua P3A Timbuseng:

“Ada tong petani sadar membayar iurannya ke mandoro, ada tong yang pura – pura lupa bahkan marah kalau ditagih, tapi ada juga petani yang sadar sendiri yaitu tanpa ditagih sudah menyimpan di pematang sawahnya”.

Perolehan air pada musim kemarau dan musim hujan itu berbeda antara lahan sawah yang ada di bagian hulu Daerah Irigasi Kampili dan bagian Hilir, jika musim hujan atau rendeng maka petani baik di hulu maupun di hilir tidak kesulitan karena selain air dari bendung yang dibuka, terdapat juga air hujan sehingga petani di hulu kadang tidak membutuhkan dan meminta air di tutup yang ke tersier karena kondisi air di lahan yang banyak, sedangkan petani yang ada di hilir lahannya terpenuhi karena air dari bendung juga banyak yang sampai ditambah dengan air yang berasal dari air hujan.

Pola musim tanam pertama dan kedua bangunan pembagi BL 7, BL 14 dan BL 17 air selalu banyak, akan tetapi pada musim gadu kedua atau musim tanam ke tiga, air tidak ada lagi pada BL 17. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua P3A yang pengambilan air dari BL 17.

“Katte ri hilirka punna timoro kammamo anne, jangankan ase, tiboang poeng nisawala nilamung karena tena sama sekali jene' battu mae, jangankan ri tanayya, ri saluran sekunderka lagi na

tania, karena tena mantong je'ne di BL 17, jari manna ni tangkasi salurangan punna lamung pintallung tena mantong kecuali timoro lamung pinruang biasaji nia jene punna tenaja asoboloki saluranga”

Petani tidak bisa menanam palawija apalagi menanam padi pada musim ke tiga, karena sama sekali tidak ada air yang sampai ke lahan persawahan, bahkan di saluran juga tidak ada air, karena memang di pengambilan pertama atau primer memang airnya tidak tersedia. Air musim tanam kedua biasanya ada jika tidak ada yang melakukan pembobolan di saluran dan kondisi saluran bersih dari tanah dan sampah yang menyumbat.

Pembersihan saluran di tersier dilakukan oleh P3A berdasarkan hasil kesepakatan kelompok. Anggota P3A diwajibkan semua bekerja bakti kalau ada petani yang tidak datang ketua P3A kadang menegur atau menghukum petani dengan tidak memberikan bantuan jika ada bantuan dari pemerintah.

c. Sistem Pemeliharaan Sarana Fisik Irigasi

Kegiatan pemeliharaan sarana fisik irigasi mulai dari bendung hingga saluran tersier, kegiatan dalam pemeliharaan Daerah Irigasi Kampili meliputi kegiatan pembersihan sampah pada saluran mulai dari bendung, primer, sekunder dan tersier, untuk bendung dilakukan oleh Petugas Operasional Bendung dengan menguras kantong lumpur, memberikan minyak pelumas pada pintu – pintu bendung. Dilakukan sekali sebulan dan dikerjakan oleh semua Petugas Operasional Bendung yang berjumlah 6 orang. Kemudian untuk saluran primer dan sekunder

dilakukan pembersihan bersama oleh juru primer, sekunder dan beberapa petugas pintu air dan Petugas Saluran (PS), pekerjaan yang dilakukan yaitu membersihkan saluran dengan mengangkat sampah dan lumpur, serta tumbuhan yang ada di dalam saluran irigasi, kegiatan ini dilakukan menjelang pembukaan pintu bendung untuk pengaliran air untuk musim tanam, baik pada musim rendeng maupun musim gadu.

Saluran tersier dilakukan oleh pengurus dan Mandoro je'ne, dan kadangkala dibantu oleh anggota, akan tetapi dalam pemeliharaan saluran ini dilakukan bersamaan masuknya air ke saluran tersier. Kemudian pengurus dan Mandoro je'ne membersihkan saluran tersier dan saluran cacing untuk memudahkan air masuk ke dalam lahan sawah petani, dengan mengangkat lumpur dan sampah yang menutup saluran. menutup bobolan yang ada, memperbaiki saluran yang rusak dengan sumbervana dari anggota kelompok P3A masing – masing. Pembersihan dilakukan menjelang tanam dengan terlebih dahulu dilakukan rapat di P3A. Semua petani diminta untuk berpartisipasi, walaupun masih ada petani yang tidak mau terlibat dalam pembersihan, akan tetapi selalu mengharapkan memperoleh air lebih awal. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Pengurus P3A.

“Kalau kerja bakti tidak semua petani terlibat, walaupun dia tahu kita mau kerjabakti, kadang dilihatjaki kerja bakti tapi mereka tidak datang bahkan kadang pura-puraki tidak naliat kalau adamaki di saluran kerja atau di sawah, tapi kalau giliran mau air inimi yang biasa jago mencuri di saluran cacing bahkan di saluran tersier juga kadang nabobol, karena jika ditegur langsung atau tidak dikasih air biasanya ributki, untuk

menghindari itu biasanya saya hukum secara finansial, biasa ada bantuan dikelompoktani, trus saya tidak kasihki, jadi biasa datangki protes baru dikasih tau sama petani yang lain, kalau mau dapat bantuan ikut juga kerja bakti di saluran”

d. Mobilisasi Sumberadya

Aktivitas menghimpunan sumber daya manusia, dana dalam kegiatan pemeliharaan yang akan dilakukan, di rencanakan lebih awal oleh P3A dan petugas Irigasi. Adapun pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya dana yang ada Daerah Irigasi Kampili pada wilayah tersier yaitu diawali dengan rapat di tingkat P3A.

Rapat di tingkat P3A di lakukan di awal tanam untuk menentukan perencanaan jadwal tanam, jadwal pengaliran air, kegiatan gotong royong serta rapat untuk menyelesaikan konflik jika ada, pelaksanaan rapat selalu dilakukan secara dadakan jika dianggap penting, belum ada jadwal rapat yang tertulis. Rapat yang dilakukan untuk menyepakati jadwal pendistribusian air yang isinya adalah mendistribusikan air ke lahan yang lebih jauh sehingga air bisa di bagi rata, kemudian rapat untuk gotong royong yaitu jika menjelang musim tanam kemudian banyak sampah disaluran sehingga dilakukan pertemuan dengan agenda siapa yang akan bertugas pada titik bangunan yang akan dibersihkan, kemudian kesepakatan untuk biaya perbaikan bobolan atau menutup saluran yang rusak. Rapat juga dilakukan jika ada pemelihan Mandoro je'ne, atau ada pergantian Mandoro je'ne karena sudah tidak kuat bekerja dan

meminta untuk diberhentikan. Dalam kegiatan sering ada yang dan adapula tidak mau hadir dengan alasan sibuk dengan pekerjaan yang lainnya. Rapat bisanya diberikan undangan langsung tetapi biasanya juga hanya diumumkan di masjid oleh kepada dusun masing – masing, atau diberikan oleh petani satu dengan yang lainnya, sesuai dengan pernyataan berikut dari petani penggarap:

“Rapat P3A itu bisanya diumumkan di masjid sama pa dusun atau p imam masjid, atau ada undangan dari pengurus, tapi bisa juga informasi dari sesama petani, jadi intinya yang penting kita tahu, maka hadir kalau tidak adaji kesibukan lainnya”

Rapat ini bertujuan untuk mengetahui tenaga kerja yang akan digunakan dalam kegiatan kerja bakti. Rapat ini juga kadang meminta petani untuk bisa membantu petugas irigasi di sekunder dan primer, kadang ini dilakukan oleh Ketua P3A, Ketua P3A ini juga merupakan petugas pintu air, sehingga agak gampang mendapatkan petani untuk bisa berpartisipasi, menurut dia secara aturan sekunder dan tersier ada petugas dari provinsi akan tetapi petani di tersier tidak akan mendapatkan air juga kalau di sekunder tersumbat, akan tetapi tidak semua P3A yang mau ikut ada juga petani yang mengatakan bahwa tugas mereka hanya di tersier, persoalan sekunder dan primer sudah ada petugas yang digaji sama pemerintah sesuai dengan kutipan berikut:

“Angapa na ki ero mae kerja bakti ri sekunder na tersierka, na anjoeng niamo nagaji pamarentah untuk antangkasi, jari nakke ri tersier ma karna anjoji bagianna petaniyya antangkasi”

Dalam kegiatan rapat juga sudah dibicarakan masalah dari pendistribusian iuran untuk kerja bakti dan perbaikan saluran serta pembayaran untuk mandoro je'ne yang mengatur dan menjaga saluran disaat pendistribusian air di tersier. Jumlah disepakati dalam rapat adalah membayar dengan memberikan hasil panen kepada Mandoro je'ne. terdapat petani yang membayar dan ada tidak membayar padahal hasil panen yang dibayarkan itu dibagi antara Mandoro je'ne dengan pengurus P3A, dan ini digunakan pengurus P3A untuk kegiatan rapat dan kerja bakti sesuai, iuran irigasi dalam bentuk gabah setelah dihilangkannya pembayaran IPAIR sebenarnya merepotkan P3A dalam menagih iuran dalam bentuk gabah, akan tetapi kehadiran mobil panen menjadi alasan beberapa petani untuk tidak membayar, karena gabahnya sudah dimasukkan ke dalam karung dan sudah terjual, dengan pernyataan:

'Hasil panen yang dibayarkan petani itu ke Mandoro je'ne, biasanya kami pengurus hanya meminta seberapa saja yang diberikan mandoro itu juga untuk kegiatan rapat dan kerja bakti, tapi tidak semua juga petani mau membayar sehingga jumlahnya sedikit yang diperoleh mandoro je'ne, tapi susahki juga menagih kalau pakai mobil panen ka jai dudi alasanna".

Pemeliharaan bangunan fisik di tersier terutama untuk rehabilitasi bangunan tersier, sudah dibantu oleh Dinas Pertanian melalui Kementerian Pertanian yang membidangi sarana dan prasarana, dana yang diberikan di tersier adalah sebanyak Rp. 1.200.000 perhektar, ini digunakan dalam memperbaiki saluran yang rusak.

e. Penanganan Pertentangan atau Konflik

Jenis-jenis konflik yang sering terjadi di Daerah Irigasi Kampili adalah pertentangan antara petani dengan petani, adanya pengambilan air oleh petani lain yang seharusnya bukan untuk lahannya, pertentangan lainnya antara petani dengan petugas pintu air, petani kadang memaksa meminta air yang bukan jadwal seharusnya, pertentangan petani dengan petugas sekunder, petani ini melakukan pembobolan secara sengaja baik di pintu maupun di saluran.

Konflik banyak terjadi pada musim kemarau, karena mereka merasa tidak cukup air, sementara kondisi air di bangunan tidak ada, serta konflik dipicu oleh pengaturan pola tanam yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan.

Dalam aturan ada sanksi baik pelanggaran dalam saluran tersier maupun dalam primer dan sekunder, akan tetapi sanksi itu tidak sepenuhnya dijalankan. Supaya tidak terjadi lagi protes petani ke petugas pintu, sehingga petugas kadang berdiskusi dengan juru dan meminta supaya diberi saja kalau meminta air walaupun bukan jadwalnya, supaya petani tidak ribut, demikian juga dengan pembobolan belum pernah ada sanksi berat yang diberikan hanya teguran jika dilihat langsung, dan kalau tidak dilihat petugas hanya menutup kembali bobolan yang ada.

Pelanggaran tingkat tersier, yaitu petani dipanggil oleh ketua P3A dan diberi tahu supaya tidak seenaknya mengambil air tanpa sepengetahuan Mandoro je'ne, tapi sanksi seperti denda serta sanksi yang berlaku sesuai dengan ADRT tidak juga dilakukan, mereka berupaya

menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Kemudian rapat untuk menangani jika ada konflik di petani dengan petani, kemudian petani dengan petugas ataupun konflik antara Mandoro je'ne dengan Mandoro je'ne P3A lainnya. Rapat ini biasanya dimediasi lebih dahulu oleh pengurus P3A sebelum mengundang ke rapat dengan meminta bantuan kepala desa untuk bisa duduk bersama menyelesaikan konflik yang terjadi seperti adanya perebutan air di saluran pembagi, adanya persoalan sampah dari saluran sekunder yang sampai ke saluran tersier. Serta adanya pembukaan pintu pengambilan oleh Mandoro je'ne yang seharusnya bukan jadwal pembagiannya. Semuanya diselesaikan dalam rapat salah satu P3A sudah bisa menyelesaikan konflik ini dengan rapat melalui P3A dan Kepala Desa.

Permasalahan pengaturan pola tanam sebenarnya sudah dibicarakan di rapat Komosi Irigasi bahwa pola tanam yang diperlakukan di Daerah Irigasi kampili adalah padi – padi – palawija, kemudian disampaikan pula di kegiatan pertemuan Perhimpunan Petani Pemakai Air pada bulan Juli 2017 pemakai air mengetahui pola tanam yang ada dan sepakat dengan pola tanam yang telah ditentukan, baik dalam dalam GP3A maupun dengan P3A, bahwa tanam ketiga adalah menanam palawija karena jumlah air yang ada tidak cukup, petani menyepakati hasil pertemuan tersebut. Akan tetapi di lapangan kenyataannya jika petani melihat air khususnya petani yang ada di hulu atau yang berada di sekitar

bangunan pembagi lebih berkeinginan menanam padi sesuai dengan pernyataan berikut:

“niamakkkaja je’ne ta’kalami alamungmaki ase, punna paeng tena’ naganna nikompai batu ribinangayya atau bantu risluranga” nia makaja kompa na sadiakang dinas pertanian”

Hasil wawancara dengan juru sekunder

“sikedeki siberangi karna persoalan je’ne, nia petani bella tananah tena na gappa jene, ampa anjo petani amani – mania ri saluranga anggapai, jari larro anjo petani tenayya na gappa, angngapana mae na buang jeneka naung ribinangayya, ampa nagana apuliki ta’kala tenaki nia agappa jene’, annemi na si bambangi sikedeki siberangi, maraengi poeng anjo alamunga tiboang anjo ammania batu ri saluranga niaka jenena, ampa anjo petani bellayya alamungi ase’ nia ero je’ne nia tea’ jene karna anjo tiboanga teami jene, ampa anne alamunga ase’ eroki je’ne, ampa anne alamunga tiboang teai dilalaoi tanana, jari abeseremi seng”.

Hasil wawancara dengan petani (yang dekat dari saluran pembagi)

“Ikatte anne petaniyya punna aciniki jene iyya pasti eroki alamu ase, karna punna nia jene angapa na tipoang nanilamung, karna asseyya niparalluangi,ni karre ikatte anne mae, jari punna nia jene alamuki ase punna parallui nikompai poe, apalagi dinas pertanian na suruhmakaki alamung ase, nasareki poeng bantuang kompa supaya digunakanki jene tanah punna kurangi jene risaluranga”

Hasil wawancara dengan petani (yang jauh dari saluran pembagi)

“Pore katte anjo tuniaka tanahna ri biring aganga apalagi niya salurang je’ne, punna parallu na kompai anjo niaka kompa nauang risaluranga, biasa poeng na bangkai anjo salurang jeneka, jari katte tena kinggappa jene”.

Berdasarkan hasil lapangan maka dapat dikatakan bahwa, petani yang ada di Daerah Irigasi Kampili Kecamatan Pallangga melakukan pembobolan atau pengambilan air secara ilegal karena mereka

beranggapan bahwa jika dilakukan pergiliran air ke hilir terlebih dahulu mereka akan terlambat menanam padi, sementara jika terlambat menanam padi khususnya pada musim gadu I, tanam ketiga untuk padi gadu II akan terlambat, hal ini pernah terjadi pada tahun 2015, mereka mengikuti pergiliran air, dengan menunggu tanam setelah bagian hilir menanam, sehingga mereka lambat tanam, dan pada tanam ketiga hanya bisa menanam palawija dan hasil palawijanya juga tidak berhasil karena hujan menjelang panen, sehingga pada tahun 2016 hingga 2018 mereka tidak mau lagi menunggu giliran. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Juru Sekunder,

“Petani itu tidak mau menunggu air dibagi dulu ke hilir karena petani mengatakan kalau kami menunggu air setelah bagian hilir dibagikan, maka kami akan terlambat tanam, dan kami tidak bisa lagi tanam padi ketiga, padahal tanam padi ketiga hasilnya lebih baik dibandingkan tanam kedua, dan memang betul berdasarkan hasil pengamatan saya yang baru – baru ini, maka produksi tanam ketiga memang lebih banyak, bahkan ketua IP3A mengatakan bahwa haran itu tanam padi ketiga karena dapat memicu konflik tapi orang pertanian mengatakan jangan diharamkan padi ketiga pa karena kami tidak bisa memenuhi program swasembada pangan kalau padi ketiga diharamkan”.

Pernyataan Petani di Kecamatan Pallangga, P3A Minasa Baji

“Saya dulu mengikuti pergiliran pembagian air, sesuai dengan petunjuk petugas operator irigasi pada tahun 2015, sebenarnya bagus, karena dibagian hilir itu juga bisa juga memperoleh air pada saat dibutuhkan, tapi kalau dilakukan itu lagi maka kami terlambat tanam ke tiga, karena kami lebih belakang menanam sehingga lambat panen, jadi berikutnya kami langsung tanam jika sudah air di saluran, dan menanam lebih awal lagi supaya bisa tanam ketiga setelah panen kedua, dan hasilnya sangat bagus daripada padi ke dua, apalagi sekarang ada mobil panen jadi prosesnya bisa lebih cepat, dan bahkan menjelang panen

kalau sawah kena air panennya juga sudah tidak bermasalah.

Terjadi penurunan luas panen dan produksi padi untuk Kecamatan Pallangga pada tahun 2015, data tersebut dapat di lihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Luas Panen dan Produksi Padi Per Kecamatan Tahun 2014 – 2016 di Kabupaten Gowa

Kecamatan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Luas Panen (Hektar)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Hektar)	Produksi (Ton)	Luas panen (Hektar)	Produksi (Ton)
Pallangga	5.540	33.788	5.146	33.765	5.458,5	34.293
Bajeng	5.414	35.223	6.491	47.324	6.673,6	47,933
Barombong	3.075	20.962	3.146	21.446	3.253,8	21.255
Bajeng Barat	3.178	20.803	3.276	23.096	3.514,6	24.784
Bontonompo	4.413	28.927	4.391	27.957	4.627,6	33.208

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Gowa, Tahun 2015 - 2017

Berdasarkan Tabel 12 dijelaskan bahwa terjadi penurunan luas panen komoditi padi di Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontonompo dari Tahun 2014 dengan 2015 yang berimpas pada penurunan produksi, ini terjadi karena pada musim ketiga petani beralih menanam palawija, alas an petani lebih memilih tanam padi karena selain sebagai kebutuhan utama, menanam padi dianggap lebih menguntungkan dengan tersedianya air dan adanya bantuan dari Dinas Pertanian.

Secara umum tanam padi di Kabupaten Gowa sudah dilaksanakan penanaman ketiga atau LTT (Luas Tambah Tanam) atau tanam padi

musim ketiga, dan hal ini direspon oleh pemerintah melalui pemberian bantuan sarana produksi, penambahan tanam ketiga mencapai kurang lebih 2000 hektar dengan penambahan produksi 12.600 ton GKP, dengan adanya penambahan yang signifikan ini yang membuat petani yang ada di Daerah Irigasi Kampili yang mayoritas memperoleh sumber air yang cukup dengan keberadaan sungai Jeneberang sebagai sumber air irigasi dan dukungan dari pemerintah yang menjadikan petani untuk melakukan penanaman padi ketiga atau gadu II.

Sesuai dengan kutipan dari petani “A” di Kecamatan Bajeng:

“Pastilah kalau air kami memilih menanam padi daripada lainnya karena lebih menguntungkan, akhir musim kemarau masuk musim hujan harga beras mahal sehingga kami tidak perlu membeli beras dan bahkan bisa menjualnya, sedangkan kalau kami tanam kacang hijau atau jagung biasanya produksinya juga tidak bagus seperti baru – baru ini banyak yang gagal panen, karena menjelang dipanen ada hujan maka rusak kalau dipanen juga kualitasnya tidak baik. Khan musim ketiga bendung selalu dibuka sehingga air selalu ada di saluran kalau tidak masuk melalui pintu bisa menggunakan pompa”

Menurut Dinas Pertanian dengan adanya tambah tanam, untuk meningkatkan pendapatan petani, sesuai dengan kutipan sebelumnya, kebijakan Dinas Pertanian sebenarnya secara ekonomi memberikan keuntungan bagi petani yang berada di hulu dan di tengah, akan tetapi mengorbankan petani yang ada di hilir.

Berdasarkan aktivitas irigasi yang telah diuraikan pada Daerah Irigasi Kampili sehingga dapat dijelaskan bahwa di dalam pemanfaatan air irigasi terbentuk beberapa pola yang berlangsung dicirikan oleh waktu, ruang, aktor dan komoditi.

Pola pemanfaatan irigasi berdasarkan waktu, berbasis musim tanam yaitu musim tanam rendeng, gadu dan musim tanam ketiga. Pemberian air untuk musim rendeng diberikan pada bulan November sampai Maret. Sedangkan musim gadu diberikan pada bulan April – Agustus dengan pemberian air 100% berasal dari bendungan, kemudian musim tanam ke tiga pada bulan September sampai Oktober, diperuntukan untuk tanaman palawija dengan tujuan bahwa jumlah air yang tersedia hanya 60% dari bendungan.

Pola pemanfaatan irigasi berdasarkan ruang, dibagi tiga golongan yaitu hulu, tengah dan hilir. Dari segi aksesibilitas, maka daerah tengah lebih mudah mengakses dan memperoleh air yang lebih banyak dibandingkan daerah hulu dan hilir. Hal ini disebabkan karena lahan persawahan pada daerah hulu lebih tinggi dari saluran irigasi, sedangkan daerah hilir jangkannya lebih jauh, bangunan irigasi banyak yang rusak dan penyadapan air secara ilegal di saluran irigasi. Hal ini sejalan Rahman (1999) yang mengatakan dalam pengelolaan irigasi terdapat permasalahan mendasar yaitu; 1) letak petakan sawah relatif dari saluran tidak diperhitungkan dalam distribusi air 2) penyadapan air secara liar diperjalanan berlanjut tanpa sanksi.

Pola pemanfaatan irigasi berdasarkan pelaku lebih dominan diatur oleh aktor juru primer dan sekunder, karena memiliki kekuasaan untuk mengintruksikan Petugas Pintu Air (PPA) dalam membuka dan menutup pintu air, serta menentukan daerah mana dan siapa yang akan diberikan

air. Petugas Pintu Air (PPA) memiliki tugas dan fungsi di dalam membuka dan menutup pintu air akan tetapi masih diatur oleh juru irigasi.

Pola pemanfaatan irigasi berdasarkan komoditi, terbanyak di usahakan pada lahan sawah irigasi pada Daerah Irigasi Kampili yaitu komoditi padi, dengan memanfaatkan pola tanam padi – padi – padi pada daerah hulu dan tengah sedangkan daerah hilir pola tanam yang diusahakan padi – padi – palawija (Tabel 9).

Berdasarkan aktivitas pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili hingga dapat dijelaskan bahwa pola pemanfaatan yang berlangsung yang berbasis pada wilayah tengah, memanfaatkan musim dan dominan dimainkan oleh aktor juru primer dan sekunder dalam mendorong produksi padi sawah.

Dihubungkan dengan teori hak kepemilikan (*property right*), yaitu 1) *Private property* (kepemilikan pribadi/individu), 2) *common property* (kepemilikan bersama), 3) kepemilikan negara, dan 4) *Open access* (tanpa kepemilikan). Sumber daya air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili merupakan kombinasi dari beberapa pola kepemilikan. Di lihat dari aspek pengaturan atau pendistribusiannya pada tingkat bendung, primer, dan sekunder dalam pemanfaatannya diatur oleh negara melalui petugas operator irigasi, sedangkan pengaturan pada tingkat tersier yang dari segi pemanfaatan oleh petani, maka pengelolaan irigasi Kampili termasuk *common property* yang terdapat lembaga petani P3A dan kelompok tani, dan cara mengaksesnya atau pengambilannya lebih cenderung bersifat

open akses (*open access*).

BAB VI

KELEMBAGAAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI KAMPILI

Sesuai Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2006 dan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015, kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi lembaga pemerintah, lembaga Petani (P3A/GP3A/IP3A), dan Komisi Irigasi.

A. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah yang terkait dengan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Kampili yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS-PJ), DSDACKTR (Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (PU/PSDA Kabupaten), dan Dinas Pertanian.

a. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS-PJ)

Tugas pokok dan wewenang BBWS-PJ yaitu mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang

luasnya lebih dari 3000 hektar dan Daerah Irigasi lintas provinsi. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BBWS-PJ berwenang: 1) Menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 2) menyusun rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai; 3) mengelola sumber daya air yang mengikuti konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai; 4) menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai; 5) memanfaatkan dan memelihara sumber daya air pada wilayah sungai; 6) mengelola sistem hidrologi; 7) menyusun data dan informasi sumber daya air 8) memfasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 9) memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; dan 10) melaksanakan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Peran BBWS dalam pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi yaitu:

1) Mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada menteri; 2) merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya; 3) merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada menteri; 4) merumuskan rencana pemeliharaan dan

rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, rehabilitasi untuk diteruskan kepada menteri; 5) memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada menteri; 6) menyiapkan anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi; 7) melaksanakan perbaikan fasilitas irigasi; dan 8) menyampaikan laporan hasil perbaikan fasilitas irigasi dan realisasi pelaksanaan pengairan untuk kebutuhan irigasi (Rampisela *et al.*, 2016).

b. Dinas Sumber daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (DSDACKTR)

DSDACKTR memiliki tujuan mewujudkan pengelolaan air dan sumber air secara terpadu, pengembangan sarana prasarana yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian, pelayanan perijinan yang tepat waktu dengan prosedur yang sederhana dan ekonomis, dan mewujudkan masyarakat petani yang mandiri untuk mencapai kesejahteraan guna mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka DSDACKRTR memiliki tugas perbantuan operasi pemeliharaan irigasi untuk saluran primer dan sekunder atau TP-OP Irigasi (Tugas Perbantuan Operasi Pemeliharaan Irigasi).

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan produksi hasil pertanian tanaman pangan terutama beras dalam kondisi bangunan irigasi yang mengalami kerusakan sebelum tercapai umur efektifnya berakibat pada penurunan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Prasarana yang

sudah terbangun ternyata tidak dapat berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga salah satu upaya pemerintah baik pusat maupun daerah adalah mempertahankan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dengan melaksanakan rehabilitasi maupun operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara konsisten dan berkesinambungan.

Peran DSDACKTR dalam pengelolaan Daerah Irigasi yaitu:

1) Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas PSDA/PU Kabupaten dalam menetapkan PPA; 2) membuat SK dan menetapkan operator irigasi; 3) mengumpulkan hasil laporan pengoperasian dan pemeliharaan pintu irigasi; 4) membuat laporan evaluasi pengoperasian dan pemeliharaan pintu irigasi; 5) mengajukan laporan dan mengesahkan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang; 6) melaksanakan perbaikan fasilitas irigasi; dan 7) membantu mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jadwal pengaturan air irigasi (Rampisela *et al.*, 2016).

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/PSDA Kabupaten

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi urusan bina marga, cipta karya, teknik dan perencanaan, tata ruang, operasional dan pemeliharaan pengairan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi bina marga, cipta karya, teknik dan perencanaan, tata ruang, operasional dan pemeliharaan pengairan; 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya; 4) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; 5) pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; dan 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan dan fungsinya (Dinas PU Kabupaten Gowa, 2018).

Peran Dinas Pekerjaan Umum (PSDA Kabupaten) dalam pengelolaan Daerah Irigasi yaitu: 1) Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemeliharaan air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya; 2) mengajukan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi, 3) memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi; 4) membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan bencana alam dan 5) melaksanakan training

IP3A/GP3A/P3A dalam pengelolaan pemeliharaan fasilitas Irigasi (Rampisela *et al.*, 2016).

d. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian merupakan lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknis pertanian di provinsi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian di daerah secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan di daerah; 2) memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum untuk daerah pertanian yang lintas kabupaten/kota; 3) menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan di daerah; 4) membina unit pelaksana teknis dinas; dan 5) melaksanakan ketatausahaan dinas.

Tupoksi ini terlihat bahwa Dinas Pertanian telah berada dalam rel yang pas dalam pengelolaan irigasi, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi, upaya peningkatan pendapatan petani dengan cara memodernisasikan usahatani dan diversifikasi usaha. Namun demikian, permasalahan juga tetap muncul dalam implementasi pelaksanaan tugasnya. Permasalahan secara mendasar yang sering muncul di daerah pertanian yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif adalah: 1) Anggaran dalam penguatan kelembagaan petani yang masih kecil serta peran serta kelompok pendamping lapangan yang masih kurang; 2) belum optimalnya koordinasi program kerja serta masih adanya ego sektoral

makin menghambat pengelolaan program pengelolaan irigasi partisipatif di daerah; dan 3) pemberdayaan P3A/GP3A belum optimal (Muharam, 2011).

Sesuai amanat Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Irigasi bahwa pembangunan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di wilayah kerjanya. Mengingat sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan sebesar Rp.1.200.000 perhektar untuk perbaikan saluran tersier untuk lahan yang ada di Sulawesi. Salah satunya adalah saluran tersier pada D.I. Kampili. Selain memberikan bantuan dalam rehabilitasi saluran tersier tugas lain dari Dinas Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 bahwa Dinas Pertanian memiliki tugas membina dan memberdayakan lembaga P3A (Anonim, 2017).

Sumber daya yang terdapat pada pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi Kampili adalah sumber daya yang mendukung kegiatan dalam pengelolaan Daerah Irigasi Kampili. Potensi yang dimaksud adalah

potensi sumber daya lahan yang dikelola oleh petani, potensi sumber daya sarana dan prasarana, potensi sumber daya air Daerah Irigasi Kampili.

Daerah Irigasi Kampili memiliki satu saluran induk dengan debit 17,307m³/detik, panjang saluran induk 14.922 meter, bangunan bagi sebanyak 4 unit, pintu saluran induk 3 unit (BL 7, 14, dan 17, dan BL 16 tanpa pintu disaluran induk), bangunan sadap 12 unit . Kapasitas saluran induk mampu mengalirkan debit rencana sesuai kebutuhan air areal layanan. Saluran sekunder pada Daerah Irigasi Kampili terdapat 29 saluran dengan panjang saluran keseluruhan 89.315 kilometer, jumlah bangunan 353 unit, fasilitas rumah jaga 10 unit, kantor 2 unit, dan sanggar tani 3 unit.

Sumber daya lembaga operator Irigasi pemeliharaan dan operasi Daerah Irigasi Kampili disajikan pada Tabel 13:

Tabel 13. Sumber Daya Lembaga Operator Irigasi Pemeliharaan dan Operasi Daerah Irigasi Kampili

No	Petugas	Jumlah (orang)	Instansi
1	Petugas Operasional Bendung	6	BBWS
2	Pengamat	1	BBWS/PSDA Provinsi
3	Juru Primer	1	BBWS/PSDA Provinsi
4	Juru Sekunder	8	BWS/PSDA Provinsi
5	Pertugas Pintu Air Primer	16	BWS/PSDA Provinsi
6	Petugas Pintu Air Sekunder	63	BBWS/PSDA Provinsi
7	Petugas Saluran	31	BBWS/PSDA Provinsi
Jumlah		126	

Sumber: Data primer setelah diolah, 2018

Tugas pokok dan fungsi masing-masing operator irigasi yang berjumlah 126 orang pada kegiatan operasi dan pemeliharaan dari bendung hingga ke saluran sekunder adalah sebagai berikut:

a. Tugas pokok dan fungsi petugas dalam kegiatan operasi irigasi

a) Pengamat

(a) mempersiapkan penyusunan RTTG (Rencana Tata Tanam Global) dan RTTD (Rencana Tata Tanam Detail) sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A,

(b) menetapkan besarnya faktor-k untuk pembagian air jika debit sungai menurun,

(c) rapat di kantor ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, dihadiri para mantri/juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A,

(d) menghadiri rapat di kecamatan dan dinas PSDA kabupaten dalam rangka operasi dan pemeliharaan,

(e) membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi,

(f) membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A,

(g) membuat laporan kegiatan operasi ke Dinas PSDA Provinsi.

b) Petugas Mantri/Juru Pengairan

- (a) Membantu kepala ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil untuk tugas yang berkaitan dengan operasi dalam hal: i) Melaksanakan instruksi dari ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur; ii) memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan; iii) memberi saran kepada petani tentang awal tanam dan jenis tanaman; iv) pengaturan giliran pembagian air; dan v) mengisi papan operasi/eksploitasi.
- (b) Membuat laporan/mengumpul data meliputi: i) Data debit; ii) data tanaman dan kerusakan tanaman; iii) data curah hujan (sesuai kebutuhan daerah); iv) data mutasi baku sawah (sesuai kebutuhan daerah); v) data usulan Rencana Tata Tanam (RTT); vi) melaporkan kejadian banjir kepada Pengamat; dan vii) melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada Pengamat.
- c) Petugas Operasi Bendung (POB)
 - (a) Melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang;
 - (b) melaksanakan pengurasan kantong lumpur;
 - (c) membuka/menutup pintu pengambilan utama, sesuai debit dan jadwal yang direncanakan;
 - (d) mencatat besarnya debit yang mengalir / atau masuk ke saluran induk pada blangko operasi; dan
 - (e) mencatat elevasi muka air banjir.

d) Petugas Pintu Air (PPA)

Membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah Juru/Mantri Pengairan.

b. Tugas pokok dan fungsi petugas lapangan pada pemeliharaan jaringan irigasi

a) Pengamat/Ranting/UPTD

- (a) Rapat di kantor setiap bulan untuk mengetahui permasalahan pemeliharaan, hadir para Mantri /Juru Pengairan, Petugas Pintu Air (PPA), Petugas Operasi Bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A;
- (b) menghadiri rapat di kecamatan dan dinas/pengelola irigasi dalam kegiatan pemeliharaan;
- (c) membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan;
- (d) membantu proses pengajuan bantuan biaya pemeliharaan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A;
- (e) membuat laporan kegiatan pemeliharaan ke sinas.

b) Mantri/Juru

- (a) Membantu kepala ranting untuk tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan;
- (b) mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para Pekerja Saluran (PS) dan Petugas Pintu Air (PPA);
- (c) mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh pemborong;

- (d) membuat laporan pemeliharaan mengenai kerusakan saluran dan bangunan air;
- (e) realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala pada jaringan irigasi;
- (f) menaksir biaya pemeliharaan berkala;
- (g) bersama masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A melakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi;
- (h) menyusun/memilih secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih atau disepakati.

c) Staf Ranting/Pengamat/UPTD/Cabang Dinas/Korwil

Membantu Pengamat dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi.

d) Petugas Operasi Bendung (POB)

- (a) Melaksanakan pengurasan kantong lumpur;
- (b) memberi minyak pelumas pada pintu air;
- (c) melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu bendung secara periodik;
- (d) mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada blangko pemeliharaan;
- (e) membersihkan semak belukar di sekitar bendung;

e) Petugas Pintu Air (PPA)

- (a) Memberi minyak pelumas pada pintu air;

- (b) melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
- (c) membersihkan endapan sampah di sekitar bangunan sadap/ bagi sadap dan di sekitar alat pengukur debit;
- (d) mencatat kerusakan bangunan air/pintu air pada blangko pemeliharaan;
- (e) memelihara saluran sepanjang 50 m di sebelah hilir bangunan sadap;
- f) **Pekerja/Pekarya Saluran (PS)**
 - a) Membersihkan saluran dari gangguan rumput, sampah, lumpur, dan ternak;
 - b) membersihkan endapan dan sampah di sekitar bangunan penting (bangunan bagi, siphon, talang dll);
 - c) menutup bocoran kecil di sepanjang saluran termasuk pengambilan air tanpa izin (liar);
 - d) merapikan kemiringan talud saluran;
 - e) menghalau ternak supaya tidak masuk dan merusak saluran;
 - f) melaporkan kalau ada kerusakan saluran yang cukup parah.

B. Lembaga Komisi Irigasi Kabupaten

Berdasarkan Permen PUPR Nomor:17/PRT/M/2015 pasal 1, yang dimaksud dengan Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air (P3A) tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.

a. Tugas Komisi Irigasi Kabupaten Gowa

a) Peningkatan jaringan irigasi, memberikan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi;

b) Pengelolaan jaringan irigasi.

(a) Mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi yang disusun oleh dinas;

(b) memberikan pertimbangan atas kontrol sosial yang dilakukan oleh P3A terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

c) Pengelolaan aset irigasi

(a) Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;

(b) memberikan pertimbangan dalam rangka penetapan penghapusan aset jaringan irigasi oleh bupati.

d) Pengaturan air irigasi

(a) Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan dan peningkatan jaringan irigasi;

- (b) memberikan masukan kepada bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - (c) memberikan pertimbangan kepada bupati atas penetapan prioritas penyediaan air irigasi dalam mengupayakan keandalan ketersediaan air irigasi, pengendalian, dan perbaikan mutu air irigasi;
 - (d) membahas dan menyepakati rencana tahunan kebutuhan air irigasi yang diusulkan oleh P3A dan disusun oleh dinas teknis yang membidangi irigasi, untuk disampaikan kerapat dewan sumber daya air;
 - (e) membahas dan menyepakati rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang diusulkan oleh perkumpulan petani pemakai air, disusun oleh dinas teknis yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - (f) membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya; dan
 - (g) memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang Irigasi.
- e) Keberlanjutan sistem irigasi, memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi.

f) Pelaporan, Komisi Irigasi Kabupaten berkewajiban melaporkan hasil kegiatan kepada bupati, meliputi program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

b. Fungsi Komisi Irigasi Kabupaten Gowa

Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Gowa, P3A dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya.

c. Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Gowa

Pengarah : Bupati Gowa

Wakil Pengarah : Wakil Bupati Gowa

Koodinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa

Pengurus Komisi Irigasi

1. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Gowa

2. Ketua Harian : Kepala Dinas PSDA/PU Kabupaten Gowa

3. Sekretaris I : Kepala Bidang Irigasi dan Rawa Dinas PSDA
Kabupaten Gowa

4. Sekretaris II : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

5. Ketua Bidang Pemanfaatan Air untuk Usahatani

6. Ketua Bidang Pemanfaatan Air untuk usaha lainnya: Dirut PDAM
Kabupaten Gowa

7. Anggota:

1. Kepala Bagian Pemerintah Setkab Gowa
2. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setkab Gowa
3. Kepala Bagian Hukum Setkab Gowa
4. Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Kabid Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan
6. Kabid SDA dan Prasarana Wilayah BAPPEDA
7. Kabid Sungai dan Pantai Dinas PSDA
8. Kabid Ekonomi dan Sosial Budaya Bappeda
9. Kabid Perencanaan Makro & Pembiayaan Pembangunan Bappeda
10. Kabid Pertambangan Diskoptamben
11. Kabid Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam Badan Lingkungan Hidup
12. Koordinator Penyuluh Kabupaten Gowa

d. Dasar keberadaan Komisi Irigasi Kabupaten Gowa yaitu:

- (a) Inpres RI Nomor 1 tahun 1969, tentang pelaksanaan pengelolaan pengairan,
- (b) Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2007 tentang pedoman mengenai Komisi Irigasi,
- (c) Intruksi bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.4 Tahun 1973,

No.2/Inst/UM/3/1973, No.3/IN/1973, tgl 09 Maret 1973, tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten (Dati II),

- (d) Perda Sul-Sel No.2 Tahun 1987, tentang irigasi dan luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan (IPEP),
- (e) SK Gubernur Sul-Sel No.1513/XI/1988, tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya TK.II,
- (f) Peraturan Daerah Provinsi Sul-Sel No.3 Tahun 2009 tentang irigasi,
- (g) Peraturan Gubernur Sil-Sel No.102 Tahun 2009 Tentang Komisi, Irigasi,
- (h) Peraturan Gubernur Sul-Sel no.138 tahun 2009 tentang kelembagaan pengelolaan irigasi,
- (i) SK Gubernur Sul-Sel no.3023/IX/tahun 2009 tentang pengangkatan pengurus komisi irigasi provinsi Sul-Sel periode 2009 – 2012,
- (j) SK Bupati Gowa No.KPTS.646/XII/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Gowa periode Tahun 2014 – 2017.

e. Hak dan Kewajiban Komisi Irigasi

a) Hak Komisi Irigasi Kabupaten

- (a) Mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
- (b) menyampaikan aspirasi dan pendapat;
- (c) mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;

- (d) ikut dalam proses pengambilan keputusan;
- (e) mempunyai hak suara yang sama;
- (f) dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air kabupaten.

b) Kewajiban anggota Komisi Irigasi Kabupaten

- (a) Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- (b) melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- (c) menghadiri rapat-rapat Komisi Irigasi dan kegiatan lainnya;
- (d) menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi;
- (e) menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

C. Lembaga Petani

Berdasarkan Permen PUPR Nomor:12/PRT/M/2015 pasal 1 yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokrasi oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

a. Sumber Daya Lembaga Irigasi

Lembaga petani yang ada pada Daerah Irigasi Kampili terdiri dari GP3A sebanyak 11 kelompok, P3A sebanyak 131 kelompok, yang terhimpun dalam 1 Induk P3A, dengan luas lahan yang dikelola sebanyak 9.106,30 hektar (Rampisela *et al.*, (2016); Kementrian PUPR (2017).

Adapun jumlah GP3A dan luas lahan yang ada di Daerah Irigasi Kampili dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah Pengurus IP3A, GP3A pada Daerah Irigasi Kampili

No	Nama GP3A	Jumlah Pengurus	Jumlah P3A	Jumlah anggota
1	Minasa Baji	14	7	528
2	Jatia	22	16	566
3	Pallangga	25	16	769
4	Tubarania	12	7	224
5	Assamaturu	22	15	433
6	Kalukuang	21	15	654
7	Galesong Utara	20	6	754
8	Passereanta	24	15	475
9	Sirannuang	25	18	2587
10	Paraikatte	13	6	752
11	Sipakainga	18	10	267
Jumlah		216	131	8.009
Jumlah pengurus IP3A		21		
Jumlah Penyuluh		42		

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 14 dijelaskan bahwa jumlah pengurus yang bergabung dalam GP3A adalah terdiri dari ketua GP3A, wakil ketua, sekertaris dan bendahara, unit operasi dan pemeliharaan, unit IPAIR, dan unit pertanian. beranggotakan seluruh ketua P3A yang ada dalam wilayah kerjanya sebanyak 216 orang, sedangkan IP3A terdiri dari ketua dan anggotanya berasal dari pengurus GP3A yang ada dengan jumlah 21 orang. Jumlah petani sebanyak 8.009 orang (44 P3A) dari 131 P3A yang ada (*The Research Institute for Humanity and Nature Japan (RIHN) and University Hasanuddin*, 2016). Jumlah penyuluh pada D.I. Kampili sebanyak 28 orang, yang tersebar dalam 5 kecamatan yang ada di

Kabupaten Gowa (Data Statistik Kabupaten Gowa 2017) dan 14 orang yang bertugas pada Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Adapun luas lahan masing-masing dari GP3A, jumlah blok tersier pada Daerah Irigasi Kampili dapat lihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Luas lahan GP3A, Blok Tersier dan P3A di Daerah Irigasi Kampili, 2018

No	Nama GP3A	Luas Lahan GP3A (Ha)	Jumlah blok tersier	Panjang saluran tersier (m)	Panjang saluran tersier tanah (m)	Panjang saluran kuarter (m)
1	Minasa Baji	500,60	12	920,00	760,50	46,00
2	Jatia	1.075,20	28	3.100,00	9810,00	17.050,00
3	Pallangga	821,60	25	4.220,00	3850,00	3.400,00
4	Tubarania	133,10	7	625,00	3550,00	2.553,00
5	Assamaturu	829,80	28	3.060,00	20.000,00	14.950,00
6	Kalukuang	1.257,70	25	2.297,00	12.129,00	8.599,00
7	Galesong Utara	1.210,26	23	1.730,00	2.250,00	2.800,00
8	Passereanta	1.144,20	22	6.270,00	8210,00	11.000,00
9	Sirannuang	774,50	19	6.658,20	3.483,59	3.580,86
10	Paraikatte	536,10	9	2.120,00	3.300,00	4.764,00
11	Sipakainga	823,24	17	3.000,00	6.250,00	5.750,00
Total		9.106,30	215	34.000,20	73.593,09	74.492,86

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 15 dijelaskan bahwa jumlah lembaga GP3A yang ada pada Daerah Irigasi sebanyak 11 kelompok. Jumlah blok tersier sebanyak 215 blok, dengan luas lahan persawahan seluas 9.106,30 hektar yang meliputi Kabupaten Gowa, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

b. Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kampili

a) Struktur Organisasi P3A

Secara umum struktur organisasi P3A yang ada pada Daerah Irigasi Kampili yaitu terdiri dari:

- (a) Ketua dan Wakil Ketua dalam organisasi P3A bertugas mengatur jalannya organisasi dan mengorganisir kegiatan stafnya
- (b) Sekretaris mencatat atau membukukan segala peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi termasuk rapat-rapat anggota
- (c) Bendahara mencatat keluar masuknya sumber keuangan dan mengendalikan penggunaan uang
- (d) Pelaksanaan teknis bertugas untuk mengatur pembagian air baik ke saluran kwarter maupun ke petak-petak sawah (Mandoro Je'ne)

b) Struktur Organisasi GP3A

Pengurus GP3A terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Unit O & P, Unit Ipair dan Unit Pertanian.

c) Struktur Organisasi IP3A

Susunan pengurus IP3A terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Unit O dan P, Unit IPAIR, Unit Usaha, Unit Pertanian dan Humas

c. Tugas Pokok dan Fungsi P3A/GP3A/IP3A

a) Sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 Inpres RI Nomor 2 Tahun 1984, tugas P3A adalah sebagai berikut:

1. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan agar air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama petani;
2. melakukan pemeliharaan jaringan tersebut dapat terjaga kelangsungan fungsinya;
3. menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier atau jaringan irigasi pedesaan atau usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi;
4. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perkumpulan;
5. pelaksanaan Tugas P3A ini dapat dilaksanakan bersama antara pengurus dan anggota secara harmonis.

b) Sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 (3) Permen PU, Nomor 33/PRT/M/2007 tugas GP3A adalah sebagai berikut:

Mengkoordinasi beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

- c) Sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 (3) Permen PU, Nomor 33/PRT/M/2007 tugas IP3A adalah sebagai berikut:

Mengkoordinasi beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

- d. Dasar Hukum Pembentukan

Dasar Hukum Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) awalnya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang irigasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Selain aturan tersebut terdapat pula dasar hukum pembentukan P3A mengacu pada Kepmen PU. No.33/PRT/M/2007 yaitu:

- a) Pasal 5 Ayat 1 yaitu petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa;
- b) Pasal 7 ayat 1 yaitu P3A dapat bergabung membentuk GP3A pasal 7 ayat 2; GP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh untuk beberapa

P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan yang terdiri dari P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi di wilayah kerjanya;

c) Pasal 9 ayat 1 yaitu GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A.

Pasal 9 ayat 2; IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu daerah irigasi secara demokrasi dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

e. Dasar Hukum Pembinaan

Dasar Hukum yang mendasari pembinaan dan pengembangan P3A di Kabupaten secara kronologis adalah sebagai berikut:

- a) Inpres RI No. 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan P3A;
- b) Inpres RI No. 3 Tahun 1999 tentang pembaharuan kebijakan pengelolaan Irigasi;
- c) Permen PU. No.33/PRT/M/2007 tentang pedoman pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- d) Undang – Undang no 11 tahun 1971.

f. Pembinaan dan Pemberdayaan P3A oleh Dinas Pertanian

Dasar hukum pembinaan P3A oleh Dinas Pertanian yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012. Sehingga dengan dasar pertimbangan bahwa pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Pengelolaan sumber daya lahan dan air secara terpadu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai perangkat hukum antara lain Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman, khususnya di dalam Pasal 19 yang mengatur tentang pemanfaatan air. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Mengamanatkan Peraturan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dimaksud, khususnya dalam huruf z mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan khususnya sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, sub-sub bidang air irigasi, pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat penetapan kebijakan pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air. Selain itu dalam Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara, khususnya pasal 271 huruf d memberikan kewenangan kepada Kementerian Pertanian untuk menetapkan Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Keberlanjutan suatu lembaga dilihat dari ketersediaan sumber daya yang dimilikinya baik itu sumber daya alam, finansial, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang digunakan di dalam beroperasi. Ohama ((2001) mengemukakan bahwa

ada tiga unsur fundamental dalam pembangunan yakni sumber daya (*resources*), organisasi (*organizations*), dan norma (*norms*). Organisasi adalah pelaku yang mengelola sejumlah sumber daya berdasarkan norma-norma. Kelembagaan Daerah Irigasi Kampili memiliki sumber daya mulai dari sumber daya air, finansial, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya lahan yang digunakan. Sistem pengaturan dan pendistribusian air irigasi dikelola oleh tiga lembaga irigasi seperti yang telah dijelaskan di atas. Ketiga unsur fundamental tersebut dapat di lihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Kelembagaan Irigasi dengan Unsur-Unsur Pembangunan

Kelembagaan Irigasi	Fungsi	Resources (R)	(Organitatio) O	(Norm) N
Lembaga Pemerintah	1. BBWS 1) Mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada menteri; 2) merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan serta keperluan lainnya; 3) merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada menteri; 4) merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, rehabilitasi untuk diteruskan kepada menteri; 5) memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi untuk diteruskan kepada menteri; 6) menyiapkan anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi; 7) melaksanakan perbaikan fasilitas irigasi; dan 8) menyampaikan laporan hasil perbaikan fasilitas irigasi dan realisasi pelaksanaan pengaliran air untuk kebutuhan irigasi.	Sumber daya yang dimiliki BBWS diantaranya: 1) Sungai Jeneberang panjang 90 meter; 2) Sumber daya Air dari Bendungan Bili – Bili dengan kapasitas 23-27 kubik/Detik; 3) debit saluran induk 17,307m³/detik 4) Bendung Kampili kapasitas 10.545 hektar; 5) saluran induk 14.922 meter, bangunan sekunder 29 unit; 6) saluran sekunder panjang keseluruhan 89.315 kilometer; 7) dengan jumlah bangunan 353 buah; 8) Fasilitas rumah jaga sebanyak 10 unit, 11) Kantor 2 unit, dan sanggar tani 3 unit; 12) Operator Irigasi 26 orang. 13) mengelola anggaran operasi dan pemeliharaan irigasi dari pusat.	BBWS	1. Kewenangan penanganan bendung dengan pelayanan irigasi di atas 3000 hektar harus dikelola oleh Pemerintah Pusat. 2. Mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, pengguna air irigasi dan drainase di wilayah kewenangannya 3. Mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi yang berada pada wilayah kewenangannya. 4. Pemerintah Pusat (BBWS) melakukan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi.
	2. DSDCKTR 1) Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas PSDA/PU Kabupaten dalam menetapkan PPA; 2) membuat SK dan menetapkan pengamat, juru, dan PPA pada pintu – pintu air di setiap daerah irigasi; 3) Mengumpulkan hasil laporan pengoperasian dan pemeliharaan pintu – pintu air; 4) Membuat laporan evaluasi pengoperasian dan pemeliharaan pintu –pintu air, 5) mengajukan laporan dan mengesahkan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai; 6) melaksanakan perbaikan fasilitas irigasi dan 6) Membantu	Sumber daya air pada saluran primer dan sekunder	BBWS DSDCKTR	1. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi sehingga Balai Besar Wilayah Sungai Menugaskan (TP-OP) Dinas Sumber daya Air Sulawesi Selatan (DSDCKTR). 2. DSDCKTR mengatur dan menerbitkan SK Petugas Irigasi serta memperoleh laporan dari petugas irigasi tentang kondisi irigasi. 3. DSDCKTR membuat proposal permintaan anggaran untuk biaya

	mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan jadwal pengaturan air yang meliputi lebih dari satu kabupaten			operasi dan pemeliharaan.
	3. Pengamat (Operasi & Pemeliharaan) 1) Operasi (1) Mempersiapkan penyusunan RTTG (rencana Tata Tanam Global) dan RTTD (Rencana Tata Tanam Detail) sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A; (2) menetapkan besarnya faktor-k untuk pembagian air jika debit sungai menurun; (3) rapat di kantor ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, hadir para mantri / juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A; (4) menghadiri rapat di kecamatan dan dinas PSDA kabupaten dalam rangka operasi dan pemeliharaan; (5) Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi; (6) membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A; (7) Membuat laporan kegiatan operasi ke Dinas PSDA Provinsi; 2) Pemeliharaan (1) Rapat di kantor setiap bulan untuk mengetahui permasalahan pemeliharaan, hadir para mantri / juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas operasi bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A; (2) menghadiri rapat di kecamatan dan dinas/pengelola irigasi dalam kegiatan pemeliharaan; (3) membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan; (4) membantu proses pengajuan bantuan biaya pemeliharaan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A; (5) membuat laporan kegiatan pemeliharaan ke Dinas.	Sumber daya air pada Daerah Irigasi Kampili	BBWS DSDACKTR	1. Menginformasikan kondisi jaringan irigasi Kampili kepada BBWS 2. Menegur operator irigasi jika tidak menjalankan tugasnya. 3. Memerintahkan POB untuk menyampaikan bukaan pintu di bendung.
	4. Petugas Mantri / Juru Pengairan 1). Operasi: (1) Membantu kepala Pengamat untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi;	Sumber daya air pada saluran primer	BBWS DSDACKTR	Juru Primer berhak mengintruksikan PPA dalam menentukan jadwal membuka

	(2) melaksanakan instruksi dari Pengamat tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur; (3) memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan; (4) memberi saran kepada petani tentang awal tanam & jenis tanaman; (5) pengaturan giliran pembagian air (6) mengisi papan operasi/ eksploitasi Membuat laporan/mengumpul data: (1) Data debit ; (2) data tanaman & kerusakan tanaman; (3) data curah hujan (sesuai kebutuhan daerah); (4) data mutasi baku sawah (sesuai kebutuhan daerah); (5) data usulan Rencana Tata Tanam (RTT); (6) melaporkan kejadian banjir kepada Pengamat; (7) melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada Pengamat. 2) Pemeliharaan: (1) Membantu kepala ranting untuk tugas - tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan; (2) mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para pekerja saluran (PS) dan petugas pintu air (PPA); (3) mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh pemborong; (4) membuat laporan pemeliharaan mengenai kerusakan saluran dan bangunan air; (5) realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala pada jaringan irigasi; (6) menaksir biaya pemeliharaan berkala; (7) bersama masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A melakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi; (8) menyusun / memilih secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih atau disepakati.			dan menutup pintu air irigasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi petugas dalam kegiatan operasi irigasi.
	5. Petugas Operasi Bendung (POB) 1) Operasi: (1) Melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang; (2) melaksanakan pengurusan kantong lumpur; (3) membuka/menutup pintu pengambilan utama,	Sumber daya air pada bendung Kampili	BBWS	Dalam menjalankan fungsi operasi dan pemeliharaan pada bendung ditugaskan kepada Petugas Operasional Bendung (POB) yang menjalankan peran dan fungsinya dalam pengaturan

	sesuai debit dan jadwal yang direncanakan; (4) mencatat besarnya debit yang mengalir / atau masuk ke saluran induk pada blangko operasi; (5) mencatat elevasi muka air banjir. 2) Pemeliharaan: 1) Melaksanakan pengurusan kantong lumpur ; 2) memberi minyak pelumas pada pintu air; 3) melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu bendung secara periodik; 4) mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada blangko pemeliharaan; 5) membersihkan semak belukar di sekitar bendung.			pendistribusian air di Bendung, serta pemeliharaan sekitar sungai dan saluran bendung hingga ke bangunan penguras
	6. Petugas Pintu Air (PPA): 1) Operasi Membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah Juru/Mantri Pengairan. 2) Pemeliharaan: (1) Memeriksa aliran pintu dan melaporkan ke juru pengairan apabila terjadi perubahan aliran; (2) memberi minyak pelumas pada pintu air; (3) melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik; (4) membersihkan endapan sampah di sekitar bangunan sadap / bagi sadap dan di sekitar alat pengukur debit; (5) mencatat kerusakan bangunan air / pintu air pada blangko pemeliharaan; (6) memelihara saluran sepanjang 50 m di sebelah hilir bangunan sadap.	Sumber daya air pada saluran primer dan sekunder	BBWS DSDACKTR	Membuka dan menutup pintu air irigasi hanya dapat dilakukan oleh PPA Primer berdasarkan tugas pokok dan fungsi petugas dalam kegiatan operasi irigasi
	7. Pekerja/Pekarya Saluran (PS): 1) Membersihkan saluran dari gangguan rumput, sampah, lumpur dan gangguan ternak; 2) membersihkan endapan dan sampah di sekitar bangunan penting (bangunan bagi, siphon, talang dll); 3) menutup bocoran kecil di sepanjang saluran termasuk pengambilan air tanpa izin (liar); 4) merapikan kemiringan talud saluran; 5) menghalau ternak supaya tidak masuk dan merusak saluran.	Sumber daya air pada saluran primer dan sekunder	DSDCKTR	PS bertugas membersihkan saluran irigasi dan menutup bocoran atau pengambilan air ilegal pada bangunan irigasi

	1. Melaporkan kalau ada kerusakan saluran yang cukup parah.			
	8. PU Kabupaten/PSDA Kabupaten: 1) Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemeliharaan air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya; 2) mengajukan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi; 3) memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi; 4) membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam; dan 5) Melaksanakan training IP3A/GP3A/P3A dalam pengelolaan pemeliharaan fasilitas irigasi	Anggaran Kabupaten	PU/PSDA Kabupaten	1. Menteri, Gubernur dan Bupati bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer serta sekunder atas dasar kesepakatan 2. Sebagai Sekretaris Komisi Irigasi maka PSDA/PU memiliki komitmen melaksanakan hasil keputusan rapat komisi irigasi
	9. Pertanian 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan di daerah; 2) memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum untuk daerah pertanian yang lintas kabupaten/kota; 3) Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan di daerah; 4) Membina unit pelaksana teknis dinas; dan 5) Melaksanakan ketatausahaan dinas.	Anggaran Dana untuk saluran tersier	Dinas Pertanian	1. Kementrian Pertanian melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan sebesar Rp.1.200.000 perhektar untuk perbaikan saluran tersier. 2. Peraturan Menteri Pertanian No.79/Permentan/OT.140/12/2012 Dinas Pertanian memiliki tugas membina dan memberdayakan lembaga P3A
Lembaga Petani	1. P3A 1. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan agar air irigasi dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama petani; 2. melakukan pemeliharaan jaringan tersebut dapat terjaga kelangsungan fungsinya; 3. menentukan dan mengatur iuran dari para anggota berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier atau jaringan irigasi pedesaan atau	1) Sumber daya air pada saluran tersier; 2) bangunan Blok tersier 215 blok; 3) Panjang saluran tersier 34.000,20 meter; 4) panjang saluran tersier tanah 73.593,09 meter; 5) panjang saluran kuarter 74.492,86 meter; 6) luas lahan 9.106,30 hektar; 7) anggota petani kurang lebih 8.009 orang; dan 8) iuran anggota P3A	1. P3A 2. Kelompoktani 3. Dinas Pertanian 4. PU/PSDA Kabupaten	1. Sesuai amanat UU No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan bahwa pembangunan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di wilayah kerjanya 2. Permen PUPR No.12/PRT/M/2015 Pasal 1 yaitu P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah

	usaha – usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi; 4. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perkumpulan; 5. pelaksanaan Tugas P3A ini dapat dilaksanakan bersama antara pengurus dan anggota secara harmonis.			petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokrasi oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. 3. AD/RT P3A 4. Ketua P3A mengambil alih pekerjaan Mandoro je'ne yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan AD/RT 5. Anggota yang tidak ikut dalam kegiatan kerja bakti tidak akan diberikan bantuan yang ada pada kelompok
	GP3A Berkoordinasi beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya	131 P3A	GP3A	1. AD/RT kelompok IP3A 2. GP3A sebagai lembaga bentukan PSDA Kabupaten berhak membawa aspirasi P3A ke tingkat Kabupaten
	IP3A Mengkoordinasi beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Kampili pada tingkat primer	11 GP3A	IP3A	1. AD/RT IP3A 2. Sebagai lembaga tertinggi di dalam lembaga petani pemakai air, berhak menyampaikan aspirasi petani sampai ke tingkat pusat . 3. Memiliki hak untuk berkoordinasi dengan operator irigasi dalam menyampaikan kondisi saluran pada tingkat primer. 4. Mewakili lembaga petani dalam menyuarkan .aspirasi 5. Hasil Keputusan rapat pada tingkat IP3A maka lembaga IP3A meminta pembukaan pintu bendung untuk keperluan pengaliran air jika

				pengaliran air terlambat.
Lembaga Komisi Irigasi	Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten yang bersangkutan	6 orang pengurus 7 orang anggota	Komisi Irigasi	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 17/PRT/M/2015 Tentang Komisi Irigasi 2. Hasil Rapat Komisi Irigasi tentang Rekomendasi jadwal pengaliran air dan pola tanam

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 16, dapat dijelaskan keterkaitan antara lembaga irigasi dan unsur R-O-N dalam sistem pengaturan pendistribusian air irigasi pada D.I. Kampili berdasarkan fungsi masing-masing lembaga sebagai berikut:

a. R-O-N dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi pada Level Bendung

Bendung Kampili memanfaatkan air dari sungai Jeneberang yang sebelumnya di bendung pada Dam Bili-bili dan sungai Jenelata untuk pelayanan irigasi pada lahan persawahan tiga kali musim tanam. Pengaturan pendistribusian air irigasi mulai dari bendung, saluran primer, dan saluran sekunder merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang Sulawesi Selatan (BBWS). Adapun R-O-N yang dimiliki oleh Level Bendung sebagai berikut:

a) Resources

Sumber daya yang dimiliki BBWS diantaranya: 1) Sungai Jeneberang panjang 90 meter; 2) Sumber daya air dari Dam Bili-bili dengan kapasitas 23-27 kubik/detik; 3) Debit saluran induk 17,307 m³/detik; 4) Bendung Kampili kapasitas 10.545 hektar; 5) Panjang saluran induk 14.922 meter; 6) Panjang saluran sekunder keseluruhan 89.315 meter; 7) Jumlah bangunan irigasi 353 buah; 8) Fasilitas rumah jaga sebanyak 10 unit; 9) Kantor 2 unit, sanggar tani 3 unit; dan 10) Operator Irigasi 26 orang.

b) *Organisation (O)*

Organisasi yang mengatur sumber daya pada bendung adalah BBWS yang dilaksanakan oleh Petugas Operasional Bendung (POB). Dalam aturan pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Sumber Daya Air (SDA), sehingga bendung Kampili yang memiliki pelayanan irigasi di atas 3000 hektar merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili oleh BBWS. Selain lembaga pemerintah, terdapat lembaga Komisi Irigasi yang terlibat dalam pengaturan pendistribusian air di bendung. Komisi Irigasi bertugas memerintahkan POB dalam pembukaan pintu bendung untuk pengaliran pertama berdasarkan hasil keputusan rapat komisi.

c) *Norm (N)*

Norma atau aturan yang menjadi acuan dari BBWS dalam pengaturan sumber daya di bendung yaitu: 1) Pemerintah Pusat dalam hal ini BBWS memiliki kewenangan penanganan bendung dengan pelayanan Irigasi di atas 3000 hektar; 2) Mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi dan drainase; 3) Mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi yang berada pada wilayah kewenangan; dan 4) Pemerintah Pusat

(BBWS) melakukan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi. Sedangkan norma dari Komisi Irigasi yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 17/PRT/M/2015 tentang fungsi Komisi Irigasi. Komisi Irigasi merupakan lembaga yang ditugaskan berkoordinasi antara lembaga pemerintah dengan lembaga petani dalam hal pengaturan irigasi. Selain norma tersebut terdapat aturan yang diacuh oleh Komisi Irigasi yaitu jadwal pengaliran air irigasi dan jadwal tanam ditentukan berdasarkan hasil keputusan rapat komisi.

Berdasarkan R-O-N pada level bendung maka dapat dijelaskan bahwa (*resources*)/sumber daya pada bendung dikelola oleh (*organisation*)/organisasi BBWS dan Komisi Irigasi akan tetapi dalam pelaksanaannya pengaturan pendistribusian air tidak sesuai dengan norma, disebabkan keterlambatan Komisi Irigasi melaksanakan rapat sementara petani sudah membutuhkan air karena sudah masuk jadwal tanam sehingga Juru Primer meminta kepada POB untuk membuka pintu bendung berdasarkan hasil rapat IP3A dan tudang sipulung Dinas Pertanian.

b. R-O-N dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi pada Level Primer

a) *Resources* (R)

Sumber daya pada level primer (*Resources*) berupa: 1) Air pada saluran primer berjarak kurang lebih 14,922 kilometer; 2)

Bangunan bagi utama 3 unit; 3) Bangunan sadap 13 unit; 4) Bangunan bagi sadap 5 unit; dan 5) Operator irigasi 18 orang.

b) *Organisation (O)*

Sumber daya pada level primer dikelola oleh Dinas Sumber daya Cipta Karya dan Tata Ruang (DSDACKTR) Provinsi Sulawesi Selatan yang ditugaskan oleh BBWS. DSDACKTR menugaskan Juru Primer dan PPA Primer dalam pengaturan sumber daya pada level primer. Selain lembaga pemerintah terdapat lembaga petani IP3A yang berkoordinasi dengan Juru Primer untuk mengatasi kekurangan air pada saluran primer.

a) *Norm (N)*

Juru Primer dalam mengatur sumber daya pada level primer berhak mengintruksikan PPA Primer dalam menentukan jadwal membuka dan menutup pintu air irigasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan operasi irigasi. Untuk membuka dan menutup pintu air irigasi hanya dapat dilakukan oleh PPA Primer berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan operasi irigasi. Walaupun dalam kenyataannya terkadang petani membuka pintu air irigasi tanpa sepengetahuan PPA Primer dengan merusak atau mengganti gembok yang ada pada pintu irigasi. Kondisi ini dapat diselesaikan dengan adanya komunikasi antara lembaga petani dengan operator irigasi sehingga permasalahan ini tidak berlanjut.

Pengaturan sumber daya (R) pada level primer dikelola oleh Juru Primer dan PPA Primer dan terlibat pula organisasi IP3A berkoordinasi dengan petugas operator untuk kelancaran pengaturan pendistribusian air irigasi. Dengan keterlibatan banyak *organisation* (O) dalam mengatur pendistribusian air irigasi pada level saluran primer dapat mengatasi permasalahan kekurangan air pada saluran primer dapat diatasi dengan adanya koordinasi antara *organisation* (O) yang ada dengan menjalankan fungsi berdasarkan *norm* (N) yang dimilikinya.

c. R-O-N dalam Pengaturan Pendistribusian Air pada Level **Sekunder**

Selain R-O-N dalam pengaturan pendistribusian air pada Level Primer terdapat pula R-O-N pada Level Sekunder yaitu sebagai berikut:

a) *Resources* (R)

Pengaturan pendistribusian air irigasi pada level sekunder berupa: 1) Sumber daya (*resources*) air pada level saluran sekunder panjang 89,315 Kilometer; 2) Bangunan sekunder 29 saluran; 3) Bangunan bagi/sadap 2 unit; 4) Bangunan sadap 106 unit; dan 5) Bangunan bagi 11 unit.

b) *Organisation* (O)

Lembaga yang terlibat di dalam pengaturan air irigasi pada level sekunder sama dengan lembaga pada level primer akan tetapi operator yang bertugas berbeda. Level sekunder diatur oleh Juru Sekunder, PPA Sekunder, dan lembaga petani GP3A yang berkoordinasi dengan

Juru Sekunder dan PPA Sekunder untuk mengatasi kekurangan air pada level saluran sekunder.

c) *Norm* (N)

Norm (N) yang diterapkan adalah aturan dari fungsi masing-masing *organisation* (O). Juru Sekunder dalam mengatur sumber daya pada level sekunder berhak mengintruksikan PPA dalam menentukan jadwal membuka dan menutup pintu air irigasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan operasi irigasi. Untuk membuka dan menutup pintu air irigasi hanya dapat dilakukan oleh PPA Sekunder berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan operasi irigasi.

Pengaturan sumber daya (R) pada level sekunder dikelola oleh (O) Juru Sekunder dan PPA Sekunder dan organisasi GP3A yang berkoordinasi dengan petugas operator untuk kelancaran pengaturan pendistribusian air irigasi pada Level Sekunder. Sumber daya air irigasi pada saluran sekunder kadang tidak terbagi dengan baik sesuai dengan aturan pendistribusian adanya pengambilan langsung ke saluran oleh petani, tugas PPA Sekunder terkadang diambil alih oleh Mandoro je'ne atau ketua P3A jika petani butuh dan air tersedia pada saluran sekunder dan PPA belum membuka pintu air irigasi.

d. R-O-N dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi pada Tingkat Tersier

Bagian paling hilir dalam sistem pendistribusian air irigasi adalah level tersier adapun R-O-N yang dimiliki sebagai berikut:

a) *Resources* (R)

Resources (R) yang dikelola pada pendistribusian air irigasi level tersier adalah: 1) Air pada saluran tersier; 2) Blok tersier sebanyak 215 blok; 3) Saluran tersier permanen 34.000,20 meter; 4) Saluran tersier tanah 73.593,09 meter; 5) Saluran kuarter 74.492 meter; 6) Luas lahan 9.106,30 hektar; dan 7) Anggota P3A 8.009 orang dari 44 P3A.

b) *Organisation* (O)

Organisation (O) level tersier dikelola oleh; 1) P3A 131 kelompok. Selain P3A pada saluran tersier Daerah Irigasi Kampili; 2) Dinas Pertanian yang berperan membina P3A dan memperbaiki saluran tersier; 3) Kelompok tani sebagai lembaga petani; 4) Komisi Irigasi sebagai lembaga koordinasi pada tingkat lembaga petani.

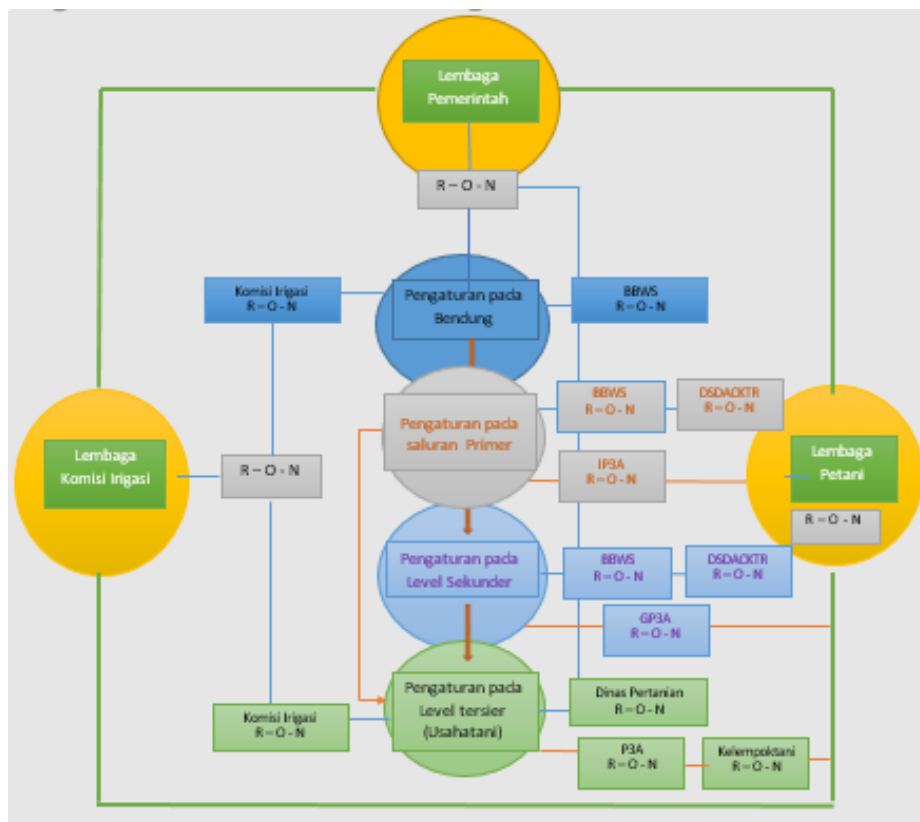
c) *Norm* (N)

Operasi dan pemeliharaan saluran tersier diserahkan kepada P3A dikelola secara swadaya dan dapat menerima bantuan dari lembaga lain. Level tersier terdapat aturan berupa AD/RT yang berisi aturan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota P3A dalam pengaturan pendistribusian, iuran anggota berupa gabah 5% untuk pengembangan lembaga P3A yang dibayarkan untuk

Mandoro je'ne dan operasional lembaga. P3A memiliki kesepakatan hasil rapat tentang penyelesaian konflik sesama anggota dan di luar anggota penanganan konflik dengan petugas irigasi.

Norm (N) yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Tujuannya adalah melancarkan proses pendistribusian pada tersier. Selain pemberian bantuan dalam pemeliharaan sarana, Dinas Pertanian menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang membina P3A sesuai dengan aturan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan maka dinas pertanian melalui aturan kementerian pertanian melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga petani pemakai air untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Lembaga Komisi Irigasi menjalankan fungsinya sebagai lembaga koordinasi antara pemerintah dan lembaga petani berdasarkan hasil keputusan rapat komisi dengan merekomendasikan jadwal tanam bagi petani.

Berdasarkan uraian R-O-N pada sistem pengaturan air irigasi yang dimiliki oleh setiap level dapat diketahui keterkaitan struktur fungsional setiap kelembagaan yang ada pada sistem pendistribusian irigasi Daerah Irigasi Kampili dengan R-O-N setiap kelembagaan irigasi disajikan pada Gambar 18 berikut:



Gambar 18. Interkoneksi R – O – N Kelembagaan Irigasi dalam Sistem Pengelolaan Irigasi Daerah Irigasi Kampili

Berdasarkan Gambar 18, menjelaskan bahwa level bendung terdapat *Resources (R)* sumber daya air yang dikelola oleh semua level yang merupakan sumber daya utama dalam irigasi. Walaupun pada masing-masing level tersebut memiliki sumber daya yang berbeda seperti yang telah dijelaskan di atas. Air pada bendung diatur oleh *Organisation (O)* yaitu BBWS dalam hal ini POB, dengan penerapan norm pada bendung dengan kapasitas pelayanan di atas 3000 hektar berada di bawah kewenangan BBWS. Sedangkan level primer terdapat *Resources (R)* yang sama yaitu air pada saluran primer berinteraksi dengan beberapa *Organisation (O)*, terdapat BBWS, DSADCKTR (Pengamat,

Juru Primer, PPA Primer) dan IP3A dengan menjalankan *norm* (N) yang berbeda. Level saluran sekunder terdapat *Resources* (R) yang sama pula yaitu air pada saluran sekunder berinteraksi dengan 2 *Organisation* (O) yaitu DSADCKTR (Pengamat, juru sekunder, PPA Sekunder) dan GP3A. Sedangkan level pada saluran tersier, kuarter dan saluran cacing hingga ke lahan sawah terdapat *Resources* (R) air yang dikelola oleh *Organisation* (O) P3A dan kelompok tani dalam pendistribusian serta dibantu oleh Dinas Pertanian dalam perbaikan saluran tersier dengan menjalankan *Norm* (N) yang berbeda pada masing-masing organisasi.

BAB VII

STAKEHOLDER DAN KONTESTASI AKTOR DALAM PENGELOLAAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI KAMPILI

A. Identifikasi *Stakeholder* dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi

Mitchell *et al.*, (1997) mendefenisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Fletcher *et al.*, (2003) mendefenisikan *stakeholders* adalah orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Masing – masing *stakeholder* memiliki *interest* and *power*. Mitchell *et al.*, (1997); Fletcher *et al.*, (2003) maksud *interest* yaitu kepentingan/kepedulian *stakeholders* dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada D.I. Kampili. Sedangkan *power* adalah kekuatan/kemampuan/kewenangan/pengaruh *stakeholder* untuk mengatur pendistribusian air irigasi pada D.I. Kampili sehingga dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu *stakeholder* primer, sekunder, dan kunci (ODA, 1995; Grimble, 1998). Adapun yang menjadi *stakeholder* kunci, utama dan pendukung yaitu:

1. *Stakeholder* kunci yaitu: 1) Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang (BBWS) karena lembaga ini mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada menteri. BBWS juga merumuskan rencana tahunan penyediaan,

pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya. BBWS merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada menteri. BBWS merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada menteri; memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada menteri; menyiapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas irigasi; 2) Unit Pengelola Bendungan berperan dalam memberikan informasi ketersediaan air yang dapat digunakan untuk kegiatan irigasi setiap musim tanam dan laporan realisasi pengaliran air untuk kegiatan pertanian; 3) DSDACKTR menjadi *stakeholder* kunci dalam kapasitasnya membuat SK dan menetapkan operator irigasi, mengajukan dan mengesahkan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, rehabilitasi kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai; 4) UPTD DSDACKTR Jeneberang sebagai *stakeholder* karena perannya dalam memberikan rekomendasi kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; 5) Dinas Pertanian memiliki kewenangan memberikan bimbingan teknis terhadap P3A dan menyiapkan anggaran dalam perbaikan fasilitas irigasi tersier sesuai dengan usulan dari lembaga petani; 6) stakeholder PU/PSDA kabupaten merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian air irigasi yang efisien untuk pertanian

dan keperluan lainnya, mengajukan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi: prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, rehabilitasi, dan melaksanakan training pada IP3A/GP3A/P3A dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas irigasi; dan 7) Bappeda/Komisi Irigasi Kabupaten menjadi *stakeholder* kunci karena memiliki peran merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien untuk pertanian dan kepentingan lainnya dan menyiapkan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas terkait serta melegalisasi organisasi kelembagaan P3A/GP3A/IP3A yang ada di kabupaten.

2. *Stakeholder* utama terdiri dari: 1) Operator irigasi (Pengamat, BOP, Juru Primer, Juru Sekunder, PPA Primer, PPA Sekunder, PS Primer dan PS Sekunder), operator irigasi terlibat langsung baik operasi maupun pemeliharaan Daerah Irigasi Kampili, dalam mengatur, membagi dan mengawasi pendistribusian air irigasi pada tingkat bendung, primer dan sekunder; 2) IP3A, GP3A, P3A, dan petani non D.I Kampili menjadi *stakeholder* utama karena memiliki kepentingan langsung dalam penggunaan air irigasi.
3. *Stakeholder* sekunder (pendukung/penunjang) yaitu Keamanan, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun, LSM dan peneliti hal ini dikarenakan tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan formal dalam pengelolaan dan pengaturan pendistribusian air irigasi sehingga perannya hanya sebatas memfasilitasi sedangkan LSM dan peneliti

tidak memiliki legalitas dalam mengatur akan tetapi hasil temuannya dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan *stakeholder* kunci.

B. Peran *Stakeholder* dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi

Peran *stakeholder* dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada terdapat 13 kegiatan (Rampisela, 2015; PSDA, 2016). Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Rapat P3A untuk persiapan pengaliran air musim tanam.
2. Rapat GP3A untuk persiapan pengaliran air pada musim tanam.
3. Rapat Koordinasi GP3A dan PPA Primer untuk penyusunan jadwal pengaliran air.
4. Rapat Komisi Irigasi untuk penetapan jadwal pengaliran air.
5. Rapat GP3A penyusunan jadwal rinci di tingkat sekunder.
6. Sosialisasi jadwal pengaliran air.
7. Pelaksanaan gotong royong.
8. Pengaliran air untuk persemaian.
9. Pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah.
10. Usaha untuk mengatasi kekurangan air.
11. Monitoring pengaliran air.
12. Rapat evaluasi pengaliran air di tingkat IP3A dan penyusunan rencana konstruksi besar.
13. Rapat evaluasi pengaliran Air di tingkat GP3A.

Berdasarkan 13 kegiatan *stakeholder* dalam pengaturan pendistribusian air irigasi sehingga semua *stakeholder* mempunyai peran

dalam kegiatan tersebut, adapun kegiatan dan peran *stakeholder* adalah sebagai berikut:

a. *Stakeholder* Kunci

Daerah Irigasi Kampili merupakan kewenangan pusat ditugaskan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, selain itu terdapat pula *stakeholder* dari unit pengelolaan bendung, DSDACKTR Provinsi, UPTD DPSACKTR, Dinas Pertanian, PU Kabupaten/PSDA Kabupaten, Bappeda. Adapun peran aktor dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili adalah sebagai berikut:

Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS-JP) memiliki peranan sebagai berikut: 1) Melancarkan pengaturan pendistribusian air dari bendung Kampili sehingga BBWS dapat memberikan informasi tentang ketersediaan air di waduk; 2) melaporkan persiapan bendung dalam kegiatan rapat komisi irigasi untuk penetapan jadwal pengaliran air sehingga BBWS dapat mempertimbangkan kondisi air dan menyetujui jika kondisi air memungkinkan untuk dialirkan ke sungai dalam mengatasi kekurangan air berdasarkan laporan kondisi air di waduk dan bendung; 3) mengumpulkan laporan realisasi pengaliran dari Kantor Pengelolaan Waduk, POB dan Pengamat dalam kegiatan monitoring pengaliran air sehingga BBWS dapat memperoleh laporan tentang kondisi bangunan pada saluran primer dan sekunder. Berdasarkan peran dalam pengaturan pendistribusian air irigasi maka

BBWS berkoordinasi dengan unit pengelola Bendungan Bili-bili, Bappeda, POB Kampili, dan pengamat.

Unit Pengelolaan Bendungan Bili-bili memiliki peran dalam kegiatan pengaturan pendistribusian air irigasi sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi alokasi ketersediaan air untuk kebutuhan di Daerah Irigasi dengan tujuan untuk menentukan jadwal pengaliran air irigasi dalam kegiatan rapat koordinasi penyusunan jadwal pengaliran air irigasi; 2) melakukan rapat persiapan pengaliran air serta mengalirkan air sesuai jadwal dengan tujuan petakan sawah memperoleh air dalam jumlah yang cukup dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian; 3) melaporkan dan membahas permintaan penambahan air irigasi ke BBWS dengan tujuan agar air tersedia sesuai dengan jadwal dan jumlah yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha untuk mengatasi kekurangan air; dan 4) monitoring pengaliran air, mencatat dan melaporkan ketersediaan air yang akan dialirkan ke bendung kepada BBWS dengan tujuan agar cakupan dan penyebab masalah dapat diketahui dalam kegiatan monitoring pengaliran air irigasi.

UPTD PSDACKTR memiliki peran dalam kegiatan pengaturan pendistribusian air irigasi sebagai berikut:

- 1) Memberikan daftar pengaliran air kepada petugas pintu irigasi dengan tujuan menetapkan jadwal pengaliran air yang telah disepakati oleh stakeholder dalam kegiatan rapat Komisi Irigasi penetapan jadwal pengaliran air irigasi; 2) pengadaan peralatan kerja lapangan dengan tujuan agar saluran bersih dan semua

pintu air berfungsi dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; 3) menyiapkan pompa air jika diperlukan dengan tujuan agar air tersedia sesuai dengan jadwal dan jumlah yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha untuk mengatasi kekurangan air; dan 4) memfasilitasi rapat evaluasi pengaliran air di tingkat IP3A dan penyusunan rencana konstruksi besar dengan tujuan agar rencana dan prioritas perbaikan fasilitas irigasi tidak mengganggu jadwal pengaliran air dan kegiatan pertanian.

Dinas Pertanian memiliki peran dalam kegiatan pengaturan pendistribusian air irigasi sebagai berikut: 1) Memberikan masukan tentang jadwal tanam dan memastikan ketersediaan bibit dan pupuk untuk petani tepat waktu yang bertujuan untuk penetapan jadwal pengaliran air yang disepakati oleh stakeholder dalam rapat Komisi Irigasi untuk penetapan jadwal pengaliran air; 2) mengatasi kekurangan air dengan menyiapkan pompa air jika diperlukan bertujuan agar air tersedia sesuai dengan jadwal dan jumlah yang dibutuhkan.

Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (DPSACKTR) memiliki peran dalam kegiatan pengaturan pendistribusian air irigasi sebagai berikut: 1) Dalam kegiatan rapat Komisi Irigasi penetapan jadwal pengaliran air, DSDACKTR memberikan daftar kepada petugas pintu irigasi yang berada di bawah naungannya, serta melaporkan rencana perbaikan saluran, dan menerima laporan Operasi dan Pemeliharaan dari IP3A yang bertujuan untuk penetapan jadwal pengaliran air yang telah disepakati oleh stakeholder dalam kegiatan rapat

Komisi Irigasi penetapan jadwal pengaliran air; 2) menganalisis laporan realisasi pengaliran air dari pengamat dengan tujuan agar cakupan dan penyebab masalah dapat diketahui dalam kegiatan monitoring pengaliran air irigasi.

PSDA Kabupaten/Dinas PU Kabupaten sebagai sekertaris Komisi Irigasi sehingga memiliki peran dalam mencatat hasil keputusan dan melaksanakan komitmen hasil rapat dalam kegiatan rapat komisi irigasi.

Bappeda selaku Ketua Komisi Irigasi memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Membuat dan mendistribusikan undangan; 2) memfasilitasi pertemuan;
- 3) meminta masukan dari peserta rapat tentang jadwal pengaliran, hambur, laporan kerusakan, dan perkiraan cuaca; 4) membuat hasil keputusan rapat komisi irigasi tentang jadwal hambur di tiga daerah irigasi (Bili-bili, Bissua, Kampili); 5) mengesahkan hasil keputusan rapat komisi irigasi; dan 6) memperbanyak dan mendistribusikan hasil keputusan rapat komisi irigasi

b. *Stakeholder* Utama

Stakeholder/Aktor utama yaitu pelaku yang berkepentingan langsung dalam pengelolaan dan pengaturan pendistribusian air irigasi yaitu petani sebagai pengguna air irigasi dan operator irigasi yang bertugas mengatur pendistribusian air irigasi dari bendung hingga ke lahan persawahan. Adapun peran dari stakeholder utama tersebut adalah sebagai berikut:

Pengamat berperan membawa daftar petugas PPA yang bertugas pada semua pintu air irigasi serta menandatangani hasil keputusan rapat dengan Tujuan penentuan jadwal membuka dan menutup pintu saluran primer dalam kegiatan rapat koordinasi GP3A dan PPA Primer.

Petugas Operasional Bendung (POB) memiliki peran dalam kegiatan pengaturan pendistribusian air irigasi sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan tentang kesiapan bukaan pintu di bendung tujuannya menentukan jadwal pengaliran air dalam kegiatan rapat koordinasi GP3A dan PPA Primer untuk penyusunan jadwal pengaliran air;
- 2) membersihkan dan mengecek pintu bendung dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong dengan tujuan saluran bersih dan semua pintu air berfungsi dengan baik;
- 3) membuka dan mengatur tinggi bukaan pintu bendung
- 4) melaporkan kepada pengamat apabila pintu bendung sudah terbuka, dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian dengan tujuan petakan sawah memperoleh air dalam jumlah yang cukup;
- 4) mengatur dan melaporkan tinggi bukaan pintu bendung ke pengamat dengan tujuan petakan sawah memperoleh air dalam jumlah yang cukup pada kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah;
- dan 5) menyesuaikan dan mengecek bukaan pintu bendung berdasarkan hasil kesepakatan dan mencatat, melaporkan realisasi tersebut kepada BBWS dalam kegiatan monitoring pengaliran air;
- 6) mengatur pintu penguras, menguras kantong lumpur, membuka/menutup pintu pengambilan utama sesuai debit dan jadwal yang direncanakan serta

mencatat besarnya debit yang mengalir ke saluran induk pada blangko operasional.

Juru Primer yang memiliki kewenangan untuk mengatur operasional dan pemeliharaan saluran primer (induk) dari BL 1 – BL 17. Adapun perannya dalam kegiatan pengaturan pendistribusian air irigasi sebagai berikut: 1) Memberikan masukan tentang jadwal buka dan tutup pintu saluran primer dalam kegiatan rapat koordinasi GP3A dan PPA Primer untuk penyusunan jadwal pengaliran air; 2) memerintahkan PPA Primer untuk memasang jadwal buka tutup pintu di pintu primer dengan tujuan petani dan petugas terkait memahami jadwal pengaliran air; 3) berkoordinasi dengan IP3A untuk menyepakati jadwal pelaksanaan serta memerintahkan PPA dan PS untuk hadir dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong, dan menyiapkan alat kelengkapan gotong royong pada kegiatan pelaksanaan gotong royong; 4) mengingatkan, mengawasi PPA Primer dalam buka/tutup pintu irigasi, memantau juru sekunder di wilayah rawan air, melapor ke pengamat jika terjadi kekurangan air dalam kegiatan pengaliran air pada saat persemaian, pengolahan tanah, dan tanam pindah; 5) melakukan monitoring ke wilayah rawan air, membahas jalan keluar jika ada masalah dengan PPA Primer, dan mengumpulkan realisasi pengaliran dari PPA Primer dalam kegiatan monitoring pengaliran air yang bertujuan mengetahui kondisi air di persawahan; 6) mengumpulkan laporan serta melaporkan kondisi saluran, pintu air irigasi yang rusak, jadwal buka dan tutup pintu, dan menandatangani hasil

keputusan rapat dalam kegiatan rapat evaluasi pengaliran air di tingkat IP3A, penyusunan rencana konstruksi besar bertujuan rencana prioritas perbaikan fasilitas irigasi tidak mengganggu jadwal pengaliran air dan kegiatan pertanian.

Juru Sekunder mengatur pemeliharaan dan operasional pada saluran sekunder sehingga memiliki peran sebagai berikut: 1) Memberikan daftar petugas PPA pada semua pintu irigasi dalam kegiatan rapat GP3A persiapan pengaliran air; 2) menyusun jadwal buka/tutup pintu air saluran sekunder dalam kegiatan rapat GP3A; 3) mengkonfirmasikan jadwal ke PPA sekunder dalam kegiatan sosialisasi jadwal pengaliran air; 4) mengkoordinir PPA sekunder dalam kegiatan gotong royong serta menyiapkan karung untuk menutup dinding saluran yang bocor/rusak dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; 5) mengawasi PPA Sekunder dalam buka/tutup pintu serta mengecek air di saluran, melapor ke PPA Primer jika air kurang dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian, pengolahan tanah dan tanam pindah; 6) mendampingi PPA sekunder untuk membuka ampang, melakukan monitoring ke wilayah rawan air, membahas jalan keluar jika ada masalah dengan PPA sekunder dan PPA primer, mengumpulkan realiasi pengaliran air dari PPA sekunder dalam kegiatan usaha untuk mengatasi kekurangan air dan monitoring pengaliran air; dan 7) mengawasi kinerja PPA sekunder dan PPA primer terkait yang ada di wilayah kerjanya dan membuat laporan untuk

disampaikan ke Juru Primer dalam kegiatan rapat evaluasi pengaliran air di tingkat GP3A.

PPA Primer merupakan salah satu aktor yang berhubungan langsung dengan pintu pendistribusian air, aktor ini yang akan membagi air ke saluran primer, sekunder dan bahkan ke tersier langsung mereka memiliki peran memberikan informasi tentang kesiapan operasional pintu (kesiapan buka dan tutup pintu) di saluran primer dan memberikan masukan tentang buka dan tutup pintu di wilayah kerjanya dalam kegiatan rapat koordinasi GP3A dan PPA Primer untuk penyusunan jadwal pengaliran air; memasang jadwal buka dan tutup pintu di wilayahnya dalam kegiatan sosialisasi jadwal pengaliran air; membersihkan saluran, mengangkat sampah, mengangkat sedimen memotong rumput dan menutup bobola dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; membuka atau menutup pintu sesuai jadwal dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian; membuka dan menutup pintu sesuai jadwal dan melapor ke juru primer jika air kurang dalam kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah; menutup bobolan dan mengusahakan perbaikan pintu air secara darurat di saluran primer dalam kegiatan usaha untuk mengatasi kekurangan air; mengecek kondisi air di wilayahnya dan mencatat dan melaporkan realisasi pengaliran air ke juru primer dalam kegiatan monitoring pengaliran air

PPA Sekunder aktor pada petugas pintu air sekunder yang memiliki kepentingan operasional pintu sekunder memiliki peran dalam pengaturan

pendistribusian air memberikan informasi tentang kesiapan operasional pintunya kegiatan Rapat P3A untuk persiapan pengaliran air; memberikan masukan – masukan tentang jadwal buka dan tutup pintu air di wilayahnya masing – masing dalam kegiatan rapat GP3A penyusunan jadwal rinci di tingkat sekunder; berkoordinasi dengan maduro je'ne tentang jadwal buka dan tutup pintunya dalam kegiatan sosialisasi jadwal pengaliran air; membersihkan saluran, mengangkat sampah, mengangkat sedimen, memotong rumput, dan menutup bobolan dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; membuka atau menutup pintu sesuai jadwal dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian dan mengingatkan PPA Primer tentang jadwal buka atau tutup pintu air sehari sebelum pintu air dibuka atau ditutup, membuka dan menutup pintu sesuai jadwal, dan melapor ke juru sekunder jika air kurang dalam kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah; mengangkat sampah yang menghambat air di pintunya, membuka ampang dan menutup bobolan, melapor ke Juru Sekunder untuk kerusakan darurat, meminta bantuan ke GP3A jika terjadi kerusakan darurat, memperbaiki pintu air yang rusak di saluran sekunder dalam kegiatan usaha untuk mengatasi kekurangan air; mengecek kondisi air di wilayahnya dan mencatat dan melaporkan realisasi pengaliran air ke Juru Sekunder dalam kegiatan monitoring pengaliran air dan melaporkan hambatan dalam pengaturan pintu – pintu air dan pengaliran air di wilayahnya, melaporkan realisasi buka dan tutup

pintu dan permasalahan selama buka dan tutup pintu dalam kegiatan rapat evaluasi pengaliran Air di tingkat GP3A

PS Primer aktor ini tugasnya menjaga kondisi kebersihan saluran antar ruas pada saluran primer memiliki peran selalu membersihkan saluran, mengangkat sampah, mengangkat sedimen, dan memotong rumput pada saluran primer dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; membersihkan saluran pada saluran primer dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian dan membersihkan saluran dan mengangkat sampah pada saluran primer dalam kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah

PS Sekunder aktor ini memiliki peran membersihkan saluran, mengangkat sampah, mengangkat sedimen, dan memotong rumput pada saluran sekunder dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; membersihkan saluran pada saluran sekunder dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian; membersihkan saluran dan mengangkat sampah pada saluran sekunder dalam kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah.

Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) sebagai induk dari lembaga petani memiliki peran yaitu mengadakan rapat untuk menentukan jadwal pengaliran air dan buka atau tutup pintu di saluran primer, sehingga harus melaporkan dan mendistribusikan undangan, memimpin rapat dan membuat rangkuman hasil rapat tentang jadwal kesiapan hambur masing – masing wilayah P3A untuk mulai

menyemaikan benih; menyampaikan laporan hasil keputusan rapat IP3A tentang jadwal pengaliran air dan jadwal hambur benih yang telah disepakati masing – masing daerah irigasi dan menerima dan mendistribusikan hasil keputusan rapat komisi irigasi tentang jadwal pengaliran air dan jadwal hambur benih masing –masing daerah irigasi dalam kegiatan rapat komisi irigasi untuk penetapan jadwal pengaliran air dan menyampaikan penetapan jadwal pengaliran air yang disepakati; menghubungi GP3A terkait untuk membantu juru primer melaksanakan kegiatan gotong royong dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; memantau jalannya air saat pengaliran dan berkoordinasi dengan pihak GP3A yang pertama mendapat air dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian; memantau daerah rawan air dan GP3A hilir dan berkoordinasi dengan juru primer jika air kurang dalam kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah; menghubungi juru primer jika terjadi kekurangan air dan berkoordinasi dengan pengamat membahas kemungkinan penambahan air di waduk dalam kegiatan usaha untuk mengatasi kekurangan air; menghubungi GP3A yang rawan air untuk memperoleh laporan realisasi pengaliran air dan Membahas jalan keluar jika ada masalah dengan GP3A atau pengamat dalam kegiatan monitoring pengaliran air; mengumpulkan laporan dan membuat rangkuman laporan dari masing – masing GP3A sebelum rapat dilaksanakan, membuat dan mendistribusikan undangan, memimpin rapat, melaporkan realisasi jangkauan air irigasi di masing – masing GP3A,

membuat rangkuman berdasarkan hasil rapat, menandatangani hasil keputusan rapat dan mengajukan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam kegiatan rapat evaluasi pengaliran air di tingkat IP3A dan penyusunan rencana konstruksi besar.

Gabungan Perhimpunan Petani Pemakai Air (GP3A) sebagai Gabungan dari P3A yang ada yang merupakan pembawa inspirasi P3A maka GP3A memiliki peran sebagai berikut menyampaikan kepada semua ketua P3A di wilayah kerjanya untuk melaksanakan rapat dalam kegiatan rapat P3A untuk persiapan pengaliran air; menyiapkan dan mendistribusikan undangan, memimpin rapat dan membuat rangkuman hasil rapat tentang jadwal kesiapan masing – masing wilayah P3A untuk mulai penyempaian bibit dalam kegiatan rapat GP3A untuk persiapan pengaliran; melaporkan awal dan akhir panen serta kesiapan hambur disetiap P3A pada masing – masing GP3A dalam kegiatan rapat koordinasi GP3A dan PPA Primer untuk penyusunan jadwal pengaliran air; membuat dan mendistribusikan undangan, memimpin rapat, menyusun rangkuman hasil kesepakatan rapat, menyampaikan jadwal kepada IP3A dan pengamat atau juru primer – sekunder dan memperbanyak dan mendistribusikan hasil keputusan kepada semua P3A dalam kegiatan rapat GP3A penyusunan jadwal rinci di tingkat sekunder; memperbanyak jadwal hasil keputusan, menghubungi kepala desa untuk membantu menginformasikan jadwal pengaliran air dan mendistribusikan jadwal ke semua P3A di wilayahnya dalam kegiatan

sosialisasi jadwal pengaliran air; bertindak sebagai koordinator gotong royong di tingkat sekunder dan menentukan lokasi gotong royong dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; GP3A berkoordinasi dengan pihak P3A yang mendapat air pertama, melapor ke IP3A jika tidak ada air atau kurang dan berkoordinasi dengan juru sekunder jika air kurang dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian; mengecek kondisi air apakah air sudah sampai di wilayah P3A anggotanya, memantau P3A hilir, melapor ke IP3A jika air kurang dan berkoordinasi dengan Juru Sekunder jika air kurang dalam kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah; berkoordinasi dengan juru sekunder dan melapor ke IP3A jika terjadi kekurangan air, mengkoordinir P3A, Madoro je'ne dan PPA sekunder untuk membuka ampang yang ada di saluran sekunder, membantu PPA sekunder jika terjadi kerusakan darurat dan melapor dan meminta bantuan kepala desa untuk memfasilitasi desa untuk memfasilitasi buka ampang dalam kegiatan usaha untuk mengatasi kekurangan air; menghubungi ketua P3A untuk mengetahui realiasi pengaliran air, melaporkan realiasi pengaliran kepada IP3A, membahas jalan keluar dengan P3A jika ada masalah dalam kegiatan monitoring pengaliran air dan menyiapkan dan mendistribusikan undangan, memimpin rapat, membuat rangkuman hasil keputusan rapat dan membuat dan melaporkan hasil keputusan rapat kepada IP3A dalam kegiatan rapat evaluasi pengaliran air di tingkat GP3A.

Ketua dan Sekertaris Perhimpunan Petani Pemakai Air (Ketua/Sek P3A) sebagai pengurus inti pada lembaga P3A ketua dan sekertaris memiliki peran menyiapkan dan mendistribusikan undangan, memimpin rapat, membuat rangkuman hasil rapat tentang awal dan akhir panen serta kesiapan hambur dalam kegiatan rapat P3A untuk persiapan pengaliran air; melaporkan hasil rapat kesiapan hambur benih di setiap P3A dalam kegiatan Rapat GP3A untuk persiapan pengaliran air; memberikan masukan dalam menyusun jadwal pembagian air serta jadwal hambur di tingkat P3A dalam kegiatan rapat GP3A penyusunan jadwal rinci di tingkat sekunder; memperbanyak jadwal pengaliran air dan jadwal hambur, menyampaikan jadwal ke Mandoro je'ne, berkoordinasi dengan kepala dusun atau imam dusun untuk menyampaikan atau menginformasikan di masjid tentang jadwal pengaliran air dan jadwal hambur dan menempelkan jadwal pengaliran air dan jadwal hambur di papan informasi masjid dalam kegiatan Sosialisasi Jadwal pengaliran air; bertindak sebagai koordinator gotong royong di tingkat tersier dan mengumumkan kembali kepada petani melalui masjid minimal sehari sebelum kegiatan gotong royong dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong, melakukan pengecekan air di saluran tersier, bersama – sama dengan Mandoro je'ne membersihkan rumput dan mengangkat sampah yang menghambat pengaliran air yang masuk ke saluran tersier dan mengumumkan di masjid sehari sebelum pengaliran untuk mempersiapkan persemaian dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian; melakukan

pengecekan di saluran tersier dan melaporkan ke GP3A dan berkoordinasi dengan PPA sekunder jika air kurang dalam kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah; melaporkan ke GP3A dan melakukan koordinasi dengan PPA Sekunder jika terjadi kekurangan air dan menutup bobolan dan membuka ampang di saluran tersier dalam kegiatan usaha untuk mengatasi kekurangan air; mengecek kondisi air pintu tersier, mencatat realisasi pengaliran air berdasarkan laporan Mandoro je'ne; membuat realiasi pengaliran dan membahas jalan keluar dengan mandor jika ada masalah dalam kegiatan monitoring pengaliran air, melaporkan kondisi pertanaman, realiasi pertanaman, jangkauan air irigasi di wilayahnya dan permasalahan selama pengaliran air dan melaporkan keaktifan PPA sekunder di wilayahnya dalam kegiatan rapat evaluasi pengaliran air di tingkat GP3A

Mandoro Je'ne salah satu aktor yang bersentuhan langsung dengan petani dalam mengatur pendistribusian air di lahan persawahan adalah Mandoro je'ne memiliki peran menyampaikan informasi tentang awal dan akhir panen di wilayah kerjanya dan melaporkan tentang kesiapan salurannya dalam kegiatan rapat P3A untuk persiapan pengaliran air; menginformasikan secara lisan jadwal hambur kepada petani di wilayahnya dan berkoordinasi dengan PPA Sekunder tentang jadwal buka dan tutup pintu dalam kegiatan sosialisasi jadwal pengaliran air; membersihkan saluran, mengangkat sampah, mengangkat sedimen, memotong rumput, dan menutup bobolan dan membuat saluran kuarter

dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; mengecek jangkauan air irigasi di petak sawah, mengalirkan dan membagi air sesuai jadwal dan bersama dengan ketua dan anggota P3A mengangkat sampah yang menghambat pengaliran air yang masuk ke tersier dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian; mengalirkan dan membagi air sesuai jadwal yang sudah disepakati ke petak sawah dan melaporkan ke ketua P3A jika tidak ada air atau kurang dalam kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah; melaporkan ke ketua P3A dan PPA sekunder jika tidak ada air atau kurang dan mengangkat sampah dan sedimen di saluran tersier dan kuarter dalam kegiatan usaha untuk mengatasi kekurangan air dan mengecek kondisi air di saluran tersier dan kuarter, melaporkan realialisasi jangkauan air irigasi kepada ketua P3A dan membahas jalan keluar dengan P3A jika ada masalah dalam kegiatan monitoring pengaliran air.

Anggota Perhimpunan Petani Pemakai Air (anggota P3A), sebagai pengguna langsung dalam sumber daya air pada lahan persawahan maka anggota P3A memiliki peran menyampaikan informasi tentang awal dan akhir panen dalam rapat P3A untuk persiapan pengaliran air menginformasikan jadwal pengaliran air dan hambur ke petani di sekitar sawahnya dalam kegiatan sosialisasi jadwal pengaliran air; membersihkan saluran, mengangkat sampah, mengangkat sedimen, memotong rumput, dan menutup bobolan dan membuat saluran kuarter dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; membuat persemaian dan

melakukan hambur benih dalam kegiatan pengaliran air untuk persemaian; melakukan olah tanah dan tanam pindah dan melapor ke Mandoro je'ne jika tidak ada air/kurang air pada saat gilirannya dalam kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah; melapor ke Mandoro je'ne jika tidak ada air dalam kegiatan usaha untuk mengatasi kekurangan air.

Petani non DI Kampili, sebagai petani yang membutuhkan air untuk lahan pertaniannya akan tetapi secara lembaga tidak berada dalam wilayah kewenangan DI Kampili, maka petani ini tidak memiliki peran dalam pengaturan air irigasi untuk wilayah Daerah Irigasi Kampili akan tetapi mereka hanya memiliki kepentingan yang cukup besar yaitu memperoleh air walaupun pengambilannya secara ilegal.

c. *Stakeholder* sekunder/pendukung

Stakeholder/Aktor pendukung yaitu pelaku yang menjadi perantara yang tidak berkaitan langsung dalam pengelolaan Daerah Irigasi Kampili namun masih memiliki pengaruh terhadap sikap masyarakat dan pemerintah yaitu: Peneliti, LSM dan Keamanan, Camat dan Kepala Desa dan Kepala Dusun

Peneliti dalam pengaturan pendistribusian air irigasi dengan kegiatan rapat GP3A untuk persiapan pengaliran air musim gadu I, maka Bersama – sama dengan petani dari P3A melakukan pengamatan dan pengukuran ketinggian air dan analisis data yang dibutuhkan, rapat koordinasi GP3A dan PPA Primer untuk penyusunan jadwal pengaliran air

peneliti memberikan data – data hasil penelitian ketersediaan dan kebutuhan air irigasi; dalam usaha untuk mengatasi kekurangan air dalam hal ini peneliti memberikan data – data hasil penelitian ketersediaan dan kebutuhan air irigasi; dan dalam kegiatan monitoring pengaliran air maka mengumpulkan dan menganalisis data – data. Rapat evaluasi pengaliran air di tingkat GP3A, maka mengumpulkan, menganalisis data – data dari hasil penelitian/temuan lapang, dan dalam kegiatan rapat evaluasi pengaliran air di tingkat IP3A dan penyusunan rencana konstruksi besar peneliti mengumpulkan dan menganalisis data – data hasil penelitian/temuan lapang

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam kegiatan penganturan pendistribusian air irigasi dalam kegiatan yang ada maka terdapat beberapa peranan LSM dalam membantu petani dalam memperoleh air pada saat dibutuhkan adapun peranan LSM yaitu Menyiapkan peta dasar dan membantu pembaharuan daftar anggota P3A, menyiapkan peta dasar dan daftar anggota, memotivasi dan membantu GP3A membuat laporan, menyiapkan peta dasar, skema jaringan dari petugas, membantu menyiapkan format jadwal pengaliran, membantu menghubungkan dengan pihak terkait yang dapat membantu dan bekerjasama mengatasi kekurangan air, memotivasi P3A/GP3A dalam melaksanakan peran utamanya, menyiapkan data hasil penelitian tentang jangkauan air irigasi dan mendampingi pembuatan laporan dan kesepakatan; dan memfasilitasi

dan mengkoordinir pihak penyuplai dan pengguna air irigasi, mendampingi penyusunan laporan dan hasil rapat

Keamanan dalam melancarkan pendistribusian air dan menjaga pembobolan saluran maka kepolisian memiliki peran kepolisian dalam hal ini yaitu memberikan informasi mengenai programnya dalam kegiatan rapat P3A untuk persiapan pengaliran air; memberikan informasi tentang program di lokasinya; mendampingi penutupan bobolan dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong, berkoordinasi dengan GP3A jika tidak ada air atau kurang dalam kegiatan pengaliran air untuk pengolahan tanah dan tanam pindah; mendampingi kepada desa membuka ampang dalam kegiatan Usaha untuk mengatasi kekurangan air.

Camat dalam kegiatan rapat komisi irigasi maka camat melaporkan kesiapan pengaliran air di lapangan dalam kegiatan rapat Komisi Irigasi untuk penetapan jadwal pengaliran air

Kepala Desa sebagai pemerintahan tertinggi di desa, peran kepala desa dalam kegiatan pengaturan pendistribusian irigasi yaitu menyiapkan tempat dan menginformasikan kesiapan hambur di wilayahnya dalam kegiatan rapat GP3A untuk persiapan pengaliran air; memberikan masukan dalam penyusunan jadwal pembagian air serta jadwal hambur di desanya dalam kegiatan rapat GP3A Penyusunan jadwal rinci di tingkat sekunder; menginformasikan jadwal pengaliran air dan jadwal hambur kepada warganya dan menempel pengumpulan jadwal peangaliran air dan jadwal hambur di kantor desa (staf desa) dalam kegiatan sosialisasi

Jadwal pengaliran air; mengkoordinir dan menunjuk GP3A dan P3A sebagai koordinator gotong royong dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong, memfasilitasi GP3A buka ampang dalam kegiatan Usaha untuk mengatasi kekurangan air; menyiapkan tempat dan menyampaikan permasalahan yang menghambat pengaliran air di daerahnya dalam kegiatan rapat evaluasi pengaliran air di tingkat GP3A.

Kepala Dusun yang merupakan pemerintahan yang berada di wilayah dusun maka perannya melaporkan kesiapan hambur di wilayahnya dalam kegiatan rapat P3A untuk persiapan pengaliran air musim; menginformasikan kepada warganya tentang jadwal pengaliran air dan jadwal hambur dalam kegiatan sosialisasi Jadwal pengaliran air; mengkoordinir warga dusun di wilayahnya melakukan penggalian saluran kuarter dalam kegiatan pelaksanaan gotong royong; mengambil inisiatif buka ampang yang ada di wilayahnya dalam kegiatan Usaha untuk mengatasi kekurangan air

Badan Metereologi dan Klimatologi Geo Fisika (BMKG) memiliki peran menyampaikan informasi tentang prediksi turunnya hujan sebagai acuan untuk menyusun jadwal pengaliran air dan jadwal hambur dalam kegiatan rapat Komisi Irigasi untuk penetapan jadwal pengaliran air

C. Kepentingan (*Interest*) dan Kuasa (*Power*) Aktor dalam Pendistribusian Air Irigasi

Kegiatan pengaturan pendistribusian air irigasi pada Daerah Kampili terdapat banyak stakeholder/aktor yang terlibat yang memiliki kepentingan langsung dan tidak langsung terhadap pengaturan pendistribusian air

irigasi pada Daerah Kampili. Selain kepentingan yang berbeda terdapat pula perbedaan kekuasaan/pengaruh dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili. Adapun kepentingan dan kekuasaan aktor dapat lihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Kepentingan (*Interest*) dan Kekuasaan/Pengaruh (*Power*) Aktor dalam Pendistribusian Air Irigasi pada Daerah Irigasi Kampili

Aktor	Kepentingan	Kekuasaan
Aktor Kunci		
BBWS Jeneberang	1. Tercukupinya aliran informasi kondisi waduk sebagai bahan dalam pemantauan dan pengambilan keputusan Kondisi bangunan yang ada di saluran primer dan sekunder dalam kondisi terpelihara. 2. Terjaminnya kondisi saluran primer dan sekunder selalu dalam kondisi baik dan terpelihara. 3. Terjaminnya pemenuhan air pada persawahan secara tepat waktu dan jumlah air yang dibutuhkan.	1. Memiliki kewenangan penuh di dalam pendistribusian air di waduk dan dibendung merupakan kewenangannya 2. BBWS dapat memerintahkan petugas waduk dan bendung untuk mendistribusikan air. 3. Dapat memberikan sanksi kepada petugas di waduk dan di bendung jika tidak menjalankan tugas dan fungsinya.
Unit Pengelolaan Bendungan	1. Tercukupinya jumlah air untuk kebutuhan PDAM, PLTA dan irigasi semua bendung 2. Menjaga kondisi bendungan selalu dalam kondisi yang stabil 3. dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan Menjaga kondisi bendungan tetap dalam kondisi yang 4. Membuat laporan realisasi pengeluaran air untuk irigasi	Mengatur besarnya volume air yang akan didistribusikan kepada semua lembaga pengguna air di Bendungan.
UPTD PSDACKTR	Menjaga kelancaran operasional air hingga ke petani	Menjalankan tupoksi dalam pengelolaan sumber daya air
Dinas Pertanian	- Memastikan berjalannya program swasembada pangan dengan program tambah tanam padi - Membina P3A - Memastikan terpenuhinya kebutuhan air pada saat tanam	- Dapat meminta pengaliran air di bendung kepada petugas irigasi berdasarkan hasil tudang sipulung - Memiliki modal untuk memberikan bantuan kepada petani berupa bantuan pompa di dalam memenuhi kepentingannya
DSDACKTR	Berjalannya operasi dan pemeliharaan pada saluran primer dan sekunder	Operasi dan pemeliharaan untuk primer dan sekunder di bawah kewenangan Provinsi

Sambungan Tabel 17

Aktor	Kepentingan	Kekuasaan
Aktor Utama		
PSDA Kabupaten/Dinas PU Kabupaten	Terjaminnya ketersediaan air untuk petani serta mendukung program pemerintah Kabupaten dalam menjalankan program swasembada pangan	Sebagai sekretaris komisi irigasi memiliki kewenangan mengesahkan hasil keputusan rapat komisi irigasi dalam pengaturan air dan jadwal tanam
Bappeda	Terlaksananya rapat komisi irigasi, membuat hasil keputusan rapat komisi irigasi tentang jadwal awal pengaliran air dan jadwal hambur benih di Daerah Irigasi Kampili, Bissua dan Bili - Bili	Sebagai ketua komisi irigasi memiliki kewenangan mengesahkan hasil keputusan rapat komisi irigasi dalam pengaturan air dan jadwal tanam dan melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya

Pengamat D.I. Kampili	1. Terjaminnya pendistribusian air dengan baik dari bendung, primer, sekunder hingga tersier. 2. Terjadanya dengan baik kondisi bangunan dan saluran irigasi. 3. Memperoleh laporan realisasi buka tutup pintu air dan memberikan laporan pengaturan dan pendistribusian air irigasi ke PSDA/DSDACKTR 4. Terdistribusinya daftar petugas PPA, 5. Hasil keputusan dan kesepakatan pengaliran air terlaksana	1. Menentukan jadwal pengaliran air irigasi di Bendung. 2. Memerintahkan POB membuka dan menutup pintu. 3. pengawasan Pendistribusian air pada D.I Kampili menjadi kewenangannya. 4. Dapat memfasilitasi lembaga petani dengan BBWS dan DSDACKTR Provinsi dalam mengajukan biaya pemeliharaan. 5. Berhak mendapatkan laporan dan pertanggungjawaban dari para operator irigasi dalam pengaturan pendistribusian air irigasi
POB	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan pada tingkat bendung sesuai dengan pemerintah dari BBWS	1. Dalam menjalankan tugas operator hanya POB yang berhak membuka dan menutup pintu bendung. 2. Dapat mengambil kebijakan dengan membuka dan menutup pintu bendung sesuai dengan kondisi yang terjadi
Juru Primer	1. Terjaminnya kondisi operasi dan Pemeliharaan Saluran Primer berjalan dengan baik 2. Penutupan dan pembukaan pintu air sesuai dengan jadwal dan intruksi yang diberikan	1. Dapat memerintahkan PPA Primer dalam mengatur pendistribusian air 2. Dapat meminta air kepada petugas operasional bendung jika rapat komisi irigasi lambat dilakukan 3. Membuka ambang dan menutup bobolan bersama PPA Primer 4. Memiliki kewenangan memeriksa semua kondisi saluran sekunder dan melaporkan kondisi ke BBWS 5. Dapat memerintahkan PS PPA primer untuk membersihkan saluran irigasi
Juru Sekunder	1. Memastikan pendistribusian pada saluran sekunder air sesuai jadwal yang telah ada 2. Memastikan kondisi saluran sekunder dalam kondisi bersih	1. Dapat memerintahkan PPA sekunder dalam membuka dan menutup pintu sekunder 2. Operasi dan pemeliharaan pada saluran sekunder menjadi kewenangannya 3. Dapat memerintahkan PS sekunder dan PPA sekunder untuk melakukan pembersihan saluran
PPA Primer	1. Tutup dan buka pintu air berjalan sesuai dengan jadwal dan perintah dari Juru Primer (menjalankan tupoksi). 2. Terdistribusinya air ke ke bangunan selanjutnya sesuai dengan perintah Juru Primer dan permintaan dari petani	1. Membuka dan menutup pintu primer menjadi kewenangannya 2. Mendistribusikan air kesaluran primer dan sekunder menjadi kewenangannya

Sambungan Tabel 17

Aktor	Kepentingan	Kekuasaan
Aktor Utama (primer)		
PPA Sekunder	1. Mendistribusikan air pada saluran sekunder 2. Saluran sekunder dalam kondisi baik dalam operasional dan pemeliharaan saluran sekunder 3. Terpenuhinya kebutuhan air kesaluran tersier	1. Membuka dan menutup pintu sekunder menjadi kewenangannya 2. Membuka ampang dan menutup bobolan bersama juru sekunder
PS Primer	Kondisi saluran primer selalu bersih dari sampah dan lumpur serta tidak ada bobolan pada saluran	Tugas utamanya membersihkan sampah dan menutup bobolan saluran primer
PS Sekunder	Kondisi saluran sekunder selalu bersih dan tidak bobolan	Tugas utamanya membersihkan sampah dan menutup bobolan saluran sekunder

IP3A	1. Terpenuhinya aspirasi GP3A ke DSDACKTR dan Komisi Irigasi 2. Terpenuhinya seluruh GP3A/P3A di wilayahnya mendapatkan air pada saat dibutuhkan 3. Memastikan pendistribusian air pada tingkat primer berjalan dengan baik	1. Merupakan lembaga resmi yang tertinggi pada lembaga petani 2. Dapat berkoordinasi dengan Juru primer 3. Dapat mengawasi perbaikan pembangunan fasilitas irigasi yang ada di wilayahnya 4. Keberdaannya dijamin oleh UU pengairan
GP3A	1. Terpenuhinya aspirasi P3A ke IP3A dan komisi irigasi 2. Memastikan seluruh P3A di wilayahnya mendapatkan air pada saat dibutuhkan 3. Memastikan pendistribusian air pada tingkat sekunder berjalan dengan baik	1. Kepentingan P3A di wilayahnya menjadi tanggungjawabnya 2. Dapat berkoordinasi dengan Juru sekunder 3. Keberdaannya dijamin oleh UU pengairan
Ketua/Sekretaris P3A	1. Terjaminya operasi dan pemeliharaan saluran tersier 2. Berjalannya kelembagaan P3A dengan baik	1. Pengaturan P3A di bawah kewenangannya 2. Dapat memberikan sanksi kepada anggota sesuai dengan AD/RT lembaga P3A 3. Keberdaannya dijamin oleh UU pengairan
Mandoro Je'ne	1. Distribusinya air dengan baik ke petakan sawah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 2. Kondisi saluran tersier hingga ke petakan sawah dalam kondisi bersih 3. Memperoleh iuran anggota	1. Pengaturan dan pendistribusian air pada saluran tersier hingga ke petakan sawah merupakan kewenangannya 2. Memungut iuran anggota dijamin oleh AD/RT lembaga P3A 3. Dapat berkoordinasi dengan PPA sekunder di dalam meminta penistribusian air
Anggota P3A	Memperoleh air untuk pertanaman di lahan persawahan disaat dibutuhkan	1. Memiliki hak sebagai anggota P3A 2. Berhak meminta air kepada mandoro je'ne 3. Keberadaannya di atur di dalam UU
Petani non D.I Kampili P3A	Memperoleh air untuk pertanaman di lahan persawahan disaat dibutuhkan	Secara legal tidak ada dalam skema jaringan irigasi Kampili akan tetapi memiliki keberanian dalam membuka pintu dan menggunakan pompa untuk Memperoleh air ke lahan persawahannya

Sambungan Tabel 17

Aktor	Kepentingan Aktor Sekunder (Pendukung)	Kekuasaan
Keamanan (tentara & Polisi)	1. Membantu dan menjalankan program pertanian 2. Menjaga keamanan pada wilayah kerjanya dalam menutup bobolan dan membuka ambang bersama petugas irigasi dan lembaga petani dan pemerintah desa	Menjalankan tugas keamanan
Peneliti	Memperoleh Informasi dan menyebarluaskan pengetahuan	Memiliki kemampuan, pengalaman dan pengetahuan

	yang dimilikinya	secara implisit dan eksplisit dan pengakuan dari masyarakat serta dapat merekomendasikan hasil penelitiannya untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan
LSM	Melakukan pemberdayaan petani baik dalam memperoleh air maupun dalam penataan lembaga petani (IP3A/GP3A/P3A)	- Memiliki pengakuan dan sejarah dalam pendampingan irigasi oleh masyarakat dan lembaga irigasi sehingga dapat mempengaruhi lembaga petani dalam memperoleh haknya.
Kepala Desa	1. Mengharapkan semuanya warganya memperoleh air pada saat dibutuhkan 2. Terpenuhinya pengusulan pengaturan jadwal pengaliran air diwilayahnya 3. Memastikan kondisi lahan sawah di wilayahnya memperoleh air pada saat dibutuhkan	1. Dapat mempengaruhi petugas irigasi dengan kewenangannya sebagai kepala desa dalam mendistribusikan air irigasi pada wilayahnya 2. Mensyahkan keberadaan GP3A sebagai lembaga yang ada ditingkat Desa 3. Mengikutsertkan GP3A/P3A dalam rapat apalili ditingkat desa
Kepala Dusun	Memaastikan sawah di di wilayahnya memperoleh air tepat waktu	Dapat berkoordinasi dengan P3A dalam mengatur pemeliharaan dan pendistribusian air
BMKG	Menjalakan tupoksinya yaitu menyampaikan informasi cuaca dan curah hujan	Lembaga resmi pemberi Informasi cuaca dan curah hujan
Sumber : Data primer Setelah diolah, 2018		

Pengukuran tingkat kepentingan dan pengaruh aktor dalam pengaturan pendiribusian air irigasi dengan menggunakan kriteria yang diadopsi dari *Overceas Development Administration* (ODA) (1995); Grimle (1998); Edan dan Ekermann (1998), penilaian derajat kepentingan dan pengaruh dalam analisis stakeholder secara kualitatif telah banyak dilakukan dan diantaranya adalah Sundawati *et al.*, (2009); Yulianus (2012) dan Fitri *et al.*, (2015). Adapun tingkat kepentingan dan pengaruh dapat dilihat pada Tabel 18.

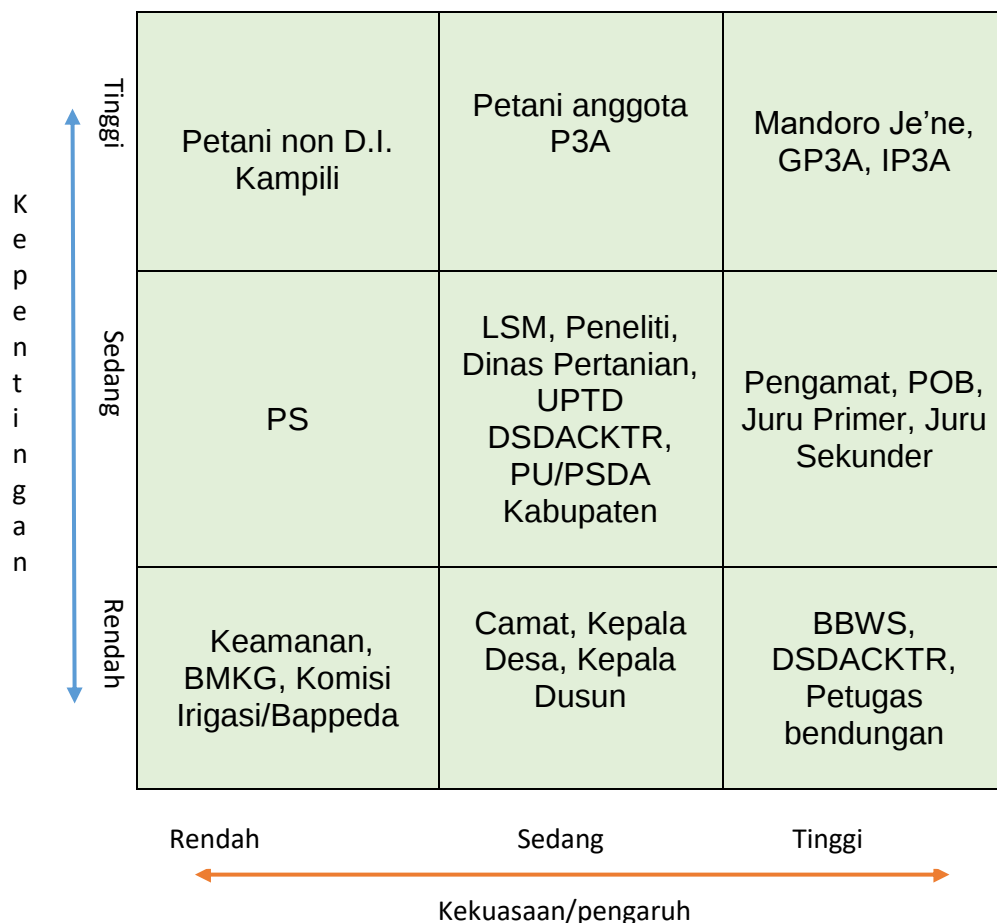
Pengukuran tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder/aktor dalam pengaturan pendiribusian air irigasi dengan menggunakan kriteria yang diadopsi dari Overceas Development Administration (ODA) (1995), Grimle (1998) serta Edan dan Ekermann (1998) penilaian derajat kepentingan dan pengaruh dalam analisis stakeholder secara kualitatif telah banyak dilakukan dan diantaranya adalah Sundawati *et all* (2009), Yulianus (2012) dan Fitri *et al* (2015). Adapun tingkat kepentingan dan pengaruh dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan Stakeholder dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi pada Daerah Irigasi Kampili

No	Stakeholder	Kategori stakeholder	Tingkat Kepentingan (Interest)	Tingkat Pengaruh (Power)
1	BBWS	Kunci	Rendah	Tinggi
2	Unit pengelolaan Bendungan	Kunci	Rendah	Tinggi
3	DSDACKTR	Kunci	Rendah	Tinggi
4	UPTD PSDACKTR Jeneberang	Kunci	Sedang	Sedang
5	Dinas Pertanian	Kunci	Sedang	Sedang
6	PU/PSDA Kabupaten	Kunci	Sedang	Sedang
7	Bappeda/Komisi Irigasi	Kunci	Rendah	Rendah
8	BMKG	Sekunder	Rendah	Rendah
9	Keamanan	Sekunder	Rendah	Rendah
10	Camat	Sekunder	Rendah	Sedang
11	Kepala Desa	Sekunder	Rendah	Sedang
12	LSM	Sekunder	Sedang	Sedang
13	Peneliti	Sekunder	Sedang	Sedang
14	Pengamat	Utama	Sedangi	Tinggi
15	BOP	Utama	Sedang	Tinggi
16	Juru Primer	Utama	Sedang	Tinggi
17	Juru Sekunder	Utama	Sedang	Tinggi
18	PPA Primer	Utama	Sedang	Tinggi
19	PPA Sekunder	Utama	Sedang	Tinggi
20	PS Primer	Utama	Sedang	Rendah
21	PS Sekunder	Utama	Sedang	Rendah
22	IP3A	Utama	Tinggi	Tinggi
23	GP3A	Utama	Tingg	Tinggi
24	Anggota P3A	Utama	Sedang	Sedang
25	Ketua P3A	Utama	Tinggi	Tinggi
26	Mandoro Jene	Utama	Tinggi	Tinggi
27	Petani non DI Kampili	Utama	Tinggi	Rendah

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2018

Sedangkan untuk mengukur pengelompokkan stakeholders adalah sebagai berikut :



Gambar 19. Pemetaan Stakeholder berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Kekuasaan/Pengaruh dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi pada Daerah Irigasi Kampili

2. Stakeholder dengan Pengaruh/Kewenangan (Power) rendah dan Kepentingan Tinggi

Aktor yang memiliki kepentingan tinggi terhadap sumber daya air akan tetapi tidak memiliki pengaruh bahkan peranan dalam pengaturan air

irigasi Kampili adalah petani yang letak sawahnya di luar jaringan irigasi D.I. Kampili. Karena letak sawahnya berada di luar skema jaringan irigasi Kampili sehingga petani ini secara legal tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan air dari D.I Kampili, karena lahan sawah dari petani ini berada pada skema jaringan irigasi Bissua, akan tetapi karena untuk memenuhi kebutuhannya akan sumber daya air, maka aktor dan disini dengan membuka pintu legal dan menggunakan pompa untuk memperoleh air dari jaringan irigasi Kampili, perilaku petani ini tidak mendapatkan sanksi dari petugas irigasi dengan pertimbangan bahwa petani ini membutuhkan air dan keberadaannya berada dalam skema D.I. Bissua akan tetapi jika menunggu air dari D.I. Bissua sangat terlambat dan bahkan airnya tidak sampai.

3. Stakeholder dengan Pengaruh/Kewenangan (Power) sedang dan Kepentingan Tinggi

Aktor yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh yang sedang adalah Petani anggota P3A karena aktor ini memiliki kepentingan yang sangat tinggi dalam terwujudnya pengaturan pendistribusian air irigasi yang baik, karena memiliki manfaat langsung dalam penggunaan air irigasi, sementara kekuasaannya atau pengaruhnya masih sedang karena petani anggota P3A hanya memiliki hak untuk memperoleh air akan tetapi tidak memiliki kekuasaan di dalam pengaturan pendistribusian air irigasi, hanya menjadi pengguna langsung dari air irigasi.

4. Stakeholder dengan Pengaruh/Kewenangan (Power) Tinggi dan Kepentingan Tinggi

Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh yang tinggi yaitu Mandoro Je'ne dan Ketua P3A, GP3A dan IP3A, Mandoro Je'ne dan Ketua P3A dapat mengatur pembagian air irigasi pada saluran tersier, menentukan petakan sawah mana yang harus mendapatkan air terlebih dahulu, sama halnya dengan GP3A dan IP3A merupakan lembaga petani yang berhak membawa aspirasi petani dalam kegiatan rapat komisi irigasi, memfasilitasi petani jika kekurangan air pada saluran sekunder dan primer dan dapat mempengaruhi operator irigasi di dalam pengaturan pendistribusian air irigasi. Sedangkan dari kepentingan lembaga ini memiliki harapan, aspirasi dan menerima manfaat langsung dari terwujudnya pengaturan pendistribusian air irigasi yang baik pada Daerah Irigasi Kampili.

5. Stakeholder dengan Pengaruh/Kewenangan (Power) Rendah dan Kepentingan Sedang

Pekarya/petugas saluran (PS) memiliki tugas utama menjaga kondisi saluran irigasi tetap dalam kondisi yang bersih sehingga air dapat mengalir dengan baik, tugas utamanya adalah menjaga kondisi saluran selalu terjaga dengan baik akan tetapi pekerjaannya atas perintah dari juru primer dan juru sekunder, PS merupakan tenaga kerja honor sehingga tidak memiliki pengaruh yang tinggi akan tetapi pengupahannya berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya.

6. Stakeholder dengan Pengaruh/Kewenangan (Power) sedang dan Kepentingan Sedang

Stakeholder yang memiliki yang dikelompokkan memiliki kepentingan sedang dan pengaruh sedang yaitu: LSM, Peneliti, Dinas Pertanian, UPTD DSDACKTR, PU Kabupaten, kelompok *stakeholder* ini tidak memiliki kepentingan langsung dalam pemanfaatan air irigasi akan tetapi memiliki harapan dan aspirasi akan keberhasilan pengaturan pendistribusian air irigasi, demikian juga dengan kekuasaan atau pengaruh di dalam pengaturan pendistribusian lembaga ini tidak memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan akan pengaturan pendistribusian air irigasi akan tetapi memiliki pengaruh untuk memperngaruhi stakeholder penentu kebijakan.

7. Stakeholder dengan Pengaruh/Kewenangan (Power) Tinggi dan Kepentingan Sedang

Operator irigasi yang memiliki peran utama mengatur pendistribusian air irigasi mulai dari bendung di atur oleh POB, saluran primer oleh Juru primer dan PPA primer, saluran sekunder diatur oleh Juru Sekunder dan PPA Sekunder dan memiliki kewenangan memfasiliasi petugas ini jika terjadi permasalahan adalah pengamat D.I. Kampili, kelompok *stakeholder* ini memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan memengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan pada wilayah kerja masing – masing, kepentingannya yaitu memiliki harapan dan aspirasi tetapi tidak menerima manfaat langsung dalam penggunaan air irigasi.

8. Stakeholder dengan Pengaruh/Kewenangan (Power) rendah dan Kepentingan rendah

Stakeholder atau lembaga yang memiliki kepentingan dan kekuasaan/pengaruh rendah yaitu keamanan, BMKG, dan Komisi Irigasi. Keamanan tidak memiliki kewenangan/pengaruh dalam pengaturan pendistribusian air irigasi, keamanan bekerja jika ada permintaan dari pemerintah setempat dan permintaan operator irigasi atau LSM, tidak memiliki kepentingan di dalam keberhasilan pengaturan pendistribusian air irigasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder BMKG sebagai lembaga yang hanya menyampaikan informasi kondisi cuaca kepada dinas pertanian untuk penentuan jadwal tanam, akan tetapi informasi bukan menjadi acuan utama di dalam pengaturan pendistribusian air irigasi di dalam mengatur dan mendistribusikan air lembaga ini tidak memiliki kepentingan keberhasilan pengaturan pendistribusian air irigasi. Sedangkan lembaga komisi irigasi yang merupakan lembaga yang resmi sebagai lembaga irigasi yang diberi kewenangan/kekuasaan sebagai lembaga koordinasi antara lembaga petani dengan lembaga pemerintah, lembaga yang menentukan dan mengesahkan hasil keputusan jadwal tanam dan pengaliran air pertama di bendung, akan tetapi kekuasaannya hilang karena air dapat mengalir tanpa hasil keputusan rapat komisi karena komisi irigasi tidak menjalankan tugasnya sehingga diambil alih oleh lembaga petani untuk berkoordinasi dengan operator irigasi di dalam pengaliran air di bendung, artinya tanpa komisi irigasi pengaliran air dapat di laksanakan, komisi

irigasi tidak memiliki harapan dan tidak menerima manfaat langsung di dalam pengaturan pendistribusian air irigasi. Sebenarnya komisi irigasi memiliki kekuasaan yang tinggi andaikan lembaga ini menjalankan tupoksinya sesuai dengan seharusnya.

9. Stakeholder dengan Pengaruh/Kewenangan (Power) sedang dan Kepentingan sedang

Stakeholder/aktor yang memiliki pengaruh sedang dan kepentingan sedang yaitu Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun, ketiga stakeholder ini tidak memiliki kepentingan langsung dalam memanfaatkan air irigasi akan tetapi sebagai pemerintah setempat berharap dan memiliki aspirasi untuk masyarakatnya di dalam memperoleh air sehingga berharap keberhasilan pengaturan air irigasi yang. Dari segi pengaruh memiliki kewenangan yang terbatas dalam membuat kebijakan akan tetapi dapat memfasilitasi implementasi kebijakan pada tingkat Desa dan memengaruhi stakeholder/aktor lain dalam membuat kebijakan di dalam pengaturan pendistribusian air irigasi.

10. Stakeholder dengan Pengaruh/Kewenangan (Power) Tinggi dan Kepentingan rendah

Pengelolaan Daerah Irigasi Kampili yang berada di Bawah naungan Pusat karena memiliki daerah pendistribusian di atas 3000 hektar, maka termasuk dalam Context settlers adalah stakeholders yang mempunyai peran besar dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan Irigasi.

Namun pengelolaan Irigasi di wilayah Balai Besar Sungai Jeneberang bukanlah merupakan satu-satunya bidang akan tetapi banyak bidang yang dibidangnya. Unit pengelolaan bendungan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pengaturan air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili karena pendistribusian air, jumlah air yang akan dialirkan dan kemana akan dialirkan merupakan kewenangan unit pengelolaan bendungan, akan tetapi kepentingannya terhadap pengaturan pendistribusian air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili bukan menjadi satu – satu tugasnya. DSDACKTR memiliki pengaruh yang tinggi karena lembaga ini yang memberikan SK penempatan buat petugas operator irigasi pada D.I Kampili, akan tetapi dari segi kepentingan bukan yang utama karena D.I Kampili tidak berada di kewenangan sepenuhnya.

D. Kontestasi Aktor dalam Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi

Kontestasi aktor dalam pengelolaan irigasi kampili yaitu kontestasi dalam ranah kebijakan dan ranah operasional.

1. Kontestasi Aktor dalam ranah kebijakan

Aktor yang berada dalam ranah kebijakan dalam pengaturan air irigasi terdiri dari: BBWS, Unit Pengelolaan Bendungan, DSDACKTR, UPTD PSDACKTR Jeneberang, Dinas Pertanian, PU/PSDA Kabupaten, BMKG, Bappeda.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), BBWS dalam penugasan tenaga kerja untuk operator irigasi antara BBWS dengan DSDACKTR itu saling bekerjasama. BBWS mengirimkan tenaga kerja dan DSDACKTR yang mengeluarkan SK petugas operator kontestasi yang berlangsung adalah kontestasi hibridisasi, sedangkan dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan, seluruh biaya yang digunakan dalam operasi dan pemeliharaan semuanya berasal dari BBWS, sementara pembiayaan yang dikeluarkan oleh DSDACKTR hanya diberikan untuk bendung yang dibawah kewenangannya sendiri, sehingga dari segi biaya operasi dan pemeliharaan yang berlangsung adalah kontestasi koeksistensi.

Unit pengelolaan Bendungan dengan Bappeda, karena kebijakan di dalam hasil putusan rapat komisi irigasi atas permintaan ketua Bappeda di dalam jadwal pembukaan pintu di Bendungan dan meminta untuk menambahkan jumlah debit air sesuai dengan permintaan pengguna jaringan, kadang terpenuhi dan kala tidak terpenuhi semuanya khususnya untuk awal musim rendeng dengan mempertimbangkan kondisi air dibendungan dan kebutuhan PDAM dan PLTA sehingga kadang kala tidak semuanya terpenuhi akan tetapi kedua stakeholder ini masih berkoordinasi sehingga kontestasi yang terjadi adalah kontestasi hibridisasi

DSDACKTR terjadi kontestasi *zero sum game* terjadi antara dinas pertanian dengan DSDACKTR khususnya pada penggunaan air pada musim ketiga, sedangkan pada musim rendang dan gadu I. Kontestasi

yang berlangsung adalah kontestasi hibridisasi, karena di dalam penentuan pola tanam yang telah disepakati DSDACKTR adalah pola tanam padi – padi – palawija, akan tetapi di dalam kegiatannya dinas pertanian memberikan bantuan benih dan bantuan alsitan sehingga waktu tanam palawija petani menanam padi, sehingga air yang jumlahnya sedikit di sungai sehingga air yang didistribusikan tidak cukup untuk semua petani, khususnya untuk wilayah hilir, pada musim tanam ketiga hampir lahan – lahan yang ada di hilir tidak kebagian karena disebabkan air dipergunakan oleh petani di hulu dan di tengah untuk menanam padi, kebijakan dinas pertanian tidak mendukung kebijakan yang ada di DSDACKTR sehingga masing – masing kebijakan yang ada dari dinas yang diperuntukan untuk petani dalam hal memperoleh air yaitu berjalan masing – masing.

Dinas Pertanian dengan PU Kabupaten, memiliki kewenangan masing – masing dalam pembinaan lembaga P3A akan tetapi dalam memberikan bantuan dinas pertanian lebih cenderung memberikan kepada kelompok tani sedangkan dalam pemeliharaan diberikan untuk P3A dalam pembangunan fisik saluran, kehadiran PU sebagai pembina lembaga petani pemakai air juga memberikan bantuan berupa pembinaan lembaga sehingga kedua lembaga ini saling kerjasama dalam membina P3A maka kontestasi yang berlangsung adalah kontestasi hibridisasi. Dinas Pertanian dengan Balai Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dinas Pertanian menyampaikan jadwal tanam dan BMKG

memberikan informasi cuaca yang cocok untuk pelaksanaan tanam, sehingga informasi dari Dinas Pertanian dan BMKG melahirkan kesepakatan jadwal tanam untuk petani, kontestasi yang terjadi adalah kontestasi Hibridisasi. Dinas Pertanian dengan DSDACKTR dalam hal penanganan musim tanam rendeng dan Gadu I, dalam arena mengatasi kekurangan air dengan Dinas Pertanian memberikan bantuan pompa sehingga petani bisa memanfaatkan air tanah atau air sungai dalam memperoleh air disaat air di bendung belum mengalir, sehingga kontestasi yang terjadi adalah kontestasi hibridisasi.

PU/PSDA Kabupaten dalam hal ini berkontestasi dengan DSDACKTR dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada saluran primer dan sekunder, walaupun PU/PSDA Kabupaten D.I Kampili tidak menjadi kewenangannya, akan tetapi PSDA Kabupaten/PU ikut serta dalam menangani pemeliharaan saluran untuk kepentingan petani yang ada di wilayah PSDA Kabupaten, PSDA Kabupaten melaporkan permasalahan yang terjadi di D.I Kampili pada wilayah primer dan sekunder, bahkan pada level tersier, pemerintah pada level provinsi dengan kewenangannya pada Daerah Irigasi 1000 - 3000 hektar, dan kabupaten dengan kewenangannya dibawah 1000 hektar, karena melihat permasalahan yang dihadapi petani pengguna air dan petugas operator irigasi, maka dengan bersama – sama mencari solusi dan bekerjasama dan mengambil kebijakan bahwa permasalahan petani Daerah Irigasi Kampili bukan hanya persoalan pusat akan tetapi menjadi

tanggungjawab bersama atau daerah, setelah pembatalan Undang – Undang Sumber daya Air Nomor 7 tahun 2004 dan dikembalikan pada Undang – Undang Pengairan Nomor 11 tahun 1974, karena aktor pada tingkat kabupaten beranggapan bahwa Undang – Undang nomor 11 tahun 1974 tidak berbicara masalah pembagian kewenangan, sehingga PU/PSDA Kabupaten dibawah petunjuk bupati ikut memberikan bantuan tenaga kerja sarana untuk kegiatan pemeliharaan yang akan membantu proses operasi.

Bappeda dalam hal dalam hal ini penyelenggara kegiatan rapat komisi irigasi, kontestasi dengan semua lembaga irigasi dalam hal pengambilan kebijakan dalam kegiatan rapat komisi irigasi dalam hal penetapan jadwal tanam, merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian, berkoordinasi dengan semua instansi dalam hal penentuan jadwal tanam, jumlah debit air yang akan disediakan dan kesesuaian jenis tanaman atau kesepakatan pola tanam Bappeda dengan instansi yang lain berkontestasi secara hibridisasi, kebijakan yang dimiliki oleh semua instansi dijalankan secara bersama dalam kegiatan rapat komisi irigasi. Berbeda dengan lembaga petani, karena lembaga petani seperti IP3A kadangkala tidak menunggu keputusan dari rapat komisi irigasi untuk melakukan pengaliran air serta pelaksanaan jadwal tanam, hal ini disebabkan karena keterlambatan dari kegiatan rapat irigasi yang dilakukan oleh Bappeda yang selalu terlambat sehingga IP3A kadangkala mengambil alih kegiatan

rapat untuk jadwal tanam sehingga IP3A dengan bantuan petugas irigasi meminta pembukaan pintu bendung serta pengaliran air untuk lahan sawah. Kontestasi yang terjadi antara lembaga petani dengan Bappeda (komisi irigasi) adalah kontestasi *zero sum game*, akan tetapi jika kegiatan komisi irigasi berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ada maka ketua P3A akan menyampaikan hasil rapat pada tingkat komisi irigasi dan kemudian hasil rapat komisi akan membuat rekomendasi hasil rapat tentang jadwal tanam dan pembukaan pintu bendung sesuai dengan hasil keputusan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikelompokkan pola kontestasi yang berlangsung pada ranah kebijakan dalam tabel berikut:

Tabel 19. Aktor, Arena Kontestasi dan Hasil Kontestasi pada Ranah Kebijakan Kegiatan Pengaturan Pendistribusian Air Irigasi pada Daerah Irigasi Kampili

Aktor	Kontesatasi	Arena	Hasil Kontestasi
BBWS	- DSDACKTR Provinsi	- Penugasan tenaga operasi irigasi - Biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	- Hibridisasi - Koeksistensi

Unit pengelolaan Bendungan	- Bappeda/komisi irigasi	- Jadwal pembukaan pintu bendungan	- Hibridisasi
DSDACKTR	- Dinas Pertanian - PSDA/PU Kabupaten	- Pola tanam (Musim tanam ke tiga) - Musim rendeng & Gadu I (mengatasi kekurangan air) - Pemeliharaan	- Zero sum game - Hibridisasi
UPTD PSDACKTR Jeneberang	- DSDACKTR - Unit Pengelolaan Bendungan	- Jadwal pendistribusian air - Permintaan debit dasar pengaliran air	- Hibridisasi - hibridisasi
Dinas Pertanian	- IP3A - PU Kabupaten - Kelompoktani - P3A	- Musim tanam ke tiga - Pembinaan P3A - Pemberian Bantuan Saprodi & Alsintan - Pemeiharaan jaringan tersier	- Zero sum game - Hibridisasi - Hibridisasi - Hibridisasi
Bappeda/Komisi irigasi	- IP3A	- Pelaksanaan pengaliran air di bendung - Keputusan penetapan jadwal tanam & pengaliran dalam rapat komisi irigasi	- Zero sum game - Hibridisasi

Sumber: Data primer setelah diolah, 2018

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada ranah kebijakan berlangsung tiga pola kontestasi, yaitu kontestasi koeksistensi, kontestasi hibridisasi dan kontestasi zero sum game.

Pola kontestasi aktor yang pertama adalah kontestasi koeksistensi yang berlangsung pada aktor ranah kebijakan yaitu 1) BBWS dengan DSDACKTR dalam arena penggunaan biaya operasi dan pemeliharaan, 2) DSDACKTR dengan Dinas Pertanian pada arena pemanfaatan air pada musim ke tiga. Pola kontestasi koeksistensi akan membawa pengaturan irigasi yang tidak efektif, karena masing – masing stakeholder akan

menjalankan lebihakannya masing – masing dan tidak melakukan koordinasi sehingga pola ini bernilai negatif di dalam pengaturan dan pendistribusian irigasi efisien dan efektif.

Pola kontestasi hibridisasi yang berlangsung pada aktor ranah kebijakan yaitu: 1) BBWS dan DSDCKTR dalam arena penugasan tenaga kerja; 2) DSDACKTR dengan PU/PSDA Kabupaten dalam arena pembiayaan operasi dan pemeliharaan; 3) UPTD Jeneberang dengan DSDACKTR dalam arena jadwal pendistribusian air; 4) UPTD Jeneberang dengan Komisi Irigasi/Bappeda dalam arena jadwal pendistribusian air; 5) UPTD Jeneberang dengan Unit Pengelolaan Bendungan dalam arena pengaliran air berdasarkan debit dasar; 6) Dinas Pertanian dengan PU/PSDA kabupaten dalam arena pembinaan P3A; 7) Dinas Pertanian dengan kelompok tani dalam arena pemberian bantuan saprodi dan alsintan, Dinas pertanian dengan P3A dengan dalam arena pemeliharaan jaringan tersier; dan 8) Bappeda/komisi irigasi dengan IP3A dalam arena penetapan jadwal tanam dan pengaliran air.

Pola yang ketiga adalah pola kontestasi zero sum game, pada aktor ranah kebijakan stakeholder meniadakan kebijakan dari stakeholder lainnya atau stakeholder yang satu mendominasi stakeholder yang lainnya. Adapun stakeholder/aktor yang berkontestasi zero sum game yaitu 1) DSDACKTR dengan Dinas Pertanian dalam arena pola tanam atau perbedaan komoditi pada musim tanam ketiga; 2) Dinas Pertanian dengan IP3A dalam arena pola tanam (penentuan jenis komoditi pada

musim ketiga); dan 3) Komisi Irigasi dengan IP3A dalam arena pelaksanaan pengaliran air di bendung. Pola kontestasi *zero sum game* akan menghantarkan pola pendistribusian yang tidak efisien dan efektif, stakeholder/aktor akan saling meniadakan atau mendominasi kebijakan dari Aktor lainnya.

Pola kontestasi yang berkontribusi pada kinerja ranah kebijakan, adalah pola kontestasi hibridisasi yang terdapat sembilan arena aktor yang kontestasi hibridisasi, kemudian pola kontestasi *zero sum game* yang terdapat tiga arena aktor yang berkonstasi secara *zero sum game*, dan hanya pada arena pembiayaan operasi dan pemeliharaan aktor BBWS dan DSDACKTR berkontestasi koeksistensi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pola kontestasi yang berlangsung pada ranah kebijakan dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili adalah pola kontestasi hibridisasi. Pola kontestasi hibridisasi yang masing – masing stakeholder/aktor akan menggabungkan kebijakan yang mereka miliki untuk melahirkan kebijakan baru untuk berlangsungnya pengaturan pendistribusian yang efektif dan efektif.

Ukuran keberlangsungan pengaturan dan pendistribusian air irigasi pada Daerah irigasi Kampili adalah terdistribusinya air secara merata baik untuk wilayah hulu, tengah, dan hilir serta terpenuhinya pemenuhan air untuk musim rendang (musim hujan) air yang digunakan terbantu dari keberadaan air hujan akan tetapi pada awal penanaman yang masing memanfaatkan air dari bendung dan penggunaan irigasi pompaniasi,

sedangkan untuk musim gadu I 100% petani bisa memanfaatkan air untuk penanaman komoditi padi yang bersumber dari bendung, untuk musim gadu II (tanam ke III), pendistribusian ini bisa dimanfaatkan oleh petani diberikan oleh bendung yang hanya 60%, seharusnya tidak ada penanaman padi selain komoditi palawija sehingga baik petani di hulu, tengah, dan hilir bisa memanfaatkan air yang disediakan. Karena komoditi padi akan menggunakan jumlah air yang sangat banyak atau hampir 50% daripada komoditi palawija.

2. Kontestasi Aktor dalam Ranah Operasional

Aktor yang terlibat dalam operasional dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada D.I. Kampili yaitu mulai dari aktor bendung, saluran primer, sekunder, dan tersier.

Pengamat yang memiliki peran utama dalam pengelolaan D.I. Kampili adalah melaksanakan rapat setiap bulan untuk mengetahui permasalahan pemeliharaan, kehadiran para juru dan PPA, Petugas Operasional Bendung serta P3A/GP3A/IP3A. Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan, membantu proses pengajuan bantuan biaya pemeliharaan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A DSDACKTR, serta membuat laporan pemeliharaan ke Dinas DSDACKTR Provinsi. dalam pelaksanaan operasional pengamat bekerjasama dengan Juru Primer dan Petugas Operasional Bendung dalam pelaksanaan pengaturan pendistribusian air irigasi, memeriksa kerusakan – kerusakan yang terjadi di saluran serta melaporkan kondisi permasalahan yang ada

baik dalam pemeliharaan maupun dalam operasional. Pengamat, Juru Primer, dan IP3A berkoordinasi baik dalam permintaan pembukaan pintu bendung maupun dalam mengatasi kerusakan dan bobolan yang terjadi di saluran primer dan sekunder sehingga Pengamat, Juru dan IP3A bekerjasama dalam mengatasi permasalahan yang ada, kontestasi yang terjadi adalah kontestasi hibridisasi.

Petugas Operasional Bendung (POB) memiliki tugas dalam membuka dan menutup pintu bendung untuk pendistribusian air irigasi sesuai dengan permintaan dari BBWS dan hasil keputusan rapat komisi irigasi. Jika rapat komisi irigasi terlambat dilakukan dan petani sudah meminta air melalui IP3A yang diteruskan ke Juru Primer dan Pengamat, sehingga POB membuka pintu bendung sesuai dengan perintah dari pengamat D.I. Kampili, baik berdasarkan keputusan hasil rapat komisi irigasi maupun tidak jika ada tersedia di sungai sehingga POB akan membuka pintu bendung jika jumlah air di sungai sudah ada, serta petani sudah ingin melaksanakan hambur benih walaupun belum ada perintah dari rapat komisi irigasi, ini dilakukan oleh pengamat dan POB untuk menghindari konflik pada petani dan kondisi air sudah tersedia di sungai. Kontestasi yang terjadi adalah kontestasi hibridisasi antara POB dengan Pengamat, sedangkan kontestasi POB dengan komisi irigasi adalah kontestasi *zero sum game*, karena kebijakan Komisi Irigasi yang terlambat akan digantikan dengan kebijakan POB dan ini sudah berlangsung hingga 2 -3 kali musim tanam.

Juru Primer yang bertugas mulai dari BL 1 – BL 17 baik dalam pengaturan pendistribusian air irigasi maupun dalam hal pemeliharaan saluran itu melakukan koordinasi dengan pengamat dalam hal melaporkan kondisi saluran primer baik permasalahan kerusakan fisik maupun bobolan yang ada baik rusak maupun karena dirusak oleh petani. Serta membawa aspirasi petani melalui IP3A pada saat petani sudah membutuhkan air dan Komisi Irigasi belum melakukan rapat. Kontestasi yang ada adalah kontestasi koeksistensi. Selain dengan pengamat, IP3A, maka Juru Primer juga berkoordinasi dengan Juru Sekunder, Petugas Pintu Air Primer dan Petugas Saluran. Juru primer melakukan koordinasi dengan juru sekunder dalam hal kondisi air pada saluran sekunder sehingga jika jumlah air disaluran sekunder kurang atau terjadi kekurangan maka Juru Primer meminta ke PPA Primer untuk membuka pintu kemudian PPA dengan tugasnya akan melihat kondisi air di saluran maka akan memprioritaskan pintu yang akan dibuka sesuai dengan permintaan juru primer untuk mengatasi kekurangan air dan menghindari konflik dengan petani, pada saat terjadi kekurangan air, banyak bobolan pada saluran primer dan sekunder, maka juru primer dan sekunder akan bekerjasama dalam mengatasi kekurangan tersebut kemudian akan mencari penyebab masalah yang ada, jika ada bobolan dan kerusakan saluran maka juru primer dan sekunder akan bekerjasama dalam menutup bobolan yang ada, dan bersama memutuskan saluran mana yang akan diprioritaskan akan diberikan air. Sementara dengan PPA Primer karena

juru primer akan memastikan jadwal buka tutup pada pintu primer, PPA dan Juru bekerjasama mengatasi permasalahan yang dihadapi juru sekunder maupun P3A yang mengalami kekurangan jumlah air di lahan sawah pada saat dibutuhkan, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh petani bisa terselesaikan kontestasi yang ada antara PPA dan Juru Primer adalah kontestasi hibridisasi.

Juru Sekunder selain berkontestasi kooksistensi dengan Juru Primer maka sebagai petugas yang ada di tingkat sekunder yang bertugas mengawasi langsung pembagian air yang dilakukan oleh PPA Sekunder dan PS Sekunder maka juru sekunder memastikan kondisi pengaturan pendistribusian air irigasi yang dilakukan oleh PPA Sekunder, memastikan jadwal buka tutup pintu pada saluran sekunder, dan kadangkala bersama dengan PPA Sekunder Juru Sekunder berkerjasama mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani melalui laporan GP3A, baik dalam pembukaan pintu air pada saat petani membutuhkan dan kondisi dibangun tersedia air, maka Juru Sekunder dan PPA memenuhi permintaan petani sehingga bisa menekan konflik yang bisa timbul serta adanya pencurian air di saluran, selain dengan PPA Sekunder, Juru Sekunder juga bekerjasama dengan Pekerja Saluran Sekunder dalam membersihkan saluran baik dari lumpur maupun dari sampah – sampah yang menghambat pendistribusian air sampai ke lahan sawah. Kontestasi yang ada adalah kontestasi hibridisasi, karena Juru Sekunder, PPA

Sekunder mereka bekerja sama untuk memperbaiki kondisi bangunan walaupun itu tugas utama dari PS.

IP3A sebagai lembaga petani perpanjangan tangan dari P3A maka IP3A berkoordinasi dengan GP3A tentang jadwal dan aturan lahan yang akan memperoleh air terlebih dahulu, IP3A menghubungi GP3A yang rawan air untuk memperoleh laporan realisasi pengaliran air dan membahas jalan keluar jika ada masalah dengan GP3A, IP3A berdasarkan laporan dari GP3A melakukan permintaan pembukaan air ke Juru Primer jika petani sudah melakukan hambur benih dan membutuhkan air, sementara belum ada jadwal buka pintu di bendung karena pelaksanaan rapat komisi yang terlambat. Sehingga IP3A akan mengambil alih pekerjaan Komisi Irigasi untuk melakukan rapat sehingga kadang kebijakan Komisi Irigasi tidak berguna lagi karena sudah dilakukan terlebih dahulu oleh IP3A sehingga jadwal hambur dan pengaliran tidak menunggu keputusan dari Komisi Irigasi. Sehingga kadangkala terjadi kontestasi *zero sum game* antara IP3A dengan Komisi Irigasi.

GP3A sebagai lembaga petani perpanjangan tangan dari P3A maka GP3A akan melaporkan jadwal dan aturan lahan yang akan memperoleh air terlebih dahulu, GP3A menghubungi P3A yang rawan air untuk memperoleh laporan realisasi pengaliran air dan membahas jalan keluar jika ada masalah dengan P3A, GP3A berdasarkan laporan dari P3A melakukan permintaan pembukaan air ke juru sekunder jika petani sudah melakukan hambur benih dan membutuhkan air, sementara belum

ada yang sampai ke saluran tersier. Sehingga Juru Sekunder akan mencari solusi bersama GP3A sehingga air bisa sampai ke saluran sekunder, dengan bersama dengan GP3A dan Juru Sekunder memeriksa kondisi saluran jika terjadi bobolan dan pemboran air, sehingga Juru Sekunder dan GP3A mengatasi bersama untuk menghindari konflik yang bisa terjadi, kontestasi yang terjadi antara GP3A dengan Juru Sekunder adalah kontestasi hibridisasi.

Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), yang di dalamnya terdiri dari Ketua/sekertaris P3A, Mandoro je'ne, Anggota P3A, sebagai lembaga petani seharusnya saling bekerjasama, baik dalam pemeliharaan dan operasional saluran tersier, akan tetapi terjadi kontestasi *zero sum game* antara petani dengan P3A karena beberapa anggota P3A sudah tidak mau lagi melakukan pembersihan, sehingga kebersihan saluran tersier hanya dilakukan oleh sebagian besar ketua P3A. Demikian juga dengan Mandoro je'ne dan anggota P3A (petani), Mandoro je'ne melakukan kewajiban mengatur dan membagi air sesuai dengan kesepakatan rapat P3A, akan tetapi dipendistribusian kadangkala petani tanpa sepengetahuan Mandoro je'ne melakukan pembobolan atau pembukaan paksa pintu air sehingga memicu konflik sesama petani, selain itu petani yang memiliki kewajiban untuk membayar iuran kepada Mandoro je'ne sudah tidak berjalan sesuai dengan seharusnya, tidak semua petani dengan kesadarannya bersedia membayar iuran irigasi, apalagi setelah adanya mobil panen yang membuat Mandoro je'ne kesulitan untuk

menerima gabah dari petani. Kontestasi yang terjadi di dalam P3A adalah kontestasi *zero sum game*, karena aturan yang seharusnya berjalan sudah tidak dilakukan lagi akan tetapi masing – masing melakukan sesuai dengan aturan masing – masing dan tidak mengikuti lagi aturan yang sudah disepakati bersama. Petani banyak melakukan pembobolan karena kurangnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang ada, sesuai dengan pendapat Rahman (1999) banyaknya penyadapan air secara liar disebabkan karena tidak adanya sanksi yang diterapkan kepada mereka.

Selain dengan P3A, aktor yang ada pada tingkat tersier terdapat pula petani yang tidak tergabung dalam P3A D.I Kampili, karena petani tidak ada di dalam jaringan skema D.I Kampili akan tetapi dalam skema jaringan D.I. Bissua. Keberadaan petani yang mengambil air dan memang sangat membutuhkan air karena jika mereka menunggu air dari D.I. Bissua, maka mereka akan terlambat menanam dan bahkan mereka tidak akan kebagian air sampai ke lahan sawah mereka, pengambilan air yang dilakukan oleh petani non D.I. Kampili ini sebenarnya tidak mengganggu petani yang ada di hulu dan ditengah akan tetapi pengambilan air yang dilakukan petani ini mengurangi jumlah air yang bisa sampai ke hilir. Keberadaan petani yang mengambil dari pintu air yang sudah tidak resmi ini tidak dihalangi pula oleh petugas pintu air yang hampir terjadi disaluran primer, karena petugas pintu air primer juga melihat bahwa pengambilan yang dilakukan oleh petani ini karena mereka memang membutuhkan air dan jika mengharapkan air dari D.I Bissua maka mereka bisa tidak

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikelompokkan pola kontestasi yang berlangsung pada ranah operasional dalam tabel berikut:

Aktor	Kontesatasi	Arena	Hasil Kontestasi
Pengamat	- POB	- Pengaturan pendistribusian	- Hibridisasi
	- Juru Primer	- Pengaturan pendistribusian	- Hibridisasi
	- Juru Sekunder	- Pengaturan pendistribusian	- Hibridisasi
	- PPA Primer	- Pengaturan pendistribusian	- Hibridisasi
	- PPA Sekunder	- Pengaturan pendistribusian	- Hibridisasi
	- IP3A	- Pengaturan pendistribusian	- Hibridisasi

POB	- Komisi irigasi - Pengamat & Primer	Juru	- Pembukaan pintu bendung - Pembukaan pintu bendung	- Zero Sum Game & Hibridisasi - Hibridisasi
Juru Primer	- Pengamat		- Operasi dan Pemeliharaan saluran irigasi	- Hibridisasi
	- IP3A		- Mengatasi kekurangan air dan konflik	- Hibridisasi
	- Juru sekunder		- Mengatasi kekurangan air dan konflik	- Hibridisasi
	- PPA Primer		- Pembukaan pintu air dan konflik	- Hibridisasi
	- PS Primer		- Pemeliharaan saluran irigasi	- Hibridisasi
Juru Sekunder	- Juru Primer		- Mengatasi kekurangan air dan konflik	- Hibridisasi
	- PPA Sekunder		- Pembukaan pintu air dan konflik	- Hibridisasi
	- PS Sekunder		- Pemeliharaan saluran irigasi	- Hibridisasi
	- GP3A		- Mengatasi kekurangan air dan konflik	- Hibridisasi
IP3A	- GP3A		- Jadwal dan pengaturan lahan dalam memperoleh air	- Hibridisasi
	- Juru Primer		- Pendistribusian dan konflik	- Hibridisasi
GP3A	- P3A		- Jadwal dan pengaturan lahan dalam memperoleh air	- Hibridisasi
			- Pendistribusian dan konflik	- Hibridisasi
Ketua P3A	- Petani		- Pendistribusian air dan pemeliharaan	- Koeksistensi (petani di hulu dan tengah)
	- Mandoro je'ne		- Pengaturan air di tersier hingga ke lahan persawahan	- Hibridisasi (petani di hilir)
				- Hibridisasi pada PA3 yang aktif
				- Zero sum game pada P3A yang tidak aktif
Mandoro je'ne	- Petani		- Pemeliharaan & pendistribusian air irigasi	- Koeksistensi & Hibridisasi
Anggota P3A/petani	- Anggota kelompok tani		- Pemeliharaan	- Koeksistensi
	- Petani non D.I Kampili			- Koeksistensi
	- Petani			- Zero sum game
Petani Non D.I Kampili	- PPA		- Perolehan Air	- hibridisasi
	- Juru Primer			- hibridisasi

Sumber; Data Primer Setelah diolah

Berdasarkan uraian sebelumnya dan berdasarkan Tabel 20, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengaturan pendistribusian air irigasi pada ranah operasional berlangsung tiga pola kontestasi, yaitu kontestasi koeksistensi, kontestasi hibridisasi dan kontestasi zero sum game.

Pola kontestasi aktor pada ranah operasional mulai dari level bendung, primer dan sekunder maka pola kontestasi yang berlangsung antar aktor operasional adalah kontestasi hibridisasi. Aktor operator irigasi baik pada level bendung, primer, sekunder semuanya bekerjasama di dalam mengatasi permasalahan kekurangan air maupun konflik yang terjadi di dalam pemanfaatan air irigasi. Terdapat kontestasi *zero sum game* antara aktor POB dan Komisi irigasi dengan arena pembukaan pintu bendung, POB lebih dahulu melakukan pengaliran air di bendung yang seharusnya harus menunggu hasil keputusan rapat komisi irigasi, rapat komisi irigasi yang terlambat sementara permintaan air sudah ada dari Pengamat dan Juru Primer, dan terdapat air di sungai, sehingga kebijakan dari Komisi Irigasi tidak berjalan akan tetapi kebijakan POB yang berjalan.

Kontestasi pada level tersier adalah pola kontestasi koeksistensi yaitu: 1) ketua P3A dengan petani khususnya petani yang ada di hulu dan tengah yang mudah memperoleh air, mereka berkontestasi koeksistensi di dalam arena pemeliharaan saluran, yang sebagai besar petani tidak mau lagi ikut kerja bakti karena mereka merasa bahwa itu tugas dari ketua P3A atau pengurus; 2) Mandoro Je'ne dengan Petani pada arena pengaturan pendistribusian dan pembayaran iuran, petani tidak mau lagi membayar iuran air dianggapnya bahwa air yang diperoleh bukan dari kerja Mandoro je'ne sehingga Mandoro je'ne juga kadang tidak menjalankan fungsinya sebagai pengatur air; 3) anggota petani P3A dengan anggota kelompok tani dalam arena perolehan air dan pemeliharaan, ada petani

yang bukan anggota kelompok tani dan ada kelompok tani yang tidak memiliki lahan sehingga mereka tidak mau ikut kerja bakti, akan tetapi anggota kelompok tani tersebut memperoleh bantuan dari dinas pertanian sehingga mereka masing – masing tidak bekerja sama di dalam menjaga kondisi saluran tersier; dan 4) anggota P3A dengan petani yang ada di luar P3A Kampili, pada arena perolehan air, petani non D.I Kampili menggunakan caranya sendiri dalam memanfaatkan saluran untuk memperoleh air, baik secara legal maupun ilegal.

Pola yang kedua pada level tersier adalah kontestasi hibridisasi yaitu: 1) P3A dengan petani yang ada di hilir, berlangsung kontestasi hibridisasi karena ketua P3A bersama petani yang ada di hilir ikut bekerjasama di dalam mengatasi sampah yang menghambat saluran untuk memperoleh air hingga ke lahan persawahan; 2) petani non D.I. Kampili (di luar skema jaringan) dengan Petugas Irigasi PPA dan Juru Primer, petani yang di luar jaringan membutuhkan air dan meminta kepada PPA dan juru supaya memperoleh air, dan PPA memberi air berdasarkan perintah dari Juru primer, sehingga kontestasi yang ada adalah kontestasi hibridisasi, akan tetapi kontestasi ini sebenarnya menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah air yang saluran primer yang pada akhirnya mengurangi jumlah air hingga ke hilir.

Pola yang ketiga adalah pola kontestasi *zero sum game*, pada aktor ranah operasional yaitu: 1) Ketua P3A dengan mandoro je'ne karena beberapa P3A pada daerah irigasi kampili, pekerjaan mandoro je'ne

diambil alih oleh ketua P3A, sehingga Mandoro je'ne tidak berjalan dan dana pembayaran dari iuran juga digunakan oleh ketua P3A sehingga fungsi dari mandoro je'ne sebagai pengatur atau pembagi air irigasi pada saluran tersier sampai ke petak lahan persawahan tidak berjalan lagi;

2) anggota P3A/petani dengan petani lainnya berkontestasi dalam arena perolehan air, sebagian besar petani yang ada pada wilayah tengah menggunakan pembobolan, pengambilan air dengan penyadapan langsung, baik menggunakan pompa maupun dengan menggunakan pipa sehingga karena ulahnya banyak petani yang tidak kebagian air, sehingga petani lain tidak memperoleh air.

Pola kontestasi yang berkontribusi pada kinerja ranah operasi pada level bendung hingga sekunder adalah pola kontestasi hibridisasi, sedangkan pada level tersier (usahatani) yang berlangsung adalah kontestasi koeksistensi, *zero sum game* dan hibridisasi.

Ukuran keberlangsungan pengaturan dan pendistribusian air irigasi pada Daerah irigasi Kampili adalah terdistribusinya air secara merata baik untuk wilayah hulu, tengah dan hilir, serta terpenuhinya pemenuhan air untuk musim rendang (musim hujan) air yang digunakan terbantu dari keberadaan air hujan akan tetapi pada awal penanaman yang masih memanfaatkan air dari bendung dan penggunaan irigasi pompaniasi, sedangkan untuk musim gadu I 100% petani bisa memanfaatkan air untuk penanaman komoditi padi yang bersumber dari bendung, untuk musim gadu II (tanam ke III), pendistribusian ini bisa dimanfaatkan oleh petani

diberikan oleh bendung yang hanya 60%, seharusnya tidak ada penanaman padi selain komoditi palawija sehingga baik petani di hulu, tengah dan hilir bisa memanfaatkan air yang disediakan, karena kebutuhan air untuk komoditi padi 50% dari penggunaan air untuk komoditi palawija.

Pendistribusian air pada ranah operasional sudah berjalan dengan baik dengan penerapan pola kontestasi hibridisasi, akan tetapi pada level tersier, aktor yang ada di level usahatani adalah aktor yang memanfaatkan langsung sumber daya air yang ada, sehingga terjadi kontestasi yang berbeda petani yang mudah mendapatkan air akan berkontestasi secara koeksistensi akan tetapi petani yang sulit mendapatkan air maka akan berkontestasi dengan pola hibridisasi untuk bisa memperoleh sumber daya yang ada. Hingga dapat dikatakan bahwa aktor yang gampang memperoleh air tidak akan memperkuat lembaganya atau organisasinya justru sebaliknya petani yang di hilir yang sulit mendapatkan air mau bekerjasama guna memenuhi kebutuhannya sesuai pendapat Ambler (1992) mengatakan bahwa semakin mudah petani dalam memperoleh air, dan semakin besar ketersediaan air, maka petani semakin tidak terdorong untuk membentuk suatu organisasi yang kuat.

Pengaturan pendistribusian air irigasi pada musim tanam gadu I, tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, petani banyak yang menanam diawal dari jadwal yang telah ditentukan, hal ini dilakukan petani karena ingin melakukan penanaman padi tiga kali, khususnya petani

yang ada di wilayah tengah seperti Kecamatan Bajeng, Barombong, sehingga petani yang lahannya ada di hilir dan lahan petani yang berada di ketinggian atau di hulu, mengalami keterlambatan di dalam menanam padi pada musim gadu I. Penanaman musim rendeng yang mengharapkan air hujan sebagai sumber daya yang digunakan juga terhambat pada awal tanam karena pada awal penanaman air belum ada dari bendung, sehingga petani menggunakan irigasi pompaniasi untuk pemenuhan air pada awal tanam, akan tetapi petani yang tidak menggunakan pompaniasi akan terlambat menanam karena menunggu air hujan atau air dari bendung. Sedangkan pada musim tanam yang yang ketiga kali pada Daerah Irigasi Kampili mengalami banyak permasalahan pula, karena air yang di distribusikan jumlahnya sedikit dari musim gadu I dan untuk gadu I diberikan 100% dari bendung sementara untuk musim tanam ketiga (gadu II) hanya 60% air yang diberikan bendung karena kondisi air dibendung dan untuk memenuhi kebutuhan PDAM dan PLTA.

Terjadinya pendistribusian yang tidak efektif pada Daerah irigasi Kampili karena masih adanya pola kontestasi koeksistensi dan *zero sum game*, dan ini terjadi di tingkat tersier dan keberadaan dinas pemerintah Dinas Pertanian dengan DSDACKTR yang tidak berkoordinasi di dalam menjalankan program lembaga masing –masing. Sehingga untuk efektif dan efisiensinya pengaturan dan pendistribusian air pada daerah irigasi kampili yang ditempuh adalah mulai dari tingkat pusat hingga ke pemerintah lokal

itu bekerjasama atau berkontestasi hibridisasi akan tetapi jika tidak bisa hibridisasi setidaknya tidak terjadi kontestasi *zero sum game* dimana ada lembaga yang dikorbankan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan di lapangan, pembahasan dan analisis penelitian untuk menjawab tujuan dari penelitian maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola pemanfaatan air irigasi yang berlangsung ditandai oleh karakteristik dari: 1) Segi waktu, pola ini berbasis musiman; 2) segi ruang, lebih besar memberi akses pada wilayah tengah 3) segi pelaku, dominan dimainkan oleh aktor Juru Primer dan Petugas Pintu; dan 4) segi komoditi, lebih banyak kepada komoditi padi. Berdasarkan hak kepemilikan pemanfaatan air irigasi bertipe kombinasi di lihat aspek hak kepemilikan dan aturan – aturannya maka bertipe kepemilikan negara, segi akses pemanfaatan bersifat sumber daya milik bersama (*common pool resources*) dan cara mengaksesnya cenderung ke open akses.
2. Sistem kelembagaan irigasi kampili dicirikan oleh saling keterkaitan R–O–N, pada level bendung adalah *Resources* (R) air bendung, dikelola oleh Organisation BBWS dan Komisi Irigasi, dengan penerapan norma masing – masing yang dimilikinya. Pada level saluran primer *Resources* (R) air di saluran primer dikelola oleh *Organisation* (O) BBWS, DSDACKTR, IP3A dengan norma masing –

masing yang dimilikinya. Pada level saluran sekunder *Resources* (R) air pada saluran sekunder dikelola oleh *Organisation* (O) BBWS, DSDAKTR, GP3A, dengan menerapkan norma dari masing – masing O. Sedangkan pada tingkat tersier atau usahatani *Resources* (R) air pada saluran tersier sampai ke petakan lahan persawahan dikelola oleh *Organisation* (O) dari P3A, Kelompok tani dan dinas pertanian dan komisi irigasi.

Di dalam pengelolaan irigasi tatanan yang berlangsung adalah sumber daya (*Resources*) yang melimpah air yang berasal dari sungai jeneberang dan jene lata' yang dialirkan melalui bendung Kampili dikelola oleh banyak (*Organisation*) atau kelembagaan irigasi dari pemerintah, lembaga petani dan lembaga komisi irigasi, akan tetapi sumber daya (*Organisation*) pada operator irigasi berkapasitas rendah, sumber daya manusia yang mengatur tidak mampu menghitung jumlah kebutuhan air yang dibutuhkan sehingga pengaturannya bukan berdasarkan kuantitas akan tetapi berdasarkan perkiraan kecukupan. Dari segi (*norm*) norma atau aturan Daerah Irigasi Kampili berada di bawah kewenangan pusat yang membuat atau membatasi provinsi dan kabupaten untuk terlibat langsung dalam operasi dan pemeliharaan mulai dari bendung sampai saluran tersier. Norma yang berlaku pada level pemerintah pusat BBWS membatasi gerak ruang dari pemerintah provinsi dan kabupaten di dalam mengatur sumber daya air yang di dalam daerah dan komisi irigasi tidak mengarah

kepada pengelolaan irigasi yang efektif yang fungsinya sebagai lembaga koordinasi antara petani dengan pemerintah tidak berjalan. Tidak efektifnya sistem pendistribusian dan banyaknya pelanggaran di dalam pemanfaatan air karena tidak terjadinya komunikasi dan koordinasi yang baik antara dinas pengelola sumber daya air dengan dinas pertanian.

3. Kontestasi aktor yang berlangsung dterbagi dalam tiga pola kontestasi, yaitu kontestasi koeksistensi, kontestasi hibridisasi dan kontestasi zero sum game. Kontestasi aktor pada ranah kebijakan yang dominan berlangsung yaitu pola kontestasi hibridisasi walaupun masih terdapat kontestasi koeksistensi dan zero sum game dan pola kontestasi yang berkontribusi pada kinerja ranah operasional pada level bendung hingga sekunder adalah pola kontestasi hibridisasi, sedangkan pada level tersier (usahatani) yang berlangsung adalah kontestasi koeksistensi, *zero sum game* dan hibridisasi.

Pola kontestasi koeksistensi pada ranah kebijakan yaitu a) BBWS dengan DSDACKTR b) DSDACKTR dengan Dinas Pertanian. Pola kontestasi hibridisasi yang berlangsung pada aktor ranah kebijakan yaitu a) BBWS dan DSDCKTR, b) DSDACKTR dengan PU/PSDA, c) UPTD Jeneberang dengan DSDACKTR, d) UPTD Jeneberang dengan Komisi Irigasi/Bappeda. e) UPTD Jeneberang dengan unit pengelolaan bendungan, f) Dinas Pertanian dengan PU/PSDA Kabupaten, g) Dinas Pertanian dengan kelompok tani dan Dinas pertanian dengan P3A, dan

h) Bappeda/Komisi Irigasi dengan IP3A. 3) Pola kontestasi *zero sum game* adalah pola kontestasi pada aktor ranah kebijakan, Adapun stakeholder/aktor yang berkontestasi *zero sum game* yaitu: 1) DSDACKTR dengan Dinas Pertanian, 2) Dinas Pertanian dengan IP3A, 3) Komisi Irigasi dengan IP3A. Pola Kontestasi pada ranah kebijakan yang dominan adalah, pola kontestasi hibridisasi walaupun masih ada kontestasi koeksistensi, demikian pula pada ranah operasional pada tingkat operator irigasi dari bendung sampai ke sekunder pola kontestasi yang dominan adalah kontestasi hibridisasi dan pada tingkat tersier ketiga pola kontestasi ini berlangsung yaitu pola kontestasi koeksistensi, hibridisasi dan *zero sum game*.

Relasi kepentingan dan kekuasaan aktor terdapat empat pola, a) *Players* yaitu aktor yang memiliki kepentingan yang tinggi dan kekuasaan yang tinggi PU/PSDA Kabupaten, Dinas Pertanian, Pengamat, POB, Juru, PS, IP3A, ketua GP3A, Ketua P3A, Petani Anggota P3A, Mandoro Je'ne, Kepala Desa, LSM, Peneliti, Bappeda, Camat, BMKG, Keamanan, b) *Conters Cettters* yaitu aktor yang memiliki kekuasaan yang tinggi tapi kepentingan yang rendah BBWS, DSDACKTR Provinsi dan Unit Pengelolaan Bendungan, c) *Subject* yaitu aktor yang memiliki kepentingan tinggi dan kekuasaan rendah yaitu petani yang ada di luar skema jaringan Daerah irigasi Kampili dan d) *Crowd* yaitu aktor yang memiliki kepentingan rendah dan kekuasaan rendah yaitu

pengusaha mobil panen dan masyarakat yang tinggal di atas/sekitar Saluran irigasi.

B. Implikasi Teori

Teori hak kepemilikan (*Property right*) dalam sumber daya terbagi menjadi empat tipologi yaitu 1) *Private property* (Kepemilikan individu/pribadi), 2) *Common property* (kepemilikan bersama) 3. Kepemilikan negara dan 4) Open Access (akses terbuka), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tipologi (*Property Right*) D.I. Kampili adalah tipe kombinasi dari tipologi yang ada dilihat dari segi pengaturan masuk ke tipologi sumber daya milik negara, dari segi cara mengakses sumber daya air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili masuk ke dalam hak kepemilikan bersama (*common right*) yang cenderung bersifat *open access*.

Ohama ((2001) mengemukakan bahwa ada tiga unsur fundamental dalam pembangunan yakni sumber daya (*resources*), organisasi (*organizations*) dan norma (*norms*). Ketiga unsur ini menjadi unsur fundamental di dalam menjalankan aktivitas kelembagaan. Hasil penelitian menemukan terdapat rangkaian interkoneksi R-O-N pada sistem pengelolaan irigasi pada Daerah irigasi Kampili, yaitu terdapat sumber daya (*R*) yang melimpah, tetapi pelaku (*O*) yang mengelolanya terutama dalam operasional masih ada yang berkapasitas rendah dan (*N*) yang berlaku khususnya dalam batas kewenangan tidak mengarah kepada pengelolaan sumber daya yang efektif, serta tidak ada penerapan dan

penegakan (*N*) terhadap pelaku atau aktor yang melakukan pelanggaran – pelanggaran.

Dalam penelitian dalam pengelolaan irigasi Kampili selain *R – O – N* yang berinterkonektivitas maka dibutuhkan Koordinasi di dalam memanfaatkan *R*, dan menerapkan *N* sehingga bisa tercapai pengaturan pendistribusian air irigasi yang efektif.

Analisis Pendekatan Pierre Bourdieu Arena merupakan suatu ruang hubungan yang karakternya terdiri atas posisi para penghuninya. Di dalam arena terdapat suatu kontestasi antara para aktor dengan modal-modal yang mereka miliki bahwa arena adalah ruang sirkulasi kapital yang dimiliki oleh organisasi yang berada di dalam arena tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga kapital yang dimiliki oleh aktor untuk berkontestasi di dalam arena pengelolaan irigasi, yaitu kapital ekonomi berupa biaya operasi dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana di dalam pengelolaan Daerah Irigasi Kampili, Kapital kultural (budaya) yang dapat terinstitusionalisasi dalam bentuk pendidikan atau pengetahuan, serta regulasi dan perizinan, dan kapital sosial yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kehormatan atau pangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aktor pemerintah yang memiliki semua modal kapital dengan mudah dapat memenuhi kepentingannya, dan hasil penelitian pula menemukan bahwa aktor lemah sekalipun bisa mendapatkan kepentingannya atas bantuan aktor yang memiliki kekuasaan. Petani yang lahannya berada di luar skema jaringan Daerah

Irigasi Kampili dan petani yang tidak memiliki pintu air legal dapat memperoleh sumber daya air dengan bantuan dari aktor yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan irigasi. Akan tetapi petani secara individu memiliki posisi tawar yang rendah, sehingga petani memiliki kekuasaan yang lemah untuk berkompetisi dengan aktor lainnya dalam pemanfaatan sumber daya irigasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan posisi tawarnya.

C. Impikasi Kebijakan

1. Diperlukan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air irigasi pada Daerah Irigasi Kampili sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di dalam memanfaatkan sumber daya air irigasi, sehingga semua stakeholder di alam mengakses sumber daya air lebih efisien dan efektif sehingga terwujud pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan sehingga tidak terjadi pemanfaatan yang akan membawa ke open akses.
2. Diperlukan kerjasama semua stakeholder/aktor dalam melihat kembali lahan persawahan petani khususnya yang tidak berada di dalam skema Daerah Irigasi Kampili dan diperlukan kerjasama antar lembaga khususnya pada tingkat tersier, dan dilakukan restrukturisasi kelembagaan kelompok petani, sehingga tidak terdapat dua lembaga petani pada tingkat tersier.

3. Pola kontestasi yang seharusnya berjalan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan pada tingkat tersier adalah kontestasi hibridisasi, dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten di dalam operasi dan pemeliharaan mulai tingkat bendung hingga tersier, bukan hanya menjadi kewenangan penuh dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB, 2010. *Citarum Analysis Stakeholders*. Institutional Strengthening for IWRM in the 6 Cis RBT.
- Adger, W.N, Luttrell C. 2000. The values of wetlands: landscape and institutional perspectives: property rights and the utilisation of wetlands. *Ecological Economics* 35:75-89
- Akhyar, 2014. *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ali, M. S., 2009. *Teori – Teori Sosial. Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu – Ilmu Pertanian*. Tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Unhas, Makassar
- Ambler, J. S, (ed). 1992. *Irigasi Indonesia: Dinamika Kelembagaan Petani*. Jakarta : LP3ES.
- Anonim, 2010. International Standart ISO 26000 Guidance on Social Responsibility.
- Anonim, 2015. AA1000 Stakeholder Engagement Standar. Account Ability.
- Anonim, 2015. *Data Pertanian Kabupaten Gowa*. BPS Kabupaten Gowa.
- Anonim, 2015. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanW.. Rakyat Republik Indonesia, Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi*. Republik Indonesia
- Anonim, 2017. Profil Dinas Sumber daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan. <http://psdasulsel.org/> di akses 3 Januari 2017.
- Arifin, Z., 2012. Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*.No.1.Vol.1. ISSN: 2301-8496.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Kabupaten Gowa Dalam Angka*. Kantor Pusat Statistik Kabupaten Gowa.
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Kabupaten Gowa Dalam Angka*. Kantor Pusat Statistik Kabupaten Gowa.
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Kabupaten Gowa Dalam Angka*. Kantor Pusat Statistik Kabupaten Gowa.
- Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang. Profil Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang [.http://bbwspompenganjeneberang.org/](http://bbwspompenganjeneberang.org/) Di akses 3 Januari 2017
- Bennett, C.F., 1976. Analysing impacts of Extension programs. Washington D.C., U.S. Departament of Agriculture Extension Service , No. ESC 575.
- Bertens K., 1985. Filsafat Barat Abad XX (Jilid II), Jakarta-Gramedia Pustaka Utama. Bordieu, Piere, 1991, *Languange and Symbolic Power*, Cambridge-Harvard University Press.

- Biersack, A., and Greenberg, J.B., 2006. *Reimagining Political Ecology*. Duke University Press.
- Bixler, R. P., Angelo J.D., Mfunne, O., Roba, H. 2015. The political ecology of participatory conservation institutions and discourse, *Journal of Political Ecology*, Vol.22, 2015
- Bixler, R.P. 2013. The political of local environmental narrative; power, knowledge, and Mountain Caribou conservation. *Journal of Political Ecology*, Vol 20, 2013.
- Bixler, R.P. and Taylor, 2012. Toward a community of innovation in community-based natural resource management: insights from Open Source software. *Human Organization* 71.
- Blaikie, P. And Brookfield, H., 1987. *Land degradation and Society*. London: Routledge.
- Bourdieu P., 1993, *The Field of Cultural Production*. Essays on Art and Leisure, New York: Columbia University Press.
- Bourdieu, P. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. London; Cambridge University Press.
- Brinkerhoff, D.W. dan Goldsmith, A. A., 1990. *Institutional Sustainability in Agriculture and Rural Development*. New York, Westport, Connecticut, London: Praeger.
- Brite, E.B., (2016). Irrigation in the Khorezm oasis, past and present: a political ecology perspective. *Journal of Political Ecology*. Vol 23 2016.
- Bromley D.W., 1991. *Environment and Economy: Property Right and Public Policy*. Cambridge (GB): Blackwell
- Browley, D.W., 1992. *The Commons, Property and Common Property Regimes*. In Making the Commons Work. Bromley D.W. (ed.). ISCG: San Francisco.
- Bryant, R.L. and Bailey S., 1997. *Third World Political Ecology*. London (GB): Routledge.
- Bryant, R.L., 1992. Political ecology an emerging research agenda in third-world studies. *Political Geography* 11(1)
- Bryant, R.L., 1998. Power, Knowledge and political ecology in the third world: a review. *Physical Geography* 22: 79-94
- Bryson, J .M., 2003. What to Do When Stakeholders Matters: A Guide to Stakeholders Identification and Techniques". A paper presented at the National Public Management Research Conference. Georgetown University Public Policy Institute, Washington, D.C.
- Budiman. 2015. *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Paper Program pascasarjana ilmu ekonomi konsentrasi pembangunan sumber daya universitas nusa bangsa*. Bogor
- Bungin, M.B., 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

- Caporaso, J.A., and Levine, D.P., 1992 *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press.
- Cockburn, A. and Ridgeway, J. (eds) 1997. *Political Ecology*. Times Books, New York
- Cole, S. 2012. A political ecology of water equity and tourism : A Case Study From Bali. *Annals of Tourism Research*, Volume 39, Issue 2, April 2012, Pages 1221–1241 doi.org/10.1016/j.annals.2012.01.003. Elsevier
- Coward E.W., 1980. *Irrigation and Agriculture Development in Asia: Perspective from the Social Sciences*. Cornell University Press.
- Coward E.W., 1984. *Improving Policies and Programs for the Scale Irrigation Systems*. Cornell University Press.
- Coward E.W., 1987. *Rural Poverty and Resource Management: A Review of Foundation Activities in Agricultural Systems, Land Management, and Water Management*. Ford Foundation.
- Creswell, J. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Creswell, J. 2014. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J., 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar
- Crosby, B.L. 1992. *Stakeholder Analysis: A vital tool for strategic managers*. Technical Notes, No. 2. Agency for International Development, Washington DC.
- De Koning, R. 2008. Resource-conflict links in Sierra Leone and the democratic Republic of the Congo. *Sipri insights on peace and security* No. 2008/2.
- Denzin, N.K. dan Lincoln, Y. S. 2017. *The SAGE Handbook Of Quality Research*. Sage Publications
- Denzin, N.K., 1989. *The Research Act in Sociology*. New York: McGraw Hill.
- Desan, M. H. (2013). Bourdieu, marx, and capital: A critique of the extension model. *Sociological Theory* , 31 (4), 318-342. [doi:10.1177/0735275113513265](https://doi.org/10.1177/0735275113513265).
- Dharmawan, A.H., 2007. Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia , Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, 01(01), 1-4.

- Dunlap, R.E, and Catton, W.R., 1979. *Environmental Sociology*. Department of Sociology, Washington State University, Pullman, Washington
- Eden, C. and Ackermann, F. (1998) *Making Strategy: The Journey of Strategic Management*, London: Sage Publications.
- Emirbayer, M., and Johnson, V., 2008. Bourdieu and organizational analysis. *Theory and Society*, 37 (1), 1-44. doi:10.1007/s11186-007-9052-y.
- Escobar, A. 2006. Difference and conflict in the struggle over natural resources: a ecology framework. *Development* 49(3):6–13. <http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.development.1100267>.
- Fauzi, A., 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Febryano, I. G., 2014. *Ekologi Politik Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Feder, E., 1978. *Stawberry Capitalism: An Enquiry into the Mechanism of Dependency in Mexican Agriculture*. Mexico City: Editorial Campesina.
- Feeny, D., Berkes, F., McCay, B.J. and Acheson, J.M., 1990. The tragedy of the commons: twenty-two years later. *Human Ecology*, 18(1): 1- 19.
- Fletcher, A; Guthrie, J; Steane, P; Roos, G; and Pike S. 2003 Mapping Stakeholders perceptions fo a third sector organization. *Journal of Intellectual Capital* 4 (4):505-527.
- Forsyth, T. 2003. *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science* 0th Edition
- Foucault, M. 2012. *Arkeologi Pengetahuan*. IRCiSoD, Jogjakarta.
- Foucault, Michael, 1980, *Power and knowledge : Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, Sussex: The Harvester Press.
- Foucault, Michael, 2000, *Power*, London: Penguin Books.
- Freeman, O., 1981. *The Multinational Company. Instrument for World Growth*. New York: Praeger.
- Freeman, R. Edward. 1984. *Strategic Management. A Stakeholder Approach*. University of Minnesota.
- Friedman, A. L. and S. Miles. 2006. *Stakeholders. Theory and Practice*. OXFORD University Press.
- Furubotn, E.G. and Richter, R., 2000. *Institutions and Economics Theory: The Contribution of The New Institutional Economics*, Ann Arbor USA The University of Michigan Press Researche.
- Grimle, R. 1998. *Stakeholder Methodologies in natural Resources Management*. Chatham, UK. Natural Resource Institute.

- Guba, E.G. 1990. *The Paradigm Dialog*. London. New Delhi: Sage Publications.
- Guba, E.G., & Lincoln, Y.S. 2005. *Competing Paradigms in Qualitative*. In N.K, Denzin & Y. S.Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative researche*. Thoudand Oaks, CA: Sage Publication.
- Hamer, 1981. *Self-Intest an Corruption in Bukusu Coopeartives*. Human Organization.
- Hamidov A, Thiel, A, Zikos D., 2015. ,Institutional design in transformation: A comparative study of local irrigation governance in Uzbekistan environmental sciece & policy 53 (2015) 175 – 191. Elsevier
- Hanna, S., 1995. *An Intruduction to property Rights and the Enviroment: Social and Ecological Issues*. Publisher: The World Bank, Wash. DC, USA
- Haragopa, G. 1980. *Administrative Leadership and Rural Development in India*. New Delhi: Light and Life Publisher.
- Hardin. G. 1968. The tragedy of the common. *science*.162p. 1240-1248.
- Hardin. G. 1994. *The tragedy of the unmanaged commons*. *Trends Ecol, Evol.*,9:199.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar rezim kepastian : Pemikiran kritis post strukturalis* . Yogyakarta: Kanisius.
- Helmi, *Peranan Lembaga P3A/Kejrueen Blang Dalam Konteks Otonomi Daerah Tentang Pengelolaan Air Irigasi di Provinsi Aceh*
- Hidayat S, 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru : Suska Pres.
- Hidayat, H; Haba, J. and Siburian, R., 2011. *Ekologi Politik Pengelolaan Taman Nasional Era Orda*. LIPI Press, Jakarta.
- Hilary, R., 2017. Konflik Penambangan Batugamping Kecamatan Ponjong dalam Tinjauan Arena Bourdieu. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan P-ISSN: 2338-1604 dan E-ISSN: 2407-8751 Volume 5 Nomor 1, April 2017, 45-58* <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.5.1.45-58>
- Hovland. I. 2005. *Successful Communication: A Toolkit for Researchers and Civil Society Organisations*. www.odi.org.uk/Rapid/Publications/Documents/Comms_toolkit.p
- Iqbal, M. 2007. Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 2007.

- Irawan, P., 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu – Ilmu Sosial*. Depok: Departement Ilmu Adminitrasi FISIP UI
- Kadir W., Awang S.A., Purwanto, R.H dan Erny, 2013 Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 20, No.1, Maret. 2013: 11 – 21
- Kakisina, L.O., Ali. S.S., Salman, D., Fahmid. I.M., Demmallino. E.B., 2015. Contested Actors in Mining Areas (a Case Study of Gold Mining at Gunung Botak). *International Journal of Social Science and Humanities*. Vol. 4, No. 3, pp. 109-112, March 2015
- Kartono, K. 1980. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kerlinger F.N., & Lee H.B., 2000. *Foundations of Behavioral Research*. Harcpiurt College.
- Laban S., Oue H., and Rampisela A., 2015. Irrigation practice and its effects on water storage and groundwater fluctuation in the first dry season in the rice cultivation region, South Sulawesi, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences* 28 (2015) 271 – 279.
- Lei Z., Nico H; Liesbeth D; Xiaoping S; Nico H and Xiaoping S. 2013. Analysis Water users associations and irrigation water productivity in northern China. *Ecological Economics* 95 (2013) 128–136
- Lei, Z; Xueqin, Z; Nico, H and Xiaoping S, 2013. Does output market development affect irrigation water institutions? Insights from a case study in northern China. *doi:10.1016/j.agwat.2013.09.008*
- Lenggono, P.S., 2006. *Metodologi Penelitian Sosiologi*. Publisher: Program Studi Sosiologi Pedesaan Sps IPB.
- Leonard, D.K., 1977. *Reaching the Peasant Farmer: Organization Theory and Practice in Kenya*. Chicargo Press.
- Lincoln, Y. S. and Guba, E. G. 2000, 'Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences', in Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. [Eds.] *The Handbook of Qualitative Research*, Sage, Beverly Hills, CA. pp. 163-188.
- Lincoln, Y. S. and Guba, E. G., 1994, *Naturalistic Inquiry*. California: Sage Publication
- Lopa, T.L, dan Maricar F., 2013. *Kajian Proses Penguatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi yang berwawasan Lingkungan*. Makalah disampaikan Konferensi Nasional Teknik Sipil 7, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Lubis, A. Y., 2014. *Postmodernisme: Teori dan metode*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lynch, O.J., and Harwell, E., 2002. Whose Natural Resources? Whose Common Good? Toward a New Paradigm of Enviromental justice

and the National Interest in Indonesia. Jakarta: Center for International Environmental Law (CIEL).

- Mbereko A., Mukamuri B., Chimbari NM., 2015. Exclusion and contests over wetlands used for farming in Zimbabwe: a case study of broad-ridge and broad-furrow tillage system on Zungwi Vlei. *Journal of Political Ecology* Vol.21, 2015.
- Miles, N.B. dan A.M.Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Tjetjep Rohendi Rohidi, penerjemah Jakarta UI Press. Terjemahan Dari : *Qualitative Data Analysis*.
- Mitchell R. K., Agle BR, Wood DJ. 1997. Toward a theory of stakeholder identification and science: defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review* 22(4):853-888
- Muharam, 2011. Strategi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi. Faperta UNSIKA
- Mustafa D, Amelia A, Scott .L, 2016. Water user associations and the politics of water in Jordan. *World Development* Vol. 79, pp. 164–176, 2016. Elsevier
- Nazir , M. 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nkhoma, B and Kayira G ,2015. *Gender and power contestations over water use in irrigation schemes: Lessons from the lake Chilwa basin*. S.J. van Andel et al. / *Agriculture and Agricultural Science Procedia* 4 (2015) 232 – 241. Elsevier
- Nkhoma, B and Kayira G ,2015. *Gender and power contestations over water use in irrigation schemes: Lessons from the lake Chilwa basin*. S.J. van Andel et al. / *Agriculture and Agricultural Science Procedia* 4 (2015) 232 – 241. Elsevier
- North W., Awang S.A., Purwanto, R.H dan Erny, 2013 Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Vol. 20, No.1, Maret. 2013: 11 – 21
- North, C.D. 1991.*Institutions, Institutional change and Economic Performance, Political Economy of Institutions and Decisions*. Cambri University, Cambridge. P 49 – 51.
- North, C.D. 2005. *Understanding the Process of Institutional Change*. Princeton: Princeton University Press.
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrohmat, D.R., Yustika, A. E., 2015. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 12 No. 2, Agustus 2015 : 105 – 124.
- Ohama, Y., 2001. *Conceptual Framework of Participatory Local Social Development*, Nagoya: JICA.
- Ohama, Y., 2007. *Participatory Local Social Development – An Emerging Discipline*,. Bharat Book Centre: India.

- Ostrom, V., 1990. *Polycentricity. Polycentricity and Local public Economies* (ed: MD McGinnis), The Univ.of Michigan Press, USA.
- Overseas Development Administration. 1995. Guidance note on how to do Stakeholders Analysis of aid Project and Programmes. Bonn: Social Development Departement, Overseas Development Adminstration.
- Oxby, C., 1983. Farmer Groups in Rural Areas of the Third World. *Community Development Journal*. 18 (1), 50-59.
- Pasandaran, E. 2005. Reformasi Irigasi Dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumber daya Air. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Peng, G; Xingmin, M;, Yajun L;, Gua, C; Runqiang, Z; Liang, Q., ,2015. Effect of large dams and irrigation in the upper reaches of the Yellow River of China, and the geohazards burden
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. <http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2015/PermenPUPR30-2015.pdf>. Diakses 5 Januari 2017
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. <http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2015/PermenPUPR12-2015.pdf>. Diakses 5 Januari 2017
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air. <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/BN-BT-PERMENTAN-79-2012%20&%20LAMP..pdf>. Diakses 5 Januari 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. <https://luk.staff.uqm.ac.id/atur/sda/PP20-2006Irigasi.pdf>. Diakses 5 Januari 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi. <https://www.slideshare.net/infosanitasi/peraturan-pemerintah-no-77-tahun-2001-tentan-g-irigasi>. Diakses 5 Januari 2017
- Peter, P. M., 2013. Canal Irrigation and The Hydrosocial Cycle the Morphogenesis of Contested Water Control in the Tungabhadra Left Bank Canal, South India. *Elsiervier*.
- Race, D. And Milliar J. Training Manual: Social and community dimension of ACIAR Projects. Australia Center for International Agricultural Research – Institute for Land,Water, and Sociate of Charles Sturt University. Australia.
- Rachman, B; Pasandaran, E. dan Kariyasa, K., 2002. Kelembagaan Irigasi dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Litbang, Pertanian* 21(3), 2002.

- Rachman, B. dan Kariyasa K., *Dinamika Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen.Pertanian R.I. di unduh 28 Juli 2016.
- Rahardjo, 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ralston, L; James A; and Elizabeth C., 1983. *Voluntary Effors in Decentralized Management: Opportunities and Contrants in Rural Development*. Berkeley: Institute of International Studies, University of California, Berkeley.
- Ramirez, R., 1999 'Stakeholder analysis and conflict management." Chap 5 in *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*. Daniel Buckles (ed). IDRC and World Bank.
- Rampisela D.A. 2016. *Buku Pegangan Pengaturan Air Irigasi Wilayah Irigasi Bili – Bili DAS Jeneberang-Sulawesi Selatan*.
- Rampisela D.A. Analysis of Water Availability in the secondary Canals in Supporting Efective Irrigation Water Management of Bili – Bili Irrigation Area. *Proceeding Workshop on Nurturing Local Wisdoms for Futurable Society*. Bali Indoneis. Page 117 – 121
- Rampisela D.A. Community Empowerment Program: Empowerment of Federation of Water Users' Organization (FWUA) for Efective Water Utilization. *Proceeding Internationall Symposium Long Term Vision for the Sustainable Water and Landuse*. Linking Global Vision and Local Wisdom, pp.69 – 71.
- Rampisela D.A. Cropping Pattern in Working Area of FWUA Sirannuang Bili – Bili Irrigation. System Research Institute for Humanity and Nature (RIHN) *Seminar 2011*.
- Rampisela D.A. Water Balance and Water Quality Issues on Bili – Bili Catchment Area and Saba Wartershed. *Proceeding of Workshop on Nurturing Local Wisdoms for Futurable Society*. Bali Indoneis. Page 107 – 110
- Rampisela D.A. Water Use for Rice Cultivation in P3A Renggang in the 1st Drying Season. *Proceeding Workshop on Nurtuting Local Wisdoms for Futurable Society*. Bali Indoneis. Page 111 – 116
- Reddy, G.M. and Haragopal.G.,1985. *Public Policy and The Rural Poor in India a Study of SFDA in Andhra Pradesh*. Chauhan Composing Agency. New Delhy.
- Reddy, G.R., 1982. *Local Government and Agricultural Development in Andhra Pradesh*, India.
- Renier, G.J., 1997. History its Pupose Method. *Terjemahan oleh Muin Umar*. 1997. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricks J.I., 2016. Building Particapotory Organization for Common Pool Resource management: Water User Group Promotion in Indonesia. *Word Development Vol 77.pp 34 – 47, 2016. Elsevier*.
- Rita T.Lopa dan Farouk Maricar, 2013. *Kajian Proses Penguatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi Yang Berwawasan Lingkungan*.

- Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ritzer, G., 2004. *Sociological Theory*, The Mc Graw-Hill Companies, NewYork.
- Robbins, P., 2004. *Policitical Ecology: A Critical Introduction*. 2nd ed. Blackwell.
- Rusyamin, L.O., 2013. *Ekologi Politik Pertambangan di Kota Bau - Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Saadah; Darma, R.,and Mahyuddin, 2012. Unsur – Unsur Pembangunan Pengelolaan Pengairan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*: <https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.180>.
- Salam, Md. Abdus and T. Noguchi. 2006. Evaluating Capacity evelopment for Participatory Forest Management in Bangladesh"s Sal Forests Based on „4Rs" Stakeholder Analysis. *Forest Policy and Economics* 8 (2006) 785–796. doi:10.1016/j.forpol.2004.12.004.
- Saldana, T.,Water rituals on the Bravo/Grande River: a transnational political and ecological inheritance. *Journal of Political Ecology*, Vol 19, 2012.
- Salman, D., 2012 *Sosiologi Desa, Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas* , Penerbit Ininnawa.
- Sarker, A. *The Role Of State-Reinforced Self-Governance In Averting The Tragedy Of The Irrigation Commons In Japan. Public Administration Vol. 91, No. 3, 2013 (727–743)*
- Satria, A., 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. LKiS: Yogyakarta.
- Schubert J. 2005. *Political Ecology in Development Research, An Introductory Overview and Annotated Bibliography*. Bern (CH): NCCR North-South
- Simonsa, Bastiaanssena, Immerzeel. 2015. Water Reuse in River Basins with Multiple Users: a Literature Review. *Journal of Hydrology* : DOI <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.01.016>
- Sriartha I.T. and Giyarsih, S.R., 2017 Subak Endurance in Facing External Development in South Bali, Indonesia. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences (IRJMISS)* Available online at <http://ijcu.us/online/journal/index.php/irjmis> Vol. 4 Issue 4, July 2017, pages: 20~30 ISSN: 2395-7492 Impact Factor: 5.462 Thomson Reuters: <http://dx.doi.org/10.21744/irjmis.v4i4.494>
- Stacey, D., 1999. Water users organisations. *Agricultural Water Management* 40 (1999) 83 – 87. Elsevier
- Stoot, P. And Sullivan, S., 2000. *Political ecology: science, myth and power*. London: Arnold
- Suharjito, D., 2014. *Pengantar Metodologi Penelitian*. IPB Press.
- Sukmadinata, N.S, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Sumaryanto, 2006. *Evaluasi Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan Upaya Perbaikannya*. Bogor: P3SEP.
- Sundawati, L dan Sanudin (2009), Analisis Pemangku Kepentingan dalam Upaya Pemulihan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau Toba, *Artikel Ilmiah. JMHT Vol. XV, (3): 102–108*, Desember 2009.
- Susono D.A., 2015. Strategi pengelolaan hutan lindung angke kapuk. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor , Bogor.
- Sutawan dan Nyoman, 1993. Dampak Sosiologi dari Inovasi Tenbik Pengairan dalam Sosiologi Pertanian. Jakarta: Yayasan Obor Indonesi.
- Swartz, D. (1997). *Culture and power: The sociology of Pierre Bourdieu* . Chicago: University of Chicago Press.
- Swensona J, 2015. Institutional stakeholders' views on jaguar conservation issue sincentral Brazil. *Global Ecology and Conservation*.doi.org/10.1016/j.gecco.2015.04.010. *Elsevier*
- The Study On Capacity Development For Jeneberang River Basin Management In The Republic of Indonesia. JICA and Dirjen of Water Resources. 2004.
- Tilahun A, 2014. Technical and Institutional attributes Contraining the *Performance of Small – Scale Irrigation in Ethiopia*. *Journal Water Resources and Rural Devolepment*
- Tonny, F., 1993. *Kelembagaan Sosial dalam Sosiologi Umum*. Bogor: Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Pustaka Wirausaha Muda Bogor.
- Townsley, P. 1998. Social Issues in Fisheries. FAO Fisheries Technical Paper. No. 375. Rome, FAO. 1998. 39p. Fao corporate document repository.
- Trawick, P, 2002. Comedy and Tragedy in The Andean Commons. *Journal Plotical Ecology*. Vol.9, 2002.
- Turner MD. 2004. Political ecology and the moral dimensions of “resource *conflicts*”: the case of farmer–herder conflicts in the Sahel. *Political Geography* 23:863–889. <http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2004.05.009>.
- Turtiainen T., Pischke J.D.V., 1986. Investment and Finance in Agricultural Service Cooperatives. The World Bank, Washington, D.C. U.S.A.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sda/UU11-1974Pengairan.pdf>. Diakses 5 Januari 2017

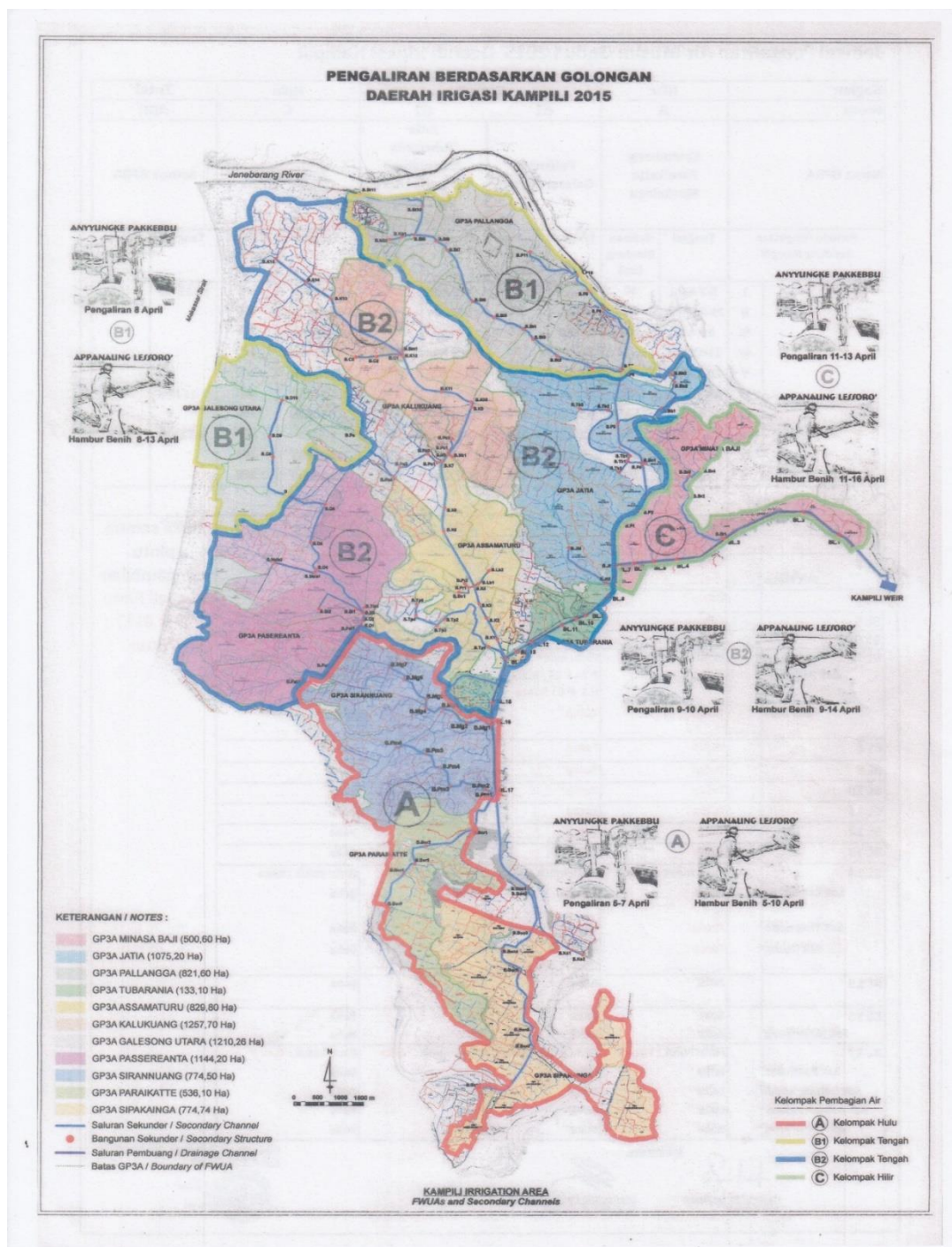
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. <http://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU-7-2004.pdf>. Diakses 5 Januari 2017
- Uphoff, N., 1986. *Local Institutional Development. An Analytical Sourcebook with Cases*. West Hartford Connecticut: Kumarian Press.
- Uphoff, N., 1986. *Improving International Irrigation Management With Farmers's Participation*, West View Press, London.
- Wahyu dan Muktiali, 2015. Commons Dilemma pada Pengelolaan Daerah Irigasi Kapilaler, Kabupaten Klaten. *Jurnal Wilayah dan lingkungan*, 3 (2), 105 – 120. <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.3.2.105-120>
- Walker, P.A., 2005. Political ecology: where is the ecology? *Progress in Human Geography* 29 (1):73 – 82.
- Walther, M. (2014). Repatriation to France and Germany . Comparative study based on bourdieu's theory of practice . Brussels, Belgium: Springer Gable.
- Wolf, E. 1972. Ownership and Political Ecology. *Anthropological Quarterly*, 45, 201 – 205
- Xiao J, You C. ,Yong J, Jian X, Feng M ,Hai Y, Lan L, 2014. Integrated water resources management and water users' associations in the arid region of northwest China: A case study of farmers' perceptions *Journal of Environmental Management* 145 (2014) 162e169
- Yin, R., 2006. *Case Study Research: Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
- Yiwen Jiang, Lanhui Zhang, Baoqing Zhang, Chansheng He, Xin Jin, Xiao Bai. Modeling irrigation management for water conservation by DSSAT-maize model in arid northwestern China. *Agricultural Water Management*. 2016, vol. 177, issue C, 37-45
- Yulianus H, 2012. Peran Kelembagaan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Gunung Walat Berdasarkan Pendekatan diskursus dan Sejarah. *Disertasi*. Intitut Pertanian Bogor, Bogor.
- Yustika, A.E., 2013. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan* , Erlangga.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Wilayah Sungai Jeneberang



Lampiran 2. Peta Daerah Irigasi Kampili, Pengaliran Air Irigasi Berdasarkan Golongan



CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

- a. Nama : Jumiati
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 Agustus 1975
- c. Alamat : BTN Andi Tonro Blok B.15 No. 10
Kabupaten Gowa
- d. Pekerjaan : Dosen Perserikatan Universitas
Muhammadiyah Makassar Fakultas

Pertanian Program Studi Agribisnis
tahun 2008 sampai sekarang

- e. Jabatan Fungsional : Lektor/ III C
- f. NIDN : 0912087504
- g. Email : jumiati.amin@unismuh.ac.id
- h. Status Sipil
 - a) Ayah : Saehuddin Lira
 - b) Ibu : Bunga Intan
 - c) Nama Suami : Drs. Muhammad Amin Ali
 - d) Nama Anak : 1. Amalul Anugrah Amin
2. Artisa Anggraeni Amin

B. Riwayat Hidup

- a. Pendidikan Formal
 - a) Tamat SD tahun 1988, di SDI. Mariso, Makassar
 - b) Tamat SLTP tahun 1991, di SMP Ahmad Yani Makassar
 - c) Tamat SMA tahun 1994, di SMA Negeri 14 Makassar
 - d) Sarjana (S1) tahun 2001, di Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar
 - e) Magister (S2) tahun 2010, di Program Studi Manajemen Agribisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar
 - f) Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Pertanian Konsentrasi Sosial Ekonomi Pertanian (2018)

C. Pengalaman Kurus/Pelatihan/Magang/Organisasi

- a. Tim Pemberdayaan Pasar Tradisional Sulawesi Selatan
Kementrian Perdagangan RI tahun 2011 - 2012
- b. Pengurus Daerah Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPD PISPI) Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2017 Nomor 07/SK/BPP-PISPI/2013

D. Pengalaman Seminar/Workshop/pemakalah/Pelatihan

1. Seminar Internasional “Innovate Learning towards Excellence in Higher Education” Universiti Teknologi Malaysia 28 Nopember 2012
2. Peserta dalam Kegiatan Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 23-27 Januari 2012
3. Seminar Regional POPMASEPI DPW V dengan tema “Ketahanan Pangan Sul-Sel antara Harapan dan Kenyataan” Makassar 06 Maret 2012
4. Seminar Hari Ibu yang diselenggarakan pada tanggal 6 Januari 2013
5. Workshop Penyusunan GBPP Silabus Fakultas pertanian Unismuh Makassar 11 September 2013
6. Pemateri Seminar Nasional “Perubahan Teknologi dalam Perspektif Teori Sosial” Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Pertanian Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar 9 November 2015.
7. Seminar Nasional “Tatakelola Perbesaran Nasional’ Perhimpunan Sarajana Pertanian Indonesia (PISPI) Badan Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar 28 April 2016
8. Internasional Seminar on Political Ecology of Sustainable Food Consumption and Production, Organized by Hasanuddin Universty, Asian Rural Sociological Association (ARSA) and International Journal of Agricultural System (IJAS). Makassar 19 September 2016
9. Workshop Penulisan Artikel Jurnal Nasional dan Internasional. Sekolah Pascasarjana, Makassar Universitas Hasanuddin
10. Pelatihan MS Word Advanced and Integrated Management Reference by Mendeley. iNstyd Learning Centre Makassar 18 Februari 2017

11. Peserta Kuliah Tamu pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tema: "Social Capital for The Agribusiness Development of ASEAN Community". Makassar, 17 Oktober 2017.
12. Participated in a mendeley presentation Session organized by the named mendeley advisor, on 18 February 2017.
13. Peserta Seminar Nasional "Regenerasi Sektor Pertanian SDM, Socio-Agro –Techno-Ecology. Makassar, 12 Mei 2017.
14. Pemakalah dalam Kegiatan Seminar Nasional' Pertanian untuk kedaulatan pangan bangsa" Makassar, 12 September 2017.
15. Pemateri Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan kegiatan KKP Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Gowa 16 Januari 2018.
16. Seminar Nasional "Peta Sumber dan bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 dan Revisi SNI 1726;2012. Makassar, 12 Maret 2018.

E. Karya Ilmiah yang telah diterbitkan

- a. Analisis Pemasaran dan tingkat Pendapatan Nelayan pada Agribisnis Pengasapan Ikan Cakalang (*Kotsuwonus pelamis*). Dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Octopus Jurnal Ilmu Perikanan" Vol.1 No.1 Makassar, Jan-Juni 2012 ISSN 2302-0670
- b. Analisis Perilaku Wanita Tani terhadap Resiko Pilihan Pola Tanam di Lahan Kering di Kabupaten Gowa Dipublikasikan pada jurnal Caliptra Fakultas Pertanian Unismuh Makassar " " Vol.1. Edisi 8, Bulan Juli- 2012 ISSN 1907-4255
- c. Analisis Nilai Tambah Pengolahan Ubi Jalar Ungu di Kabupaten Takalar. pada jurnal Caliptra Fakultas Pertanian Unismuh Makassar " Vol. 12, Edisi 2 Juli 2014
- d. Analisis Perbandingan antara Sistem Tabela dan Sistem Tapin Usahatani Padi di Desa Popo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Dipublikasikan pada jurnal Caliptra Fakultas

Pertanian Unismuh Makassar ” Vol.2. Edisi 9, Bulan Jan- 2013
ISSN 1907-4255

- e. Analisis Marjin, Efisiensi Pemasaran dan Tingkat Pendapatan Nelayan pada Agribisnis Pengasapan Ikan Cakalang di Kec.Bontotiro Kabupaten Bulukumba Dipublikasikan pada jurnal Caliptra Fakultas Pertanian Unismuh Makassar ” Vol.2. Edisi Juli 2010 ISSN 1907-4255
- f. Peranan Perempuan dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Dipublikasikan pada jurnal Caliptra Fakultas Pertanian Unismuh Makassar ” Vol.1. Edisi 11, Bulan Jan- 2014 ISSN 1907-4255
- g. Ipteks Bagi Masyarakat Terhadap Pengolahan Produk Es Krim Ubi Jalar Ungu di Rumah Pintar Bunga Intan Kabupaten Takalar, Majalah Aplikasi Ipteks NGAYAH Volume 6, Nomor 2, Desember 2015 ISSN : 2087-118X

F. Mempersentasekan hasil penelitian yang berkaitan dengan disertasi

- a. Pemakalah pada kegiatan Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke 29 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, dengan tema: Pertanian untuk Kedaulatan Pangan Bangsa” Pangkep 12 September 2017.
- b. Pemateri Seminar Nasional “Regenerasi Sektor Pertanian SDM, Socio-Agro –Techno-Ecology. Makassar, 12 Mei 2017.
- c. Pemakalah dalam kegiatan workshop dan seminar Nasional “Wiratani dalam agribisnis Indonesia: Fakta, Harapan dan Tantangan” Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar bekerjasama dengan Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI), Makassar 9 – 10 Desember 2017

- d. Oral Presentation 1st International Conference on Food Security and Sustainable Agriculture in the Tropics. Makassar 24-25 Oktober 2018

G. Karya Ilmiah yang merupakan bagian dari disertasi

- a. Stakeholder Analysis in the Management of Irrigation in Kampili Area. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 157 (2018) 012069 doi:10.1088/1755-1315/157/1/012069. Artikel Terindex Scopus
- b. Contestation of Actors Inregulatory Setting Irrigation Water. Journal of Engineering and Applied Science ISSN:1816-949X. Medwell Journals, 2018. Artikel Terindex Scopus (akan terbit edisi 13 Issue 22 2018).
- c. Institutional Irrigation In Management Irrigation Kampili Area. International Journal of Agriculture System (IJAS) (Submission).

Demikian Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar, Juli
2018



Tum

Gambar 1. Sungai Jeneberang



Gambar 2. Bendungan Bili - Bili



Gambar 3. Bendung Kampili



Gambar 4. Pembungan Aliran Sungai Jeneberang, dari bendung Kampili



Gambar 5. Saluran Primer Daerah Irigasi Bendung Blissua



Gambar 6. Saluran Sekunder Daerah Irigasi Bendung Kampili



Gambar 7. Saluran Tersier (Bangunan Sadap) Daerah Irigasi Bendung Kampili



Gambar 8. Saluran Tersier Daerah Irigasi Bendung

Jadwal Pengaliran Air Musim Gadu I 2015 Daerah Irigasi Kampili

Bagian		Hilir		Tengah				Hulu		Total	
Group		A		B1		B2		C		ABC	
Nama GP3A		Sirannuang Paraikatte Sipakainga		Pallangga Galesong Utara		Jatia Tubarania Assamaturu Galesong Utara Kalukuang Pasereanta		Minasa Baji		Semua GP3A	
Periode Pengaliran Bendung Kampili		Tanggal	Bukaan Bendung (cm)	Tanggal	Bukaan Bendung (cm)	Tanggal	Bukaan Bendung (cm)	Tanggal	Bukaan Bendung (cm)	Tanggal	Bukaan Bendung (cm)
	I	5-7 April	30	08-Apr	30	9-10 Apr	60	11-13 Apr	60	14-22 Apr	100
	II	23-25 April	80	26-Apr	80	27-28 Apr	80	29 April -1 Mei	100		
	III	2-4 Mei	100	5-Mei	100	6-7 Mei	100	8-10 Mei	100		
	IV	11-13 Mei	100	14-Mei	100	15-16 Mei	100	17-19 Mei	100		
	V	20-22 Mei	100	23-Mei	100	24-25 Mei	100	26-28 Mei	100		
	VI	29-31 Mei	100	1 Juni	100	2-3 Juni	100	4-6 Juni	100	7-15 Juni	100
	VII	16-18 Juni	100	19-Juni	100	20-21 Juni	100	22-24 Juni	100	4-12 Juli	100
	VIII	25-27 Juni	100	28 Juni	100	29-30 Juni	100	1-3 Juli	100		
	IX	13-15 Juli	100	16-Juli	100	17-18 Juli	100	19-21 Juli	100		
	X	22-24 Juli	100	25-Juli	100	26-27 Juli	100	28-30 Juli	100		
Primer Limbung											
BL 1		Tutup		Tutup		Tutup		Buka		Buka semua pintu pengambilan Kecuali Pintu Induk BL17 : Tutup	
BL 2		Tutup		Tutup		Tutup		Buka			
BL 3	Sek Barua	Tutup		Tutup		Tutup		Buka			
		Tutup		Tutup		Tutup		Buka			
BL 4		Tutup		Tutup		Tutup		Buka			
BL 5		Tutup		Tutup		Tutup		Buka			
BL 6		Tutup		Tutup		Tutup		Buka			
BL 7	Sek Pallangga	Pintu Induk : Buka		Pintu Induk : Buka		Pintu Induk : Buka		Pintu Induk : Tutup			
		Tutup		P 7 - P 13 : Buka		Buka		Buka			
	Sek Jatia	Tutup		Tutup		Buka		Buka			
BL 8		Tutup		Tutup		Buka		Buka			
BL 9		Tutup		Tutup		Buka		Buka			
BL 10		Tutup		Tutup		Buka		Buka			
BL 11		Tutup		Tutup		Buka		Buka			
BL 12		Tutup		Tutup		Buka		Buka			
BL 13		Tutup		Tutup		Buka		Buka			
BL 14	Sek Kalukuang	Pintu Induk : Buka		Pintu Induk : Buka		Pintu Induk : Buka		Pintu Induk : Buka			
		Tutup		Tutup		Buka		Buka			
		Tutup		Tutup		Buka		Buka			
	Sek Timpoppo	Tutup		Tutup		Buka		Buka			
	Sek Doang	Tutup		BD.7 - BD.10 : Buka		Buka		Buka			
				BD.1 - BD.6 : Tutup							
BL 15		Buka		Buka		Buka		Buka			
BL 16	Sek Majannang	Buka		Buka		Buka		Buka			
		Buka		Buka		Buka		Buka			
BL 17	Sek Pammase Sek Borong Boddii Sek Bontolangkasa Sek Kalase'rena	Pintu Induk : Tutup		Pintu Induk : Tutup		Pintu Induk : Tutup		Pintu Induk : Tutup			
		Buka		Buka		Buka		Buka			
		Buka		Buka		Buka		Buka			
		Buka		Buka		Buka		Buka			
		Buka		Buka		Buka		Buka			

Mengetahui.

Hasanuddin Dg.Nassa
Juru Kampili

Syamsuddin Dg.Ngawing. ST
Pengamat DI Kampili

Ditetapkan di Pallangga, 26 Maret 2015
Ketua IP3A Kampili







Gambar.... Juru Primer, Juru sekunder, Pekerja Swadaya DI Kampili dalam kegiatan pembersihan saluran sekunder Kalukuang



Gambar..... kondisi sampah yang ada pada Saluran Kalukuang



Pengelolaan irigasi yang baik perlu dilaksanakan serangkaian kegiatan yang menyangkut seluruh aspek operasi dan pemeliharaan, dimulai dari pengerahan tenaga untuk membersihkan saluran atau memperbaiki bendungan sampai kepada penyelesaian konflik mengenai pembagian air dan perencanaan untuk musim berikutnya (Ambler, 1992). Kegiatan-kegiatan dalam operasi dan pemeliharaan irigasi tersebut menuntut adanya kelembagaan petani pemakai air yang kuat.

Bredina, Y.N. Linnell, J.D.C., Silveirac L, Tôrresc M.N, Jácomoc, A.A.

Anonim, 2012. Peraturan Pemerintah tentang irigasi

Kadir W, Awang S.A., Purwanto R.H., Erny, *Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan (Stakeholder Analysis of Bantimurung Bulusaraung National Park Management, South Sulawesi Province)*

Hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa stakeholder primer dalam pengelolaan TN Babul terdiri dari Balai TN Babul, Masyarakat sekitar TN Babul, PDAM Maros, Disparbud Maros, Lembaga Pengelola Air Desa. Sedangkan stakeholder sekunder terdiri dari Dishutbun Maros, Dinas Pertanian Maros, Pemerintah desa dan kecamatan, BP2KP Maros, BPN Maros, PNPM Mandiri, LSM, dan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian. Keberadaan stakeholder tersebut dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kawasan TN Babul. Peran yang dapat dilakukan oleh stakeholder dalam mengakomodir kepentingan masyarakat dapat berupa fungsi kontrol, bantuan fisik, bantuan teknis, dan dukungan penelitian. Pengelolaan kolaborasi dapat menjadi alternatif model pengelolaan TN Babul dalam mengakomodir kepentingan stakeholder yang beragam.

Abd. Kadir W.*, San Afri Awang**, Ris Hadi Purwanto*** dan Erny Poedjirahajoe*** *Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Sulawesi Selatan **Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. ***Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. * Email: abdkadirw@yahoo.com, abd.kadirw@mail.ugm.ac.id
Diterima: 7 Januari 2013 Disetujui: 13 Maret 2013

Keberadaan setiap stakeholder bisa memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap suatu objek

DISERTASI DOKTOR

Irigasi Sungai Jeneberang

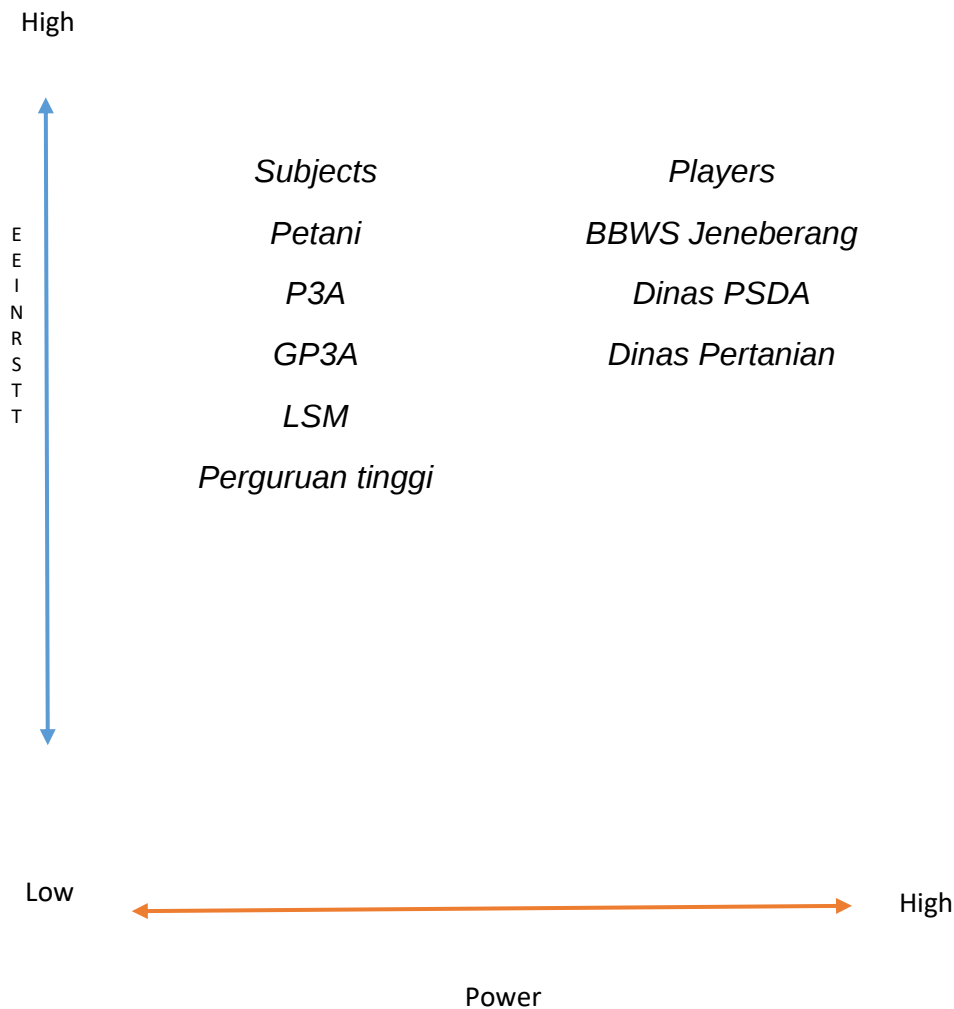
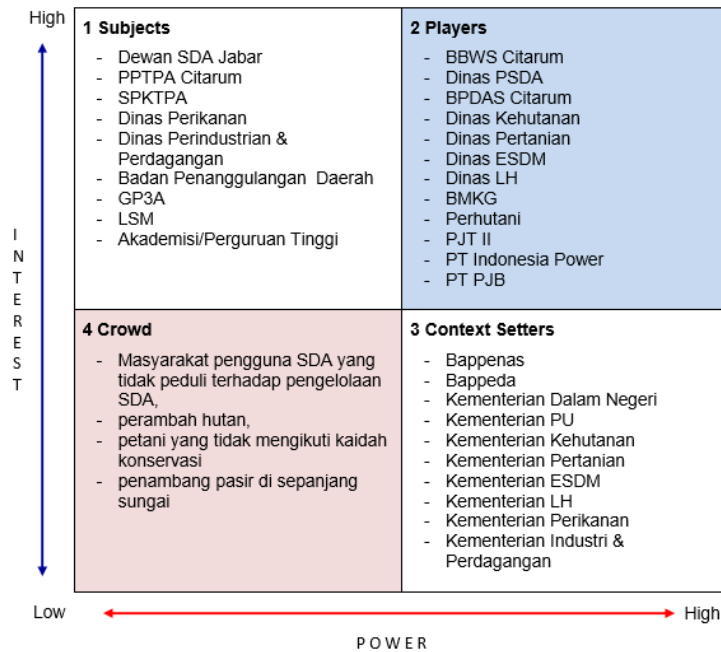
Analisis Stakeholders berdasarkan interest dan power. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran peran optimal yang diharapkan dari masing-masing stakeholder dalam pengelolaan sumber irigasi Jeneberang. Yang dimaksud dengan interest disini adalah minat/kepentingan/kepedulian stakeholders dalam pengelolaan SDA irigasi Jeneberang, sedangkan power adalah kekuatan/kemampuan/kewenangan stakeholders untuk melaksanakan (mempengaruhi pelaksanaan) pengelolaan irigasi Jeneberang.

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan irigasi Jeneberang dikelompokkan dalam empat kuadran (two-by-two matrix) sebagai berikut:

1. *High Interest – Low Power* (Subject): adalah stakeholder yang mempunyai kepedulian tinggi, tetapi tidak mempunyai kewenangan/kemampuan untuk melaksanakan.
Power yang rendah bisa diakibatkan karena tidak mempunyai sumber daya (manusia maupun dana), tidak ada/tidak tertuang dalam tupoksinya, rendahnya kapasitas dari sumber daya yang ada.
2. *Power (Player)*, adalah stakeholder yang mempunyai kepentingan yang tinggi sekaligus mempunyai resources untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan SDA dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Walau demikian, tingkat kewenangan dari masing-masing stakeholder tidak sama, tergantung hirarki tupoksi tentang pengelolaan SDA di institusi tersebut, apakah setingkat Bidang atau Seksi.
3. *Low Interest – High Power (context setter)*, adalah stakeholder yang kepentingannya terhadap pengelolaan SDA bukan prioritas utama,

tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi stakeholder lain untuk melaksanakan.

4. *Low Interest – Low Power (Crowd)*, adalah mereka yang kepedulian dan kemampuannya rendah terhadap pengelolaan SDA.



<i>Crowd</i>	<i>Context Setters</i>
	<i>Kementrian Pertanian</i>
<i>Petani yang tidak mendapatkan bangunan saluran irigasi</i>	<i>Kementrian PU</i>

5.1 Subjects

Di dalam matriks Interest dan Power, wadah-wadah koordinasi pengelolaan SDA di Jawa Barat dikelompokkan ke dalam High Interest – Low Power karena walaupun mempunyai tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan dan program pengelolaan SDA serta menyusun konsep pengalokasian air untuk berbagai kepentingan, namun tidak mempunyai power untuk mengeksekusi. Wadah koordinasi mempunyai fungsi pengawasan dan evaluasi sebagaimana tertuang dalam tupoksi masing-masing, namun wadah koordinasi tidak mempunyai mekanisme internal untuk menerapkan —sanksi bagi anggota yang kinerjanya tidak sesuai rencana yang telah disepakati.

Beberapa dinas, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Perindustrian dan perdagangan juga digolongkan sebagai Subject yaitu stakeholder yang mempunyai kepentingan tinggi tetapi tidak mempunyai kewenangan yang cukup. Hal ini tampak dari minimnya keterlibatan dinas-dinas ini dalam mengatasi masalah pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan produktif di masing-masing sector.

Pengguna air, khususnya untuk kegiatan pertanian, adalah kelompok masyarakat yang sangat berkepentingan atas ketersediaan air yang memadai baik dari segi kuantitas, kualitas

High 1 Subjects - Dewan SDA Jabar - PPTPA Citarum - SPKTPA - Dinas Perikanan - Dinas Perindustrian & Perdagangan - Badan Penanggulangan Daerah - GP3A - LSM - Akademisi/Perguruan Tinggi

- 2 Players - BBWS Citarum - Dinas PSDA - BPDAS Citarum - Dinas Kehutanan - Dinas Pertanian - Dinas ESDM - Dinas LH - BMKG - Perhutani - PJT II - PT Indonesia Power - PT PJB
- 4 Crowd - Masyarakat pengguna SDA yang tidak peduli terhadap pengelolaan SDA, - perambah hutan, - petani yang tidak mengikuti kaidah konservasi - penambang pasir di sepanjang sungai
- 3 Context Setters - Bappenas - Bappeda - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian PU - Kementerian Kehutanan - Kementerian Pertanian - Kementerian ESDM - Kementerian LH - Kementerian Perikanan - Kementerian Industri & Perdagangan

Low High

I N T E R E S T

P O W E R

TA 7189-INO: Institutional Strengthening for IWRM in the 6 Cis RBT
DHV, Deltares, MLD 52

dan waktu. Hingga saat ini posisi mereka masih lemah ketika harus berhadapan dengan pemanfaatan air untuk kepentingan non pertanian, padahal di lain pihak mereka dituntut untuk menyediakan pangan secara berkelanjutan.

LSM dan akademisi/ perguruan tinggi, secara langsung maupun tidak langsung, telah banyak berkontribusi dalam perbaikan pengelolaan SDA, antara lain melalui kegiatan penelitian, advokasi, dan implementasi di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menyebabkan kegiatan yang dilakukan juga masih terbatas, bersifat local dan cenderung sektoral.

5.2 Players

Stakeholders yang mempunyai interest tinggi sekaligus mempunyai kewenangan dan sumber daya dalam pengelolaan SDA, antara lain, adalah : a. BBWS Citarum dan Dinas PSDA yang dalam kewenangannya meliputi semua aspek pengelolaan SDA, yaitu konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, system informasi dan pengembangan kelembagaan SDA. Namun anggaran yang sangat besar, khususnya di BBWS, belum mampu menghasilkan perbaikan kondisi Citarum sesuai harapan masyarakat. b. Dinas Kehutanan dan BPDAS Citarum-Ciliwung, mempunyai tupoksi dan alokasi anggaran yang sangat jelas untuk pelaksanaan konservasi. Berbagai program telah dilaksanakan di hulu Sungai Citarum. Walaupun demikian tingginya laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi serta lemahnya pengawasan serta penegakan hukum menyebabkan program konservasi tidak berjalan dengan lancar. c. Perhutani sebagai pengelola dan pemanfaat hasil hutan mempunyai tanggung jawab besar terhadap kelestarian Citarum karena letak sumber air utama untuk Sungai Citarum berada

di areal milik Perhutani. d. Dinas Pertanian Jawa Barat mempunyai kepentingan yang tinggi untuk dapat menjamin alokasi air yang memadai terutama untuk mengairi areal sawah beririgasi karena Jawa Barat merupakan salah satu daerah andalan untuk ketersediaan pangan nasional. Untuk itu, sejak beberapa tahun yang lalu telah dibentuk Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, di bawah Bidang Sumber Daya, sebagai salah satu unsure dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Anggaran juga dialokasikan untuk program budidaya yang sesuai dengan kaidah konservasi di wilayah Citarum Hulu serta pengembangan usahatani padi dengan system SRI. e. BPLHD Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota mempunyai tugas yang sangat berat berkaitan dengan tingginya tingkat pencemaran di Citarum akibat limbah industry, domestic, dan kegiatan keramba jarring apung. Bidang-bidang dalam struktur organisasi BPLHD Jawa Barat berkaitan langsung dengan penanganan pencemaran tersebut, yaitu: 1) Bidang Tata Kelola yang menangani kajian AMDAL, 2) Bidang Pengendalian menangani pemantauan pencemaran, 3) Bidang Konservasi menangani masalah konservasi dan mitigasi bencana, dan 4) Bidang Penataan Hukum. f. Perusahaan swasta dan BUMN seperti PJT II, Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali membutuhkan air dari Citarum untuk kelangsungan usaha pembangkit listrik, air minum dan pertanian. Selain untuk biaya operasi, perusahaan

TA 7189-INO: Institutional Strengthening for IWRM in the 6 Cis RBT

DHV, Deltares, MLD 53

perusahaan tersebut juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan konservasi baik secara langsung maupun melalui kegiatan CSR.

5.3 Context Setters

Termasuk dalam context setters adalah stakeholders yang mempunyai peran besar dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan SDA. Namun pengelolaan SDA, khususnya di wilayah Citarum, bukanlah satu-satunya bidang yang ditangani oleh atau menjadi perhatian dari institusi yang bersangkutan. Institusi-institusi tersebut adalah Bappenas, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, kementerian-kementerian terkait.

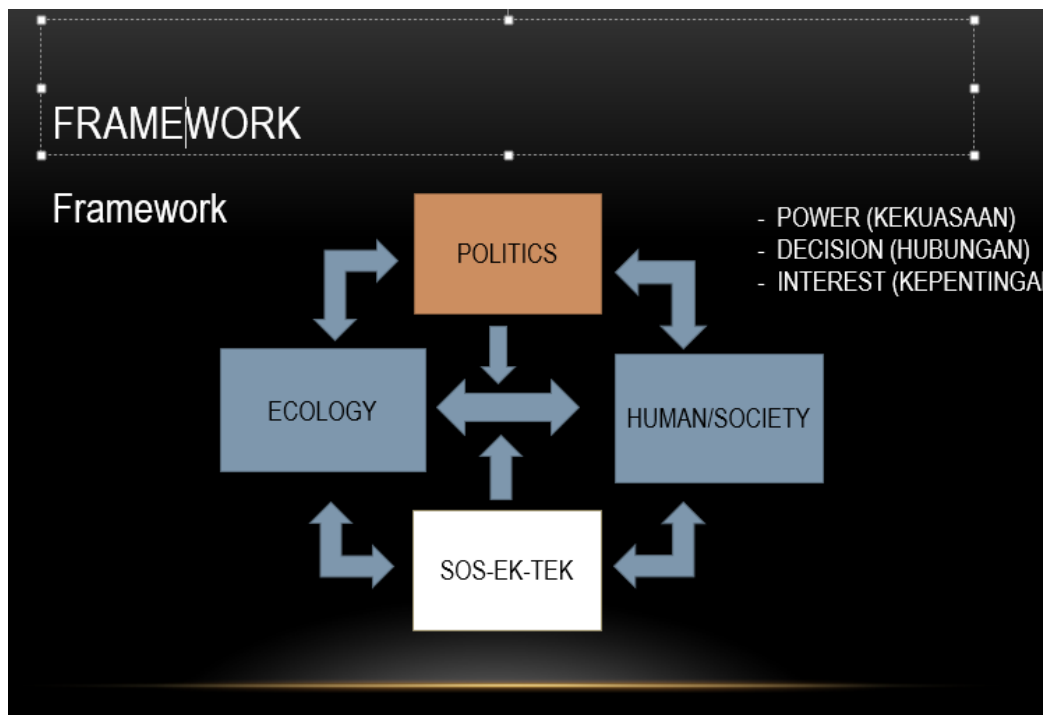
5.4 Crowds

Cukup banyak kelompok yang tingkat kepeduliannya terhadap kondisi Citarum masih sangat rendah, diantaranya adalah masyarakat yang tinggal di bantaran atau sepanjang sungai dan membuang sampah langsung ke sungai, penambang pasir sungai, masyarakat perambah hutan, dan petani yang melakukan budidaya tanpa mengikuti kaidah konservasi. Ketidakpedulian mereka dapat diakibatkan oleh

rendahnya kesadaran, ketidakmampuan untuk mencari mata pencaharian dan tempat tinggal yang lain.

(Stekholder mapping = pemetaan stakeholder

- Istilah “political ecology” dalam publikasi akademik muncul pada tahun 60an (lihat Russett, 1967; Wolf, 1972; Miller, 1978; Cockburn and Ridgeway, 1979).
- Political ecology adalah perspektif teoritik (theoretical perspective) yang bermaksud mengintegrasikan aspek manusia (human) dengan perubahan lingkungan melalui analisis politik, ekologi dan ekonomi; tekanan budaya dan sosial terhadap produksi sumber daya lokal; dan interaksi politik local-global (Zimmerer and Basset 2003; Robbins 2004; Peet and Watts 2004).
- Bryant and Bailey (1997:190) mengatakan bahwa “political ecology” adalah perdebatan mengenai interaksi antara negara (the state), aktor non-state, dan lingkungan phisik.
- Hvalkof and Escobar (1998:426) mendefinisikan political ecology sebagai studi mengenai konstruksi lingkungan dalam konteks kekuasaan (power).
- PERHATIAN political ecology
- (1) Interaksi alam (lingkungan) dengan manusia;
- (2) Analisa aktor lokal (stakeholders) yang terlibat dalam persoalan lingkungan;
- (3) Analisa bagaimana interaksi, dari tingkat lokal sampai global, aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik dari suatu lingkungan.
- (4) Analisa bagaimana tindakan masa lalu menentukan dan menciptakan berbagai ketidakadilan (inequalities) yang masih ada sekarang (Walker 1998; Biersack and Greenberg 2006).
- (5) Relasi gender;
- (6) Analisa bagaimana kekuasaan (power) dan bangunan pengetahuan (knowledge) mempengaruhi lingkungan (Foucault)
- (7) Analisa hubungan manusia dengan lingkungan sebagai ‘socially constructed’.



BACA ATAU PRIN DISERTASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
DOKUMENNYA ADA PADA BAHAN DISERTASI DARI LEKTOP
FILENYA BERBENTUK HASIL SCAN JADI PERLU DI PRINT

Cari UU Basis peraturan pengelolaan air yaitu UU no 7 2004 tentang
sumber daya air, UU NO 11

Peraturan pemerintah tentang irigasi yaitu PP No.20 tahun 2006 (basis peraturan pengelolaan air yaitu UU no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air) dan PP No.77 tahun 2001 (basis peraturan pengelolaan air yaitu UU No 11 tahun 1974 tentang pengairan)

UU Irigasi 2006

Prof. Darmawan

Penelitian ini masuk Kajian socio teknis

Fokus anda pada relasi kuasa antara aktor menggunakan analisis stakeholder

Tujuan kedua adalah kelembagaan, maksud saya secara epistemologi

Mengkaji kelembagaan itu sebenarnya tradisi fakta sosial bagaimana *role of the game* mendeterminasi individu di dalam bertindak dan bertingkah laku sementara kajian aktor itu filsafat yang lain yang mempercayai bahwa aktor itu adalah makhluk yang mempunyai kebebasan di dalam bertindak dan bertingkah laku

Di tujuan kedua itu kita berbicara bagaimana dari atas kebawah bagaimana struktur bekerja mendeterminasi atau mempengaruhi individu sebagai aktor (misalnya ada kelembagaan perkawinan antar sepupu itu adalah *role of the game*, lalu anda adalah seorang aktor seorang gadis punya pacar seakan2 bisa bebas menikah dengan pacarnya itu paradigmanya adalah paradigma aktor, akan keharusan menikah dengan sepupu itu sebuah kelembagaan (*role of the game*), tantangan anda secara filosofi secara epistemologi bagaimana dialetika diantara keduanya (maksud hati ingin menikah dengan sepupu apa daya pacar lebih cantik, maksud hati menikah dengan pacar apadaya ada aturan yang memaksa menikah dengan sepupu, dalam tujuan 2 ini ada 3 *role of the game*, 1. Ada *role of the game* yang berkembang di masyarakat itu adalah nilai2 kesukarelaan, tapi kelembagaan juga anda harus pahami ada nilai2 pasar ada kelembagaan yang bekerja dalam market organism yang orientasinya profit, lalu ada kelembagaan pemerintah administrasi dalam aturan irigasi, apakah itu regulasi apakah itu programatik untuk tujuan 2 bagaimana anda mempertemukan 3 *role of the game* tentu cara berfikirnya dilihat dari level sumber airnya, jaringan primer sekunder sampai bangunannya di sawah, bagaimana 3 *role of the game* ini mendeterminasi aktor, aktor petani dan aktor2 lainnya, pada tujuan ke 3 anda pindah paradigma masuk pada

konstruktivisme, aktor ini bertindak dan berperilaku bukan karena arahan role of the game, ada kepentingan yang dia pangku, pemangku kepentingan ini masing2 punya power, disini seninya ini penelitian bagaimana memetakan interset dan power dari aktor2 yang ada, kemudian akan lahir 4 matrik yang ada, yang paling menderita itu powernya tinggi inters nya rendah, sampai disitu saya kira kajian political ecologynya, sdh tergambarnya, bagaimana kuasa bekerja berinteraksi dengan yang lain. Yang ingin saya sarankan jangan berhenti dikampilinya saja ttp bawa sebaran aktornya ke level jeneberang karena aktor2 yang bekerja dilevel kampili, banyak ditekan pada aktor aktivitas jeneberang, meski fokus anda dikampili tapi jangan lupa relasi aktor kampili dan jeneberang, disitu saran saya, pertanyaan saya itu hari setelah itu APA? Saya menyarankan penelitian ini akan mengarah melahirkan semacam arahan pengelolaan yang tipe idealnya menunjukkan jika power dan inters teranalisis dengan baik, maka sustainability dari pengelolaan irigasi bisa terjamin, ada 2 mashab yang bisa dijadikan ajuan yang paling umum sekarang adalah colaboratif managment bagaima multisrtokeholder (betul2 power dan inters yang bs dikelolah), cari letetarut colaboratif police making.....yang diinterasikan itu adalah vulue yang cari. Maksud saya setelah tujuan 3 kita bisa kunci dengan sesuatu

TEORI DAN KONSEP IRIGASI DAN P3A

Pengertian irigasi secara umum adalah pemberian air dengan maksud untuk menyuburkan tanah yang esensial bagi pertumbuhan tanaman (Hansen 1992). Tujuan umum irigasi kemudian dirinci lebih lanjut, yaitu: (1) menjamin keberhasilan produksi tanaman dalam menghadapi kekeringan jangka pendek (dalam bahasa Jawa disebut *bethatan*), (2) mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga dapat dengan mudah untuk pertumbuhan tanaman, (3) mengurangi bahaya kekeringan, (4) mencuci atau melarutkan garam dalam tanah, (5) mengurangi bahaya pemipaan tanah, (6) melunakkan lapisan olah dan gumpalangumpalan tanah, dan (7) menunda pertunasan dengan cara pendinginan lewat evaporasi. Tujuan umum irigasi tersebut secara implisit mencakup pula kegiatan drainase pertanian, terutama yang berkaitan dengan tujuan mencuci dan melarutkan garam dalam tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Pasal 1 berisikan kutipan dari pengertian-pengertian irigasi, seperti bangunan irigasi, daerah irigasi, dan petak irigasi, yang telah dibakukan sebagai berikut: (1) irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian; (2) jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya; (3) daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air satu jaringan irigasi; dan (4) petak tersier adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi. Dari butirbutir pengertian tentang irigasi dan jaringan irigasi tersebut kemudian dapat disusun rumusan pengertian irigasi sebagai berikut: “irigasi merupakan bentuk kegiatan penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaan air untuk pertanian dengan menggunakan satu kesatuan saluran dan bangunan berupa jaringan irigasi.

Small dan Mark (1995) menegaskan sebuah kerangka untuk menilai keragaman irigasi dalam buku “Visi Irigasi Indonesia: Studi Ilmiah dan Pengembangan Irigasi,” yaitu: (1) peran campur tangan manusia terhadap keberadaan air alami yang menyiratkan adanya nilai keberlanjutan teknis dan lingkungan; (2) meningkatkan produksi dan mendorong pertumbuhan tanaman yang mengandung nilai-nilai sosial dan ekonomi dalam usaha tani secara berkelompok; dan (3) memasukkan air lewat akuifer-akuifer sebagai bagian dari bentuk irigasi, disamping irigasi permukaan dengan gaya gravitasi, telaah irigasi sebagai ilmu mencakup tiga dimensi yang menjadi cirinya, yaitu dimensi ontologi, epistemologi dan aksiologi, dimensi keberadaannya (ontologi), teridentifikasi dua ciri irigasi berkelanjutan yang sesuai dengan tuntutan di masa datang. Pertama, cakupan formal (pusat pertanian) berupa keteknikan (*engineering*) yang sarat dengan teknologi sepadan, kaya akan wawasan keseimbangan, dan keserasian nilai-nilai sosial dan teknis masyarakat pertanian beririgasi secara berkelanjutan. Kedua, cakupan material atau pokok masalah meliputi tiga substansi, yaitu (1) penyediaan, penagihan, dan penyampaian serta pengaturan air irigasi untuk usaha tani saja (dalam bentuk interaksi,

interelasi, dan interdependensi antara bangunan, saluran air irigasi dengan lahan usaha tani); (2) interaksi, interelasi, dan interdependensi antara individu petani pemakai air, dan antara individu dengan kelompok, dan juga antara kelompok petani dengan kelompok petani lainnya yang terkait dengan penggunaan air irigasi, dan (3) keberlanjutan ketersediaan air irigasi di sumber-sumber alaminya serta keberlanjutan fungsional bangunan dan jaringan irigasi.

Irigasi merupakan wadah bagi petani sawah untuk memenuhi air atas lahan pertaniannya. Di Indonesia, kita mengenal beberapa jenis irigasi. Pertama, irigasi permukaan adalah sistem irigasi yang menyadap air langsung di sungai melalui bangunan bendung maupun melalui bangunan pengambilan bebas (*free intake*) kemudian air irigasi dialirkan secara gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian, yang dikenal dengan saluran primer, sekunder, dan atau tersier. Pengaturan air irigasi dilakukan dengan pintu air dan prosesnya adalah gravitasi, yaitu tanah yang rendah atau landai akan mendapat air paling akhir. Kedua, irigasi lokal adalah pendistribusian air dengan cara pipanisasi gravitasi di mana lahan yang rendah atau landai mendapat air lebih dahulu dan air yang didistribusi terbatas jumlahnya atau hanya secara lokal. Ketiga, irigasi dengan penyemprotan yaitu irigasi yang biasanya menggunakan penyemprot air atau *sprinkle*. Air yang disemprotkan ke lahan sawah akan seperti kabut sehingga tanaman mendapat air dari atas, daun akan basah lebih dahulu, kemudian menetes ke akar. Keempat, irigasi tradisional dengan ember yaitu irigasi yang memerlukan tenaga kerja secara perorangan yang banyak sekali. Irigasi ini dinilai boros tenaga kerja dan tidak efektif karena menggunakan ember sebagai wadah. Kelima, irigasi pompa air yaitu irigasi yang airnya diambil dari sumur dalam dan dinaikkan melalui pompa air yang kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran.

Pada musim kemarau saluran irigasi mengalami kekurangan stok air yang dapat menghambat suplai air ke petak sawah dan berdampak pada kinerja petugas lapangan atau pengelola air irigasi yang harus memenuhi persyaratan baku air. Pengelolaan air irigasi dapat diterima atau diadopsi oleh P3A sebagai pengelola air irigasi. Kegiatan pengelolaan sistem jaringan irigasi dapat digambarkan dalam tiga kategori, yakni: (1) kegiatan pendayagunaan air mencakup pengadaan, alokasi, distribusi, dan pembuangan air irigasi, (2) kegiatan organisasional mencakup pengambilan keputusan, komunikasi, pengerahan sumber daya, dan penyelesaian pertentangan (*konflik*), dan (3) kegiatan bangunan kontrol air mencakup pembuatan desain, pelaksanaan rekayasa konstruksi, perbaikan jaringan irigasi, kemudian operasi dan pemeliharaan. Berdasarkan tiga kategori tersebut, upaya pemberdayaan kelembagaan P3A dilaksanakan untuk mendorong tercapainya harapan kelompok P3A, yakni keterlibatan langsung partisipasi anggota P3A agar dalam pengelolaan air irigasi yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan usaha tani anggota kelompok.

Kelembagaan Pengelolaan Air Irigasi

Sejarah irigasi yang panjang di Indonesia telah memberi kesempatan bagi petani untuk menumbuhkan kelembagaan pengelolaan air irigasi secara profesional. Sarana fisik sebuah jaringan irigasi merupakan perangkat keras, sedangkan kelembagaan petani merupakan perangkat lunak dalam bentuk institusi formal yang menjadi wadah kelompok tani. Pengelola jaringan irigasi paling dikenal di Indonesia adalah Subak di Bali dan Nagari di Sumatera Barat, terutama kemampuannya dalam mengelola jaringan irigasi secara efisien. Namun demikian, Subak dan Nagari hanya dua jenis organisasi pengelola jaringan irigasi tradisional yang telah berkembang di Indonesia. Air irigasi yang dikelola oleh petani dulu disebut irigasi rakyat atau irigasi tradisional. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Jaringan Irigasi, irigasi yang dikelola petani disebut irigasi pedesaan atau irigasi desa. Jaringan irigasi di negara-negara lain dikenal dengan istilah seperti communal irrigation (Philipina), minor irrigation (India), atau small and medium-scale irrigation (Maroko). Luas sawah irigasi petani di Indonesia sudah mencapai 1 036 613 ha. Luas rata-ratanya adalah 40 ha per kelompok kecil (kuarter).

s rata-ratanya adalah 40 ha per kelompok kecil (kuarter). Menurut Irchamni (1995), peranan masyarakat dalam pembangunan irigasi dilihat dari fungsi dan peran kelembagaan P3A. Kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mengelola jaringan irigasi dengan baik dapat dilihat dalam tiga kategori besar, yaitu kegiatan kelembagaan, bangunan kontrol air, dan penggunaan air. Dalam kategori kelembagaan terdapat dimensi-dimensi seperti penyelesaian konflik, komunikasi, pengalokasian sumber daya, dan pengambilan keputusan. Kegiatan bangunan kontrol air merupakan alat untuk mengetahui jumlah debit air yang sudah didistribusikan, termasuk usaha-usaha perekrasan irigasi, konstruksi suplesi air, dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi. Tahap kegiatan berikutnya adalah penggunaan air, pengalokasian, pendistribusian, dan pembuangan air. Tiga macam kegiatan ini juga saling terkait satu sama lain dan dapat digunakan untuk meredam konflik antar sesama pengguna air. Tugas ini merupakan peran serta perkumpulan petani pemakai air sehingga jaringan irigasi dapat juga dikatakan sebagai suatu proses sosio-teknis.

Kelembagaan P3A Kartodihardjo (2000) mengatakan bahwa fungsi dan peran kelembagaan P3A adalah sebagai pengelola air irigasi dan pendistribusi air irigasi secara merata di petak tersier/kuarter. Sebagai kearifan lokal, kelembagaan P3A perlu dilestarikan karena budaya dan nilai-nilai sosialnya dapat menguatkan kapasitas pengurus P3A, sehingga berdaya dan terdorong serta memotivasi munculnya kesadaran petani pemakai air untuk tahu, mau, dan mampu melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengelolaan air irigasi. Kelembagaan P3A adalah seperangkat organisasi yang memiliki ketentuanketentuan yang mengatur masyarakat petani dalam mengakses kesempatankesempatan yang tersedia, maupun bentuk-bentuk

aktivitas yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lainnya, dan hak-hak istimewa yang telah diberikan serta tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Tadjuddin (1999) mengartikan kelembagaan sebagai seperangkat tata nilai, aturan main, dan aspirasi yang bersifat unik dalam dimensi ruang dan waktu, yang secara formal kelembagaan itu sendiri harus bersifat dinamis, dalam arti adaptif terhadap perubahan. Berdasarkan pandangan sebagai aturan main, dapat dipahami bahwa adanya perbedaan pengertian antara kelembagaan sebagai institusi dan kelembagaan sebagai organisasi. Hayami dan Kikuchi (1999) mengatakan bahwa kelembagaan merupakan suatu institusi yang harus dijaga (*rule of the game*) yang dalam interaksi interpersonal dapat diartikan sebagai seperangkat aturan, baik formal maupun informal tentang tata hubungan manusia dan lingkungannya, yang menyangkut hak-hak dan tanggung jawab. Sementara itu, kelembagaan dalam konteks organisasi lebih mengarah pada mekanisme administrasi dan kewenangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, irigasi merupakan hal yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi, salah satu kelembagaan pengelolaan irigasi adalah P3A. Perkumpulan petani pemakai air dan gabungan P3A adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air irigasi, termasuk irigasi pompa, yang meliputi pemilik, penggarap, penyakap, dan pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, serta badan usaha dibidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi (KPU 2007a). Institusi P3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berazaskan gotong-royong. Beberapa daerah di Indonesia menggunakan nama atau istilah yang berbeda untuk kelembagaan P3A, seperti di Jawa Timur dengan nama Himpunan Petani Pengelola Air (HIPPA), di Bali dengan nama Subak, di Jawa Barat dengan nama Mitra Cai, dan sebagainya.

11

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Sumber Daya Air, wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi berubah, yang secara substansial sebenarnya sudah lama dikenal melalui pola swadaya atau gotong-royong. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A atau Gabungan P3A, P3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial ekonomi dan budaya berwawasan lingkungan serta berazaskan gotong-royong. Pengelolaan jaringan irigasi partisipatif dimaksudkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan para petani dan memiliki rasa tanggung jawab dalam pengelolaan air antara Pemerintah dan kelembagaan P3A agar terpenuhinya pelayanan air irigasi dalam memenuhi harapan P3A melalui upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan air berkelanjutan (KPU 2007b).

Dukungan pada Kelembagaan P3A

Kelembagaan P3A merupakan suatu sistem organisasi dan kontrol terhadap sumber daya. Pakpahan (1996) mengatakan bahwa suatu kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama, yaitu: (a) batas yurisdiksi, (b) property rights, dan (c) aturan representasi rules of representation. Batas yurisdiksi menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu masyarakat atau dapat berarti batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga. Konsep property atau kepemilikan muncul dari konsep hak (rights) dan kewajiban (obligations) yang didefinisikan atau diatur oleh hukum, adat dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya. Aturan representasi mengatur permasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apa di dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Soekanto (1990), lembaga pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (a) memberikan pedoman kepada anggota masyarakat cara bertingkah-laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, yang terutama menyangkut kebutuhan pokoknya; (b) menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan; dan (c) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), artinya sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya. Lebih lanjut, Soekanto (1990) menjelaskan bahwa norma-norma yang diciptakan untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda. Pengertian norma dikenal ada empat, yaitu: (a) cara (usage) menunjuk pada suatu bentuk perubahan; (b) kebiasaan folkways merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama; (c) tata kelakuan (mores) merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima sebagai norma-norma pengatur; dan (d) adat-istiadat (customs) adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Menurut Marliati (2008), pengembangan kelembagaan melalui karakteristik internal petani P3A dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain tingkat pendidikan baik formal maupun non formal, tingkat pendapatan, luas lahan, pengalaman responden, dan motivasi. Pendidikan menunjukkan tingkat intelegensi yang berhubungan dengan daya berpikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin luas pengetahuannya. Sebagaimana

12

perkembangan ilmu irigasi yang harus menyesuaikan diri dengan bentuk irigasi berkelanjutan, teknologi irigasi juga akan berkembang sesuai dengan kebutuhan irigasi berkelanjutan. Menurut Anwar (2003), kelembagaan ini mencakup juga pengertian organisasi petani. Artinya, selain "aturan main" (rule of the game) atau aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, kelembagaan juga termasuk kesatuan sosial yang merupakan wujud nyata dari partisipasi. Lebih lanjut, partisipasi pada dasarnya menyangkut hal-hal tentang bagaimana masyarakat terlibat langsung melakukan kegiatan di dalam program dan proyek pembangunan. Bourgeois (2007) telah menganalisis prospektif partisipatif masyarakat dalam membangun hubungan dengan lembaga eksternal untuk sumber daya dan bantuan teknis yang diperlukan

tetapi tetap menguasai sumber daya yang digunakan. Beliau memaparkan bahwa secara umum kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (a) organisasi yang tidak termasuk lembaga; (b) lembaga yang tidak termasuk organisasi; dan (c) organisasi yang merupakan lembaga atau, sebaliknya, lembaga yang termasuk organisasi. Ndraha (1990) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Berbagai bentuk atau tahapan partisipasi seperti dikemukakan oleh Ndraha (1990) adalah antara lain: (a) partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial; (b) partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; (c) partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana) perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis; (d) partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; (e) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan; dan (f) partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Barker dan Molle (2004) mengemukakan beberapa alasan seseorang termotivasi untuk terlibat dalam suatu program tertentu, antara lain: (a) pola partisipasi masyarakat ditentukan secara umum oleh lingkungan sosial mereka, di mana pada beberapa kelompok komunitas, partisipasi keluarga merupakan suatu kebiasaan atau fungsi budaya; (b) sebagai rasa tanggung jawab masyarakat; (c) masyarakat berpartisipasi jika merasa mampu di mana kemampuan dan kepercayaan diri biasanya timbul dari akses pada informasi, pengalaman, dan pelatihan; (d) ekspresi dan aktualisasi diri dengan kepuasan terhadap prestasi, penghargaan, dan harapan pencapaian adalah bentuk penting motivasi; (e) sebagai pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup; dan (f) keterlibatan seringkali merupakan derajat minat pribadi. Karena ditantang oleh kekuatan luar, partisipasi dipandang sebagai suatu yang bermakna. InterAmerican Development Bank (IADB 2001) mengatakan bahwa partisipasi sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan. Hal ini bisa terjadi karena:

13

(1) Partisipasi merupakan bentuk pemberdayaan yang dapat menggerakkan masyarakat sebagai pelaku dan pengawas dari pembangunan yang mereka lakukan sehingga membantu menciptakan dan memelihara demokrasi dan pemerintahan yang baik; (2) Partisipasi merupakan proses memperbaiki rancangan proyek dengan mengurangi biaya pengamatan dan data serta faktor-faktor sosial budaya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat sehingga mengurangi juga biaya supervisi; (3) Proses partisipasi dapat meningkatkan temuan dan pembelajaran sosial sehingga dapat menciptakan komitmen terhadap perubahan sosial; dan (4) Partisipasi dapat

menguatkan kapasitas lembaga lokal, seperti ketrampilan manajemen, yang memperbaiki proyek secara berkelanjutan.

Menurut Rachman (2009), pembentukan Subak di Bali setara dengan P3A dan penggabungan Subak menjadi Subak Gede setara dengan P3A Gabungan, dan penggabungan Subak Gede menjadi Subak Agung setara juga dengan P3A Federasi berdasarkan batas aliran satu sungai sehingga lebih memudahkan dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan dan mampu mengurangi resiko konflik. Oleh karena itu, anggota Subak atau Subak Gede dan atau Subak Agung bisa berasal dari beberapa wilayah administratif. Sebaliknya, seorang petani yang berada pada suatu wilayah administratif sedangkan sawahnya terletak di wilayah administratif lainnya, petani bersangkutan harus masuk anggota Subak di wilayah administratif sesuai lokasi sawahnya. Menurut Rachman (1999), pembentukan P3A dan P3A Gabungan atas dasar sumber daya air atau hidrologis akan lebih efektif dalam menciptakan kelembagaan yang mandiri dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan dan mengatasi ancaman luar. Pada Pelita-I (1969-1975), pemerintah melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi. Bersamaan dengan itu, berbagai upaya memajukan eksploitasi dan pemeliharaan (E&P) jaringan juga dilakukan. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi di dalam kegiatan di atas adalah kurangnya dukungan petani, terutama di dalam (E&P) jaringan yang baru direhabilitasi atau dibangun. Upaya-upaya untuk membina petani telah dilakukan, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Berdasarkan temuan-temuan fakta lapangan penelitian tersebut di atas, berikut disajikan sejumlah dalil: (1) Di Jawa, hipotesis Wittfogel (1957) mengatakan bahwa penguasaan atas jaringan-jaringan irigasi menyebabkan pemerintah dan petani dapat saling mendukung dalam pembangunan irigasi. (2) Pembangunan jaringan irigasi yang dilaksanakan dengan pendekatan penyediaan kemudahan bagi masyarakat (service delivery approach) mengurangi minat dan kesediaan petani untuk memberikan sumbangannya di dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi. (3) Pembangunan jaringan irigasi menyangkut aspek-aspek kemasyarakatan di jaringan tersier dan aspek-aspek kemasyarakatan itu justru lebih penting peranannya dibandingkan dengan aspek-aspek teknis dan ekonomi tersebut. (4) Struktur organisasi instansi pelaksana pembangunan irigasi yang sesuai bagi pembangunan yang melibatkan masyarakat petani adalah struktur yang tidak sentralistik.

14

(5) Petani akan mengembangkan suatu sistem pembagian air yang menjamin pemerataan apabila mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jaringan utama. (6) Kendala utama yang menyebabkan organisasi pengelolaan irigasi jaringan tersier yang diintroduksi oleh pemerintah tidak berkembang adalah karena ketidaksesuaian dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunan struktur organisasi dengan kenyataan-kenyataan yang berlaku di lapangan. (7) Struktur penguasaan tanah yang berlaku di pedesaan tidak mendukung upaya menumbuhkan minat dan kesediaan petani untuk memberikan sumbangan pikiran dalam pembangunan pengelolaan jaringan irigasi.

Syahyuti (2012) mengemukakan bahwa organisasi yang baru diintroduksi oleh pemerintah dan disesuaikan dengan jaringan irigasi yang baru kerap kali tidak sesuai dengan pengalaman petani mengelola air irigasi, termasuk pola pembagian air dari saluran yang satu ke saluran berikutnya. Pembagian air irigasi ke saluran tersier terhambat karena terjadi rembesan ke petak-petak sawah sehingga tidak terdistribusi secara merata. Pemerintah biasanya mendorong pembentukan organisasi P3A setelah pembangunan jaringan irigasi selesai dilaksanakan. Pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan untuk meningkatkan produksi pertanian, namun belum juga memperlihatkan hasilnya. Penyediaan sarana produksi dan kegiatan penyuluhan disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, namun masyarakat petani tetap saja miskin. Kelembagaan pengelolaan air irigasi sering disebut dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk dinas teknis lingkup PU Pengairan atau Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Pertanian, dan pemerintahan setempat (desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi), Ketersediaan dan pengaturan pembagian air irigasi dapat dilakukan oleh kelembagaan P3A pada Daerah Irigasi (DI) Awo Kabupaten Wajo yang melayani seluruh wilayah irigasi yang masuk Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu, pembangunan Bendungan Suplesi diharapkan dapat menampung debit air irigasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemanfaatan air irigasi dan prasarana jaringan irigasi sesuai dengan sistem pengelolaan air irigasi di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Kondisi fisik sistem jaringan irigasi adalah kompleks dan saling terkait antara satu daerah irigasi dengan daerah irigasi lainnya. Perbedaan faktor pemberian air yang relatif besar antara wilayah Barat, wilayah Timur, dan wilayah Tengah (Bagian Selatan) merupakan indikasi tidak meratanya distribusi air. Oleh karenanya suatu koordinasi yang terpola diperlukan untuk dapat menghasilkan perencanaan alokasi air yang tepat dan pelaksanaan operasi yang tepat agar fungsi kontrol berjalan dengan baik serta distribusi air secara merata dan adil, Sub Dinas Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan mengoptimalkan fungsi perangkat manajemen yang sudah ada dalam pengelolaan air dengan membentuk Unit Water operasional Center (WOC). Unit ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 30/KPTS/DPU/1991 tanggal 8 Juli 1991. Sebagai implementasi lebih lanjut, tugas-tugas yang diembannya dalam Pengembangan Water Management Unit (PWMU) sejalan dengan upaya mengoptimalkan fungsi dan peran, yaitu rencana restrukturisasi pengelolaan air irigasi pada tingkat jaringan utama. Pengelolaan air irigasi pada tingkat usaha tani

15

perlu mendapat perhatian. Pengelolaan air pada tingkat jaringan irigasi usahatani (tersier-kuarter) dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air. Untuk beberapa daerah irigasi terkait dengan sistem pembagian air, sistem ini menjadi bahan kajian bagi daerah yang sudah dibentuk organisasi P3A. Pada dasarnya, landasan pembentukan organisasi P3A adalah daerah irigasi dan lembaga P3A yang dibentuk merupakan satu-satunya wadah organisasi petani. Setelah terbentuk, Bupati mengesahkan AD/ART Perkumpulan Petani Pemakai Air yang kemudian dilegalisasi oleh Pengadilan. Secara

yuridis formal, kelembagaan P3A sudah berbadan hukum. Kelembagaan P3A yang berbadan hukum dapat menjadi organisasi yang mandiri, baik dari segi kelembagaan maupun susunan kepengurusan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Perubahan-perubahan yang perlu dikaji di lingkungan birokrasi dan petani pemakai air adalah sebagai berikut: (1) Produk disain jaringan irigasi sebagai kriteria disain seharusnya tidak menjadi patokan, melainkan dipakai sebagai pedoman, dan menjadi orientasi dalam pembuatan disain konstruksi jaringan irigasi. (2) Di Indonesia, pembangunan jaringan irigasi utama dilaksanakan secara terpisah dari jaringan tersier. Pemisahan ini tidak dapat dipertahankan karena kenyataan-kenyataan yang berlaku di jaringan utama tidak dapat dipisahkan dari kenyataan-kenyataan di jaringan irigasi tersier, demikian sebaliknya. (3) Pembangunan jaringan irigasi tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan evaluasi dan pemeliharaan. Dalam pembuatan rancangan jaringan irigasi, eksploitasi dan pemeliharaan harus masuk dalam pertimbangan dan kebijakan, sehingga instansi pelaksana pembangunan yang tidak bertanggung jawab atas eksploitasi dan pemeliharaan perlu ditinjau kembali. (4) Sebagai sebuah “instansi vertikal,” Progasi Madiun bertanggungjawab langsung ke induknya, yaitu Direktorat Irigasi II. Hal ini menyebabkan instansi tidak terdorong untuk menjalin koordinasi dengan instansi-instansi lain di daerah, termasuk Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian. Mengingat pentingnya peranan dari instansi-instansi di daerah, terutama dalam kegiatan evaluasi dan pemeliharaan, suatu peraturan tentang keterlibatan instansi tersebut dalam pembangunan irigasi perlu dibuat. (5) Pengambilan keputusan di lingkungan Progasi Madiun dipusatkan pada tingkatan atas instansi itu. Struktur yang sentralistik ini menyebabkan tugastugas di lapangan mengalami kesulitan untuk bekerjasama dengan petani P3A. Oleh karena itu, wewenang pengambilan keputusan perlu diberikan kepada petugas-petugas pada tingkatan yang lebih rendah. (6) Kedudukan pemerintah desa sebagai pihak yang berwenang atas irigasi di desa perlu ditinjau kembali. Para petani akan terdorong untuk mengembangkan kerjasama dalam irigasi apabila wewenang dan tanggung jawab irigasi ada pada kewenangan dan tanggungjawab mereka (P3A). (7) Oleh karena jaringan utama dan jaringan tersier merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka pembatasan wewenang petani hingga jaringan irigasi tidak dapat dipertahankan. (8) Perbedaan sosial ekonomi petani sejalan dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam penguasaan tanah. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembangunan dan pengelolaan irigasi.

16

(9) Perubahan struktur penguasaan tanah yang mengarah pemerataan merupakan salah satu jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi petani dalam pengelolaan air irigasi.

Kaidah-kaidah hidrologi dalam menyadap air secara bebas (letak bendung, konstruksi bendung, serta letak dan ukuran pintu sadap) melalui saluran dan bangunan pelimpas secara teknis dapat diterapkan oleh masyarakat berdasarkan nilai kearifan local dalam memahami informasi teknologi secara empiris karena irigasi desa memiliki luas layanan

yang sempit kurang dari 100 ha. Luas satuan layanan irigasi desa dibatasi oleh: (1) kesatuan hidrologis hamparan sawah yang dimiliki warga petani setempat; (2) kemampuan menguasai dan mengendalikan watak hidrologis aliran air di sumber alami; (3) keseragaman fisik lahan sawah yang diairi; dan (4) keseragaman usahatani. Faktor-faktor pembatas layanan air irigasi ini dipahami oleh petani setempat secara arif dan sangat nyata pengaruhnya terhadap keberlanjutan sistem irigasi desa. Perubahan pola kebutuhan air perlu disesuaikan dengan jenis tanaman dan cara budidaya pertanian yang diterapkan. Kasryno (1995) mengatakan bahwa reorientasi dan penyuluhan tentang kelembagaan P3A sangat diperlukan dalam pembangunan pertanian, disamping kelembagaan petani pemakai air yang lain. Kelembagaan kelompok petani yang efektif dalam mengelola sumber daya air melalui bidang usaha pertanian menjadi solusi bagi pemecahan permasalahan pertanian mengingat karakteristik usahatani yang ada serta dalam rangka menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Kelembagaan kelompok petani pemakai air perlu dikembangkan dalam upaya mendukung kegiatan usahanya (agribisnis) agar mampu berhadapan secara setara dengan pelaku usaha pertanian yang lain dan mampu menghadapi persaingan ditingkat global. Kasryno (1995) menegaskan bahwa kelembagaan P3A memperlihatkan kecenderungan masih lemah. Salah satu pendekatan yang diperlukan dalam pengembangan kapasitas anggota P3A adalah meningkatkan partisipasi mereka dalam aktivitas kelompok kerja. dukungan pada kelembagaan P3A diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi, baik perorangan maupun kelompok taninya. Penguatan organisasi P3A di daerah irigasi oleh petani pemakai air belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Pasandaran 1993), walaupun kegiatan keseharian anggota P3A dilaksanakan secara swadaya. Masing-masing peran anggota P3A belum jelas dalam pembagian tugas, meskipun peran setiap anggota kelompok petani pemakai air telah diatur dalam AD-ART, seperti pengumpulan iuran petani pemakai air. Harapan anggota P3A yang dikenakan iuran pemakaian air merupakan suatu strategi untuk mendorong partisipasi petani pemakai air yang menitikberatkan pada masyarakat petani pemakai air agar dapat berperan secara aktif dalam aktivitas pengelolaan sumber daya air. Petani-petani yang lahannya cukup luas sebaiknya memiliki peran sosial yang besar juga. Pemerintah sangat perlu memperhatikan masyarakat petani kecil dan tidak membebani iuran pemakaian air yang besar karena biasanya hanya untuk kebutuhan sendiri. Menurut Pasandaran (1993), pembangunan pedesaan memerlukan kelembagaan lokal untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam, seperti infrastruktur pedesaan, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan pertanian dan usaha non-pertanian. Kelembagaan P3A dapat membangun kerjasama dengan instansi terkait yang dapat dikategorikan sebagai

17

kelembagaan lokal, yakni: (a) Administrasi lokal, agen, dan staf lokal dari departemen-departemen pusat yang bertanggung-jawab pada birokrasi di atasnya. (b) Pemerintahan lokal yang dipilih dan ditetapkan masyarakat seperti dewan desa karena kewenangannya berhubungan dengan pembangunan dan aturan tugas serta bertanggung-jawab pada penduduk lokal. (c) Organisasi-organisasi keanggotaan

(membership organizations) sebagai asosiasi mandiri setempat yang mempunyai anggota untuk menangani berbagai tugas-tugas khusus atau adanya karakteristik dan minat yang sama. (d) Kerjasama (cooperatives) dengan organisasi lokal yang menyatukan sumber daya ekonomi anggota untuk dimanfaatkan, seperti asosiasi pemasaran, himpunan kredit, masyarakat konsumen, atau kerjasama produsen. (e) Organisasi-organisasi pelayanan (service organizations) yang merupakan organisasi lokal yang dibentuk untuk membantu orang lain. (f) Bisnis pribadi (private businesses) yang bergerak dibidang industri jasa dan atau perdagangan. (g) Irigasi dapat ditelaah dengan berbagai tolok ukur nilai kebenaran ilmu lain, seperti ilmu keteknikan, ilmu teknik pertanian, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, sosiologi, dan ilmu hukum. Hal ini dikarenakan praktik pemanfaatan air secara bersama mengandung elemen-elemen kejiwaan dalam menguasai air (Surono dan Indro 2003). Kekhawatiran dan juga rasa saling menghormati antara warga masyarakat pemakai air dengan petugas irigasi. Irigasi berkelanjutan juga memberikan peluang untuk ditelaah dari aspek psikologi dan etika. Pengembangan ilmu irigasi berkelanjutan perlu terlebih dahulu dilakukan penentuan posisi. Proses pengayaan ilmu irigasi berkelanjutan akan dapat berlangsung tanpa didahului rasa was-was akan adanya tumpang tindih atau berebutan kompetensi keilmuan. Teknologi irigasi di Indonesia (Jawa) yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi termasuk salah satu teknologi irigasi yang tertua di dunia, setua teknologi irigasi di Siria, Persia, India, dan Italia. Kompleksitas tersebut memperlihatkan karakteristik sistem irigasi yang bersifat sosio-teknis. Sumaryanto (2006) mengatakan bahwa sistem irigasi tidak hanya sekedar seperangkat teknologi berupa bangunan dan saluran irigasi saja, melainkan juga terdapat aspek sosial seperti kelembagaan pengelola irigasi, manajemen konflik, dan sosiabilitas antara hulu, tengah, dan hilir. Selain itu, aspek ekonomi dari air irigasi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas hasil usahatani yang berujung pada pendapatan masyarakat petani. Demikian pula halnya dengan aspek lingkungan, indikasi adanya berbagai pengguna air irigasi yang apabila tidak dikendalikan dapat menyebabkan ketersediaan air menjadi semakin terbatas dan rentan terjadi pencemaran air irigasi oleh limbah industri. Mengingat pengelolaan air irigasi menjadi bagian dari bidang pembangunan yang urusannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota), kebijakan regional yang tepat diperlukan untuk mengantisipasi kompleksitas dan permasalahan yang apabila dibiarkan dapat berujung pada konflik pemanfaatan air irigasi. Kebijakan regional dalam pengelolaan air irigasi harus berdasarkan prinsip keberlanjutan. Kebijakan regional tersebut sekurang-kurangnya mampu menyediakan jaminan air irigasi kepada pengguna sesuai dengan skala prioritasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 29 ayat (3), yaitu: "Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem jaringan

18

irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di semua lini kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tentang air." Menurut Soenarno (1994), pemanfaatan air irigasi dibandingkan dengan jumlah ketersediaan yang dapat diandalkan masih terbatas, terutama di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh

kesalahan-kesalahan dalam sistem perencanaan, perancangan, konstruksi dan pengelolaan, operasi dan manajemen irigasi. Penyebabnya adalah: (1) kekurangan data teknis (iklim, hidrologi, topografi, luas lahan, sifat fisik tanah) secara kuantitas dan kualitas; (2) kekurangan data tentang cara budidaya pertanian yang telah membudaya di masyarakat setempat; (3) kekurangmampuan petugas dan masyarakat dalam mengelola bangunan dan jaringan irigasi; dan (4) proses pembangunan irigasi yang tidak mempergunakan pendekatan holistik dengan pemberdayaan sumber daya dan potensi setempat. Secara umum, teknologi irigasi berkelanjutan akan mencakup substansi elemen-elemen teknologi berkesepadanan menyatu dengan wujud kebudayaan secara keseluruhan dalam atmosfir kehidupan berkelanjutan. Soenarno (1994) menegaskan bahwa, sesuai dengan cakupan pokok masalah dan minat telaah sebagai suatu sistem teknologi, teknologi irigasi berkelanjutan dapat dikelompokkan dalam: (1) teknologi mendapatkan air dari satu sumber dan terkumpulnya air secara alami, (2) teknologi memfasilitasi dan mengendalikan perpindahan air dari sumbernya ke lahan atau tempat lain yang dimaksudkan untuk budidaya tanaman pertanian atau tanaman-tanaman lainnya yang diinginkan, dan (3) teknologi menyebarkan air ke daerah lingkungan (zona) perakaran di lahan yang diairi. Secara teknologis, sistem irigasi di Indonesia dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu irigasi desa dan irigasi pemerintah. Keragaman (atribut) elemen penyusun teknologinya sangat berbeda. Perencanaan dan perancangan jaringan irigasi sudah lama diterapkan. Model jaringan irigasi yang dibangun sistem operasinya dapat dikendalikan secara otomatis dan telah dicoba di proyek irigasi Sidorejo (Bendungan Kedung Ombo) untuk areal layanan seluas 5 200 ha. Teknologi dalam perencanaan dan perancangan tidak menyatu dengan penguasaan elemen teknologi lain berupa keterampilan teknis pengawasan dalam konstruksi dan operasi bangunan serta jaringan-irigasi oleh para petugas di lapangan. Apalagi, elemen organisasi teknologi yang menyatukan kegiatan petugas dengan masyarakat petani pemakai air dalam penjatahan dan pemanfaatan air masih jauh dari memadai. Akibatnya, nilai kesepadanan teknologi sistem irigasi yang dikembangkan dan juga dikelola pemerintah masih rendah. Contohnya adalah hasil studi pengembangan sumber daya air di Pulau Lombok Bagian Selatan. Pengembangan sumber daya air dimulai di Lombok Island Water Resources Development Study (IWRDS) pada tahun anggaran 1995. Kegiatan ini mendapat bantuan teknis dari Canadian International Development Agency (CIDA) yang dilaksanakan oleh Proyek Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air (P3SA) bekerjasama dengan Crippen Consultant dari Kanada. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa rendahnya tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok petani disebabkan oleh rendahnya tingkat kedinamisan kelompok dan rendahnya tingkat kapasitas petani. Rendahnya aspek-aspek kesadaran atas kebutuhan riil dan lemahnya dukungan penyuluh berpengaruh pada rendahnya kedinamisan kelompok sebagai wahana pembelajaran. Rendahnya tingkat pendidikan formal dan non formal berpengaruh terhadap usahatani dan

pengalaman belajar. Kepemimpinan lokal dan dukungan penyuluhan berpengaruh terhadap rendahnya kapasitas petani. Peningkatan dukungan penyuluhan pertanian

dilakukan melalui proses penyadaran, pemberdayaan, pengorganisasian, pemantapan dan penguatan terhadap petani dan kelembagaan kelompok petani. Untuk melaksanakan peran tersebut, penyuluh membutuhkan dukungan kompetensi yang memadai dan pendekatan yang partisipatif sehingga sesuai dengan tingkat kapasitas petani dan kelembagaan P3A.

Strategi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Posted by [muhamam61](#) · Agustus 9, 2011 · [Tinggalkan komentar](#)

Oleh :

Muharam

Faperta UNSIKA

LATAR BELAKANG

Pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi telah dilaksanakan mulai tahun 1999 sampai saat ini. Pembaharuan kebijakan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menangani permasalahan yang terjadi, seperti :

1. Meningkatnya pergeseran nilai air,
2. Terjadinya kerawanan air secara nasional,
3. Meningkatnya persaingan penggunaan air pertanian dengan non-pertanian,
4. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian beririgasi kepada non pertanian,
5. Ketidakberdayaan petani,
6. Kerusakan sarana prasarana irigasi dan Kerusakan jaringan irigasi terjadi sangat cepat sesudah konstruksi selesai;
7. Rendah partisipasi masyarakat,
8. **Lemah kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi,**

9. **Regulasi dan kebijakan perlu ditata ulang,**
10. **Lemahnya koordinasi dan perencanaan,**
11. Rendahnya efisiensi pada pengelolaan irigasi;
12. **Kurangnya kemampuan institusi yang menangani irigasi untuk memelihara kelangsungan pengelolaan irigasi.**

Dari kondisi tersebut terlihat bahwa salah satunya telah terjadi kelemahan dalam kelembagaan pengelolaan irigasi. Untuk itu, Pemerintah melaksanakan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan irigasi yang ditujukan untuk penguatan kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI), seperti :

1. Meningkatkan apresiasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan irigasi;
2. Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif ;
3. Meningkatkan penguatan kapasitas P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif;
4. Meningkatkan sinkronisasi program keirigasian antara Kelembagaan Pengelola Irigasi terkait di tingkat Pusat dan Daerah;
5. Meningkatkan penguatan Kelembagaan Pengelola Irigasi dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif;
6. Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat petani dan memberdayakan masyarakat petani;
7. Meningkatkan pendanaan pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel;

Kelembagaan menurut Bromly (1982) dapat diartikan *sebagai kesepakatan kolektif (norma) dan prinsip aturan yang membentuk standar perilaku individu maupun kelompok yang dapat diterima*. Lebih jauh Bramley (1982) membedakan antara “Kelembagaan” sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip yang melandasi organisasi, dan “organisasi” sebagai wadah operasionalisasi norma-norma dan prinsip-prinsip tersebut. North (1990) lebih rinci mengatakan bahwa “kelembagaan” atau “institusi” sebagai *semua bentuk batasan-batasan yang dibuat oleh manusia untuk memberi bentuk terhadap interaksi di antara mereka*. Jadi menurut North (1990) “kelembagaan” adalah kerangka kerja dimana manusia saling berinteraksi, selain itu menurut North (1990) mengatakan juga bahwa yang membedakan antara kelembagaan (institusi) dengan organisasi adalah bahwa organisasi memberikan struktur bagi interaksi manusia berdasarkan kerangka kelembagaan yang dibuat.

Konsep berkelanjutan sistem irigasi dalam konteks pengelolaan irigasi mempunyai implikasi perlunya disusun suatu kebijakan kerangka kelembagaan, dan pada pelaksanaan kegiatan sehingga sistem irigasi terus eksis dan berfungsi. Keberlanjutan sistem irigasi bukanlah berarti hanya berkelanjutan secara fisik, tetapi suatu konsep yang menghubungkan hasil-hasil fisik pembangunan dengan lingkungan sosial, ekonomi dan biologi dimana

infrastruktur tersebut berada. Disini terkandung konsep keseimbangan antara aspek-aspek yang membentuk keberlanjutan tersebut.

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IIRIGASI

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Menurut PP No.20 Tahun 2006 tentang Irigasi

Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, bahwa kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi :

1. Instansi pemerintah yang membidangi irigasi
2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
3. Komisi Irigasi

a. Pemerintah :

Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat sekunder dan primer pada irigasi lintas propinsi, lintas negara, irigasi strategis, dan irigasi yang luasnya lebih dari 3000

ha. **Provinsi** mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat sekunder dan primer pada irigasi lintas kabupaten, dan irigasi yang luasnya lebih dari 1000-3000 ha. **Kabupaten/Kota** mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat sekunder dan primer pada irigasi kabupaten/kota, dan irigasi yang luasnya kurang dari 1000

b. Petani Pengelola dan Pemakai Air (P3A) :

Petani Pengelola dan Pemakai Air (P3A) diberi tugas dan wewenang mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat tersier. Bila diperlukan dan memenuhi kebutuhan dibentuk GP3A untuk bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ikut mengelola irigasi di tingkat sekunder (konsep partisipasi/voluntir). Bila diperlukan dan memenuhi kebutuhan dibentuk IP3A untuk bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ikut mengelola irigasi di tingkat primer (konsep partisipasi/voluntir).

1. **Pemerintah Desa** diberi tugas dan wewenang mengembangkan dan mengelola irigasi pedesaan yang dibangun oleh desa.
2. **Perseorangan, lembaga sosial, dan swasta** di wilayah irigasinya.

c. Komisi Irigasi :

- 1) Pada tingkat Kabupaten dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten.
- 2) Pada tingkat Propinsi dibentuk Komisi Irigasi Propinsi.
- 3) Terdapat Komisi irigasi yang dibentuk pada irigasi lintas Propinsi, lintas negara, dan yang strategis.

A. Instansi Pemerintah Terkait dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)

Instansi pemerintah yang membidangi irigasi di daerah baik provinsi maupun kabupaten adalah Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Disamping itu terdapat juga Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi seperti Dinas Pertanian, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, dan lain-lain.

1. Bappeda

Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah yang melakukan proses perencanaan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaannya. Tugas Bappeda adalah menunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan yang membantu Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan.

Menurut pasal 150 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah maka disusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selain itu, berdasar Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M./PPN/I/200050/166/SJ, Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 menunjukkan bahwa fungsi Bappeda adalah :

- Menetapkan dan mengkoordinir jumlah forum Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan forum gabungan SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya.
- Menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan atau gabungan SKPD
- Menetapkan tim penyelenggara forum SKPD dan atau gabungan SKPD.
- Menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasar prioritas pembangunan daerah.

Peran Bappeda dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi ini antara lain :

- Bappeda sebagai jembatan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
- Bappeda sebagai koordinator dan sinkronisasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian dari seluruh unsur *stakeholders*.
- Bappeda sebagai inisiator terbitnya regulasi di bidang irigasi.

Dari tugas, fungsi, peran, dan kewenangan Bappeda, maka penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi di Bappeda ini sangat penting. Pemahaman terhadap peraturan perundangan dan peraturan turunannya tentang irigasi, sangat penting untuk diketahui oleh sumber daya manusia Bappeda.

2. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas pekerjaan umum atau Dinas PSDAI pada beberapa Provinsi khususnya sub dinas pengelolaan sumber daya air adalah lembaga teknis yang secara khusus ditugasi untuk mengelola sumber daya air termasuk irigasi. Berdasarkan perda yang ada di daerah khususnya perda tentang pembentukan Dinas PU, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum secara umum adalah :

1. Menyusun kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum.
 1. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota.
 2. Pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum provinsi.
 3. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
 4. Pelaksana urusan tata usaha dinas.

Dari tupoksi ini, kewenangan dinas PU khususnya sub dinas pengelolaan sumber daya air provinsi adalah :

1. Penetapan standar pengelolaan sumber daya air permukaan lintas kabupaten/kota.
2. Penyediaan dukungan atau bantuan teknis untuk kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengembangan prasarana dan sarana jaringan irigasi.
3. Penyediaan dukungan atau bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan.
4. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pembangunan, dan perbaikan jaringan utama untuk irigasi lintas kabupaten/kota.
5. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.

Permasalahan secara umum yang ada pada kelembagaan PU ini adalah kurangnya perhatian atau kurangnya anggaran untuk penguatan kelembagaan

irigasi. Program dan kegiatan secara dominan lebih diarahkan ke kegiatan fisik seperti pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi. Dana operasi dan pemeliharaan termasuk dana yang belum optimal karena memang hanya mengandalkan dana dari APBD saja. Di samping itu, terbatasnya sumber daya manusia yang ada di bidang irigasi, termasuk yang memahami kebijakan-kebijakan baru tentang irigasi serta kelembagaan irigasi menjadi kendala dalam penguatan kelembagaan irigasi di dinas PU provinsi.

3. Dinas Pertanian

Dinas pertanian adalah lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan teknis pertanian di provinsi. Tugas pokok dan fungsi dinas pertanian di daerah, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
2. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum untuk daerah pertanian yang lintas kabupaten/kota.
3. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan di daerah.
4. Membina unit pelaksana teknis dinas.
5. Melaksanakan ketatausahaan dinas.

Dari tupoksi ini terlihat bahwa dinas pertanian telah berada dalam rel yang pas dalam pengelolaan irigasi, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi, khususnya dalam upaya peningkatan pendapatan petani dengan cara memodernisasikan usaha tani dan diversifikasi usaha. Namun demikian, permasalahan juga tetap muncul dalam implementasi pelaksanaan tugasnya..

Permasalahan-permasalahan secara mendasar yang sering muncul di daerah di bidang pertanian yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif adalah :

1. Anggaran dalam penguatan kelembagaan petani yang masih kecil serta peran serta kelompok pendamping lapangan (KPL) yang masih kurang.
2. Belum optimalnya koordinasi program kerja serta masih adanya ego sektoral makin menghambat pengelolaan program pengelolaan irigasi partisipatif di daerah.
3. Pemberdayaan P3A/GP3A belum optimal

1. 4. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan petani untuk irigasi yang keberadaannya secara formal telah ada sejak dimulainya pembangunan pertanian/keirigasian sejak mulai Pelita I sampai saat ini. Sebagian besar dari organisasi petani ini belum berfungsi dengan aktif, hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa kelembagaan petani untuk mengelola irigasi ini belum juga berkembang dengan memadai?. Apakah kerangka kelembagaan yang ada memberikan insentif kepada petani untuk berperilaku efisien dan merespon terhadap kesempatan ekonomi yang ada ?.

Dalam peraturan perundangan sekarang kelembagaan P3A/GP3A/IP3A di samping bertanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di jaringan tersier, juga diberi peran dengan berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi baik di saluran primer maupun di saluran sekunder.

Untuk mampu berperan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan tersebut, maka dalam penguatan kelembagaan di samping diarahkan kepada kemampuan di bidang fisik pengelolaan air, juga harus diarahkan dalam kemampuan ekonominya. Dengan penyesuaian kelembagaan pada bidang ekonomi berbasis air ini, maka kelembagaan petani mempunyai tiga fungsi yaitu :

1. Memfasilitasi dan menyokong anggota untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi berbasis air, baik dengan mengatur OP irigasi supaya efektif dan efisien maupun dalam menjalankan usaha ekonomi itu sendiri.
2. Menghasilkan pendapatan bagi organisasi petani (P3A) itu sendiri sehingga mereka mampu melaksanakan tugas pengelolaan irigasi secara lebih efektif dan efisien.
3. Mempromosikan usaha-usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi.

Dengan memberdayakan kemampuan ekonomi P3A ini, maka manfaat yang didapat dari organisasi P3A sebagai unit ekonomi adalah :

1. Mengumpulkan sumber daya mereka untuk mencapai skala ekonomi usaha yang layak dalam menjalankan bisnis berbasis air.
2. Memfasilitasi akses anggota dalam memperoleh dukungan pelayanan dengan cara yang aktif dan efisien.
3. Mengurangi resiko dieksploitasi oleh pihak lain sehubungan dengan suatu kesempatan bisnis tertentu.

Secara keseluruhan penguatan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A yang telah dilaksanakan oleh beberapa program seperti PISP dan WISMP diarahkan kepada pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknik irigasi dan pertanian, kemampuan ekonomi, dan kemampuan dalam bidang organisasi. Di

daerah, permasalahan yang dihadapi oleh P3A / GP3A ini adalah hampir sama yaitu :

1. Pembentukan P3A/GP3A pada umumnya masih bersifat keproyekan, artinya lembaga ini dibentuk untuk kepentingan proyek, sehingga dibentuk oleh instansi yang sedang menangani proyek. Jarang sekali P3A/GP3A dibentuk berdasarkan aspirasi dan kebutuhan petani itu sendiri. Hal ini berakibat rasa memiliki dan manfaat keberadaan organisasi kurang atau belum dipahami benar oleh para anggota.
2. Pada umumnya P3A/GP3A memang sudah berbadan hukum, tetapi rata-rata belum mempunyai program kerja yang terstruktur/tertulis.
3. Kurangnya pemberdayaan P3A/GP3A oleh instansi terkait karena kekurangan dana dan personil di lapangan (KPL), serta jarak dan geografis wilayah daerah irigasi/pertanian yang cukup jauh.
4. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangan tentang irigasi belum menyentuh masyarakat tani, sehingga para petani/anggota P3A/GP3A belum memahami posisi mereka dalam pengelolaan irigasi partisipatif.

Sedang untuk GP3A permasalahannya adalah :

Pada umumnya, GP3A di Indonesia sudah berbadan hukum. Proses pengurusan BH GP3A/GP3A telah dilakukan sejak Proyek IWIRIP hingga PISP. Pengurusan BH difasilitasi oleh TPP, dan hingga kini (sebagai contoh untuk Jawa Barat) belum ada pengurus yang mampu mengurus BH secara mandiri. Berbicara tentang operasional (OP) dan tidak operasionalnya (TOP) GP3A, jelas bersifat relatif. Namun, sebagian besar GP3A hanya aktif ketika ada bantuan (proyek), seperti kontruksi, operasi dan pemeliharaan partisipatif. Memang, di setiap daerah juga ditemukan beberapa GP3A yang meskipun tidak ada bantuan (proyek) tetap beroperasi. Namun, sebagian besar GP3A yang dibentuk menampilkan kinerja yang lemah, bahkan tidak operasional. Secara teknis, meskipun belum efektif dan efisien, keberadaan GP3A tetap operasional, seperti dalam perbaikan jaringan secara partisipatif, pembagian air, penanganan konflik, kontruksi partisipatif, OP partisipatif dan pengelolaan ipair. Pertanyaannya, kenapa akses GP3A terhadap sumber produktif masih tetap lemah? Bukankah sudah berbadan hukum?

Seperti halnya GP3A, IP3A juga menampilkan kinerja yang tidak jauh berbeda. Sebagian besar hanya aktif pada saat ada bantuan (proyek) dan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin, seperti perbaikan jaringan irigasi (pembersihan menjelang musim tanam), penanganan konflik, pengelolaan Ipair dan kegiatan partisipatif lainnya. Sedangkan aksesnya terhadap kegiatan ekonomi produktif dan sumber daya produktif masih sangat lemah. Kecenderungannya, IP3A belum mampu membantu petani menyelesaikan permasalahan pengairannya, terutama di musim kemarau. Pengurus IP3A juga lebih aktif mengakses ke atas, daripada kepada para anggotanya. Hingga kini, IP3A belum mampu berperan sebagai wadah para petani untuk memperkuat posisi tawar dan atau untuk mengartikulasikan aspirasi petani dan P3A yang menjadi anggotanya. Terkait

dengan kegiatan usaha ekonomi produktif, IP3A juga masih belum mampu menjadi lembaga yang memayungi berbagai aktivitas dan jaringan pembangunan pertanian pedesaan.

1. 5. **Komisi Irigasi**

Komisi irigasi adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati sebagai wadah koordinasi antar berbagai pihak terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam meningkatkan kinerja pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Tugas komisi irigasi adalah membantu Bupati/Walikota dalam hal :

- Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
- Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.
- Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi.
- Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya.
- Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi, dan
- Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Keanggotaan komisi irigasi terdiri dari wakil pemerintah kabupaten/kota dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil P3A, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

Komisi irigasi provinsi dengan tugas yang sama dengan komisi irigasi kabupaten/kota, dibentuk oleh Gubernur. Tugas komisi irigasi provinsi adalah membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah irigasi lintas kabupaten atau daerah irigasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Keberadaan komisi irigasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten umumnya beragam, ada yang sudah dibentuk tapi belum aktif, ada juga yang memang belum dibentuk sama sekali. Daerah-daerah yang mengikuti program WISMP dan PISP umumnya sudah dibentuk, tapi aktivitasnya yang belum optimal. Daerah-daerah yang tidak mengikuti program tersebut komisi irigasi baik di provinsi maupun kabupaten umumnya belum ada. Sehingga berbagai permasalahan yang terkait dengan koordinasi baik secara ekonomi maupun teknis sering dijumpai di beberapa daerah. Konflik pembagian air, penyediaan air, tumpang tindih program antar instansi terkait menunjukkan bahwa komisi irigasi mutlak diperlukan dan keberadaannya harus segera terealisasi.

Instansi pemerintah yang terkait dengan komisi irigasi sebagian besar belum menyadari pentingnya komisi irigasi, karena mereka sudah merasa memiliki lembaga koordinasi antar SKPD semacam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Musrenbang, Rakorbang, dan lain-lain. Padahal komisi irigasi ini merupakan lembaga koordinasi yang anggotanya meliputi instansi non pemerintah dan instansi pemerintah. Selain itu, secara khusus lembaga ini merupakan wadah koordinasi antara *stakeholders* di bidang irigasi, yang akan menata pengelolaan irigasi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan penggunaan air irigasi baik itu antara pengguna hulu hilir, antara sektor, maupun antara wilayah administrasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Komir adalah sebagai berikut:

- 1) Keberadaan Komir bersifat fungsional, sehingga tidak jelas struktur keorganisasiannya, insentifnya, kantornya, keanggotaannya dan batas kewenangannya;
- 2) Komir tidak memiliki legal aspek yang kuat (tidak memiliki Perda), tetapi hanya mengandalkan SK Bupati. Keadaan tersebut juga berdampak terhadap program dan aktivitasnya. Kecenderungannya, Komir tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- 3) Keanggotaan Komir yang bersifat keterwakilan institusi (bukan individu) telah menyebabkan terjadinya *gonta-ganti* orang dalam setiap kegiatan. Akibatnya, tidak tercipta estapet perkembangan dan pengambilan keputusan (terputus-putus). Keanggotaan yang bersifat keterwakilan, juga rentan terhadap perubahan SOTK;
- 4) Pendanaan Komir yang tidak jelas juga berdampak terhadap semangat dan aktivitas para anggotanya. Masalah ketidakjelasan pendanaan merupakan factor penyebab pakumnya kegiatan Komir/Pokja. Hal ini sangat wajar, terutama untuk biaya transportasi para wakil (anggotanya) yang datang dari berbagai tempat dan institusi yang berbeda, terutama para wakil petani (GP3A);
- 5) Lahir dan keberadaan Komir sangat tergantung kepada ada dan tidaknya Proyek Irigasi. Bahkan, ketika ada Proyek, tetapi tidak ada alokasi dana untuk kegiatan Komir/Pokja, maka aktivitas Komir/Pokja pun tidak berjalan;
- 6) Pembentukan Pokja/Komir tidak didasari oleh kebutuhan pihak-pihak terkait, tetapi lebih karena adanya proyek dan fasilitasi oleh TPP/KTPP/Konsorsium Proyek. Padahal, jika kita cermati, keberadaan Komir/Pokja sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar sektor dan antar pengguna air irigasi.

Koordinasi dan komunikasi menjadi masalah besar dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang melibatkan berbagai sektor (SKPD) dan berbagai pihak terkait; Oleh karena keberadaan Komir sangat penting bagi terciptanya

kondusifitas koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak yang terkait, maka keberadaannya perlu didukung oleh payung hukum yang jelas (Perda), keanggotaan yang jelas dan tetap (meskipun berdasarkan keterwakilan institusi), sumberdananya juga harus jelas dan berkelanjutan (baik dari proyek maupun sharing daerah) sehingga tidak menghambat aktivitas dan mobilitas anggotanya, programnya harus jelas dan produktif menyelesaikan permasalahan (tidak ketergantungan terhadap proyek), estapet kepengurusan dan keanggotaannya jelas (termasuk manajemen dan estapet data dan informasinya, agar berkelanjutan), dan memiliki akses ke jaringan kelembagaan irigasi (baik secara vertikal, horizontal dan diagonal).

Pada periode Proyek PISP, Komir dibentuk dan atau diaktifkan kembali. Komir juga mendapat perhatian lagi ketika Proyek PISP digulirkan. Upaya yang pertama dilakukan untuk mengaktifkan atau pembentukan kembali Komir adalah melalui legalisasi payung hukumnya, yaitu Perda. Hingga tahun 2007, WISM dan PISP telah mengaktifkan kembali sekitar 23 Komir di lokasi Proyek. Namun, belum ada satu daerah pun yang sudah memiliki Perda Komir. Sebagian besar masih dalam tahap proses, baik dalam tahap penyusunan naskah akademiknya maupun dalam tahap pengurusan dan pembahasan draf raperdanya di dewan. Lambatnya pengurusan Perda terjadi karena faktor berikut:

- 1) Keterlambatan penyusunan naskah akademik;
- 2) Banyaknya draf raperda yang masuk ke dewan;
- 3) Kurangnya pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pembahasan raperda;
- 4) Kurangnya dana untuk pengurusan dan pembahasan reperda, termasuk untuk studi banding;
- 5) Gejolak politik di daerah; dan sebagainya.

